

Laporan Nasional Sport Development Index 2022

Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data

**Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia**



**Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga
Republik Indonesia**

Tim Penyusun

Laporan Nasional Sport Development Index 2022

Penanggung Jawab	Menteri Pemuda dan Olahraga RI Prof. Dr. Zainuddin Amali
Penasehat	Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Dr. Gunawan Suswantoro
Ketua	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Dr. Raden Isnanta
Wakil Ketua	Sekretaris Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga Suyadi Pawiro
Tim Penulis	Prof. Toho Cholik Mutohir Prof. Rusli Lutan Prof. Ali Maksum Prof. Agus Kristiyanto Reesa Akbar, Ph. D
Editor	Prof. Ali Maksum
Sekretariat	Nurhasanah Ahmad Arsani Andi Rahman Edward T. Panjaitan Aminah Lestari Sriyanti Dian Haerani Cut Sheila Nansiska

Sekretariat:

Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga - Kementerian Pemuda dan Olahraga
Jl. Gerbang Pemuda No. 3 Senayan
Jakarta Pusat 10270

Kata Pengantar

Tiada kalimat yang lebih indah kecuali ucapan syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan karunia yang tanpa henti, laporan SDI 2022 dapat diselesaikan sesuai harapan. Laporan kali ini disusun pasca Peraturan Presiden No. 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan Undang-Undang No. 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan diterbitkan. Dalam batas tertentu, kita dapat berharap pembangunan olahraga ke depan akan semakin baik.

Sebagaimana tradisi yang telah dibangun dalam menyusun laporan SDI, selalu mengangkat tema yang menjadi isu sentral dalam kurun waktu tersebut. Hal ini dimaksudkan agar laporan SDI tidak sekadar memaparkan angka-angka dalam bentuk indeks, tetapi lebih jauh dari itu, memberikan makna dan perspektif dalam memahami pembangunan olahraga. Kali ini, tema yang diangkat adalah “Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data”. Pemilihan tema ini bukan tanpa alasan. Ada harapan besar bahwa olahraga bisa menjadi “driving force” bagi daya saing bangsa seiring dimulainya penyusunan RPJP 2025-2045 menuju Indonesia Emas. Sungguh disadari bahwa tidak mudah untuk mewujudkan tujuan tersebut. Ada banyak simpul persoalan yang perlu diurai dan ditata ulang, terutama dari aspek kelembagaan, kepemimpinan, kebijakan, dan implementasinya di lapangan. Perumusan kebijakan berbasis data menjadi bagian krusial dari proses tersebut. Laporan ini akan memberikan perspektif yang kritis dan tajam terkait dengan persoalan tersebut seiring dengan pemaparan data SDI 2022.

Pengumpulan data SDI 2022 mencakup 34 Provinsi, 190 Kabupaten/Kota, 534 Desa/Kelurahan, dan 16.020 responden serta melibatkan 2.050 personil pengumpul data. Untuk menjamin kecepatan dan mutu data, manajemen data dioperasionalkan dengan berbasis elektronik, yang memungkinkan *input*, verifikasi, dan pelaporan data dilakukan dan dikendalikan melalui perangkat elektronik berbasis internet. Ada harapan besar bahwa data SDI bermanfaat bagi perbaikan pembangunan olahraga Indonesia ke depan, melalui intervensi kebijakan berbasis data.

Kami menyadari bahwa tidak semua pihak setuju dengan argumen dan kesimpulan yang dibangun dalam laporan ini. Namun, bagaimanapun, kami berharap laporan ini dapat memberikan kontribusi sekaligus memberikan perspektif yang konstruktif bagi pembangunan olahraga Indonesia ke depan. Akhirnya, kami tidak lupa mengucapkan banyak terimakasih kepada semua pihak, terutama kepada Kemenko PMK, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Bappenas, dan BPS yang telah mendukung program ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhoi usaha kita semua.

Jakarta, 10 November 2022
Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
Kementerian Pemuda dan Olahraga RI

Dr. Raden Isnanta

Ringkasan Eksekutif

Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data

Daya saing pada dasarnya merupakan hasil dari kemampuan suatu negara dalam berinovasi dan berimprovisasi untuk mencapai atau mempertahankan posisi unggul dibanding negara lain. Olahraga memang tidak disebut sebagai komponen utama daya saing suatu bangsa, baik dalam konsep *Global Competitiveness Index* yang dikeluarkan oleh *World Economic Forum* maupun *World Competitiveness* dari *Institute for Management Development*. Meski demikian, olahraga merupakan “driving forces” bagi meningkatnya sejumlah komponen pembentuk daya saing tersebut. Terkait modal manusia sebagai komponen daya saing, olahraga menjadi bagian penting dari proses mewujudkan hal tersebut. Misalnya dalam hal kebugaran dan kesehatan fisik guna mendukung produktivitas dan ketahanan bangsa, memperkuat resilien dan modal sosial dalam rangka beradaptasi dengan perubahan dan fragmentasi sosial, dan membangun identitas dan *branding* melalui prestasi olahraga. Sayangnya, apa yang dijanjikan oleh olahraga belum dapat diwujudkan secara optimal.

Laporan ini menyebutkan bahwa capaian pembangunan olahraga tahun 2022 yang diukur dengan sembilan dimensi menunjukkan skor sebesar 0,376, menurun 32 poin dibandingkan capaian tahun 2021 yang sebesar 0,408. Capaian tersebut termasuk dalam kategori rendah dari skala 0,00-1. Indeks tertinggi ada pada dimensi ekonomi sebesar 0,604, literasi fisik sebesar 0,576, dan perkembangan personal sebesar 0,550. Sementara itu, indeks terendah ada pada dimensi SDM sebesar 0,071, kebugaran sebesar 0,194, dan partisipasi sebesar 0,309. Fakta tersebut membuktikan bahwa intervensi kebijakan dan program harus lebih gencar dilakukan agar berdampak signifikan dalam mendongkrak nilai indeks.

Terbitnya UU No. 11 Tahun 2022 sebagai pengganti dari UU No. 3 Tahun 2005 Tentang Keolahragaan sungguh merupakan payung hukum yang kokoh bagi penyelenggaraan olahraga di tanah air. Regulasi tersebut juga merupakan bentuk komitmen nasional, baik dari pihak eksekutif maupun legislatif. Pada tataran yang lebih operasional juga telah diterbitkan Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang DBON yang mengelaborasi kebijakan, strategi, dan capaian tiga lingkup olahraga, yakni: olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi kurun waktu 2021-2045. Secara regulasi hal ini tentunya lebih dari cukup untuk mengoperasionalkan kerja-kerja di bidang keolahragaan, yang menjadi tantangan tersendiri mengingat data yang ada sampai saat ini belum terlalu menggembirakan. Tingkat kebugaran anak dan remaja sayangnya juga belum menunjukkan angka yang baik. Laporan ini menyebutkan bahwa kebugaran jasmani pelajar yang masuk kategori “kurang” dan “kurang sekali” sebanyak 82,7% untuk SD/ sederajat, 85,8% untuk SMP/ sederajat, dan 83,9% untuk SMA/ sederajat. Kondisi tersebut tentu saja menjadi cambuk bagi seluruh pemangku kepentingan keolahragaan terutama dalam upaya mewujudkan Indonesia Emas di tahun 2045, di mana kita akan mendapatkan bonus demografi. Situasi yang sama juga terjadi pada tingkat kebugaran masyarakat secara umum, terutama pada usia 30-60 tahun. Kebugaran yang rendah memiliki risiko besar terhadap penyakit nonmenular seperti jantung, stroke, hipertensi, dan diabetes tipe 2. Inilah salah satu variabel yang bisa menjelaskan mengapa BPJS Kesehatan sejak didirikan tahun 2014 terus mengalami defisit sampai triliunan rupiah, mengingat belanja anggaran

nasional yang besar untuk sektor kesehatan dalam mengcover penyakit seperti disebutkan di atas.

Dalam konteks olahraga prestasi, daya saing Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan di berbagai level dalam beberapa periode. Pada level Olimpiade, capaian tertinggi diperoleh tahun 1992 ketika Susi Susanti dan Alan Budikusuma meraih medali emas dari bulutangkis. Pada level Asian Games, Indonesia pernah berjaya pada 1962 dengan memperoleh 11 medali emas dan ada di peringkat kedua setelah Jepang. Gelombang prestasi mengalami penurunan sejak Asian Games 2002 dan titik nadirnya pada tahun 2006 ketika Indonesia hanya memperoleh 2 medali emas dan ada diperingkat ke-22. Untungnya pada 2018 Indonesia menjadi tuan rumah dan berhasil menaikkan peringkat dan perolehan medali emas. Pada level SEA Games, dominasi Indonesia selama 20 tahun, 1977-1997, memudar hingga ke peringkat 5. Di level nasional, kesenjangan prestasi olahraga antar daerah begitu lebar. Sejak PON diselenggarakan tahun 1948 hingga sekarang, dominasi provinsi di Jawa, terutama Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur seolah tidak mungkin tertandingi. Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa 50,5% capaian 14 cabang prioritas DBON dikontribusikan oleh tiga provinsi tersebut, Jawa Barat sebesar 20,7%, Jawa Timur sebesar 15,2%, dan DKI Jakarta sebesar 14,7%.

Meski demikian, ada temuan menarik terkait dengan ekonomi olahraga. Dari analisis data diperoleh informasi bahwa uang yang beredar untuk belanja olahraga diperkirakan sebesar 43,2 triliun/tahun. Belanja olahraga tersebut terbagi dalam belanja barang dan belanja jasa. Belanja barang lebih didominasi oleh sepatu sebesar 48,8%, pakaian olahraga sebesar 39,3%, dan peralatan olahraga sebesar 18,4%. Belanja jasa olahraga didominasi oleh pembelian tiket pertandingan sebesar 21,2%, biaya perjalanan sebesar 18,1%, dan sewa tempat latihan sebesar 15,8%. Dari responden yang disurvei, sebanyak 57,7% (yang menggambarkan representasi populasi sekitar 113,8 juta orang dari seluruh Indonesia) membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga, antara Rp 200 ribu hingga lebih dari Rp 5 juta/tahun. Hal ini menggambarkan betapa ukuran ekonomi olahraga di Indonesia adalah sangat besar.

Pertanyaannya kemudian, bagaimana menaikkan kembali capaian olahraga nasional? Penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan berbasis data, *evidence-based policy*, harus dijadikan habituasi. Pengetahuan ilmiah, hasil-hasil riset, analisis data berbasis statistik, dan kajian yang mendalam harus lebih sering dilakukan. Kebijakan dan keputusan yang bersifat rutinitas dan banyak didorong oleh kepentingan - *ideologically-driven politics*, harus dihindarkan. Budayawan Koentjaraningrat 46 tahun lalu pernah mengingatkan bahayanya sikap mental yang menghambat kemajuan dan sayangnya masih banyak bersemayam di masyarakat kita. Akibatnya, tidak banyak perubahan yang bisa dilakukan dan kita terjebak dalam kondisi yang itu-itu saja. Untuk keluar dari jebakan tersebut diperlukan pikiran besar, kajian yang mendalam, kerja yang sungguh-sungguh, dan komitmen kolektif guna mewujudkan Indonesia emas pada tahun 2045. Semoga!

Daftar Isi

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
Daftar Isi	v
Bab 1 Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data	7
DBON: Antara Intensi, Akurasi, dan Eksekusi	7
Kebijakan Berbasis Bukti	15
Menagih Janji Perguruan Tinggi.....	17
Basis Saintifik: Faktor DNA dan Peran Laboratorium	19
Pendekatan Ilmiah dalam Pelatihan Atlet	23
Bab 2 SDI: Capaian, Tantangan, dan Harapan	27
Capaian SDI Hingga Saat Ini	27
1. Sumber Daya Manusia.....	27
2. Ruang Terbuka	31
3. Literasi Fisik.....	35
4. Partisipasi.....	37
5. Kebugaran.....	39
6. Kesehatan.....	42
7. Perkembangan Personal.....	43
8. Ekonomi.....	45
9. Performa	49
Tantangan yang Dihadapi	53
Harapan Ke Depan	57
Bab 3 Pembudayaan Olahraga: Proyek Kehidupan yang Tiada Akhir.....	59
Olahraga Pendidikan di Sekolah: Sudahkan Mencapai Tujuan?	62
Literasi Fisik, Literasi Kehidupan.....	66
Mempromosikan Olahraga atau Membiayai Orang Sakit?.....	69
Membangun Peradaban Sosial yang Bermartabat	74
Bab 4 Daya Saing Olahraga Prestasi	79
Capaian Olahraga Prestasi: Sampai di Mana?	79
Performa Tinggi Butuh Standar Mutu	83
Anggaran dan Mutu SDM: Kunci Keberhasilan Olahraga Prestasi.....	89
Menatakelola Pusat Pembinaan Atlet Muda: Kasus PPLP.....	92

Pusat Pelatihan Nasional: Sebuah Keniscayaan	95
Bab 5 Menumbuh-Kembangkan Ekonomi Berbasis Olahraga	97
Ekonomi Berbasis Olahraga	99
Perkembangan Global Industri Olahraga.....	103
Kemana Pendulum Ekonomi Olahraga Bergerak?	105
Ekonomi Kreatif dan Wisata Olahraga.....	108
Bab 6 Penutup	111
Kesimpulan	111
Rekomendasi.....	113
Referensi	115
Lampiran	122
SDI Menurut Provinsi	122
Indeks SDM Olahraga Menurut Provinsi	123
Indeks Ruang Terbuka Olahraga Menurut Provinsi	124
Indeks Literasi Fisik Menurut Provinsi	125
Indeks Tingkat Partisipasi Olahraga Menurut Provinsi	126
Indeks Tingkat Kebugaran Menurut Provinsi.....	127
Indeks Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Psikis Menurut Provinsi	128
Indeks Resilien dan Modal Sosial Menurut Provinsi.....	129
Indeks Performa Menurut Provinsi.....	130
Indeks Ekonomi Olahraga Menurut Provinsi	131

Bab 1 Olahraga, Daya Saing, dan Kebijakan Berbasis Data

DBON: Antara Intensi, Akurasi, dan Eksekusi

Berawal dari kerisauan Presiden yang disampaikan pada Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke 37 tahun 2020, Peraturan Presiden (Perpres) No. 86 tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) diterbitkan. Dalam amanahnya pada Haornas tersebut, Presiden meminta pola pembinaan olahraga direviu secara total. Kerisauan Presiden tersebut bisa dipahami. Rasanya tidak masuk akal dengan penduduk 270 juta tidak dapat ditemukan talenta yang luar biasa dalam olahraga untuk kemudian dilakukan pembinaan secara sungguh-sungguh. Sepertinya ada yang salah dalam pembinaan olahraga kita. Apalagi perjalanan bangsa ini telah menginjak 77 tahun, sementara prestasi olahraga kita di level Olimpiade tak kunjung membuahkan hasil yang signifikan. Sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam Olimpiade sejak 1952, baru pada Olimpiade 1992 Indonesia meraih medali emas, 1 dari Susi Susanti dan 1 dari Alan Budikusumah, keduanya dari cabang bulutangkis. Setelah itu terjadi stagnasi dan cenderung mengalami penurunan karena pada setiap Olimpiade berikutnya hanya diperoleh 1 emas, bahkan pada Olimpiade London 2012 kita tidak mendapatkan medali emas. Dengan demikian, praktis selama 30 tahun terakhir tidak ada kemajuan yang signifikan pada keolahragaan kita.

Publik sesungguhnya menunggu apa hasil dari reviu total yang diperintahkan Presiden tersebut. Apa yang menjadi problem utama dari stagnasi prestasi olahraga Indonesia? Apa yang harus dilakukan untuk mengejar ketertinggalan tersebut? Mengapa cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi berhasil memperoleh medali di Olimpiade, sementara cabang olahraga yang lain tidak? Mengapa dominasi Indonesia selama 20 tahun di SEA Games, 1977-1997, melemah pasca era reformasi? Terhadap sejumlah persoalan tersebut memang belum ada jawaban yang memuaskan.

Kerisauan itu segera ditindaklanjuti secara cepat oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), dan akhirnya pada 9 September 2021 Perpres No. 86 Tahun 2021 tentang DBON diterbitkan bersamaan dengan Haornas ke 38 tahun 2021. Sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11 Tahun 2022, ruang lingkup DBON mencakup tiga hal, yakni olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/masyarakat, dan olahraga prestasi. Capaian prestasi olahraga penting untuk membangun identitas sekaligus *branding* bagi bangsa di dunia internasional. Sementara itu olahraga pendidikan dan olahraga rekreasi urgen untuk membangun *human capital* guna mewujudkan daya saing bangsa.

DBON diharapkan menjadi pamungkas dari beberapa proyek/program nasional olahraga yang sebelumnya pernah dilaksanakan. Indonesia pernah memiliki Proyek Garuda Emas tahun

1997, Program Atlet Andalan (PAL) tahun 2009, Program Indonesia Emas (Prima) tahun 2010, dan Peningkatan Prestasi Olahraga Nasional (PPON) tahun 2017, meski dengan skala yang berbeda. Dari aspek payung hukum, kita memiliki UU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11 Tahun 2022. Saat ini, UU No.11/2022 dan Perpres 86/2021 tersebut menjadi tumpuan bersama yang diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan, terlebih dalam konteks capaian Olimpiade dalam jangka panjang.

Intensi untuk mewujudkan rencana induk yang berisikan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang, tentu patut diapresiasi. Apalagi jika memperhatikan komitmen presiden, termasuk proses sosialisasinya oleh Kemenpora yang resonansinya terasa begitu kuat. DBON juga telah disebut dalam UU No. 11/2022 Pasal 12 ayat 2 yang mengikat semua pihak, termasuk mengantisipasi perubahan politik kekuasaan ke depan. Untuk itu ada beberapa hal yang perlu dicermati lebih saksama agar DBON tidak saja sebagai dokumen perencanaan, tetapi lebih membumi dan realistik untuk diwujudkan. Pada laporan ini dilakukan tinjauan bagaimana Perpres 86 Tahun 2021 sebagai bagian dari upaya membangun olahraga Indonesia ke depan dapat dilaksanakan semua pihak secara rasional, realistik, dan *evidence-based* sehingga meminimalkan kemungkinan terjadinya kekeliruan yang berulang dari masa lalu. Tinjauan difokuskan pada aspek kelembagaan, konstruksi perencanaan, substansi kebijakan, dan target yang ingin dicapai.

Aspek Kelembagaan

Dari pendalaman yang telah dilakukan terhadap Perpres 86/2021, tepatnya Pasal 8, disebutkan bahwa Tim Koordinasi Pusat DBON diketuai oleh Wakil Presiden, Wakil Ketua adalah Menko PMK, dan Ketua Pelaksana adalah Menpora. Sementara itu, sebagai anggota disebutkan ada beberapa kementerian, yakni Mendagri, Menkumham, Menag, Menkeu, Mendikbudristek, Menkes, Mensos, Memperin, Menteri PUPR, Menteri PPN/Bappenas, Menteri BUMN, dan Menparekraf. Pelibatan banyak kementerian dan lembaga, total ada 20 kementerian dan 2 lembaga, dalam pembangunan olahraga tentu menarik. Asumsi yang dibangun dalam pelibatan banyak kementerian/lembaga sungguh bisa dipahami bahwa pembangunan olahraga nasional tidak mungkin ditangani hanya oleh satu kementerian/lembaga, tetapi membutuhkan keterlibatan banyak pihak. Sebagai konsekuensinya, dibutuhkan *span of control* yang kuat terhadap banyaknya institusi yang terlibat tersebut. Jika tidak, yang terjadi adalah ego sektoral, saling kukuh pada kepentingannya masing-masing sehingga kinerja organisasi tidak optimal yang kemudian berujung pada ketidaktercapaian tujuan.

Dari tinjauan aspek kelembagaan, pelajaran kita bisa didapatkan dari masa lalu. Malaysia pernah membentuk “Cabinet Sub-Committee on Sport” sebagai respons kegagalannya pada Olimpiade 2004 di Athena, karena tak satu pun medali diperoleh. Organisasi gugus tugas tersebut mencakup 14 kementerian yang dipimpin oleh Dr. Najib Razak, wakil perdana menteri kala itu. Untuk menyusun dan melaksanakan program tersebut, Malaysia menyewa konsultan Hallam Pereira dari Australia, tahun 2004-2008. Dalam perjalanannya, kinerja organisasi tersebut tak semulus yang diimajinasikan. Disharmoni terjadi di internal organisasi, termasuk antara Kementerian Belia dan Sukan, *National Sport Council*, *National Institute of Sport*, *National Olympic Committee*, dan federasi cabang olahraga. Akhirnya, program tidak dapat berjalan efektif dan tujuan pun tidak bisa dicapai. Dalam konteks kebijakan nasional, telah terbit Inpres No. 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) yang melibatkan 15 Kementerian. Pelaksanaan Inpres tersebut sampai sekarang masih dijalankan. Pelibatan 15 Kementerian yang termaktub dalam Inpres tersebut membutuhkan *span of control* yang kuat dalam mencapai tujuan utama Germas, yaitu meningkatkan aktivitas fisik. Resonansi Germas memang harus terus digalakkan. Mengingat, tingkat partisipasi berolahraga masyarakat dan kebugaran masih belum mencapai angka yang diharapkan (Mutohir, Lutan, Maksum, & Kristiyanto, 2021).

Konstruksi Perencanaan

Dalam lampiran Perpres 86/2021, Bab 1 bagian A, dinyatakan bahwa visi DBON adalah “mewujudkan Indonesia bugar, berkarakter unggul, dan berprestasi dunia”. Visi tersebut dinilai cukup komprehensif meski dirumuskan dalam kalimat yang sederhana. Kata “bugar” mencerminkan tujuan olahraga rekreasi/masyarakat, kata “karakter” merepresentasikan tujuan olahraga pendidikan, dan kata “prestasi dunia” menunjuk pada tujuan olahraga prestasi. Ketiganya menjadi bidang garapan olahraga yang disebut dalam UU No. 11/2022. Selanjutnya, berdasarkan visi tersebut maka haruslah dirumuskan tujuan, kebijakan, strategi, program, dan target yang sejalan dengan visi tersebut. Khusus untuk “berkarakter unggul”, harus segera dielaborasi dalam dokumen perencanaan berikutnya. Hal ini dikarenakan karakter mengandung nilai-nilai etos kerja dan nilai-nilai moral yang menjadi tujuan utama dari olahraga (Coubertin, 2000; IOC, 2020, 2021) dan juga menjadi misi pokok Presiden Joko Widodo melalui slogan revolusi mental (Sekretariat Kabinet, 2016).

Tinjauan juga dilakukan pada peta jalan yang diuraikan pada Bab 3 Tabel 2. Pada peta jalan tahap I, 2021-2024, dinyatakan bahwa “*pembangunan difokuskan kepada pembangunan fondasi penyelenggaraan DBON melalui penguatan regulasi, penyusunan norma, standar,*

prosedur, dan kriteria". Dari uraian tersebut memberikan pesan kuat bahwa dalam kurun waktu 4 tahun pertama kegiatan difokuskan pada penguatan regulasi dan prosedur. Meskipun demikian, target pembinaan seperti tingkat partisipasi, tingkat kebugaran, dan peringkat kompetisi sudah harus diberlakukan. Selain itu, juga paradigma ilmu pengetahuan dan teknologi juga harus menjadi bagian tak terpisahkan dan diaplikasikan sejak tahap awal peta jalan.

Substansi Kebijakan

Berdasarkan pendalaman yang dilakukan, target yang dicantumkan memang cukup menantang, misalnya 10 besar pada Olimpiade 2032 dan 5 besar pada Olimpiade 2044. Untuk mencapai itu, diuraikan 5 kebijakan dan 5 strategi yang dirumuskan sebagaimana tersebut dalam Bab 2 bagian A dan B, yang kesemuanya diharapkan dapat menjadi terobosan dan tidak lagi bersifat "business as usual".

Salah satu strategi yang diuraikan adalah fokus pembinaan olahraga prestasi pada 14 cabang olahraga unggulan. Terlepas masih adanya pertanyaan mengenai jenis cabor dan jumlahnya, upaya membuat prioritas pembinaan dinilai logis dan wajar, seseorang atau suatu organisasi yang memiliki skala prioritas berarti yang bersangkutan akan fokus pada sedikit hal dan bukan pada banyak hal. Prioritas pada banyak hal sama artinya bahwa yang bersangkutan tidak punya prioritas. Analog yang sama bisa diberlakukan dalam konteks pembinaan olahraga. Dalam sejumlah kajian, ada dua variabel utama yang dapat menjelaskan pencapaian prestasi olahraga, yakni anggaran dan kualitas SDM, terutama pelatih (De Bosscher, De Knop, van Bottenburg, Shibli, & Bingham, 2009; De Bosscher, Heyndels, De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2008; Hylton, Bramham, Jackson, & Nesti, 2007; Mutohir et al., 2021). Kita tidak cukup punya kemewahan dalam hal anggaran. Anggaran olahraga tahun 2021 di Kemenpora sekitar 2,2 triliun, 0,06% dari APBN (Kemenpora, 2021). Kita juga tidak punya kualifikasi pelatih dunia, kecuali pada cabang olahraga bulutangkis dan mulai disusul angkat besi. Karena itu, fokus pada prioritas menjadi keniscayaan. Hal-hal penting yang wajib diperhatikan dalam menentukan cabang olahraga prioritas yakni rekam jejak, potensi, probabilitas, dan *time span* yang dibutuhkan untuk mewujudkan prestasi olimpik.

Kita bisa belajar dari *best practice* di negara lain yang sudah berhasil pada level Olimpiade. Rasanya tidak mungkin Indonesia akan mengikuti pola pembinaan olahraga ala Amerika dan China yang menerapkan strategi multicabang. Sumber daya mereka nyaris tak terbatas. Dengan PDB per kapita masing-masing sebesar \$69.287 dan \$12.566 (World Bank, 2021), diikuti hegemoni kepemimpinan politik negara adidaya, maka kedua negara tersebut tidak mungkin ditandingi. Kita bisa merujuk pada sejumlah negara di luar itu, seperti Kuba, Jamaika, Korea

Selatan, dan Australia. Sebanyak 4 dari 7 medali emas yang diperoleh Kuba dalam Olimpiade Tokyo berasal dari tinju, 4 medali emas yang diperoleh Jamaica berasal dari atletik nomor lari jarak pendek, 4 dari 6 medali emas yang diperoleh Korea Selatan berasal dari panahan, dan 9 dari 17 medali emas yang diperoleh Australia berasal dari renang.

Medali emas Korea hanya diperoleh dari 3 cabang olahraga: panahan, anggar, dan senam. Sementara itu, medali emas Australia diperoleh dari 6 cabang: renang, dayung, kano, layar, skateboard, dan balap sepeda. Dalam hal ini, mungkin penting dipertimbangkan untuk mengoptimalkan cabang olahraga yang telah terbukti secara empirik menghasilkan medali di Olimpiade. Padahal di cabang olahraga tersebut tersedia medali cukup banyak: bulutangkis 5 medali emas, angkat besi 14 medali emas, dan panahan 5 medali emas. Jika memang ingin ditambah, bisa sampai 5 cabang olahraga, dengan mengikutsertakan 2 cabang olahraga yang memiliki rekamjejak dunia, meski belum level Olimpiade.

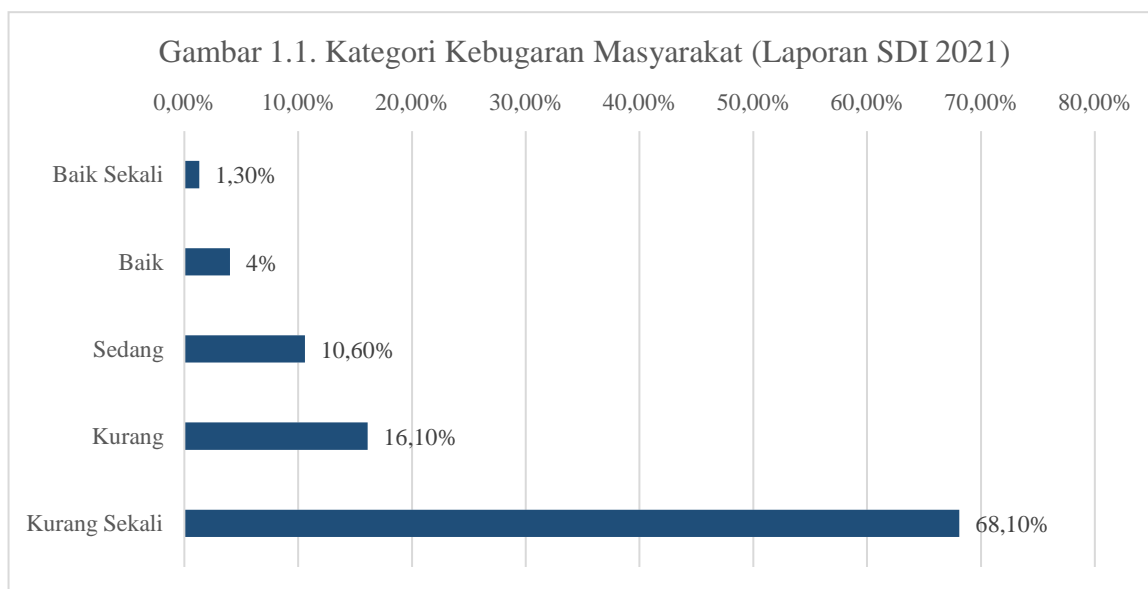
Dalam konteks olahraga pendidikan, terdapat strategi penambahan jam pelajaran pendidikan jasmani di sekolah hingga 3 kali per minggu. Langkah ini harus disinkronkan dengan langkah Kemendikbud yang melakukan penyederhanaan kurikulum karena dalam beberapa tingkatan sekolah, seperti kelas 12 di SMK, bidang studi pendidikan jasmani justru sudah ditiadakan. Jika hal ini dipaksakan, potensi pertentangan dengan bidang studi lain yang dianggap lebih penting terkait akumulasi jam pelajaran menjadi tak terhindarkan. Sejumlah hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan motorik dan kebugaran jasmani pelajar belum menunjukkan tingkat yang memuaskan (Hartati, 2018; Indahwati, 2018; Nurhayati, 2018), termasuk hasil pengkajian data SDI 2021 (Mutahir et al., 2021). Memang kondisi yang demikian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di banyak negara lain (K Hardman, 2003; Ken Hardman, 1999). Pertanyaannya adalah apa yang dilakukan oleh mereka dalam upaya memenuhi kecukupan gerak anak minimal 60' per hari. Program yang banyak diadopsi oleh sejumlah negara adalah “physical activity before and after school” (Caldwell et al., 2022; Marttinen & Stellino, 2022) termasuk di dalamnya “walking and biking to school” dan “weekend sports program”. Program tersebut pada intinya mengarah pada “daily physical activity” agar para siswa memperoleh kecukupan gerak yang berdampak pada kebugaran jasmani mereka.

Substansi lain yang tidak kalah krusialnya untuk ditinjau adalah adanya perintah penyelarasan kurikulum PJOK di sekolah dengan *Long Term Athlete Development* (LTAD). Tentu saja ini menjadi tantangan tersendiri, karena tujuan olahraga sebagaimana yang tertuang dalam UU No. 11 Tahun 2022 bersifat multiaspek, tidak beralur tunggal yang ujungnya hanya performa tinggi. Tujuan PJOK di sekolah adalah sebagai instrumen pendidikan yang mengarah

pada literasi fisik dan penanaman nilai. Sementara itu, konstruksi LTAD adalah untuk performa tinggi yang mengarah pada atlet elit. Padahal tidak semua siswa melakukan olahraga untuk tujuan menjadi atlet.

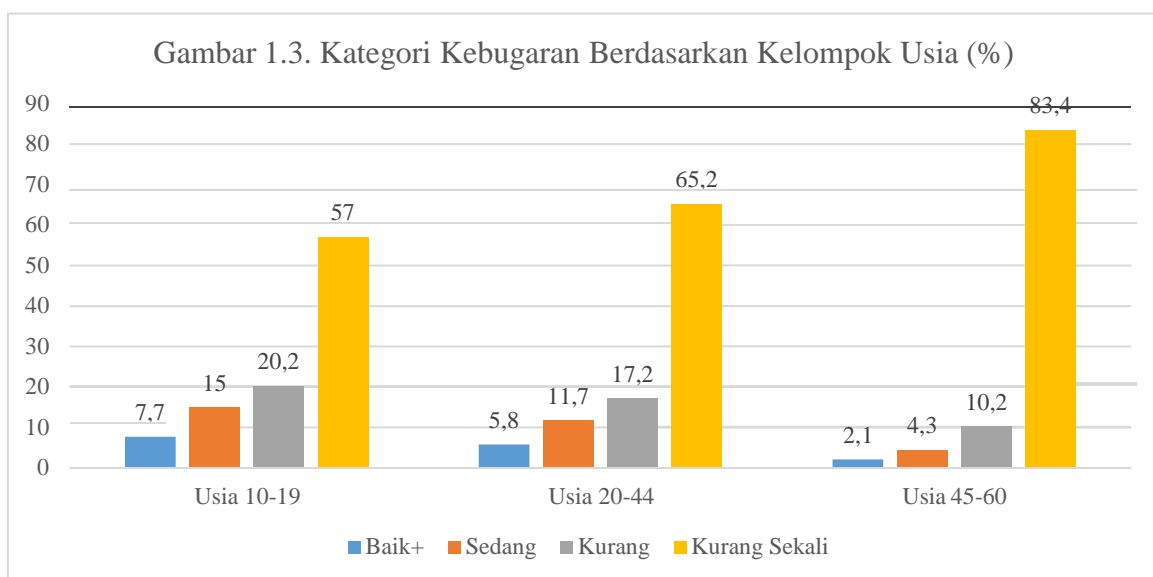
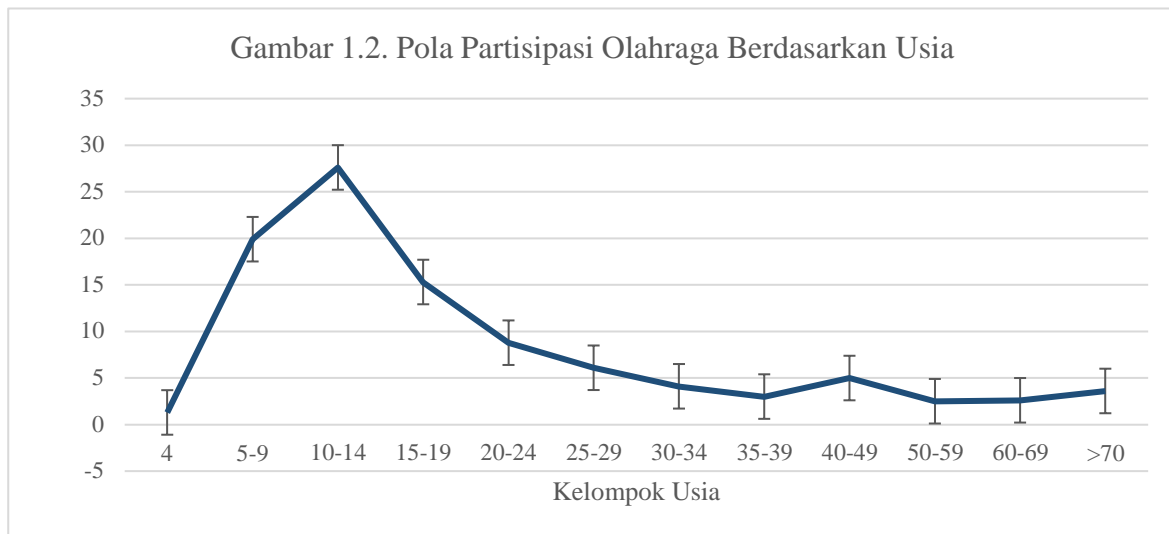
Target Capaian

Beberapa hal dapat dilihat ketika meninjau DBON dari aspek Target Capaian. Pertama, terkait dengan tingkat kebugaran masyarakat yang ditargetkan 30% masuk kategori baik pada 2024 dan 60% pada 2045. Target tersebut dinilai cukup ambisius mengingat tren kebugaran masyarakat seiring waktu cenderung turun dan berdasarkan laporan SDI 2021, mereka yang masuk kategori baik ke atas hanya 5,30% (Mutohir et al., 2021). Menaikkan sebesar 24,70 poin pada tahun 2024 dan 54,70 poin pada tahun 2045 tentu saja bukan persoalan yang mudah. Diperlukan kebijakan yang komprehensif mulai dari hulu seperti kebijakan pemerintah sampai dengan hilir yakni individu dalam masyarakat (WHO, 2018): *active systems, active societies, active environments, and active people*.

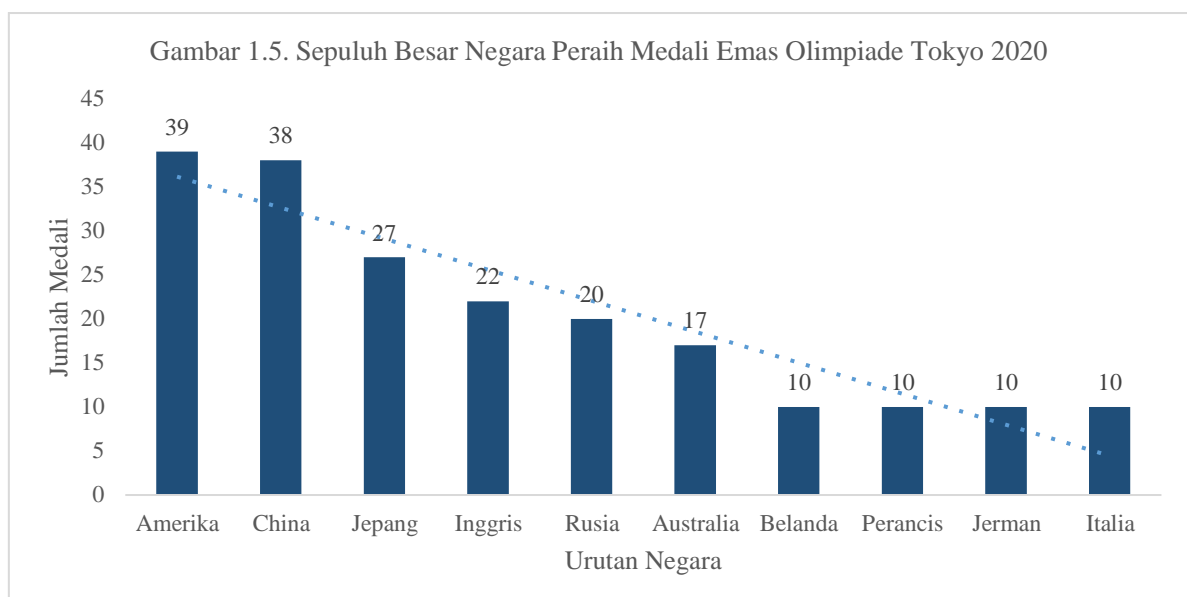
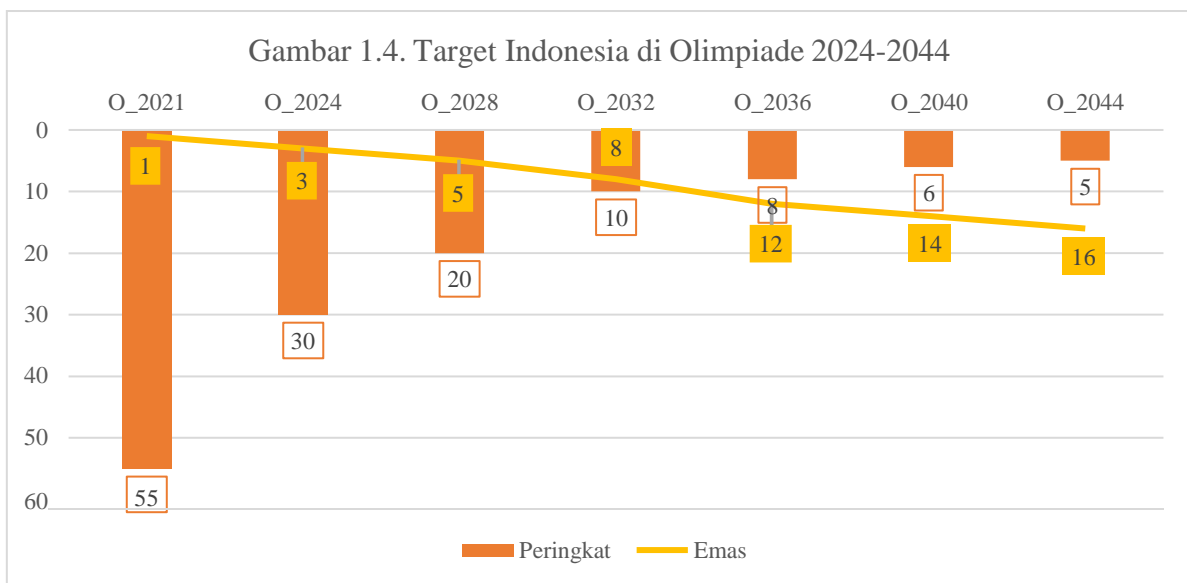


Kedua, yaitu target partisipasi. Dalam DBON dinyatakan bahwa target partisipasi olahraga masyarakat adalah sebesar 70% pada tahun 2045 yang berlaku pada semua kelompok usia. Penyebaran target partisipasi kepada semua kelompok usia ini perlu direvisi mengingat berdasarkan hasil riset (Eime et al., 2016; Maksum, 2020; Mutohir et al., 2021), puncak partisipasi dalam melakukan olahraga adalah terjadi pada usia pelajar (6-19 tahun) dan seiring usia akan mengalami penurunan. Kondisi yang demikian bersifat universal, tidak hanya terjadi di Indonesia tetapi juga di sejumlah negara. Kondisi yang demikian-lah yang menunjukkan linieritas dengan tingkat kebugaran, mengingat tingkat partisipasi berkorelasi erat dengan

tingkat kebugaran. Semakin tinggi tingkat partisipasi, semakin tinggi pula tingkat kebugaran.



Ketiga, target olahraga prestasi. Pada Tabel 3 lampiran Perpres 86/2021 disebutkan bahwa pada Olimpiade 2032 Indonesia diharapkan berada di peringkat 10 dengan 8 medali emas dan pada Olimpiade 2044 ada pada peringkat 5 dengan 16 medali emas. Target tersebut juga merupakan tantangan tersendiri mengingat posisi kita sekarang, hasil Olimpiade Tokyo 2021, ada di urutan ke 55. Mengacu target tersebut, dalam waktu ± 10 tahun kita diharapkan naik 45 tingkat, menggeser negara maju seperti Italia, Kanada, Brazil, dan Korea Selatan. Dalam waktu ± 22 tahun kita berada di peringkat kelima, berarti kita akan menggeser Rusia, Australia, Belanda, Perancis, dan Jerman.



Kebijakan Berbasis Bukti

Perumusan kebijakan tidak cukup hanya berdasarkan pada pengalaman sejumlah orang atau kelompok orang, apalagi berbasis intuisi atau opini yang bersifat *common sense*. Probabilitas kesalahannya lebih tinggi dan pada ujungnya berpengaruh pada ketercapaian tujuan. Yang dibutuhkan adalah kebijakan berbasis bukti atau yang lazim disebut dengan *evidence-based policy* (EBP). Model ini didasarkan pada premis bahwa kebijakan yang dirumuskan berdasarkan bukti yang tersedia dan mencakup analisis yang rasional-mendalam akan menghasilkan *outputs* yang lebih baik (Mayer, 2010; Pawson, 2006; Sutcliffe & Court, 2005). Dalam konteks EBP, pendekatan ilmiah dalam mengkaji sesuatu seperti ketersediaan literatur, hasil penelitian, bukti empirik, dan analisis data yang mendalam menjadi sangat krusial. Harus diakui bahwa dalam level pemerolehan pengetahuan, metode ilmiah memiliki tingkatan yang paling tinggi dibandingkan dengan cara yang lain. Meski demikian, tidak berarti metode ilmiah tidak memiliki kesalahan. Peluang kesalahan tetap ada tetapi dapat diminimalkan (Maksum, 2018).

Dalam sejarahnya, EBP pertama kalinya diterapkan dalam bidang medis (Mayer, 2010) yang berkaitan langsung dengan kehidupan dan kemanusiaan. Sebagai ilustrasi, pemerintah Tanzania menerapkan proses reformasi layanan kesehatan yang didasarkan pada hasil riset penyakit rumah tangga dan terbukti berkontribusi pada lebih dari 40% pengurangan kematian bayi antara tahun 2000 dan 2003 di dua wilayah percontohan (Sutcliffe & Court, 2005). Pada kajian tersebut juga dikemukakan bahwa krisis HIV/AIDS yang terjadi di beberapa negara semakin dalam karena pemerintah mengabaikan bukti penyebab penyakit dan cara mencegah penyebarannya. Dalam konteks pemerintahan, EBP pertama kali digunakan di Inggris ketika Tony Blair menjadi perdana menteri. Pemerintah Blair mengatakan bahwa mereka ingin mengakhiri pengambilan keputusan yang bersifat *ideologically-driven politics* menjadi keputusan berbasis rasionalitas. Pemerintah Inggris harus menghasilkan kebijakan yang benar-benar menangani masalah, berwawasan ke depan, dan dibentuk oleh bukti, bukan respons terhadap tekanan jangka pendek yang acapkali hanya mengatasi gejala bukan penyebab (Blair, 1999; Parkhurst, 2017; Sutcliffe & Court, 2005).

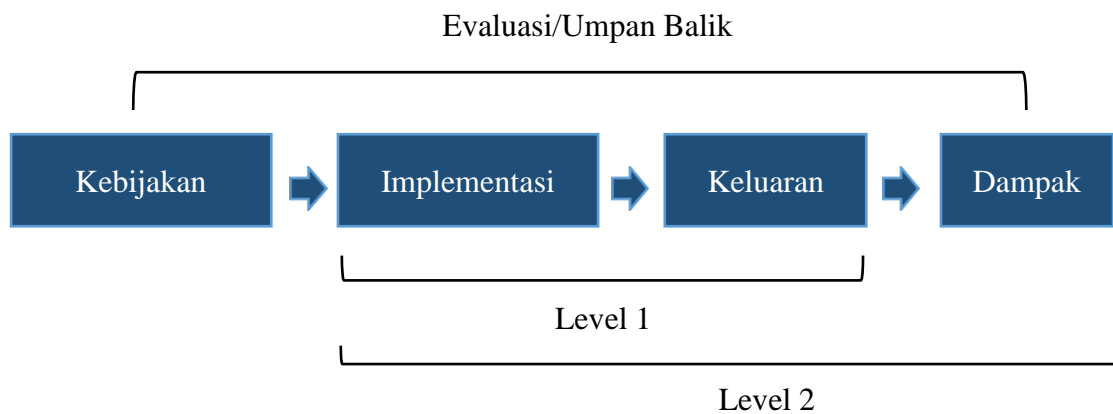
Sungguh disadari bahwa olahraga tidak bergerak dalam ruang yang hampa, ia berjalan berkelindan dengan aspek kehidupan lain seperti politik, ekonomi, dan sosial. Karena sifatnya yang populer dan menjadi perhatian banyak orang, maka olahraga rentan dimanfaatkan oleh segelintir orang untuk kepentingan tertentu. Itu sebabnya, olahraga harus tetap dijaga independensinya, bebas dari kepentingan politik praktis, dan tekanan pemilik modal. Itulah

yang sering diwanti-wanti oleh IOC, termasuk federasi internasional olahraga, terkait penyelenggaraan olahraga di suatu negara. Dalam Olympic Charter (IOC, 2020) disebutkan:

“...Sports organisations within the olympic movement shall apply political neutrality. They have the rights and obligations of autonomy, which include freely establishing and controlling the rules of sport, determining the structure and governance of their organisations, enjoying the right of elections free from any outside influence and the responsibility for ensuring that principles of good governance be applied. The NOCs must preserve their autonomy and resist all pressures of any kind, including but not limited to political, legal, religious or economic pressures which may prevent them from complying with the Olympic Charter”.

Sudah waktunya kita mengakhiri kebijakan olahraga yang bias tujuan (*ideologically-driven politics*) dan bertransformasi menuju kebijakan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Kita sudah banyak kehilangan energi dan waktu untuk meningkatkan daya saing bangsa di mata internasional melalui olahraga. Bangsa ini sudah 77 tahun merdeka, sudah cukup waktu untuk berbenah, tidak perlu menunggu hingga 100 tahun.

Gambar 1.6. Proses Evaluasi Kebijakan Berbasis Dampak



Pada tataran yang lebih operasional, kebijakan yang kemudian diturunkan dalam bentuk program dan kegiatan perlu dievaluasi secara sungguh-sungguh, tidak sekadar berhenti pada keluaran (level 1) seperti banyaknya orang yang hadir dalam acara dan tuntasnya pertanggung-jawaban keuangan, tetapi sampai pada dampak dari kegiatan tersebut (level 2). Program “AyoBerolahraga”, misalnya, apakah sudah dievaluasi tingkat keberhasilannya hingga dapat meningkatkan partisipasi

olahraga masyarakat secara berkelanjutan. Demikian juga terkait program naturalisasi atlet yang terjadi di sejumlah cabang olahraga, apakah program tersebut dalam jangka panjang mampu membangun prestasi olahraga nasional. Lagi-lagi, kajian mendalam berbasis bukti perlu dilakukan.

Menagih Janji Perguruan Tinggi

Dalam kajian kebijakan berbasis bukti, kontribusi perguruan tinggi menjadi urgen dalam rangka menyediakan informasi/data hasil penelitian. Fungsi perguruan tinggi sebagaimana disebutkan dalam UU No. 12/2012 adalah membangun peradaban dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa (Kemendikbud, 2012). Kecerdasan dalam kehidupan, termasuk didalamnya daya saing, dibutuhkan dalam menghadapi globalisasi di segala bidang. Itu sebabnya, perguruan tinggi dituntut menghasilkan intelektual dan/atau profesional yang cakap dan berani membela kebenaran demi kepentingan bangsa. Sejalan dengan itu, kiprah dan kontribusi perguruan tinggi keolahragaan dalam rangka menghasilkan pembangunan olahraga yang progresif dan berdaya saing menjadi sebuah keniscayaan.

Peran tersebut dapat diwujudkan dalam dua hal, yakni pengembangan dan penerapan *sport science* dan penyiapan SDM keolahragaan yang kompeten. Peran spesifik tersebut sekaligus menjadi “janji suci” atas keberadaan kampus yang tumbuh membesar melalui tri dharma perguruan tinggi yang mencakup pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui Sentra Olahraga di 10 titik Sentra menempatkannya di 10 Kampus Olahraga di berbagai wilayah di Indonesia. Pilihan terhadap 10 Perguruan Tinggi Keolahragaan sekaligus menjadi tantangan yang harus dijawab dengan karya nyata berupa peningkatan prestasi.

Kepercayaan ini pada akhirnya harus dijawab oleh perguruan tinggi. Inilah yang akan diulas pada bagian ini. Menagih janji peran kampus keolahragaan adalah hak masyarakat sebagai bagian inti dari pembuktian akuntabilitas publik. Tagihan tersebut sekaligus merupakan bentuk kontrol kualitas atas apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh perguruan tinggi keolahragaan, utamanya hal-hal yang memang belum secara optimal dilakukan

Kampus keolahragaan adalah sebuah habitat masyarakat ilmiah dan terdidik yang memiliki fungsi kepeloporan dalam kiprah panjang tri dharma untuk membangun keolahragaan secara komprehensif. Nilai kepeloporan utamanya adalah meracik peran dan kapasitas fungsional institusi sebagai *leader* kebangkitan olahraga era kini dan untuk masa depan. Olahraga dalam dimensi yang luas meliputi berbagai lingkup dan tidak sebatas pada persoalan mikro yang berhubungan dengan performa teknis olahraga. Institusi yang secara teknis mengurus persoalan seperti itu bergerak mendewasa dalam perannya sebagai *stakeholder* inti keolahragaan. Misalnya, olahraga prestasi dijalankan oleh peran inti KONI dan NPC; olahraga pendidikan ditangani Dinas/OPD/SKPD di level pemerintah pusat/provinsi/kota/kabupaten; dan olahraga rekreasi oleh KORMI dan berbagai komunitas olahraga rekreasi/olahraga masyarakat yang tumbuh eksis berkembang.

Betapa penting artinya bagi masyarakat kampus untuk selalu meninjau dan memperkuat 'posisi berdiri', terlebih jika dikaitkan sebagai naungan tak terpisahkan dengan lembaga formal di dalam ranah Kemendikbudristek. Secara implementatif, kampus diharapkan berkontribusi dalam mengawal kebijakan olahraga nasional dan membumikan hasil kemajuan riset dan teknologi keolahragaan. Pengawasan kebijakan olahraga nasional menjadi sebuah keniscayaan bagi kampus, terlebih kampus yang di dalamnya memiliki aneka sumber daya kepakaran yang berhubungan dengan persoalan keolahragaan. Kepeloporan tidak sekadar diwujudkan pada kepeduliannya untuk mengintegrasikan diri dalam iklim partisipasi masyarakat awam dalam berolahraga, tetapi menyangkut banyak hal. Substansi kebijakan keolahragaan harus dipelopori oleh perguruan tinggi keolahragaan melalui pusat-pusat keunggulan yang bisa disumbangkan dalam aktivitas tri dharma secara personal maupun kolektif, terutama dalam hal produktivitas riset yang dapat dihilirisasikan untuk mengawal dan memandu pembangunan olahraga.

Riset di perguruan tinggi keolahragaan merupakan hal yang sangat vital, karena merupakan unsur tri darma utama yang dilakukan oleh setiap dosen atau kelompok dosen di perguruan tinggi. Aspek produktivitas riset merujuk pada menguatnya aneka nilai manfaat pragmatis produk-produk riset yang berguna secara nyata di masyarakat. Kepeloporan riset mengarah pada orientasi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Sejahtera dalam arti yang umum berhubungan dengan kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran. Kualitas dan bidang kajian pragmatis keolahragaan disesuaikan dengan era kekinian, yakni masyarakat yang sukses beradaptasi dengan lahirnya generasi teknologi 4.0 dan *society* 5.0. Memelopori dalam kegiatan riset artinya, perguruan tinggi keolahragaan melakukan literasi dan akselerasi dengan menghasilkan banyak publikasi, hilirisasi, dan komersialisasi riset keolahragaan.

Hilirisasi riset olahraga dalam tataran yang ringan berhubungan dengan aplikasi yang tanpa konflik di dalam proses pelatihan elit atlet. Dalam tataran yang lebih makro, hilirisasi riset olahraga harus membumi, mengikat, mengakar dengan kalangan industri sebagai bagian dari cinta atas karya anak bangsa yang mandiri dan berdaya saing.

Basis Saintifik: Faktor DNA dan Peran Laboratorium

Dalam sepuluh tahun terakhir, perkembangan riset genom sungguh luar biasa. Konsorsium riset tersebut didukung oleh sejumlah negara besar seperti Amerika, Inggris, Jerman, Jepang, dan China. Proyek penelitian tersebut dimulai pada tahun 1990 dan ujungnya pada 2022 telah berhasil memetakan genom manusia secara lengkap. Temuan tersebut kian membuka jalan untuk mengetahui dan memahami cetakbiru manusia secara utuh (Natri et al., 2022; Wagner, Schwingshackl, Draxler, & Franzke, 2021) termasuk dalam konteks olahraga (Camporesi & McNamee, 2018; Singer & Janelle, 1999).

Secara sederhana, genom adalah cetakbiru yang berisi informasi genetik yang tersusun dalam bentuk pita molekul DNA (*deoxyribonucleic acid*) yang berfungsi untuk mengembangkan aktivitas organisme (Achebe & Schools, 2021; John, Dhillon, & Dhillon, 2020). Dari DNA tersebut dapat diketahui karakteristik fisik, potensi mengidap penyakit tertentu, dan daya tahan terhadap kondisi tertentu. Manusia memiliki 23 pasang kromosom yang mengandung sekitar 3 milyar pasangan basa (nukleutida). Sebagai catatan, simpanse memiliki 24 pasang kromosom, 13 di antaranya identik dengan manusia. Setiap kromosom mengandung ratusan hingga ribuan gen, sekitar 25.000 gen, yang membawa petunjuk dan instruksi untuk memproduksi protein. Setiap gen dalam genom akan membuat sekitar tiga protein. Setiap manusia memiliki gen yang berbeda dan inilah yang kemudian membedakan antara manusia yang satu dengan yang lain, ras yang satu dengan yang lain, bangsa yang satu dengan bangsa yang lain.

Temuan tersebut pada gilirannya akan berdampak pada dunia olahraga. Seperti diketahui, olahraga kompetitif telah berkembang sedemikian rupa sehingga para atlet akan berusaha keras untuk mengembangkan diri mereka menjadi juara. Dunia kedokteran juga telah berevolusi ke titik di mana banyak elemen genetik telah diidentifikasi terkait dengan karakteristik atlet dan perubahan genetik juga sangat mungkin dilakukan. Riset saat ini telah menemukan tiga faktor penting terkait genetik dalam olahraga, yakni polimorfisme yang mempengaruhi performa, doping gen, dan kecenderungan genetik untuk cedera (John et al., 2020; Natri et al., 2020; Sharp, 2010). Sebagai contoh, gen ACTN3 memiliki pengaruh pada serat otot tipe II, yang

menguntungkan untuk olahraga bertenaga seperti lari cepat. Polimorfisme gen ACE berhubungan dengan efisiensi kardio-respiratori dan dapat mempengaruhi daya tahan atlet. Gen erythropoietin dapat meningkatkan pengiriman oksigen dan gen endorfin dapat meningkatkan toleransi rasa sakit. Rekayasa genetika juga memungkinkan atlet akan sembuh dari cedera lebih efektif dan efisien. Banyak gen lain sedang dicari dengan fokus khusus padahal-hal yang berpotensi terkait dengan peningkatan performa dalam olahraga.

Performa atlet diyakini bersifat multifaktorial yang dipengaruhi oleh genetik dan lingkungan. Dalam dua dekade terakhir, telah terjadi akumulasi bukti kuat yang berhubungan dengan gen untuk performa atlet, terutama kekuatan, daya tahan, dan kecepatan. Hingga saat ini, lebih dari 200 gen polimorfisme telah diidentifikasi dan lebih dari 20 polimorfisme ini diyakini berkorelasi dengan performa atlet elit (Natri et al., 2020; Sharp, 2010). Seiring waktu, performa atlet akan menjadi lebih baik secara eksponensial dengan rekayasa genetika. Para peneliti di China telah menggunakan CRISPR (*clustered regularly interspaced short palindromic repeats*), teknologi yang memungkinkan materi genetik ditambahkan, dihapus, atau diubah di lokasi tertentu dalam genom (Achebe & Schools, 2021). Teknologi tersebut akan menciptakan atlet yang mampu melampaui batas biologis yang ditempatkan pada ras manusia. Dalam perkembangan ke depan, rekayasa genetika dimungkinkan bisa memanipulasi perbedaan gender. Jika atlet diizinkan untuk meningkatkan diri secara genetik, maka tidak perlu lagi memisahkan olahraga pria dan wanita. Keuntungan alami yang dimiliki pria akan hilang begitu saja setelah wanita mampu merekayasa gen mereka untuk meningkatkan kinerja mereka. Gender akan menjadi pembeda yang tidak berguna dalam olahraga, yang berarti atlet hanya akan dievaluasi oleh performa mereka.

Dalam logika hereditas, peran gen begitu dominan dalam menentukan performa atlet. Dalam sejumlah penelitian disebutkan bahwa VO₂max atau kapasitas aerobik sebanyak 50% ditentukan oleh faktor genetik, respon terhadap latihan aerobik sebesar 47%, kekuatan anaerobik sebesar 70-80%, status atlet sebesar 66%, partisipasi olahraga sebesar 35%-83%, dan aktivitas fisik harian sebesar 29-62%. Demikian juga faktor tinggi badan, sekitar 50% merupakan faktor genetik (Schneider & Rupert, 2009).

Modifikasi genetik akan memberikan lompatan yang mengarah pada transformasi dalam sejarah manusia. Atlet akan menjadi lebih cepat dan lebih kuat daripada yang dimungkinkan oleh kode genetik alami mereka. Sudah tentu, bidang ini akan menarik imajinasi publik dan para olahragawan. Pentas olahraga ke depan akan diisi oleh homo sapiens yang berevolusi yang

akan menarik jutaan pemirsa. Meskipun demikian perlu dicatat bahwa persoalan tersebut tidak bisa dilepaskan dari masalah etik yang serius (Camporesi & McNamee, 2018; Schneider & Rupert, 2009). Bagaimana risiko kesehatan dan kemanusiaan dalam jangka panjang atas rekayasa genetika yang dilakukan. Apakah hal tersebut tidak melanggar prinsip *fairness* dalam bertanding karena ketidaksamaan akses dalam kemampuan rekayasa. Lebih dari itu, kontestasi olahraga tidak lagi alami menampilkan performa human sapiens.

Performa atlet merupakan sesuatu yang kompleks dan dipengaruhi oleh berbagai faktor fisik, fisiologis, biomekanik dan psikologis. Terkait hal tersebut, laboratorium menjadi penting dalam berbagai aspek pengembangan atlet dan optimalisasi pelatihan. Laboratorium menawarkan lingkungan yang stabil untuk tidak hanya memantau kinerja tetapi juga memanfaatkan peralatan khusus, yang dapat memberikan informasi tambahan tentang mekanisme yang mendasari kapasitas latihan atlet. Oleh karena itu, pengujian laboratorium memungkinkan untuk menentukan faktor-faktor spesifik yang membatasi performa, sehingga dengan demikian memberikan pemahaman yang lebih besar kepada para atlet dan pelatih tentang bagaimana memaksimalkan kekuatan dan mengatasi kelemahan. Mengingat perkembangan dan kemajuan lebih lanjut dari berbagai teknologi, menjadi relatif mudah untuk menilai performa atlet selama pelatihan dan kompetisi reguler.

Secara sederhana, laboratorium *sport science* adalah fasilitas yang dilengkapi dengan seperangkat instrumen yang valid dan reliabel untuk melakukan penelitian atau pengumpulan data terkait ilmu pelatihan dengan fokus utama untuk menyediakan data guna mengoptimalkan program pelatihan dan terapi olahraga. Laboratorium juga untuk mendiagnosis daya tahan, kekuatan, kecepatan, dan koordinasi serta melakukan pemeriksaan biomekanik. Salah satu variabel yang bisa menjelaskan keberhasilan China pada Olimpiade Beijing 2008 adalah keberadaan laboratorium *sport science* yang dikembangkan sejak tahun 2007, yang ditempatkan di Beijing Sport University (Hallmann, Kirstin and Petry, 2013). Lab tersebut berfungsi menyediakan dukungan ilmiah untuk atlet elit nasional, menyediakan fasilitas & prosedur standar penelitian untuk staf pengajar dan mahasiswa, dan menyediakan kualitas layanan tinggi kepada masyarakat. Paradigma pengembangan lab adalah interelasi beberapa subdisiplin ilmu keolahragaan.

Sebagai contoh, hingga kini konsep kapasitas aerob maksimal (vo_{2max}) terkait pencapaian prestasi tetap relevan dan data vo_{2max} menjadi prediktor utama untuk cabang olahraga seperti dayung dan balap sepeda. Parameter prestasi Olimpiade menuntut vo_{2mx} di

atas 80. Untuk mencapai itu, peran lab sangat membantu pelatih untuk menyusun program latihan sehingga para ahli *sport medicine* menjadi mitra dalam penyediaan data yang akurat dan menyusun program yang tepat sasaran untuk meningkatkan potensi atlet. Tanpa lab sukar untuk meningkatkan keunggulan kompetitif karena pelatih tidak memahami kondisi atletnya dan peluang untuk berhasil. Efek latihan dan ekser negatif tercermin pada darah sehingga atlet China diperiksa darahnya pada setiap bulan. Dalam konteks pelatihan hypoxia, misalnya, berlatih pada ketinggian di atas 200 meter sangat efektif untuk menimbulkan perubahan kemampuan biologis karena terekspos oleh lingkungan yang tipis oksigennya. Kini orang tidak perlu pergi ke gunung tinggi sebab dengan teknologi dapat diciptakan ruang hipoksia sesuai kebutuhan. Dengan diam saja sambil tidur-tiduran, ruangan sudah terjadi perubahan fisiologis. Dalam konteks performa tinggi, tidak hanya keterampilan motorik unggul yang dapat berhasil dengan baik, tetapi juga kemampuan kognitif seperti mengobservasi perilaku (*gazebehavior*) lawan, perangkat, atau lingkungan permainan (Hüttermann, Noël, & Memmert, 2018). Agar berhasil memulai reaksi motorik terhadap gerakan atau keputusan dengan tepatwaktu, perlu secara visual memahami informasi yang relevan secepat mungkin. Titik waktu penyerapan informasi dan lokalisasi informasi menjadi urgen, karena 95% rangsangan lingkungan dicatat oleh sistem visual manusia. Tidak dapat disangkal bahwa kemampuan mengobservasi yang efisien dikombinasi dengan keterampilan motorik diyakini sangat penting untuk mencapai performa terbaik dalam olahraga.

Pengukuran rutin kepada atlet, meskipun berpotensi memakan waktu dan mahal, dapat memberikan informasi yang spesifik dan berguna. Manfaat pertama yang diakui dari pengukuran parameter fisiologis adalah pemeriksaan umum status kesehatan dan kebugaran atlet. Dengan ukuran dasar ini, program pemeriksaan reguler akan memberikan umpan balik kepada atlet, pelatih, atau ilmuwan. Umpan balik ini memungkinkan penilaian efektivitas program pelatihan. Harus diakui bahwa selama ini ada kesenjangan antara teori dan praktik dalam pelatihan, pengkondisian, dan pengukuran olahraga performa tinggi. Penelitian ilmu olahraga perlu memperhatikan kebutuhan dalam praktik di lapangan. Kolaborasi antara akademisi dan praktisi dibutuhkan guna mencari solusi untuk menyelaraskan model performa atlet secara terpadu.

Pendekatan Ilmiah dalam Pelatihan Atlet

Kajian akademik tidak boleh berhenti hanya pada lingkungan kampus, tetapi harus diimplementasikan di lapangan. Basis saintifik dalam pelatihan tidak harus menggunakan alat-alat yang canggih, tetapi lebih pada bagaimana pengambilan keputusan di dalam proses pelatihan atlet dilakukan berdasarkan pengetahuan, prosedur, dan bukti yang memadai. Terkait hal ini, ada pengalaman riil yang bisa dipelajari dari kesuksesan Jawa Barat mengulang sukses PON 2016 karena mampu mempertahankan posisi pada peringkat teratas dalam PON 2021 Papua. Pertanyaannya, faktor apa yang menjadi penentu sukses Jawa Barat tersebut. Kuncinya ada pada perencanaan dan ketenagaan serta dukungan anggaran yang memadai. Sekitar 75% pelatih PON adalah alumni FPOK UPI kualifikasi S1, S2 dan S3 yang mampu menerapkan perencanaan berbasis pengetahuan dan pengalaman di tingkat nasional dan pengetahuan praktis, didukung pelatih dari Korea untuk cabang olahraga Taekwondo. Ketika merebak pandemi Covid 19 di Indonesia, dampaknya luas dan mendalam ke berbagai aspek mencakup ekonomi, politik, termasuk olahraga, penyelenggaraan even dan PON itu sendiri terutama persiapan daerah peserta.

Kondisi pandemik yang dikategorikan sebagai krisis memerlukan mitigasi agar tidak terjadi *training loss* yang merugikan. Karena itu, KONI Jawa Barat melalui bidang perencanaan dan strategi menyusun buku saku bertajuk ‘Prinsip Manajemen Training Dalam Krisis’ yang berisi pengetahuan praktis berbasis bukti empirik hasil riset. Pengetahuan tersusun berdasarkan pemahaman terkait fakta teramati yang dikonstruksi berdasarkan metode ilmiah. Dari fakta yang dipersepsi terbentuk konsep. Dari konsep tersusun variabel yaitu konsep yang dinyatakan dalam nilai. Data dari sampel yang representatif dari populasi di inferensi menjadi generalisasi. Konsistensi dan koherensi temuan menghasilkan prinsip yaitu kaidah yang dapat diterapkan dan menjadi bahan mengkonstruksi teori. Tidak ada yang lebih praktis dari teori yang baik. Teori berfungsi untuk menggambarkan, menjelaskan, memprediksi dan mengontrol. Dari 11 prinsip dalam latihan ada yang disebut reversibilitas, yakni penurunan kemampuan fungsi fisiologis, termasuk komponen kebugaran jasmani yang berpengaruh terhadap performa.

Atlet yang sangat terlatih sekali pun terbukti mengalami penurunan Vo_{2max} sebesar 6 hingga 20% selama penghentian pelatihan (*detraining*) yang bersifat jangka panjang (Mujika

& Padilla, 2000). Vo_{2max} menurun secara progresif dan proporsional selama 8 minggu awal *detraining*, tetapi stabil setelahnya atau sama dengan individu yang tidak berlatih. Denyut jantung maksimal juga meningkat sebesar 5% setelah 84 hari penghentian pelatihan pada atlet yang dilatih daya tahan. Latihan intensitas submaksimal menimbulkan respons detak jantung yang lebih tinggi setelah 5 hingga 23 minggu tidak aktif.

Untuk mencegah efek *detraining* maka ditetapkan kebijakan berupa:

- mempertahankan derajat kebugaran dalam cabang olahraga masing-masing
- memelihara derajat kesehatan dan sistem kekebalan tubuh serta gaya hidup sehat sebagai atlet
- menggalang kebersamaan dan dukungan lingkungan sosial
- memelihara ‘feeling’ teknis (koordinasi saraf dan otot) secara individual
- mempertahankan motivasi dan regulasi diri
- Mencegah efek *detraining* terkait prinsip reversibilitas

Latihan didesain terdiri atas tiga cara, pertama, cabang olahraga individual seperti panahan berlatih di rumah masing-masing. Kedua, cabang olahraga yang bersifat kelompok seperti dayung, dikarantina pada suatu tempat yang memungkinkan mereka berlatih secara maksimal. Ketiga, latihan bersama dan atlet yang tinggal di rumah masing-masing, seperti renang, keperluan atlet didukung oleh pengurus. Ada sejumlah argumen untuk meyakinkan pimpinan daerah agar tidak menghentikan latihan. Menghindari efek *detraining* yang secara nyata mempengaruhi performa atlet perlu dilakukan. Atlet dan pelatih adalah aset daerah yang tak tergantikan dan justru harus diurus dengan baik agar tidak terjangkit Covid-19. Kedua poin tersebut juga meyakinkan pihak inspektorat untuk tetap memberikan dukungan anggaran bagi persiapan dan pembelian alat, seperti anak panah yang tinggi tingkat kerusakannya karena atlet menembak target face dari jarak dekat.

Argumen tersebut didukung dengan data, seperti 30 persen atlet adalah mahasiswa dan pelajar yang sebagian orang tuanya terdampak kesulitan pekerjaan sehingga atlet harus diurus dengan baik untuk dapat mempertahankan juara umum. Target itu harus dicapai karena yang dikejar adalah *outcome* jangka panjang yang menjadi bagian tujuan pembangunan daerah dan melekat sebagai prestasi kepemimpinan gubernur dan jajaran pejabat pemda termasuk bupati dan walikota se Jawa Barat.

Olahraga bagi Jawa Barat merupakan sumber daya. Keunggulan komparatif berupa penduduk terbanyak 48 juta harus diubah menjadi keunggulan kompetitif guna meraih *outcomes* yang menguntungkan daerah yaitu berupa:

- Prestasi dalam PON 2021 merupakan sebuah *branding* bagi daerah
- Jalan menuju keunggulan melalui investasi modal manusia untuk menciptakan keunggulan yang bermuara pada kemajuan ekonomi
- Atlet berprestasi merupakan model bagi anak-anak muda yang berdampak pada peningkatan partisipasi, termotivasi juga oleh prospek secara finansial yang diperoleh dari perhatian besar gubernur terkait penyediaan bonus yang cukup besar, partisipasi besar merupakan elemen pasar yang besar bagi pengembangan industri olahraga
- Mengejar parameter prestasi Olimpiade; dan
- Peningkatan kapabilitas manajemen cabang olahraga termasuk KONI sendiri.

Kelima poin tersebut cukup meyakinkan pimpinan daerah, apalagi terpantau dengan baik daerah potensial sebagai pesaing tidak bisa berlatih dengan baik. Jadi Jawa Barat mampu melakukan sesuatu yang daerah lain tak dapat melakukannya. Dari perspektif perencanaan juga diperkenalkan aplikasi teori dinamis yang kompleks, berupa inovasi yang selanjutnya dijabarkan oleh pelatih. Periodisasi standar tidak dapat diterapkan seperti musim kompetisi karena sukar mencari mitra tanding termasuk lawatan ke luar negeri. Maka yang ditekankan adalah siklus mikro mingguan dan harian. Pelatih paham benar kunci keberhasilan di Papua adalah *fitness* yang prima. Untuk mengukur Vo₂max digunakan “beep test”, mudah melaksanakannya dan mudah menafsirkannya sehingga atlet tahu posisinya. Latihan kondisi fisik menggunakan alat apa saja yang ada di lingkungan seperti tangga stadion, dan sebagainya. Kreativitas menjadi kunci. Pembinaan aspek mental membekali keterampilan psikologis seperti relaksasi, visualisasi dan manajemen arousal, berulang dipesan *briefing* jangan panjang-panjang, singkat pada poin yang dipahami atlet.

Aspek lain yang perlu juga diperhatikan adalah strategi “proxy” budaya. Maksudnya budaya Papua harus dipahami karena menjadi dasar perilaku sehari-hari dan di arena. Pada awal tahun 2021, tim kecil berangkat ke Jayapura. Tujuannya meraih simpati masyarakat Papua dan pejabat setempat termasuk kepala suku karena dipahami struktur sosial orang Papua rumit sekali. Paguyuban Pasundan didekati untuk membantu memasak makanan. Kontingen Jawa Barat selama di PON menyediakan makanan sendiri termasuk pengadaan air. Terkait ancaman dehidrasi bila kurang minum secara kebetulan Kepala PDAM Papua adalah orang Jawa Barat. Jadi ketersediaan air minum melebihi kebutuhan. Perencanaan kontingen sangat detail termasuk efek iklim panas. Kontingen tinggal di barak tentara. Lobi dilakukan melalui pensiunan AD yang pernah bertugas dan mengenal dengan baik adat istiadat orang Papua. Prinsip saling menghargai sangat ditekankan. Ungkapan bersahabat disusun seperti Papua

bersama Jawa Barat berjaya untuk Nusantara. Efek psikologisnya kuat sekali. Penonton selalu berpihak ke atlet Jawa Barat seperti dalam poloair dan bolavoli yang menghibur apalagi tim puteri yang cantik-cantik.

Jawa Barat sukses karena prestasi cabang olahraga individual seperti atletik, taekwondo, dan dayung. Program latihan dayung benar-benar berbasis pengetahuan, volume terukur dengan baik, 3 kali sehari, masak sendiri di Cipule. Hasilnya memang teruji, meraih 20 medali emas. Taekwondo menang dari aspek teknik dan taktik terlatih baik oleh pelatih dari Korea. Hampir semua cabang olahraga beregu gagal meraih medali emas. Mudah dipahami karena kekosongan program uji coba dalam persiapan yang penting untuk memperkaya keterampilan taktis. Dengan bekal pengetahuan praktis Jawa Barat mampu unggul dari provinsi lainnya. Apalagi jika didukung laboratorium *sport science* yang dengan akurat menyediakan data kemampuan biologis atlet guna menyusun program latihan tepat sasaran, termasuk pencegahancedera.

Bab 2 SDI: Capaian, Tantangan, dan Harapan

Olahraga yang telah menjadi bagian penting dari kebijakan publik perlu mendapatkan pengaturan, termasuk dalam menentukan ukuran keberhasilannya. Jika sesuatu tidak dapat diukur, maka sesuatu tersebut tidak dapat diperbaiki. Dalam UU No. 3 Tahun 2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11 Tahun 2022, tujuan olahraga bersifat majemuk yang mencakup kesehatan fisik dan psikis, karakter etos dan moral, ekonomi, sosial, budaya, dan martabat bangsa. Tujuan tersebut perlu diukur guna memastikan sudah sampai di mana upaya kita mewujudkan tujuan tersebut. SDI merupakan instrumen untuk mengukur sekaligus instrumen kebijakan untuk mendinamisasi dan mengoptimisasi pembangunan olahraga.

Capaian SDI Hingga Saat Ini

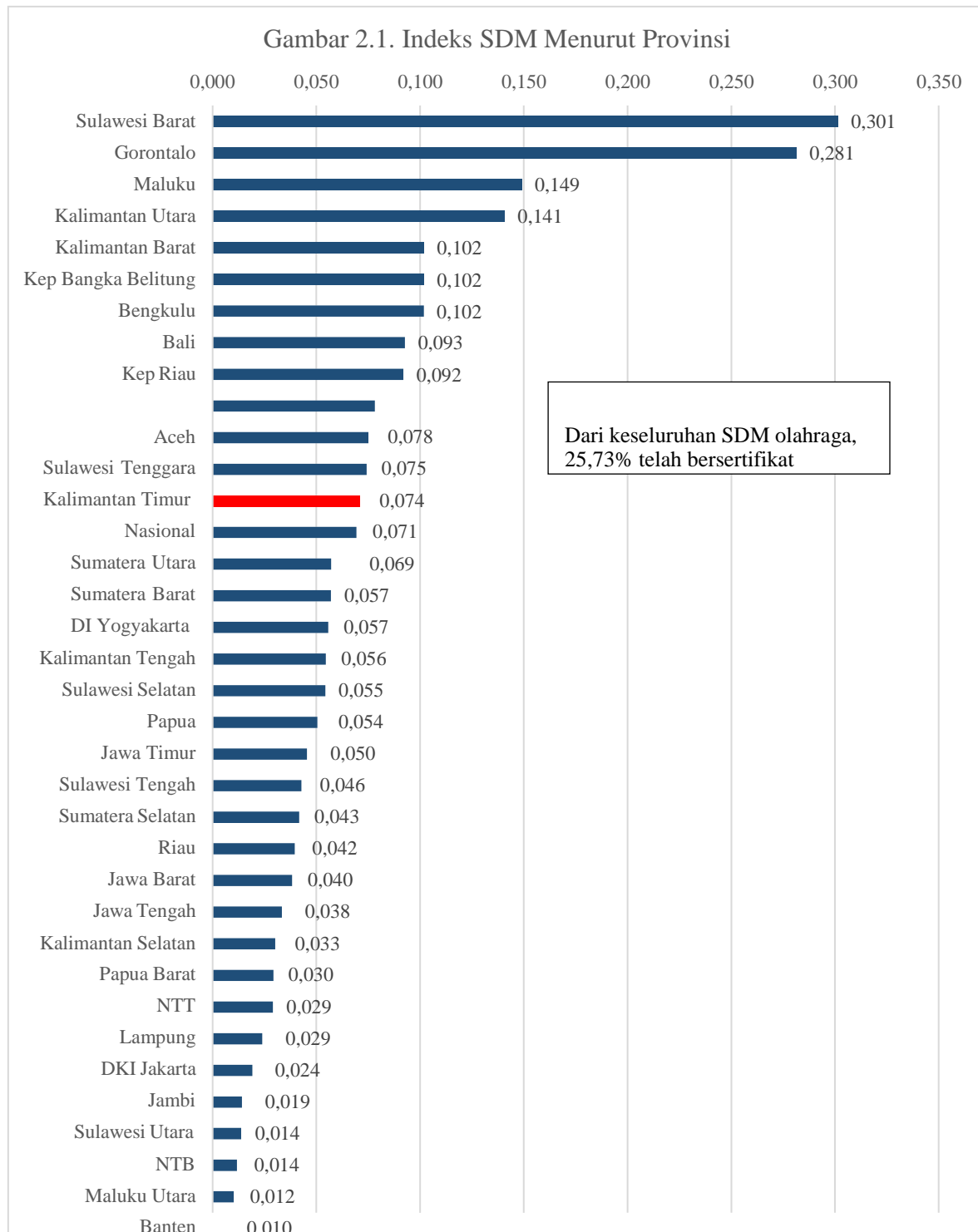
Sebagai sebuah ukuran pembangunan olahraga secara nasional, SDI sudah dilakukan sejak tahun 2004 dengan empat dimensi, yakni SDM, ruang terbuka, partisipasi, dan kebugaran. Seiring perkembangan dan tuntutan perubahan, pada tahun 2021 disempurnakan menjadi sembilan dimensi dengan menambahkan dimensi literasi fisik, kesehatan, perkembangan personal, ekonomi, dan performa. Laporan SDI 2022 didasarkan pada pengumpulan data di 34 Provinsi yang dilaksanakan pada bulan Juni hingga Agustus 2022. Pengumpulan data melibatkan 190 Kabupaten/Kota, 534 Desa/Kelurahan, dan 16.020 responden. Usia responden berkisar 10-60 tahun, 73% dari total penduduk Indonesia, atau sekitar 197,246 juta jiwa, dengan proporsi usia 10-19 sebanyak 21,3%, usia 20-44 sebanyak 52,7%, dan usia 45-60 sebanyak 26%. Dari keseluruhan responden tersebut, 19,8% berpendidikan SD/setara, 20,5% berpendidikan SMP/setara, 48,7% berpendidikan SMA/setara, dan 11% berpendidikan tinggi. Data responden digunakan untuk mengungkap dimensi partisipasi, literasi fisik, kebugaran, kesehatan, perkembangan personal, dan ekonomi. Sementara itu, untuk data ruang terbuka dan sumber daya manusia menggunakan angka pembandingan penduduk usia 5 tahun ke atas. Adapun data performa murni menggunakan perolehan medali dalam kejuaraan nasional.

Berikut dilaporkan capaian SDI pada tahun 2022 dengan membandingkannya dengan data tahun 2021.

1. Sumber Daya Manusia

Indikator SDM diukur berdasarkan rasio antara jumlah ketenagaan olahraga (guru, pelatih, instruktur, dan relawan) dengan jumlah penduduk berusia 5 tahun ke atas pada suatu daerah. Setelah dilakukan perhitungan, maka diperoleh data sebagaimana tampak pada Gambar 2.1. Dari data tersebut nampak bahwa secara nasional, indeks SDM sebesar 0,071 dan masuk

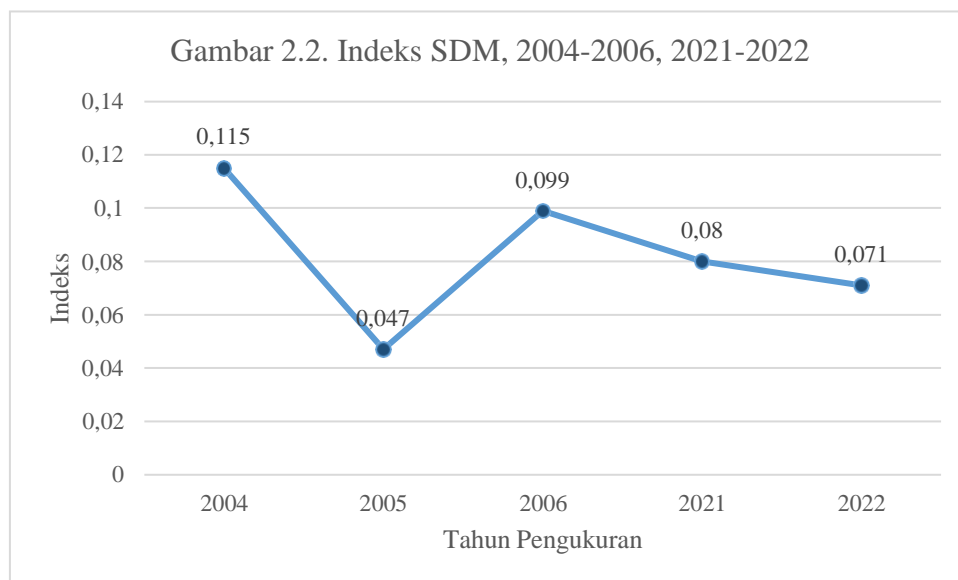
kategori rendah. Terdapat 3 provinsi yang memiliki indeks SDM tertinggi yakni Sulawesi Barat, Gorontalo, Maluku dan ada 3 provinsi yang memiliki indeks terendah yakni Banten, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Barat.



Dibanding data tahun 2021, indeks SDM dari sejumlah provinsi tampak bervariasi dengan rentang untuk tahun 2021, terendah 0,017 (Banten) dan tertinggi 0,191 (Kep. Riau). Adapun

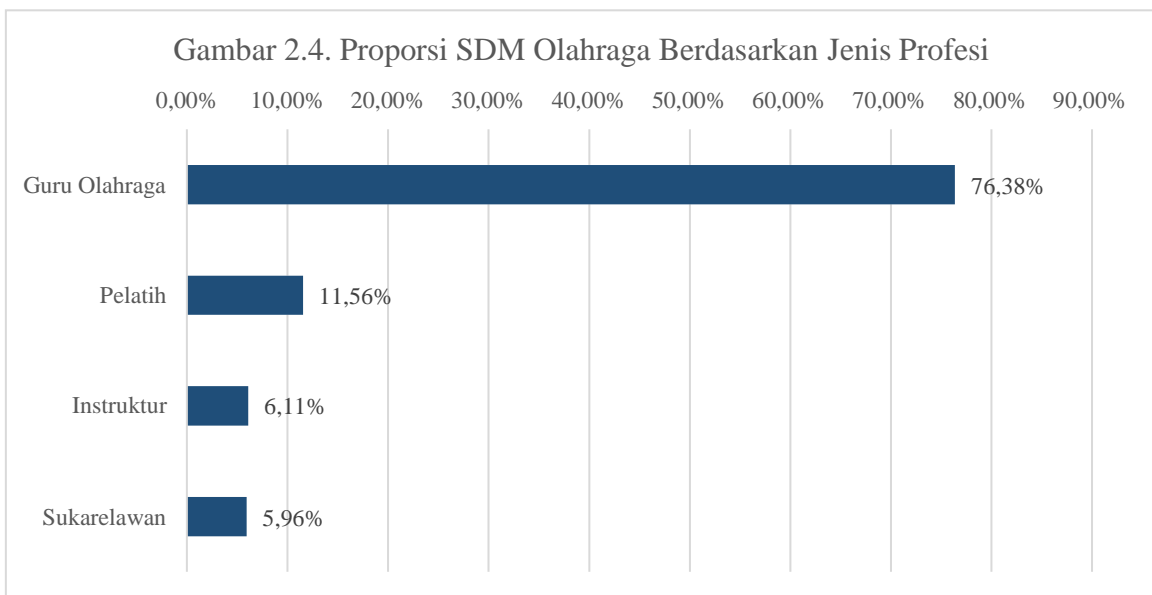
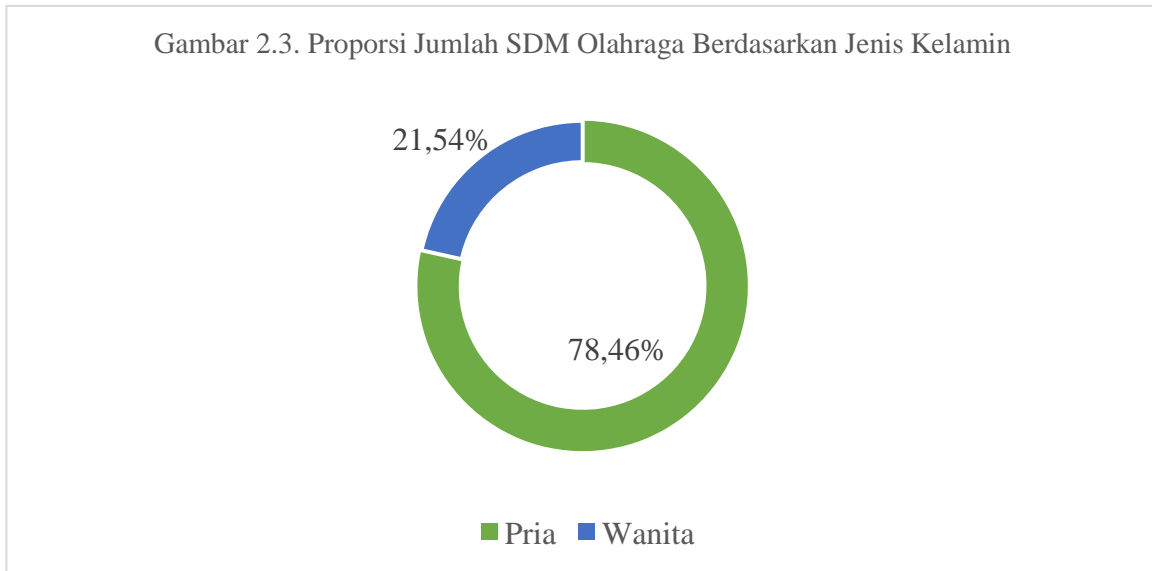
rentang untuk tahun 2022, terendah 0,010 (Banten) dan tertinggi 0,301 (Sulawesi Barat). Sebagian besar provinsi terjadi penurunan skor, kecuali delapan provinsi, yakni Gorontalo, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Lampung, Riau, Sulawesi Barat, dan Sumatera Utara. Data indeks SDM seluruh provinsi masih berada dalam kategori rendah. Kondisi ini cukup memprihatinkan dan hal ini merupakan tantangan ke depan yang harus diatasi apabila pembangunan olahraga nasional dapat dilaksanakan secara efektif, mengingat faktor SDM merupakan faktor kunci keberhasilan.

Indeks rerata SDM secara nasional tampak terjadi penurunan dari 0,080 pada tahun 2021 menjadi 0,071 pada tahun 2022. Penurunan tersebut bisa jadi wajar terjadi, kemungkinan besar dikarenakan belum adanya program intervensi untuk meningkatkan SDM secara signifikan di setiap daerah, sementara angka pertumbuhan penduduk setiap tahun diperkirakan sebesar 1,25% (BPS, 2021). Jika dibandingkan data SDI yang ada sebelumnya, 2004-2006, indeks SDM secara konsisten dalam kategori rendah, di bawah 0,499. Ini berarti bahwa intervensi kebijakan dan program yang diarahkan untuk pengembangan SDM atau tenaga keolahragaan sebagaimana diamanatkan UU SKN tahun 2005 yang diganti dengan UU Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan belum dilakukan secara sistematis dan masif, sehingga belum berdampak secara berarti dalam pengembangan SDM.



Dilihat dari jenis kelamin, ketenagaan olahraga didominasi oleh pria, yakni sebesar 78,46% dan hanya 21,54% yang berjenis kelamin wanita. Kondisi tersebut masih sama dengan pengukuran SDI pada tahun 2021. Kondisi tersebut tentu tidak ideal, mengingat proporsi laki-

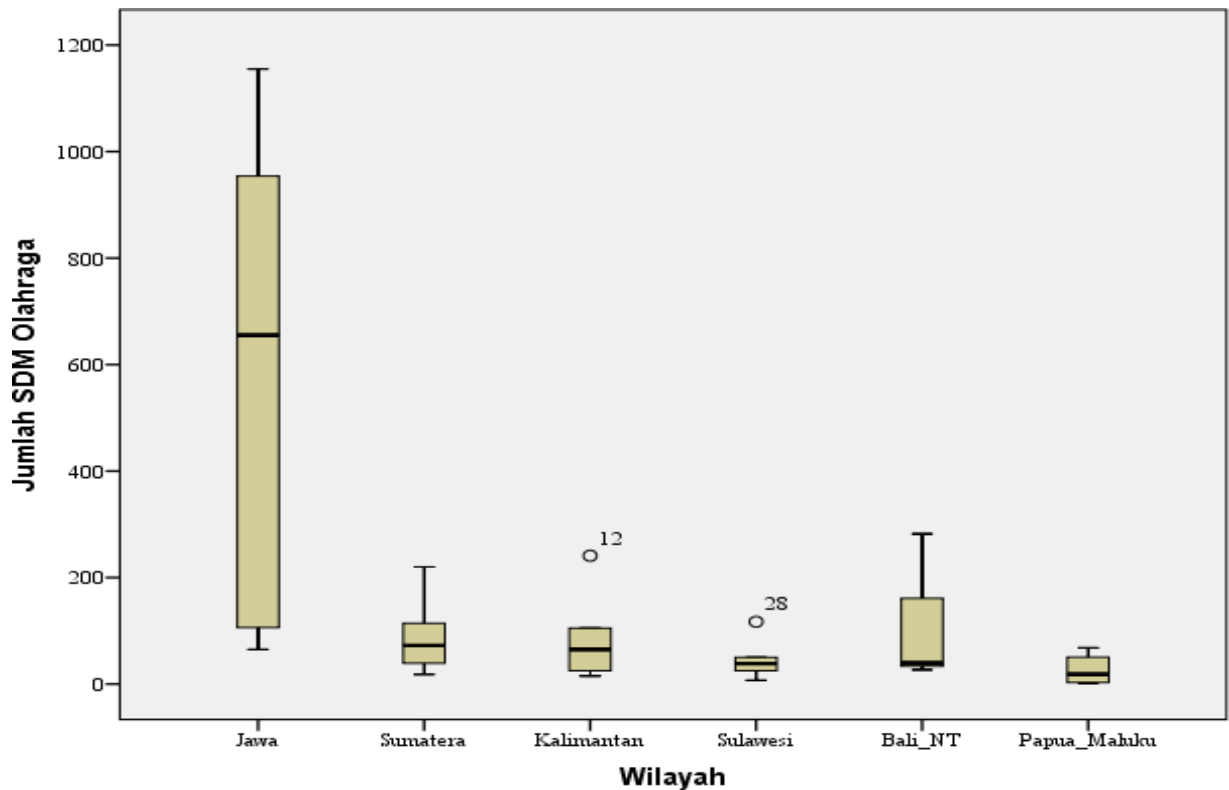
laki dan perempuan dalam struktur penduduk Indonesia relatif berimbang, 50:50 (BPS, 2021). Karena itu, perluasan akses dan penguatan partisipasi pada ketenagaan olahraga perempuan menjadi penting untuk dilakukan. Bukan semata karena alasan pelayanan, di mana perempuan umumnya lebih menyukai dilayani sesama perempuan, atau sebaliknya, tetapi lebih karena alasan kesetaraan dan pemberdayaan.



Dilihat dari komposisi jenis profesi, sebagian besar (76,38%) ketenagaan olahraga merupakan guru olahraga, baru diikuti pelatih sebesar 11,56%, instruktur sebesar 6,11%, dan sukarelawan sebesar 5,96%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa peran guru olahraga begitu sentral dalam pembangunan keolahragaan di Indonesia. Acapkali peran mereka tidak hanya

terbatas pada proses pembelajaran pendidikan jasmani di sekolah, tetapi juga menjadi pelatih atau instruktur pada cabang olahraga tertentu.

Gambar 2.5. Distribusi SDM Olahraga Berdasarkan Wilayah

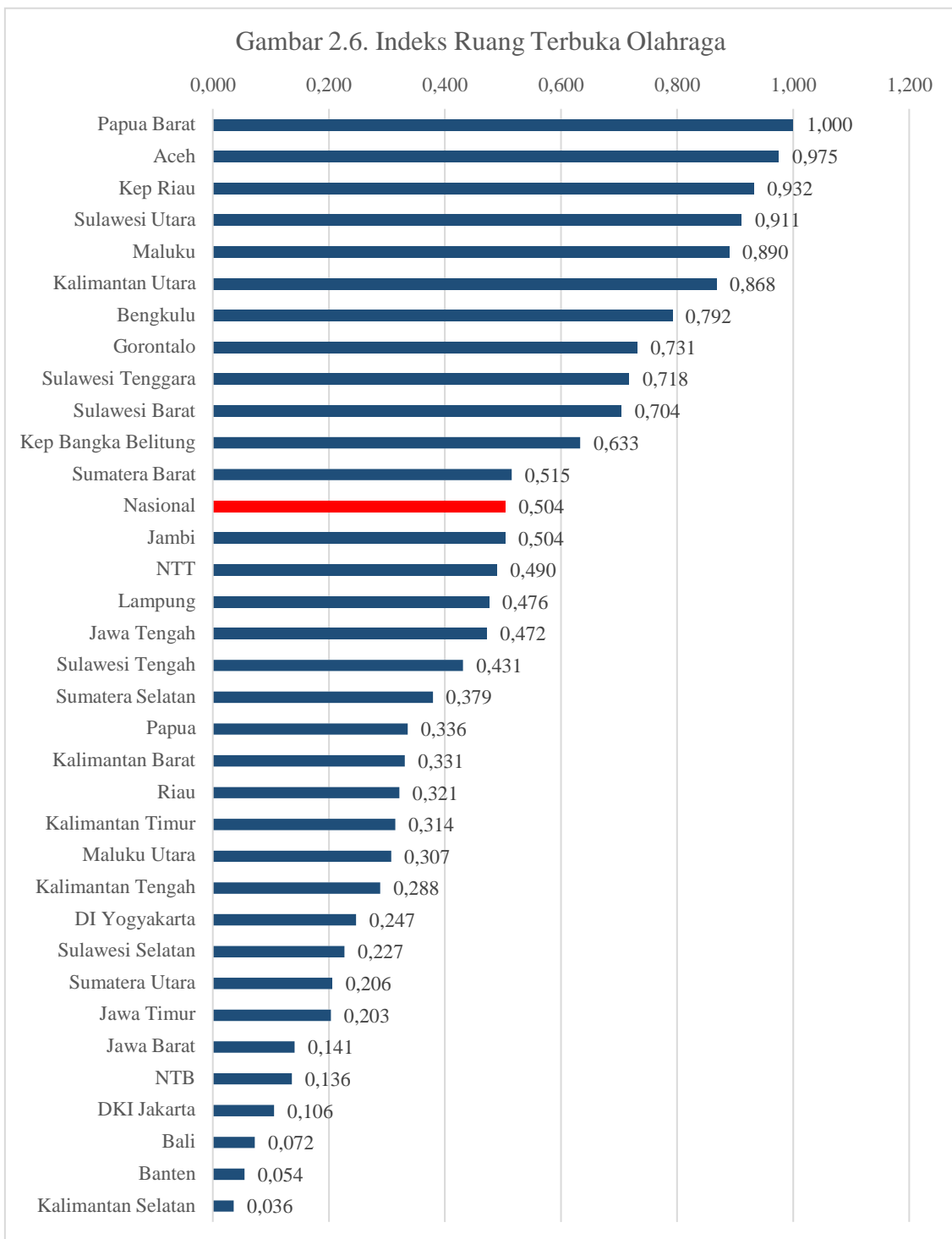


Dilihat dari distribusi SDM keolahragaan, wilayah Jawa begitu dominan dibandingkan dengan wilayah lain seperti Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi. Meski bukan merupakan variabel tunggal, namun keberadaan SDM keolahragaan dapat menjelaskan mengapa provinsi di Jawa seperti Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta selalu mendominasi dalam perolehan medali pada suatu kejuaraan seperti PON. Kondisi yang demikian sekaligus menunjukkan kesenjangan yang luar biasa antara wilayah Jawa dan di luar Jawa terkait pembangunan olahraga.

2. Ruang Terbuka

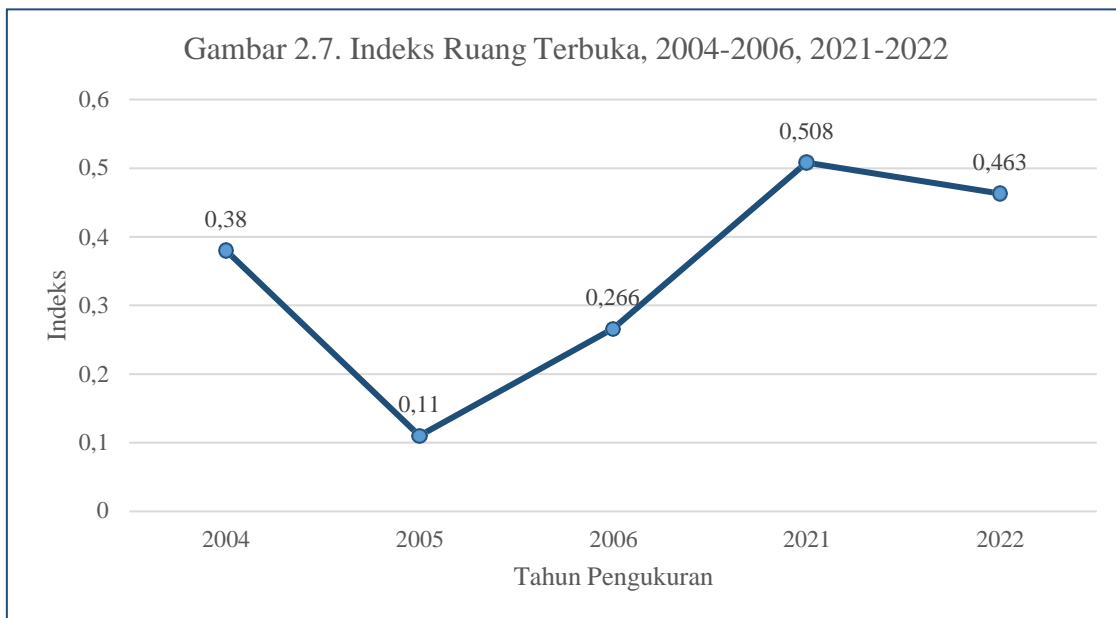
Ruang terbuka olahraga adalah suatu tempat yang digunakan untuk melakukan aktivitas olahraga, baik *indoor* maupun *outdoor*. Ruang terbuka merupakan tempat yang menjadi kebutuhan bagi siapa pun untuk melakukan aktivitas olahraga. Ruang terbuka yang memadai menjadi syarat terbentuknya partisipasi dalam aktivitas olahraga. Indikator ruang terbuka di

suatu wilayah adalah rasio antara ketersediaan ruang terbuka dengan jumlah penduduk usia 5 tahun ke atas di wilayah tersebut.



Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh indeks ruang terbuka olahraga secara nasional sebesar 0,463. Ada tiga provinsi yang memiliki indeks tertinggi, yakni Papua Barat, Aceh, dan Kepulauan Riau. Sementara itu, indeks terendah ada pada provinsi Kalimantan Selatan, Banten,

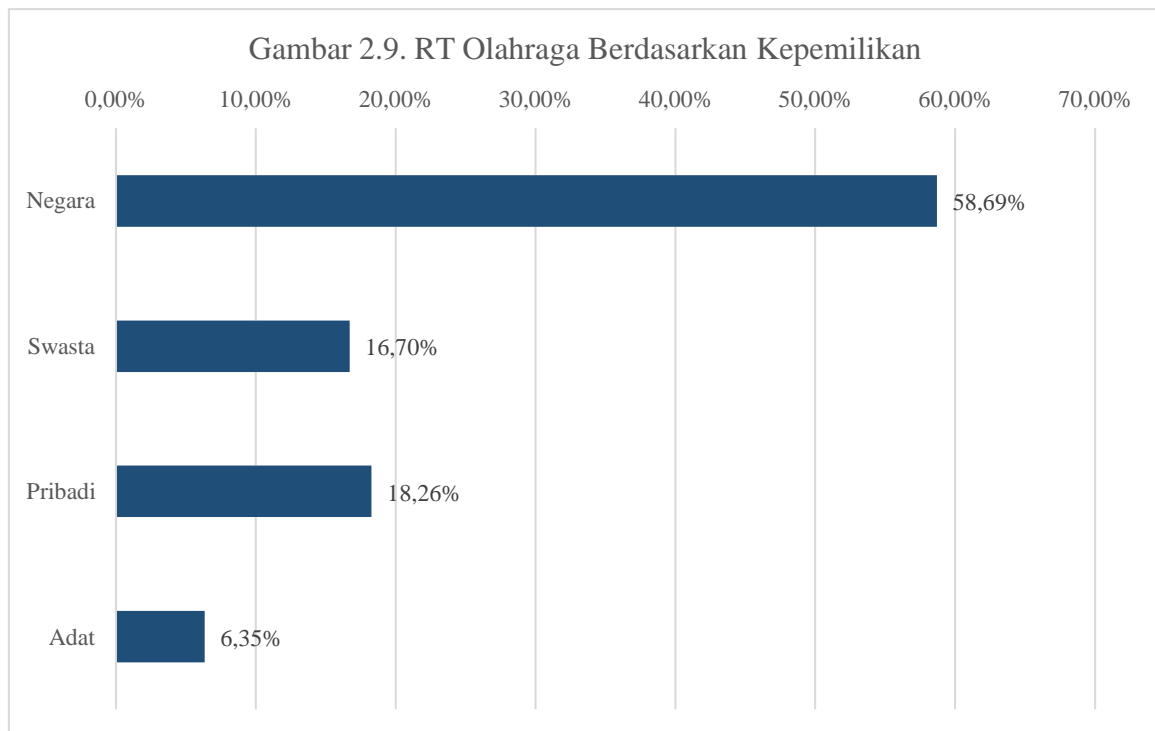
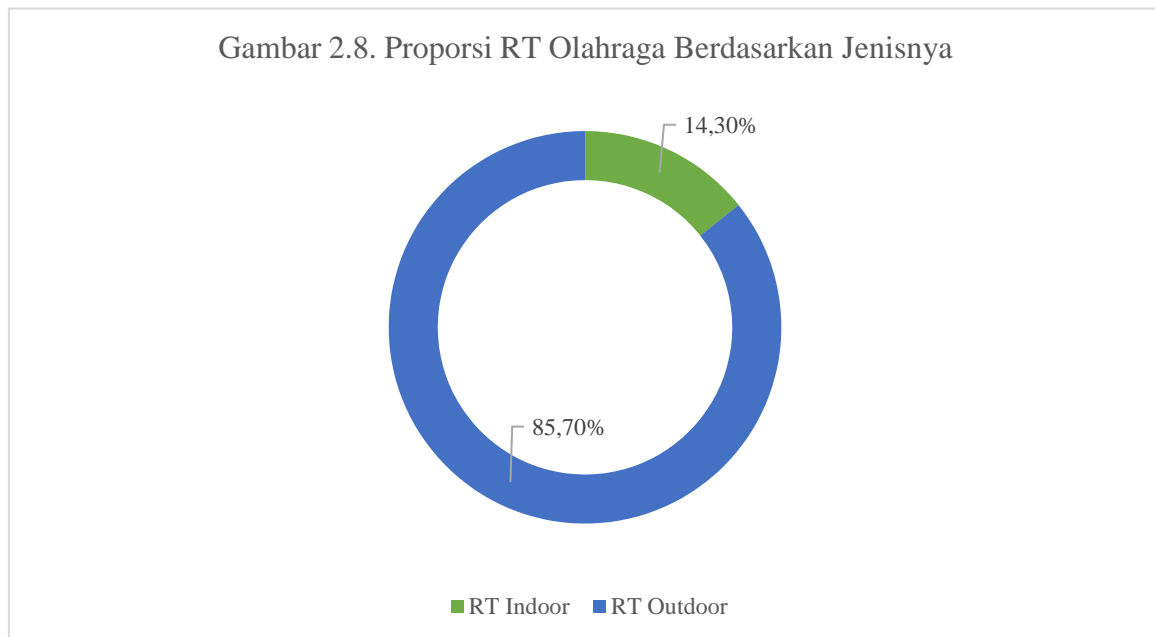
dan Bali. Jika dilihat berdasarkan rasio jumlah penduduk dan ketersediaan ruang terbuka olahraga, maka diperoleh angka sebesar 1,76m². Terdapat perubahan hasil pengukuran dibandingkan dengan tahun 2021 meski tidak signifikan. Pada tahun 2021, indeks ruang terbuka olahraga sebesar 0,508 dan rasio jumlah penduduk dengan ruang terbuka sebesar 1,78m².



Jika dibandingkan data SDI yang ada sebelumnya, indeks ruang terbuka pada tahun 2004 sebesar 0,380, tahun 2005 sebesar 0,110, dan tahun 2006 sebesar 0,266, ketiganya secara konsisten dalam kategori rendah. Ini berarti bahwa intervensi kebijakan dan program yang diarahkan untuk pengembangan ruang terbuka belum secara sistematis, sehingga belum berdampak secara berarti dalam pengembangan prasarana dan sarana sebagai ruang terbuka publik melakukan aktivitas olahraga. Kondisi ini tidak bisa dipertahankan terus dan hal ini sekaligus menjadi tantangan ke depan agar pengembangan ruang terbuka publik sebagai wahana dan syarat bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan olahraga. Sebagaimana diketahui bahwa kebutuhan gerak melalui aktivitas fisik dan olahraga itu merupakan hak azasi setiap orang.

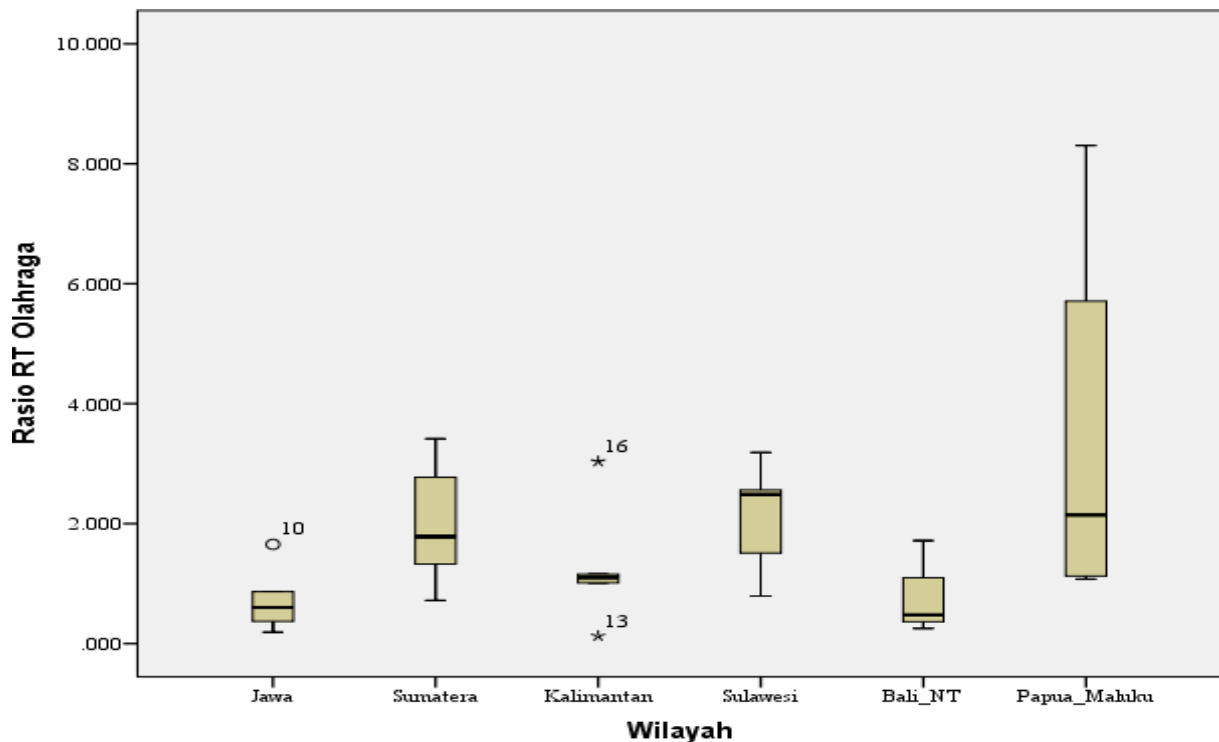
Ditinjau dari proporsi ketersediaan ruang terbuka olahraga, 85,70% dalam bentuk *outdoor* dan 14,30% dalam bentuk *indoor*. Angka tersebut juga tidak berbeda signifikan jika dibandingkan dengan hasil pengukuran tahun sebelumnya, yakni 86% dan 14%. Sementara itu, untuk kepemilikan ruang terbuka, 58,69% milik negara, 16,70% milik swasta, 18,26% milik pribadi, dan 6,35% milik adat. Meski peran negara dalam penyediaan ruang terbuka masih

relatif dominan, tetapi peran swasta/masyarakat dan perorangan tidak bisa diabaikan. Peran perorangan sebesar 18,26% dalam penyediaan ruang terbuka bukanlah kecil. Dalam sepuluh tahun terakhir, banyak anggota masyarakat membangun gedung untuk kepentingan olahraga seperti bulutangkis dan futsal dengan pendekatan bisnis. Faktanya, kebutuhan masyarakat untuk melakukan aktivitas fisik, terutama untuk alasan kesehatan, kebersamaan, dan *well-being* semakin tinggi.



Dilihat dari aspek kewilayahan, ruang terbuka olahraga masih cukup leluasa di wilayah luar Jawa, terutama Papua-Maluku, Sumatera, dan Sulawesi. Bahkan di beberapa tempat indeksinya melebihi standar 3,5m². Ini mengingat tingkat kepadatan penduduk di wilayah tersebut rendah, sementara ketersediaan ruang terbuka cukup luas.

Gambar 2.10. Rasio RT Olahraga Berdasarkan Wilayah di Indonesia

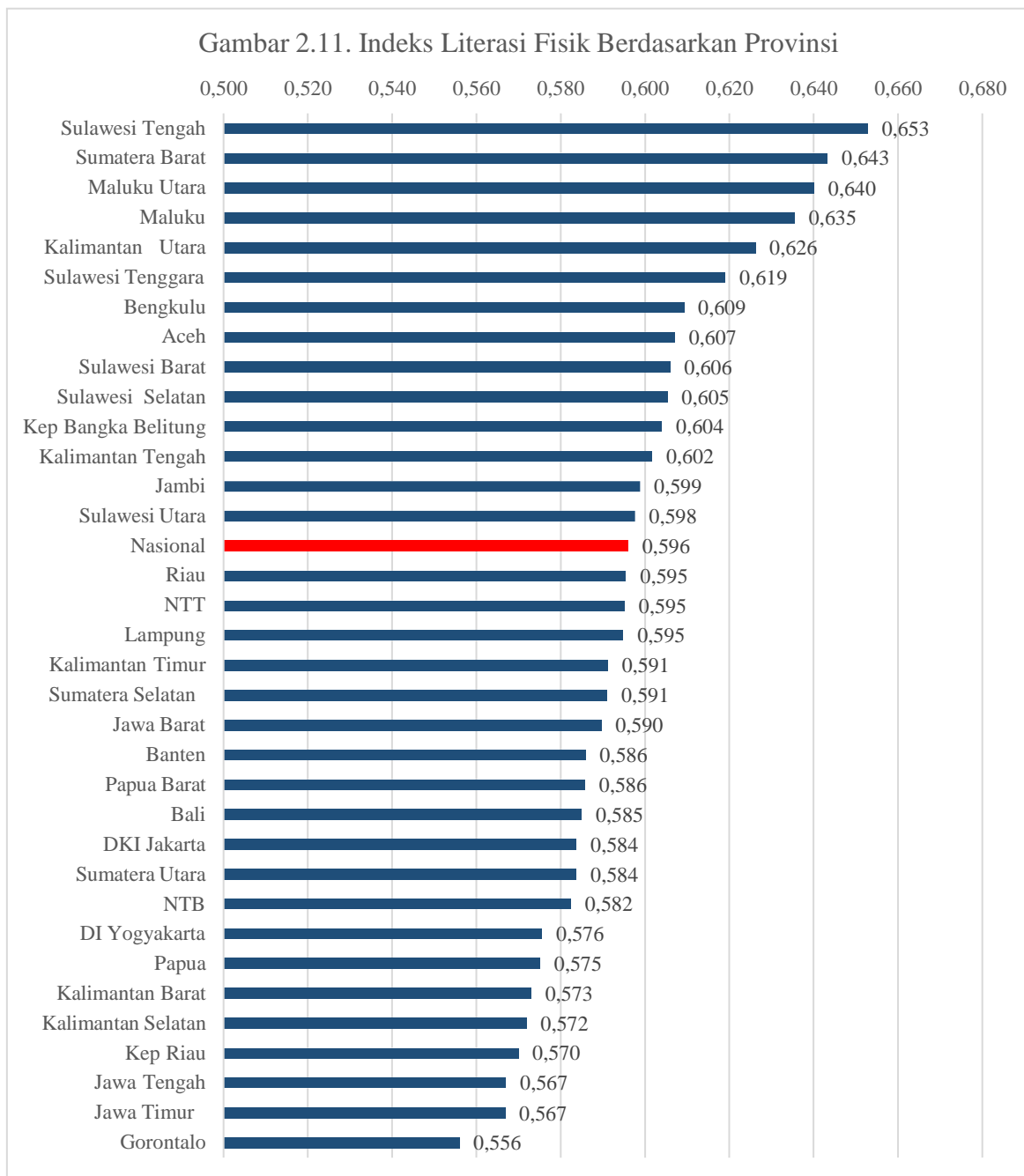


3. Literasi Fisik

Literasi fisik adalah serangkaian pengetahuan, keterampilan, keterlibatan, dan tanggung jawab seseorang dalam melakukan aktivitas fisik untuk hidup yang berkualitas sepanjang hayat (Edwards, Bryant, Keegan, Morgan, & Jones, 2017; Whitehead, 2013). Indikator utama dari literasi fisik adalah pengetahuan, sikap, dan kompetensi fisik dari individu. Individu yang memiliki literasi fisik yang bagus akan melibatkan diri dalam aktivitas fisik yang intens dan berkelanjutan. Berdasarkan atas indikator tersebut tampak bahwa data hasil pengukuran indeks literasi fisik di 34 provinsi antara tahun 2022 relatif tidak jauh berbeda dengan tahun 2021.

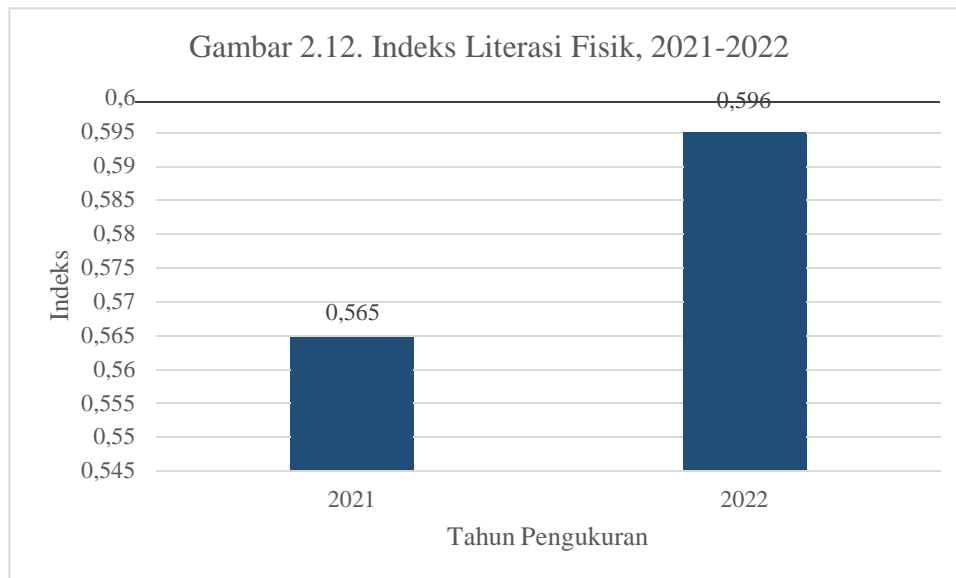
Dari hasil analisis diperoleh bahwa rata-rata indeks literasi fisik pada tahun 2022 adalah 0,596, sementara data dari laporan tahun 2021 adalah 0,565. Data ini menunjukkan bahwa terjadi peningkatan literasi fisik di dalam masyarakat. Ada tiga provinsi yang memiliki indeks

literasi fisik tertinggi, yakni Sulawesi Tengah, Sumatera Barat, dan Maluku Utara. Sementara itu, provinsi dengan indeks terendah adalah Gorontalo, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.



Pada tataran global termasuk di Indonesia hingga dewasa ini mengalami gejala kekurangan gerak. Kurangnya pemahaman, kesadaran terhadap pentingnya manfaat gerak dan kemauan untuk aktif bergerak serta dipicu dengan kemajuan teknologi yang serba otomatisasi membuat manusia seolah dunia berhenti bergerak. Di sebagian besar negara dan komunitas, terutama warga di kota-kota besar kondisinya semakin memprihatinkan karena tidak memiliki kesempatan yang cukup untuk mengakses program dan lingkungan yang aman, terjangkau dan

sesuai untuk melakukan aktivitas fisik. Pola hidup sehat dan aktif cenderung bergeser ke pola hidup sedenter. Akibatnya, banyaknya individu yang kurang memiliki keterampilan, kurang percaya diri, kemauan serta kurang memiliki pengetahuan dan pemahaman sehingga enggan melakukan aktivitas fisik.

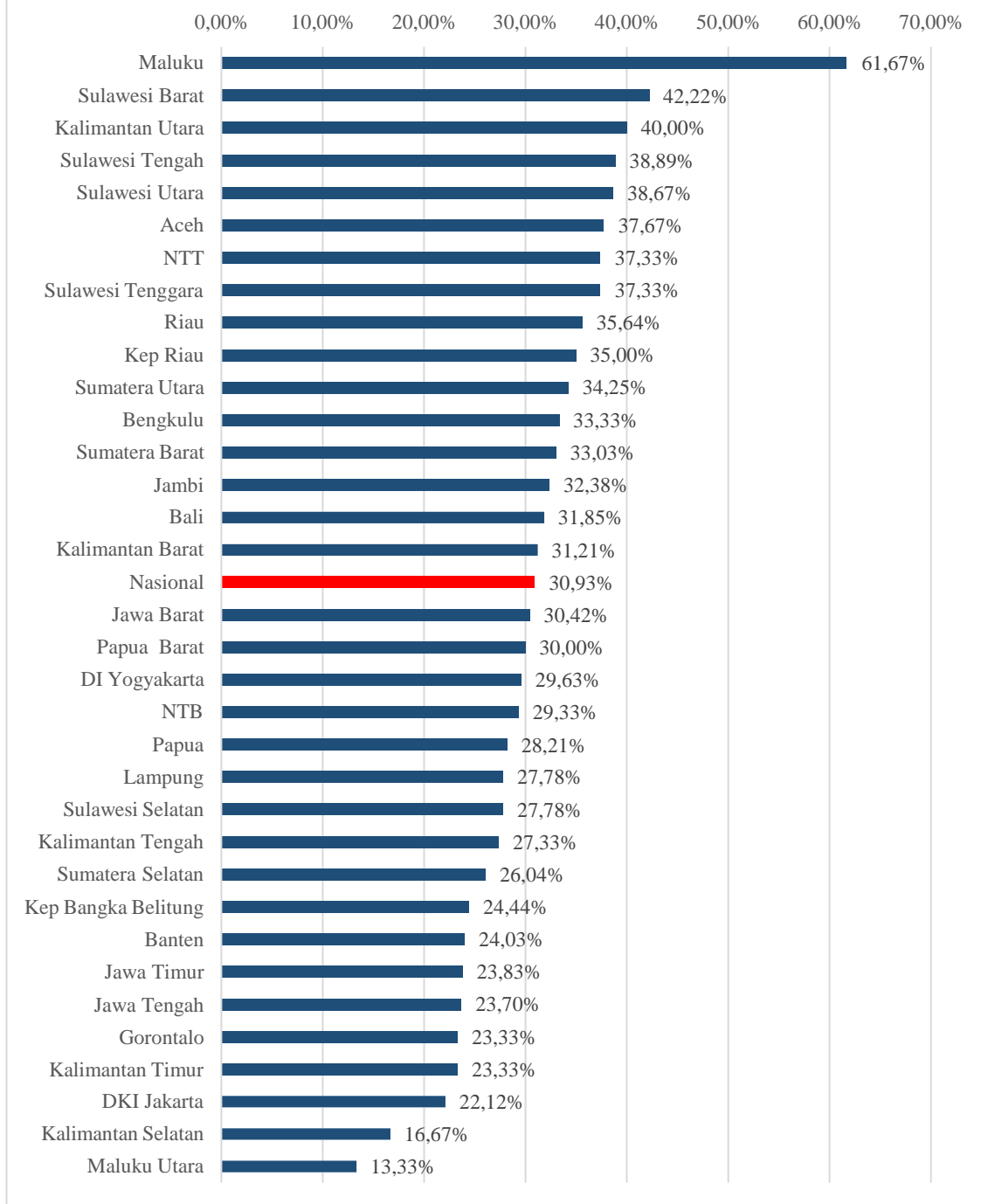


Dalam konsep perilaku, literasi fisik dapat dimaknai sebagai disposisi untuk memanfaatkan kemampuan manusia yang diwujudkan dengan adanya motivasi, keyakinan, kompetensi fisik, pengetahuan, dan pemahaman terhadap nilai serta bertanggung jawab untuk menjaga kegiatan/aktivitas fisik yang terarah sesuai tujuan selama hidup. Seseorang yang memiliki literasi fisik yang tinggi akan memiliki kecenderungan untuk melakukan aktivitas fisik dalam berbagai lingkungan secara berkelanjutan, mampu melakukan tugas gerak dengan kualitas baik, cenderung sukses untuk berprestasi dalam olahraga, tidak mudah mengalami cedera olahraga, dapat berinteraksi secara sosial dengan mudah, dan memiliki tingkat kualitas hidup yang lebih baik (Durdan-Myers, Green, & Whitehead, 2018; Edwards et al., 2017).

4. Partisipasi

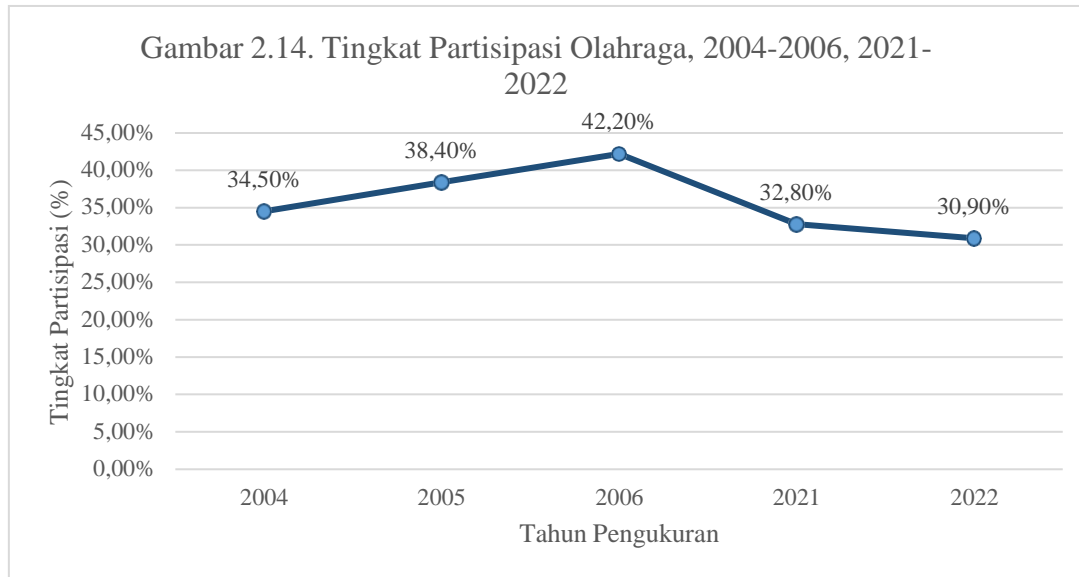
Partisipasi adalah keterlibatan individu dalam olahraga/aktivitas fisik dalam satu minggu terakhir. Indikator partisipasi aktif merujuk pada angka partisipasi anggota masyarakat berusia 10-60 tahun yang melakukan aktivitas olahraga/aktivitas fisik minimal tiga kali seminggu. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh data bahwa tingkat partisipasi olahraga sebesar 30,93%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021 yang sebesar 32,80%.

Gambar 2.13. Tingkat Partisipasi Olahraga Berdasarkan Provinsi



Secara umum berdasarkan data provinsi, tingkat partisipasi olahraga pada tahun 2021 dan tahun 2022 relatif tidak berbeda jauh dan secara merata dalam kategori rendah. Tingkat partisipasi untuk tahun 2021 memiliki rentang terendah 19% untuk DKI Jakarta dan tertinggi 47,2% untuk Sulawesi Utara. Sedangkan tahun 2022 memiliki rentang terendah 13,3% untuk Maluku Utara dan tertinggi 61,7% untuk Maluku. Kondisi rendahnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga selama ini tampak masih memprihatinkan. Selama hampir dua dekade

sejak pengukuran SDI nasional pada tahun 2004, 2005, dan 2006 hingga saat pengukuran SDI nasional tahun 2021 dan tahun 2022, tampak tidak menunjukkan adanya perkembangan yang berarti.



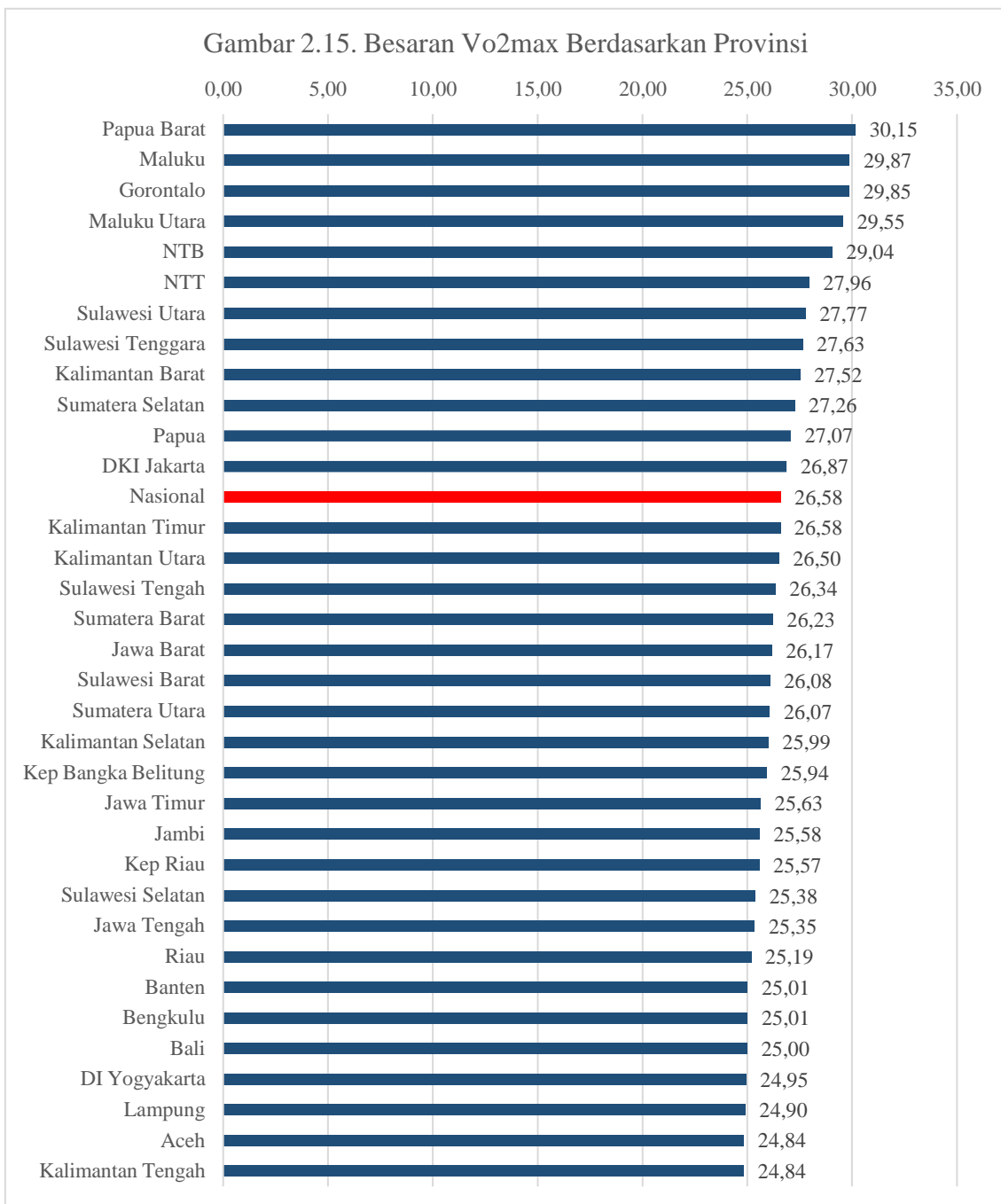
Kondisi tersebut kemungkinan terjadi karena belum adanya intervensi kebijakan dan program yang memacu pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kebijakan dan program yang dilaksanakan selama ini tampak belum memberikan dampak secara signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Kebijakan dan program terkait partisipasi yang dikenal dengan pembudayaan olahraga - memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat atau dengan slogan “Ayo Olahraga” perlu diikuti dengan kebijakan dan program terkait dengan pengembangan SDM dan pengembangan ruang terbuka publik termasuk pengadaan prasarana dan sarana olahraga dalam upaya mendukung peningkatan angka partisipasi tersebut. Isu terkait perimbangan dalam kebijakan anggaran yang dialokasikan untuk partisipasi dan prestasi menjadi hal yang menarik dan ikut mewarnai keberhasilan peningkatan partisipasi masyarakat dalam olahraga. Lebih lanjut, hal ini akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius di masa datang.

5. Kebugaran

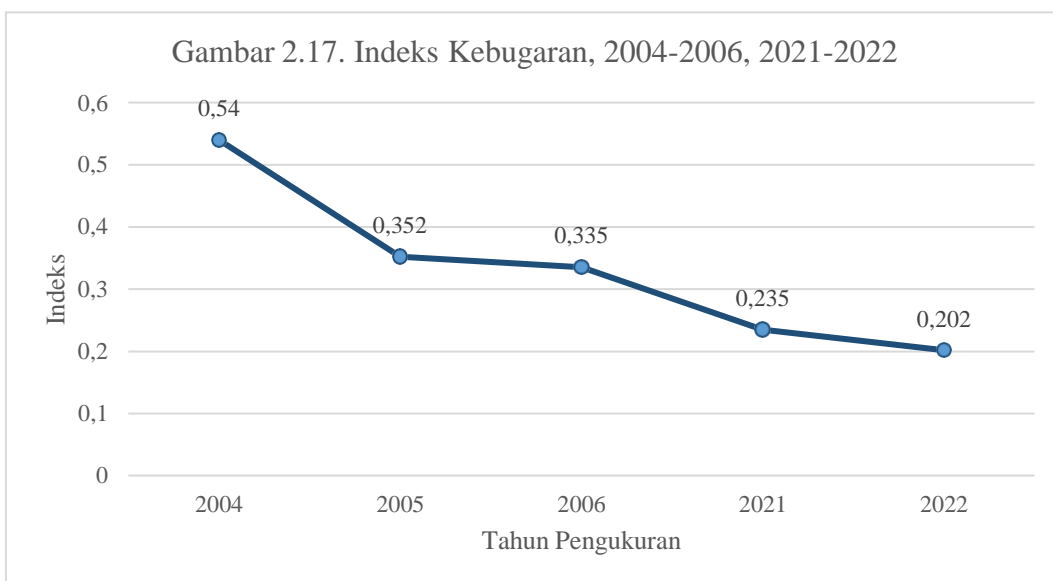
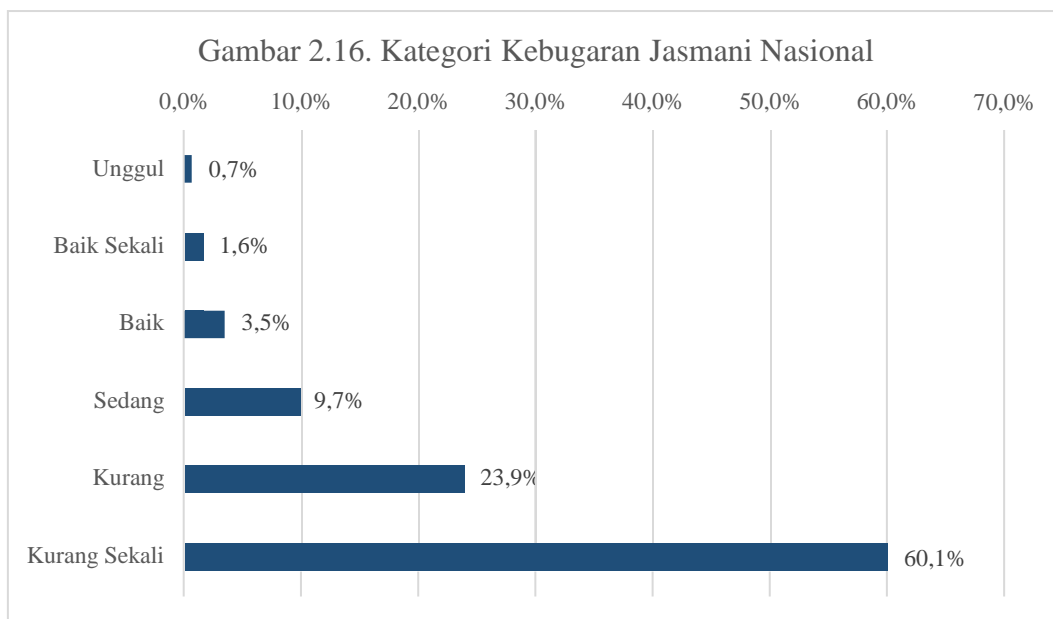
Kebugaran diartikan sebagai kesanggupan tubuh untuk melakukan aktivitas fisik tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Indikator kebugaran ditunjukkan dengan Vo_{2max} , yakni berupa derajat kapasitas konsumsi aerobik maksimum. Semakin tinggi Vo_{2max} , semakin tinggi tingkat kebugaran seseorang. Setelah dilakukan perhitungan, diperoleh data rerata

nasional sebesar 26,58 ml/kg/min, lebih tinggi dibanding capaian pada tahun 2021 yang sebesar 26,35 ml/kg/min.

Data kebugaran setiap provinsi pada tahun 2021 dan tahun 2022 relatif tidak berbeda jauh dan secara merata dalam kategori rendah. Data dimensi kebugaran untuk tahun 2021 memiliki rentang terendah 23,74 untuk Kalimantan Utara dan tertinggi sebesar 34,17 untuk Maluku Utara. Sedangkan tahun 2022 memiliki rentang terendah 24,84 untuk Kalimantan Tengah dan tertinggi sebesar 30,15 untuk Papua Barat.

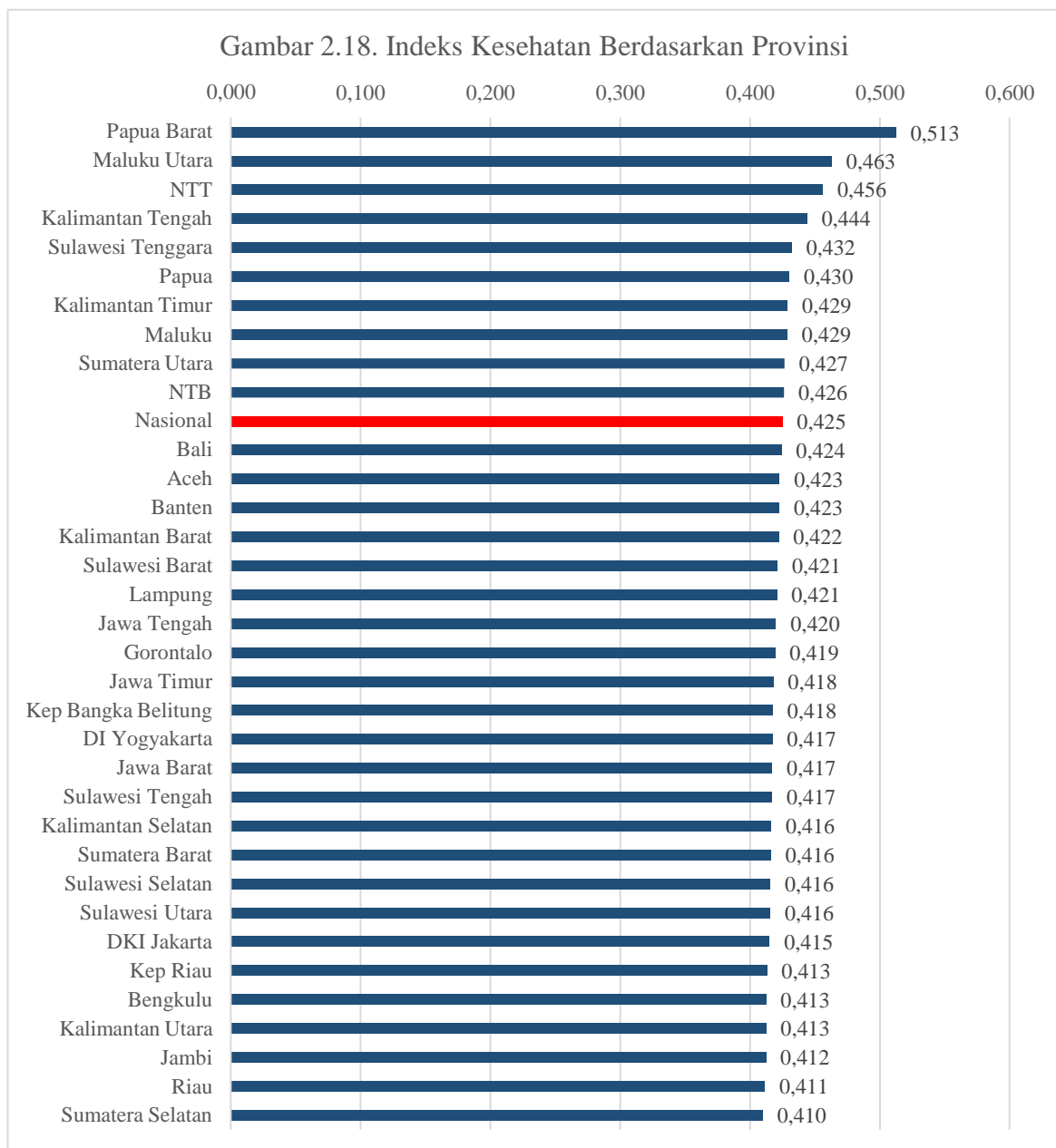


Kondisi kebugaran masyarakat selama ini masih memprihatinkan. Selama hampir dua dekade sejak pengukuran SDI nasional pada tahun 2004, 2005, dan 2006 dengan indeks kebugaran jasmani secara berurutan sebesar 0,540, 0,352, dan 0,355 hingga saat pengukuran SDI nasional tahun 2021 sebesar 0,235 dan 2022 sebesar 0,194 tampak tidak menunjukkan adanya perkembangan yang berarti. Kondisi ini kemungkinan terjadi karena belum adanya intervensi kebijakan dan program yang terkait dengan pengembangan SDM atau tenaga keolahragaan—istilah dalam UU Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan. Hal ini, tentunya akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius di masa datang.

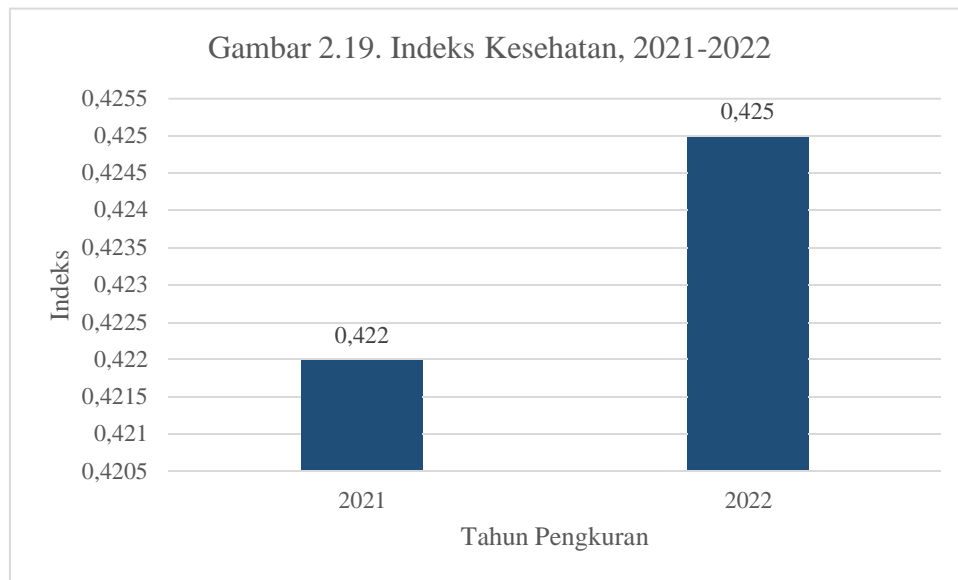


6. Kesehatan

Kesehatan mencakup sehat secara fisik dan psikis yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif. Seseorang dinyatakan sehat secara fisik jika terbebas dari penyakit dan mampu bekerja secara produktif. Sedangkan sehat secara psikis mengacu pada kesejahteraan psikis, yakni suatu kondisi di mana individu dapat bertindak otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Pertanyaan terkait seberapa sering mengalami gangguan kesehatan/sakit, seberapa puas terhadap kondisi kesehatan diri, dan keyakinan diri terhadap apa yang dilakukan menjadi urgen untuk diungkap. Setelah diperoleh data dan dilakukan analisis indeks menggambarkan bahwa derajat kesehatan masyarakat pada umumnya merata dalam kategori rendah, yakni sebesar 0,425.



Meski demikian, jika dibandingkan dengan capaian tahun 2021 mengalami peningkatan sebesar 0,03 poin. Ada tiga provinsi yang mendapat indeks kesehatan tertinggi, yakni Papua Barat, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur. Sementara itu, tiga provinsi yang memiliki indeks terendah adalah Sumatera Selatan, Riau, dan Jambi.

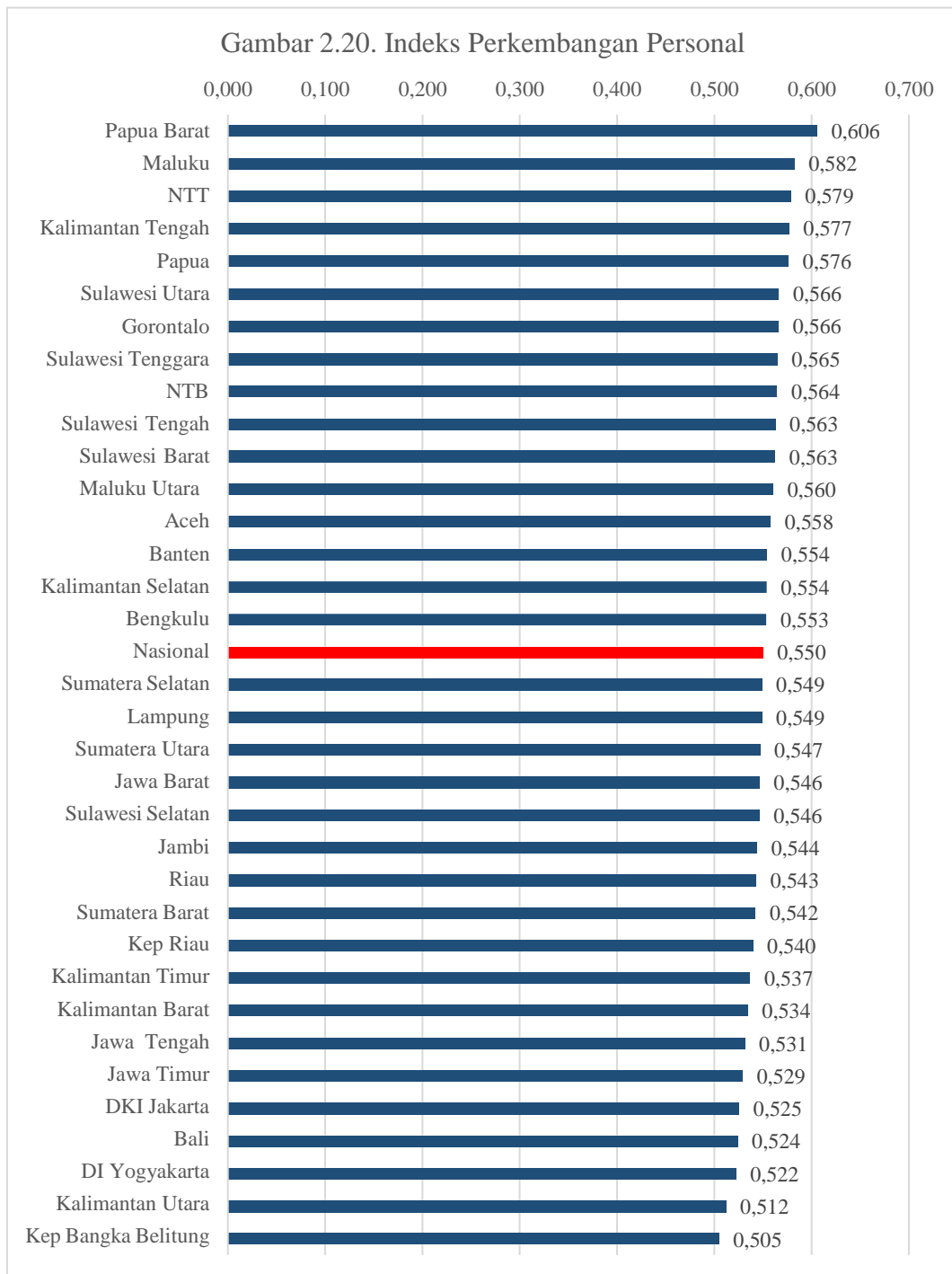


7. Perkembangan Personal

Manfaat olahraga tidak hanya terbatas pada kebugaran dan kesehatan fisik, tetapi juga berdampak pada perkembangan personal. Olahraga merupakan miniatur kehidupan, kita banyak belajar nilai-nilai kehidupan seperti persahabatan, kepemimpinan, respek pada aturan, menghormati lawan, dan keberanian mengambil risiko. Dalam kondisi pandemi Covid-19, banyak terjadi ketidakpastian akibat perubahan yang tidak disangka-sangka. Banyak orang kehilangan pekerjaan akibat di PHK, kecemasan massif terjadi akibat ancaman virus yang tidak kasat mata, yang tanpa diduga dapat mengancam keselamatan jiwa. Dalam kondisi yang demikian, olahraga dapat menjadi wahana pelepasan stress akibat tekanan kehidupan.

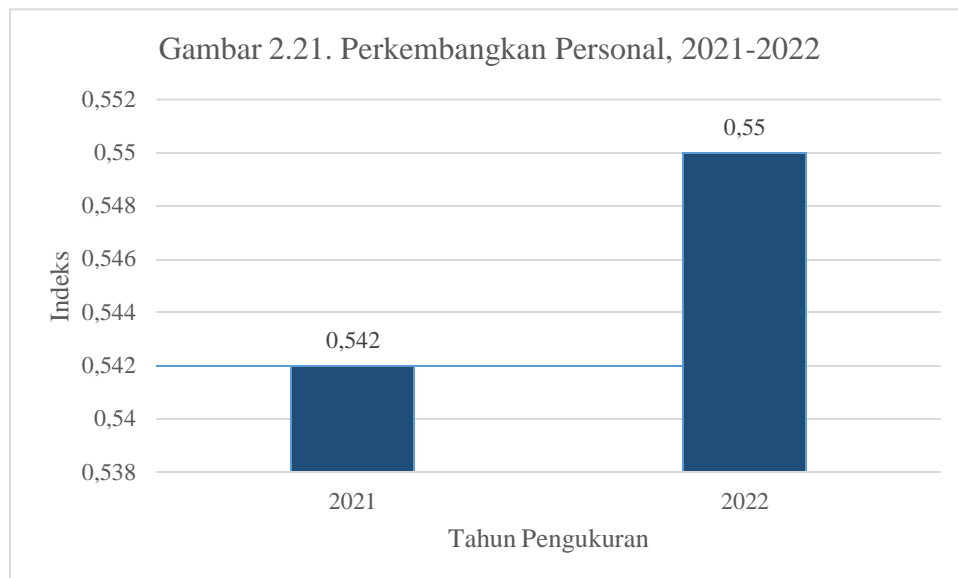
Dalam laporan ini, perkembangan personal adalah aspek-aspek kepribadian yang dibutuhkan seseorang untuk menjalani kehidupan yang konstruktif. Ada dua aspek perkembangan personal yang diukur, yakni resilien dan modal sosial. Resilien adalah kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan (Connor & Davidson, 2003; Luthans, Luthans, & Luthans, 2004). Sementara modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya

satu sama lain (Degenne, 2004; Forrest & Kearns, 2001). Setelah dilakukan perhitungan diperoleh skor indeks dimensi perkembangan personal secara nasional sebesar 0,550.



Data tersebut menggambarkan bahwa dilihat dari dimensi perkembangan personal secara umum, kondisi masyarakat relatif merata dalam kategori menengah. Ada tiga provinsi yang memiliki indeks perkembangan personal tertinggi, yakni Papua Barat, Maluku, dan Nusa

Tenggara Timur. Sementara itu, tiga provinsi dengan indeks terendah adalah Kepulauan Bangka Belitung, Kalimantan Utara, dan Yogyakarta. Meski demikian, jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2021, terdapat peningkatan sebesar 0,013 poin. Peningkatan ini bisa jadi seiring dengan menurunnya kondisi pandemi Covid-19 yang memberikan keleluasaan mobilitas kepada masyarakat.

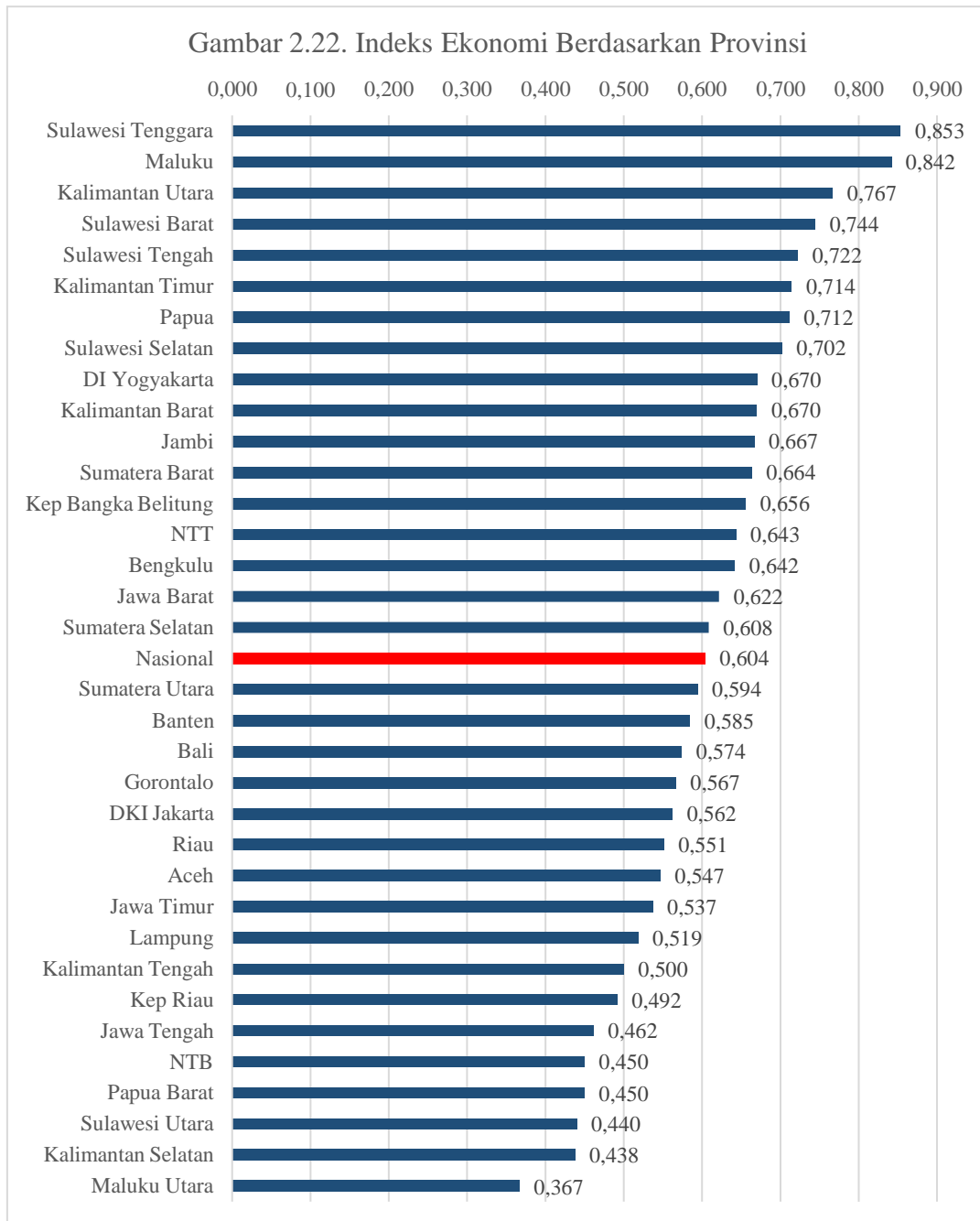


8. Ekonomi

Capaian olahraga tidak hanya berhenti pada perolehan medali yang sudah barang tentu membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Pada tataran tertentu, aktivitas olahraga dapat mendatangkan berkah ekonomi. Ketika suatu even digelar, maka banyak orang terlibat dalam kegiatan tersebut, baik sebagai pelaku langsung di lapangan maupun sebagai penonton yang hadir. Mobilitas orang dalam jumlah besar akan terjadi dari satu tempat ke tempat lain. Dalam konteks yang demikian, ekonomi masyarakat akan bergerak karena terjadi pengeluaran belanja olahraga. Dalam laporan ini, ekonomi dimaksudkan sebagai pengeluaran individu terkait aktivitas olahraga, baik dalam bentuk barang maupun jasa, dalam satu tahun. Belanja barang dapat berupa peralatan dan perlengkapan olahraga. Peralatan dapat berupa antara lain racket, *stick* atau pemukul, *glove*, dan bola. Sementara itu, jasa dapat berupa pembayaran tiket, konsultan, dan/atau jasa pelatihan. Kemampuan membayar terhadap barang dan jasa merupakan indikator penting dari ekonomi seseorang dalam kurun waktu satu tahun terakhir.

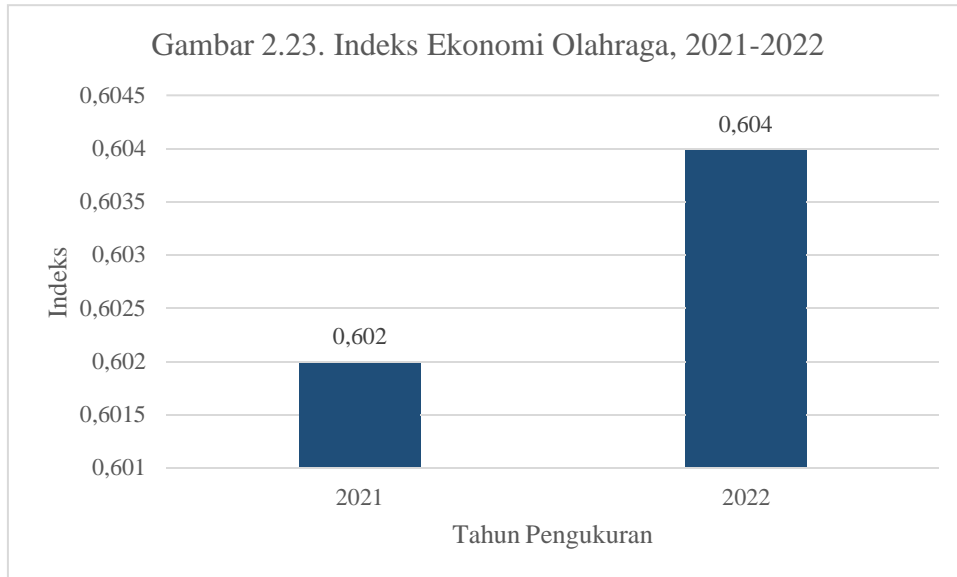
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh skor indeks ekonomi olahraga sebesar 0,604. Ada tiga provinsi yang mendapatkan indeks tertinggi, yakni Sulawesi Tenggara, Maluku, dan

Kalimantan Utara. Sementara itu, provinsi dengan indeks terendah adalah Maluku Utara, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Utara. Data tersebut menggambarkan bahwa dilihat dari indeks ekonomi secara umum, kondisi masyarakat bervariasi dalam kategori antara rendah sampai kategori menengah.

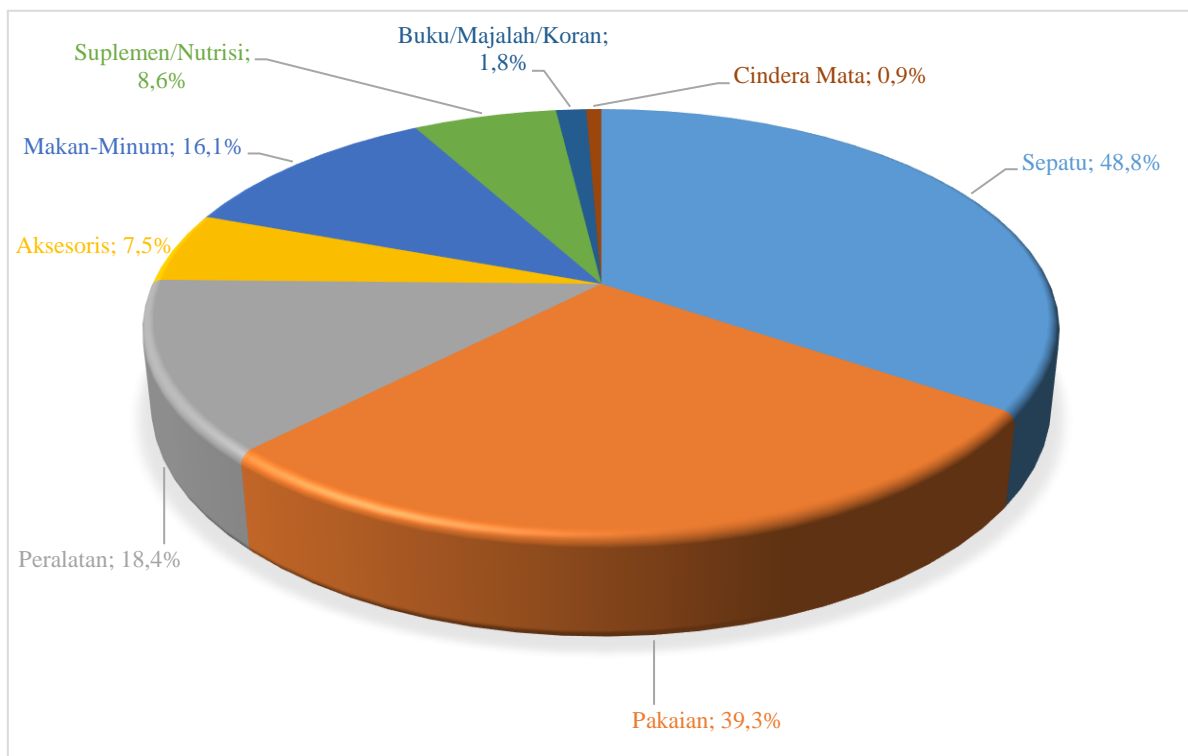


Dibandingkan dengan tahun 2021, tidak ada perubahan yang signifikan capaian indeks ekonomi olahraga pada tahun 2022. Kondisi yang demikian bisa dipahami mengingat kondisi ekonomi nasional dan global dalam kurun satu tahun ini kurang mengembirakan. Meski

dampak pandemi sudah bisa dikelola dengan baik, tetapi dalam waktu yang beriringan terjadi perang Rusia-Ukraina yang berdampak pada ekonomi global, termasuk Indonesia. Secara langsung maupun tidak langsung, kondisi tersebut akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat.

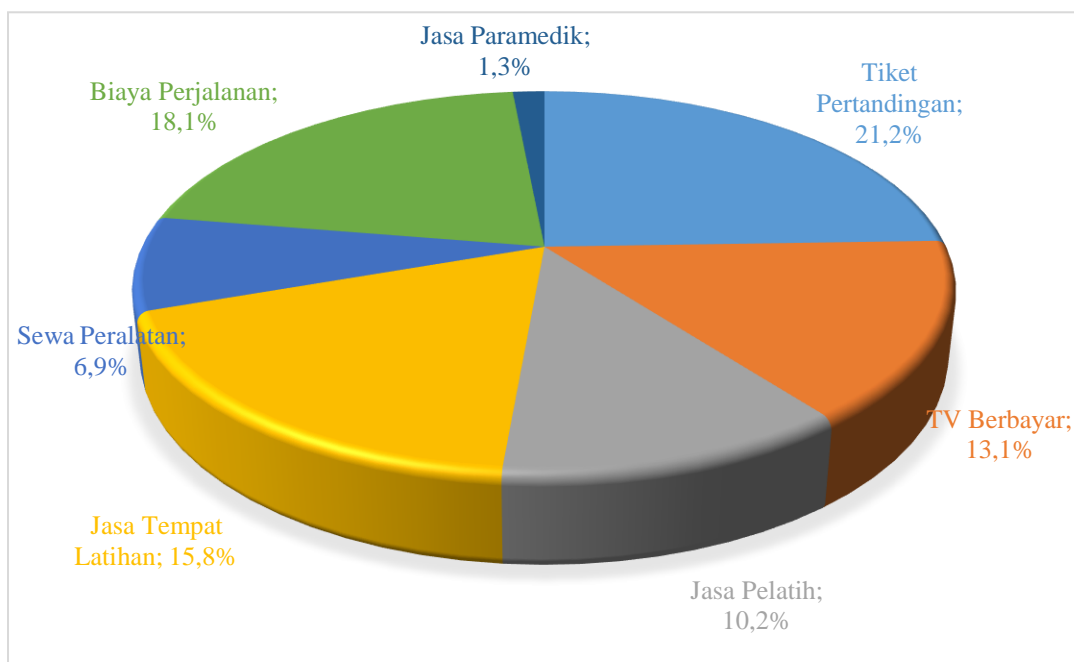


Gambar 2.24. Jenis Barang Olahraga yang Dibeli oleh Masyarakat



Belanja barang olahraga masyarakat lebih didominasi oleh sepatu sebesar 48,8%, kemudian diikuti pakaian olahraga sebesar 39,3%, dan peralatan olahraga sebesar 18,4%. Pola belanja tersebut relatif sama dengan kondisi tahun 2021, di mana sepatu, pakaian, dan peralatan masih menjadi kebutuhan barang yang utama dalam olahraga. Bagaimana halnya dengan jasa olahraga? Tampaknya pola perilaku masyarakat dalam memanfaatkan jasa olahraga juga relatif konsisten, meski ada perbedaan. Hasil analisis data menunjukkan bahwa jasa olahraga didominasi oleh pembelian tiket pertandingan sebesar 21,2%, kemudian diikuti oleh biaya perjalanan sebesar 18,1%, dan sewa tempat latihan sebesar 15,8%. Dibandingkan dengan kondisi tahun 2021, ada perbedaan urutan. Pada tahun 2021, biaya perjalanan menjadi urutan pertama, sementara tiket pertandingan menempati urutan kedua. Pada tahun 2022 terjadi sebaliknya.

Gambar 2.25. Jenis Jasa Olahraga yang Dibayar Masyarakat



Dari semua responden yang menjadi sasaran SDI 2022, sebanyak 57,7% atau sekitar 113.8 juta orang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga. Belanja tersebut bisa berupa belanja barang seperti sepatu, pakaian, atau perlengkapan yang lain dan belanja jasa berupa membayar pelatih, TV berbayar, dan sewa lapangan. Rentang belanja olahraga yang dikeluarkan per tahun mulai dari Rp200 ribu sampai lebih dari Rp5 juta. Mereka yang membelanjakan uangnya sampai Rp200 ribu sebanyak 47,2%, yang membelanjakan uangnya 200-500 ribu rupiah sebanyak 34,9%, rentang 0,5-1 juta rupiah sebanyak 10,9%, rentang 1-2 juta rupiah sebanyak 4,1%, rentang 2-3 juta rupiah sebanyak 1,4%, rentang 3-4 juta rupiah sebanyak 0,4%, rentang 4-5 juta rupiah sebanyak 0,4%, dan rentang 5

juta ke atas sebesar 0,7%. Jika angka tersebut direkapitulasi secara nasional, maka estimasi uang beredar untuk belanja olahraga sebesar 43,2 triliun/tahun. Jika dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar Rp43,8 triliun, maka terjadi penurunan.

Tabel 2.1. Estimasi Uang Beredar Terkait Ekonomi Olahraga di Indonesia

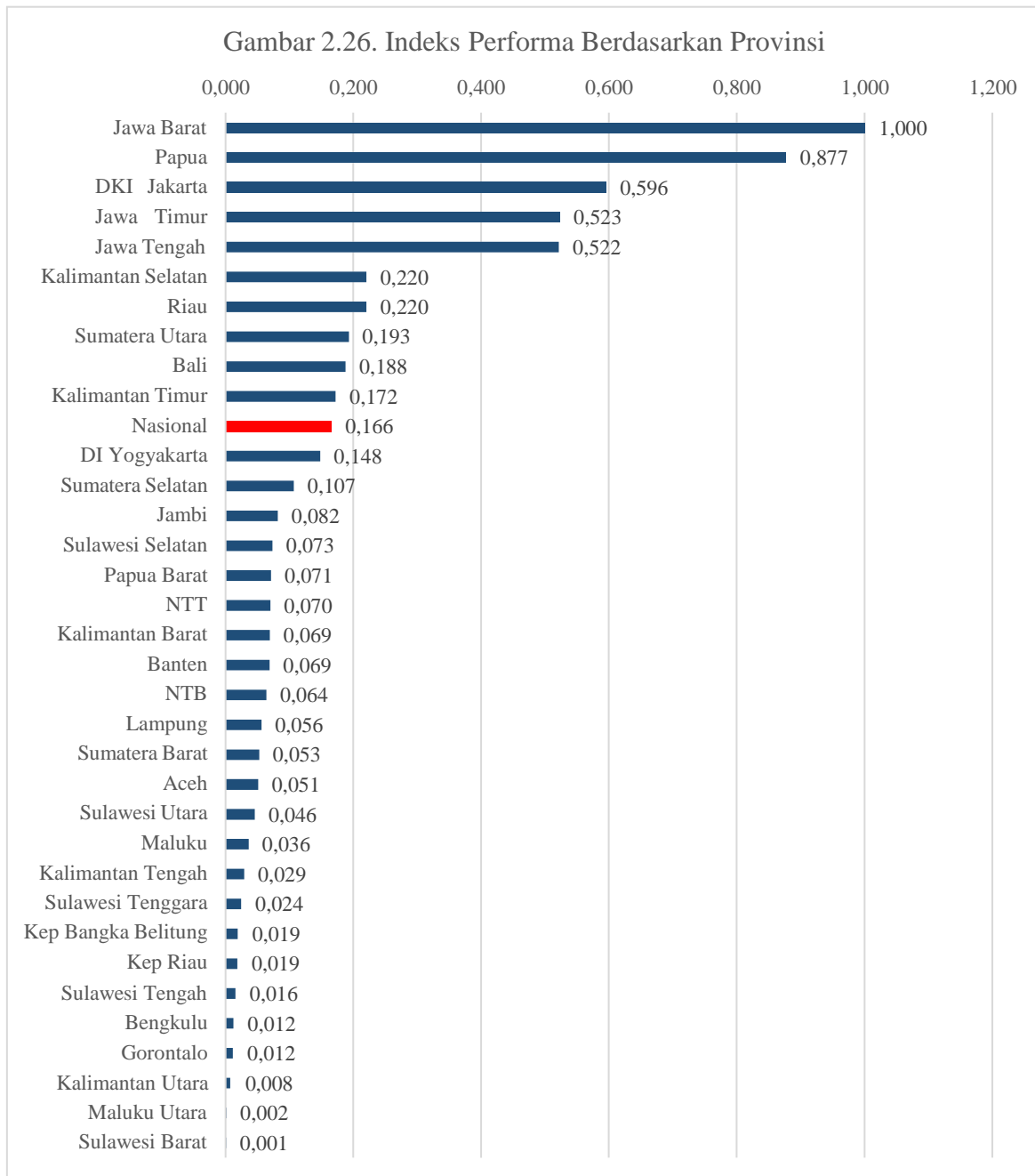
Besaran Belanja Olahraga	Persentase	Median Belanja	Jumlah Konsumen	Total Belanja/Tahun
<200 ribu	47,2%	100.000	53.718.765	5.371.876.462.400
200-500 ribu	34,9%	250.000	39.720.019	9.930.004.689.500
0,5 sd 1 juta	10,9%	750.000	12.405.393	9.304.044.508.500
1-2 juta	4,1%	1.500.000	4.666.249	6.999.372.933.000
2-3 juta	1,4%	2.500.000	1.593.353	3.983.382.970.000
3-4 juta	0,4%	3.500.000	455.244	1.593.353.188.000
4-5 juta	0,4%	4.500.000	455.244	2.048.596.956.000
>5 juta	0,7%	5.000.000	796.677	3.983.382.970.000
	100,0%			43.214.014.677.400

9. Performa

Dalam konteks olahraga prestasi, perolehan medali menjadi ukuran yang absolut. Suatu negara atau daerah yang berhasil mendapatkan medali terbanyak, maka merekalah yang dianggap berhasil. Meskipun bisa saja diajukan pertanyaan, dari mana mereka memperoleh medali tersebut, membina atlet sendiri secara sungguh-sungguh atau mengkapitulasi atlet yang dibina daerah lain. Dalam banyak penelitian, perolehan medali banyak dipengaruhi oleh faktor ketersediaan anggaran dan modal manusia. Negara yang memiliki sumber daya tersebut di atas rata-rata akan berpeluang memperoleh medali lebih banyak. Apalagi jika pencapaian tersebut juga didorong oleh hegemoni kekuasaan adidaya seperti yang terjadi pada Amerika Serikat dan China. Dalam konteks nasional, logika tersebut juga berlaku. Sepanjang perjalanan PON, provinsi di wilayah Jawa cenderung dominan dibandingkan dengan provinsi di luar Jawa.

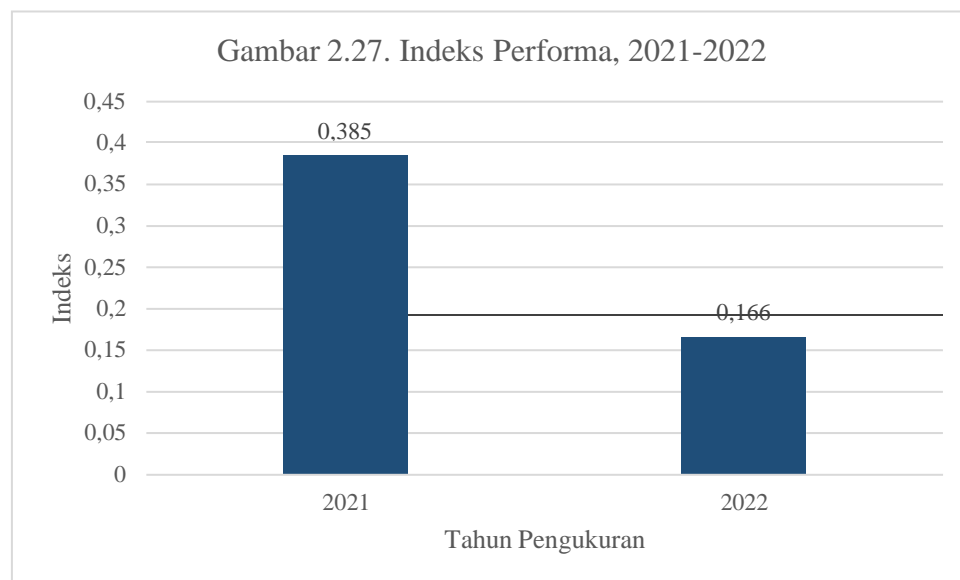
Dalam laporan ini, yang dimaksud performa adalah capaian olahragawan atau kelompok olahragawan termasuk penyandang disabilitas sebagai hasil pembinaan olahraga prestasi pada suatu wilayah. Ada yang berbeda dalam pengukuran terkait dengan performa. Pada tahun 2021, performa diukur berdasarkan capaian setiap daerah dalam PON dengan indikator utama medali dan menambahkan faktor koreksi berupa jumlah atlet yang ikut berpartisipasi. Pada tahun 2022 kali ini, performa diukur berdasarkan perolehan medali per cabang olahraga dipadu dengan

capaian olahraga disabilitas pada kejuaraan nasional setiap cabang olahraga, termasuk 14 cabang olahraga prioritas DBON. Perubahan ini dilakukan seiring dengan kebijakan pemerintah terkait DBON yang tertuang di dalam Perpres No. 86 Tahun 2021. Mengingat tahun 2021 ada penyelenggaraan PON dan Peparnas, praktis tidak banyak cabang olahraga yang menyelenggarakan kejuaraan nasional. Atas dasar itu, capaian cabang olahraga dalam PON dan Peparnas diasumsikan sebagai data kejuaraan nasional.



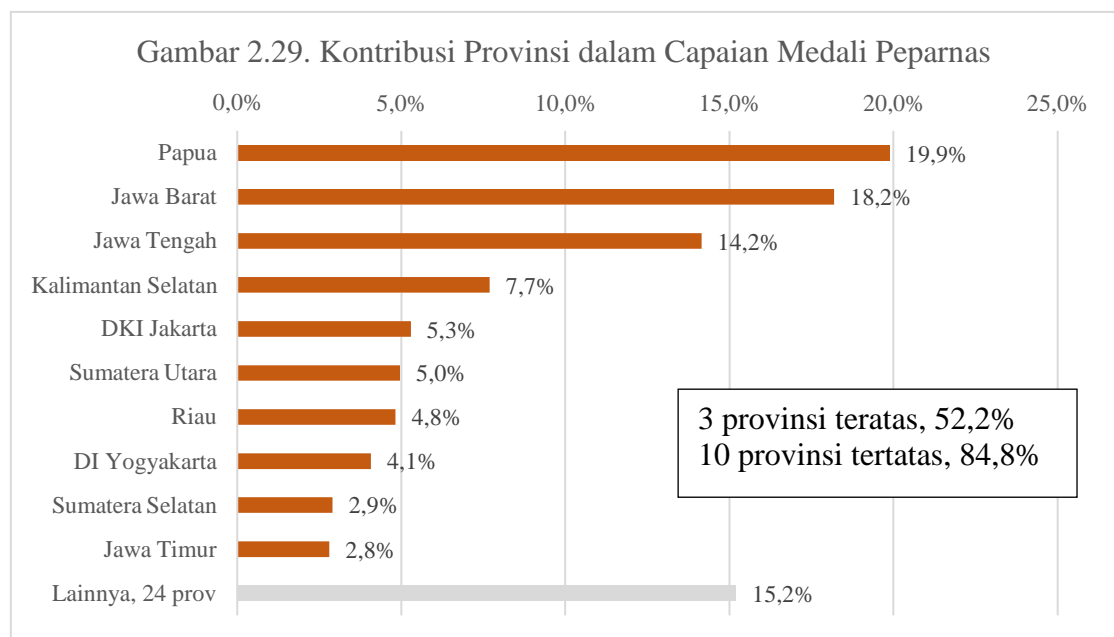
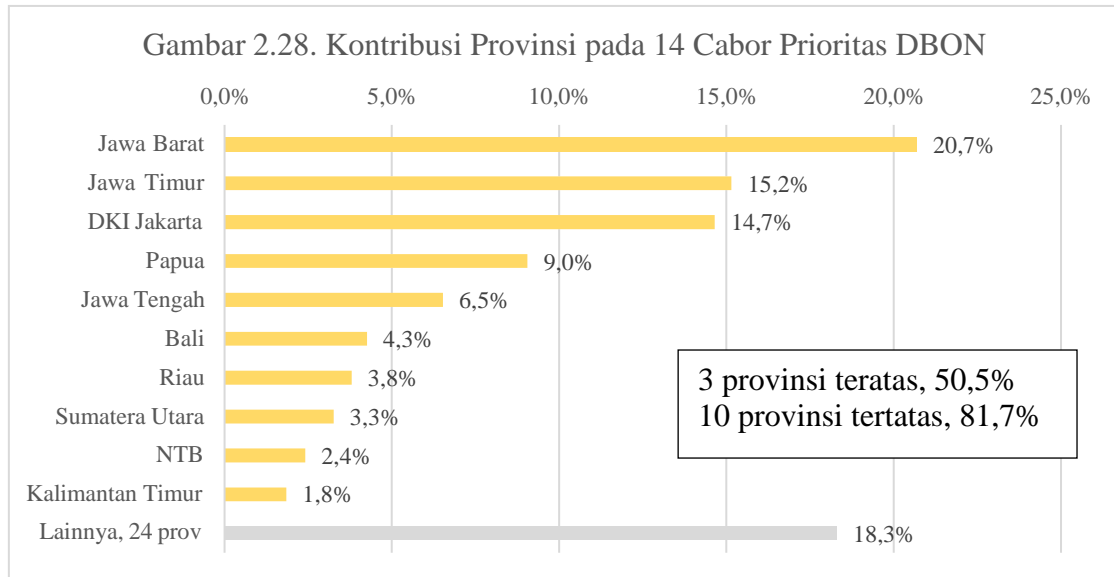
Setelah dilakukan perhitungan diperoleh indeks performa sebesar 0,166, jauh lebih rendah dibandingkan dengan capaian tahun 2021 yang sebesar 0,385. Terjadi penurunan yang cukup

signifikan, yakni sebesar 0,219 poin. Data tersebut menggambarkan bahwa dilihat dari dimensi performa, capaian setiap provinsi sangat bervariasi dan kesenjangan terlalu besar. Pada tahun 2021, rentang terendah sebesar 0,116 untuk Kepulauan Bangka Belitung dan tertinggi sebesar 1,000 untuk Jawa Timur. Sementara itu, data tahun 2022 rentang terendah sebesar 0,016 untuk Sulawesi Tengah dan tertinggi sebesar 1,000 untuk Jawa Barat. Namun, secara rerata nasional dimensi performa berada dalam kategori rendah. Tampak sekali adanya kesenjangan dalam performa khususnya untuk provinsi-provinsi di Jawa dan di luar Jawa. Kondisi yang memprihatinkan ini disebabkan oleh banyak faktor, namun tampaknya faktor jumlah penduduk dan kondisi ekonomi suatu provinsi sangat menentukan capaian performa tersebut (De Bosscher, De Knop, Van Bottenburg, & Shibli, 2006; De Bosscher, Shibli, Westerbeek, & Van Bottenburg, 2015; Mutohir et al., 2021).



Selanjutnya kita ingin mendalami bagaimana peta daerah dalam mendukung kebijakan nasional terkait 14 cabang prioritas DBON. Berdasarkan analisis data, kecuali balap sepeda yang memang tidak dipertandingkan dalam PON Papua, ditemukan bahwa 50,5% capaian 14 cabang prioritas dikontribusikan oleh tiga provinsi yang selama ini mendominasi kejuaraan PON, yakni Jawa Barat sebesar 20,7%, Jawa Timur sebesar 15,2%, dan DKI Jakarta sebesar 14,7%. Jika daerahnya diperluas, maka 10 provinsi telah berkontribusi sebesar 81,7% dalam pencapaian prestasi cabang olahraga prioritas. Selebihnya, 24 provinsi yang lain kontribusinya hanya sekitar 0-1%. Pola yang sama juga terjadi pada olahraga disabilitas, meski daerahnya relatif berbeda. Pada olahraga disabilitas, 52,2% capaian prestasi dikontribusikan oleh tiga

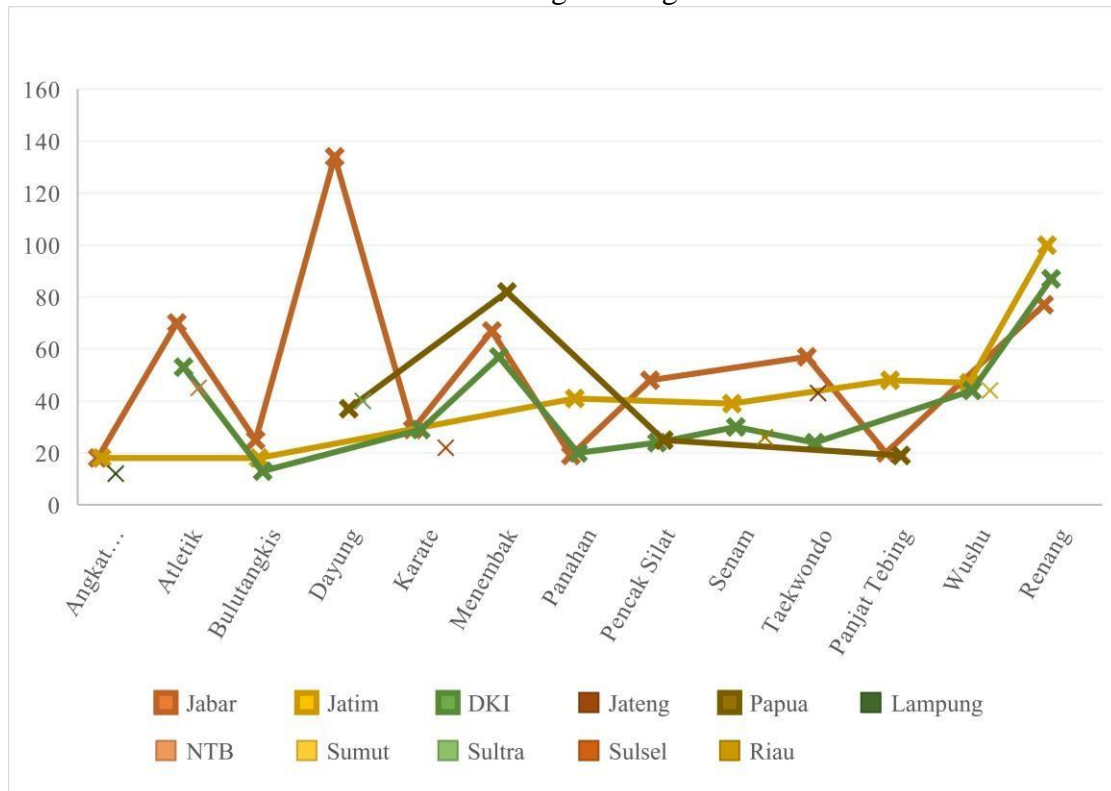
provinsi, yakni Papua, Jawa Barat, dan Jawa Tengah. Jika daerahnya diperluas hingga sepuluh besar, maka kontribusinya mencapai 84,8%. Sementara itu, 24 provinsi yang lain kontribusinya hanya sekitar 0-1%.



Lalu bagaimana peta cabang olahraga prioritas dilihat dari keunggulan daerah? Berdasarkan analisis data dengan menggunakan pola “top three”, maka dominasinya ada pada empat provinsi, yakni Jawa Barat, Jawa Timur, DKI Jakarta, dan Papua. Pada cabang olahraga bulutangkis, misalnya, dominasi medali ada pada provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta. Demikian juga cabang olahraga panjat tebing, dominasinya ada pada Jawa Timur, Jawa

Barat, dan Papua. Provinsi yang lain mampu masuk “top three” hanya pada satu cabang olahraga. Jawa Tengah pada cabang olahraga taekwondo, Lampung pada angkat besi, NTB pada atletik, Sumatera Utara pada wushu, Sulawesi Tenggara pada dayung, Sulawesi Selatan pada karate, dan Riau pada senam.

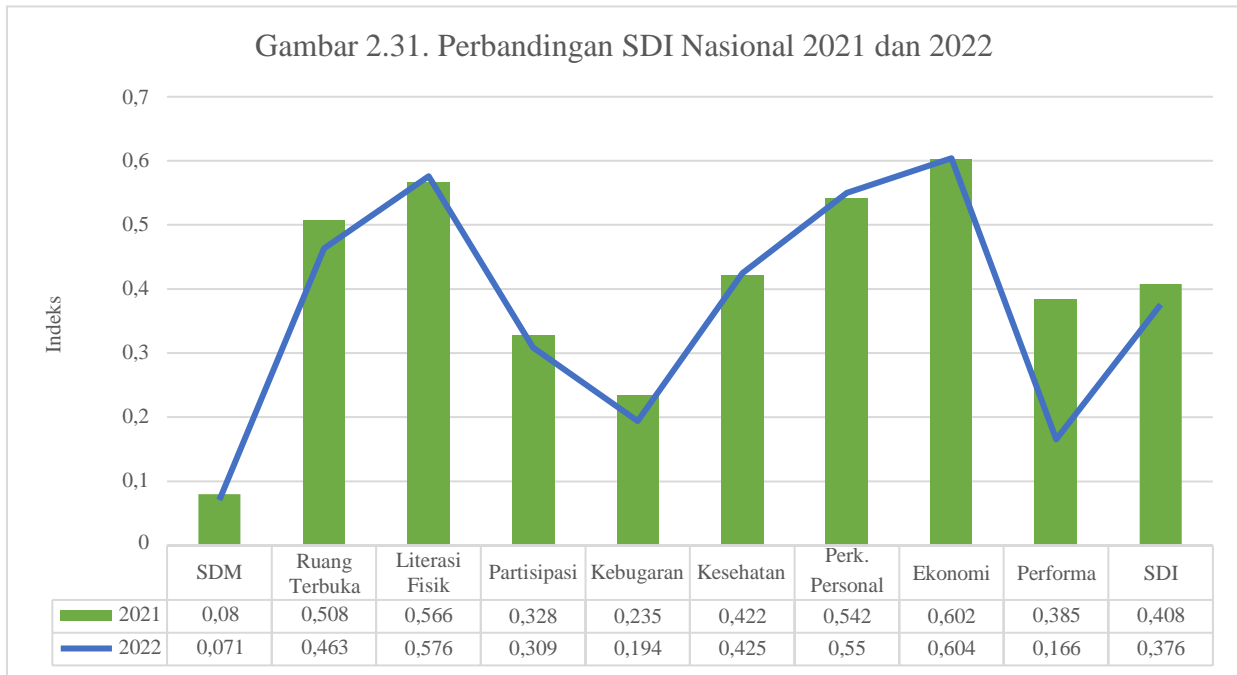
Gambar 2.30. Peta Dominasi Cabang Olahraga Prioritas Menurut Provinsi



Tantangan yang Dihadapi

Analisis data secara keseluruhan memberikan indikasi bahwa indeks dimensi SDI pada tahun 2022 dibandingkan dengan SDI pada tahun 2021, tampak tidak banyak mengalami perubahan yang berarti. Dimensi SDI yang masuk dalam kategori rendah untuk tahun 2021 dan 2022 adalah SDM, partisipasi, kebugaran, dan performa. Sedangkan dimensi yang masuk dalam kategori menengah adalah ruang terbuka, kesehatan, literasi fisik, perkembangan personal, dan ekonomi. Secara umum, indeks SDI tingkat nasional pada tahun 2022 sebesar 0,376, sedikit di bawah indeks SDI tahun 2021 sebesar 0,408. Selain karena ketiadaan intervensi kebijakan yang signifikan, perbedaan indeks ini disebabkan adanya perubahan penghitungan indeks performa sebagaimana yang sudah dijelaskan. Indeks SDI tingkat nasional untuk tahun 2022 dan juga tahun 2021, keduanya berada dalam kategori rendah.

Gambar 2.31. Perbandingan SDI Nasional 2021 dan 2022



Partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan olahraga atau aktivitas fisik, sebagaimana ditunjukkan hasil pengukuran SDI pada tahun 2021 dan 2022, hingga dewasa ini masih memprihatinkan. Program Indonesia sehat yang dicanangkan oleh Pemerintah hingga dewasa ini tampaknya belum mencapai sasaran seperti yang diharapkan. Kondisi yang memprihatinkan ini tidak bisa dibiarkan, tetapi harus ada intervensi kebijakan dan program aksi yang konkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah untuk mengatasi wabah penyakit karena kekurangan gerak itu. Kebijakan pembudayaan olahraga agar olahraga atau aktivitas fisik menjadi pola hidup yang sehat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat perlu terus dilancarkan secara berkelanjutan dengan dukungan pendanaan yang memadai.

Rendahnya tingkat partisipasi pada gilirannya berdampak pada rendahnya kebugaran jasmani. Hingga dewasa ini kondisi kebugaran jasmani masyarakat Indonesia, sebagaimana ditunjukkan hasil pengukuran SDI tahun 2021 dan 2022, masih dalam kategori rendah. Kondisi kebugaran jasmani masyarakat Indonesia yang dicerminkan dari hasil pengukuran SDI tahun 2006, hingga dewasa ini tidak banyak berubah. Hasil analisis data kebugaran jasmani yang dikumpulkan dari kegiatan SDI tahun 2006 menunjukkan bahwa 37,40% masuk dalam kategori kurang sekali, 43,90% kurang, 13,55% sedang, dan hanya 5,15% yang masuk kategori baik dan baik sekali. Kondisi seperti ini, sejatinya telah ditunjukkan dari beberapa hasil kajian sebelumnya. Misalnya, survei yang dilakukan oleh Departemen Kesehatan pada tahun 2002 untuk memetakan kondisi kebugaran jasmani para pegawai sipil yang berasal dari Pemda tingkat I dan Dinas Kesehatan provinsi di DKI Jakarta, Jawa Barat, Sumatera Selatan, dan Bali

menunjukkan bahwa lebih dari 63% mereka memiliki kebugaran jasmani yang sangat kurang. Selain itu, survei kebugaran jasmani terhadap pelajar yang dilakukan pada tahun 2005 menunjukkan bahwa 10,71% pelajar masuk kategori kurang sekali, 45,97% masuk kategori kurang, 37,06% masuk kategori sedang, dan 5,66% masuk kategori baik; sedangkan tidak ada (0%) mereka yang masuk kategori baik (Mutohir & Maksum, 2007). Kondisi kebugaran jasmani yang memprihatinkan ini sudah terjadi lama, namun tampaknya belum ada kebijakan nasional dan program aksi yang konkrit yang dilaksanakan secara sistematis dan berkelanjutan. Bagaimana arah kebijakan nasional terkait kebugaran jasmani ke depan?

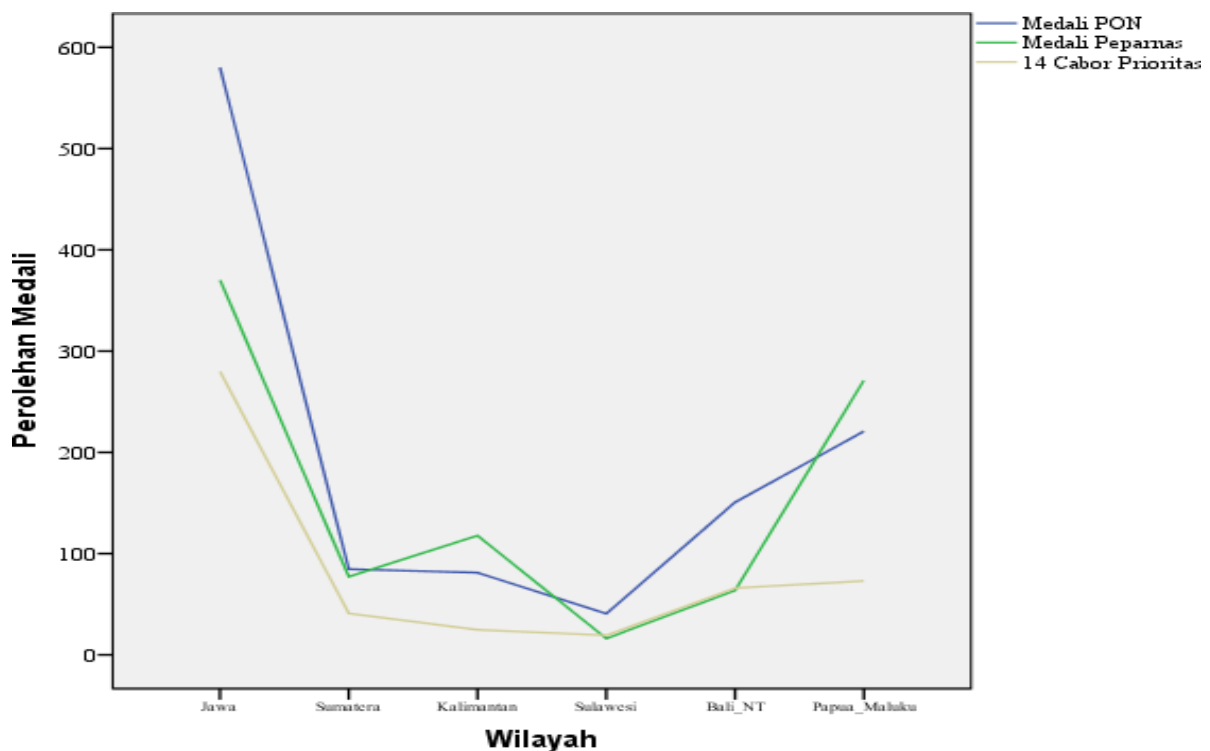
Sebagaimana diketahui bahwa kondisi kebugaran itu menggambarkan kemampuan seseorang untuk mampu melakukan tugas atau pekerjaan tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Dengan kata lain kebugaran jasmani itu menunjukkan produktivitas kerja. Orang yang memiliki taraf kebugaran tinggi biasanya produktivitas kerjanya yang tinggi pula. Justru itulah, meningkatkan kebugaran jasmani masyarakat pada hakikatnya merupakan tantangan yang tidak ringan. Dalam persaingan bangsa ke depan, kebugaran jasmani ini menjadi penting. Hal ini didasarkan atas pemikiran bahwa kekuatan suatu bangsa sangat tergantung dari kebugaran jasmani masyarakatnya.

Di Indonesia, pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto, tepatnya tahun 1983 dibuat kebijakan dalam upaya memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat. Gerakan ini merupakan upaya membudayakan olahraga, dengan maksud agar olahraga itu digemari dan dilakukan masyarakat dan akhirnya terbentuk masyarakat berolahraga. Pada masa itu, telah diperkenalkan senam kesegaran jasmani yang wajib dilakukan setiap pagi di lingkungan sekolah dan kantor-kantor, serta piagam Presiden sebagai bentuk penghargaan kepada para siswa yang telah berpartisipasi dan mencapai taraf kebugaran tertentu. Sayangnya, kebijakan dan program itu tidak berlanjut seiring dengan perubahan politik dan pergantian pemerintahan. Pada tataran kebijakan, sejatinya gerakan olahraga untuk semua atau *sport for all*, pada hakikatnya merupakan misi strategis keolahragaan, karena membangun masyarakat bugar itu menjadi fondasi utama dalam pembangunan nasional. Masyarakat yang bugar adalah masyarakat yang memiliki modal kuat untuk membangun, termasuk membangun prestasi olahraga dan juga prestasi-prestasi lain di segala bidang.

Hingga dewasa ini dan di masa datang prestasi olahraga tampaknya masih menjadi prioritas dalam kebijakan olahraga nasional. Tantangan utama dalam dimensi performa tersebut adalah adanya kesenjangan yang dalam antara prestasi olahraga di Jawa dan luar Jawa. Tampak pembangunan olahraga, terkait dengan dimensi performa ini tidak merata. Orientasi pembinaan prestasi olahraga di dalam negeri hendaknya tidak diarahkan pada capaian atau

perolehan medali dalam multi-event seperti PON atau Kejurnas. Ke depan daerah hendaknya dipacu untuk membina dan mengembangkan olahraga unggulan atau prioritas yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi daerah. Ukuran keberhasilan dalam bidang olahraga prestasi tidak hanya difokuskan pada keberhasilan daerah dalam memperoleh medali pada setiap Kejurnas/PON dibandingkan dengan jumlah atlet peserta dalam kontingen, tetapi juga pengukuran dimensi performa yang ditinjau dari perolehan medali dari hasil kejuaraan nasional/PON dengan memperhatikan cabang olahraga yang diikuti oleh daerah. Prestasi sangat berkaitan dengan kualitas dan bukan kuantitas. Oleh karena itu, pembinaan olahraga prestasi difokuskan pada pemenuhan standar, baik standar input (atlet, sarpras, dana, pelatih dan tenaga keolahragaan pendukung termasuk pakar *sport sciences*), standar proses, standar *output*, dan *outcome*.

Gambar 2.32. Peta Dominasi Medali PON, Peparnas, dan Cabang Olahraga Prioritas Menurut Wilayah



Terkait program Manajemen Talenta Nasional dalam rangka mengidentifikasi calon atlet berbakat taraf dunia, tenaga pelatih kaliber dunia, pemusatan latihan berkualitas didukung sarana dan prasarana, berbasis *sport sciences*, sistem kompetisi, sistem kesejahteraan, dan faktor pendukung serta faktor pendanaan harus ada dalam upaya pembinaan dan pengembangan secara berjenjang dan berkelanjutan. Untuk itu, kebijakan olahraga nasional

dalam DBON yang mengarah pada 3 sasaran besar: pembudayaan olahraga, prestasi olahraga, dan industri olahraga menjadi tantangan utama yang harus disukseskan. Ketika sasaran itu saling berkelindan membentuk sebuah sistem pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional jangka panjang secara terintegratif dan kolaboratif untuk meningkatkan daya saing bangsa dalam bidang keolahragaan. Di sini SDI merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan DBON karena fungsinya yang melekat sebagai instrumen pengukuran dan evaluasi keberhasilan kebijakan kolahragaan nasional tersebut.

Harapan Ke Depan

Dengan diselesaikannya program SDI 2022, diharapkan laporan ini dapat digunakan sebagai umpan balik yang bermanfaat untuk menyusun kebijakan dan program konkrit berbasis bukti data dari lapangan. Dengan memahami kondisi riil di lapangan sebagai dampak implementasi kebijakan keolahragaan nasional di berbagai daerah di seluruh Indonesia, maka para pengambil kebijakan dan pelaksana program dapat mengetahui seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga. Berbagai masalah atau kesenjangan yang terjadi antara realisasi dan tujuan, serta berbagai faktor penyebab terjadinya kesenjangan tersebut dapat diidentifikasi. Melalui analisis kebutuhan, dapat diidentifikasi berbagai alternatif solusi dan dipilih alternatif solusi yang sesuai dan efektif untuk diusulkan sebagai intervensi kebijakan dan program pada tahun berikutnya. Dengan demikian, kemajuan pembangunan olahraga dapat dimonitor dan dievaluasi. Sekali lagi, di sini SDI memegang peran penting.

Secara umum, peran SDI dalam mendukung keberhasilan kebijakan keolahragaan nasional-DBON dapat dilihat sebagai:

- instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi keberhasilan DBON mencapai tujuannya;
- katalisator yang membangun ekosistem yang kondusif untuk mengembangkan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/masyarakat, olahraga prestasi, dan industri olahraga
- fasilitator yang menjembatani peran sinergitas antar-pemangku kepentingan pada tingkat pusat dan daerah, dalam rangka memajukan pengembangan keolahragaan, khususnya olahraga prioritas, dan
- alat untuk menyediakan data dan informasi dalam keolahragaan yang dapat diintegrasikan ke dalam sistem keolahragaan atau satu data Indonesia yang bermanfaat untuk memetakan potensi nasional yang kompetitif, khususnya ekonomi berbasis olahraga.

Diharapkan ke depan, agar SDI ini dapat diimplementasikan baik di tingkat nasional maupun daerah secara berkelanjutan sebagai instrumen untuk mengukur dan mengevaluasi kemajuan pembangunan olahraga. Lebih lanjut, diharapkan agar daerah provinsi dan kabupaten/kota dapat mengimplementasikan SDI secara mandiri dengan alokasi dana yang disediakan dari APBD masing-masing. Dengan demikian provinsi dan kabupaten/kota dapat mengetahui perkembangan pembangunan olahraga dan sekaligus dapat mengidentifikasi berbagai masalah atau kesenjangan yang terjadi antara cita-cita berupa tujuan/sasaran yang diharapkan dan realita yang ada. Berdasarkan atas masalah yang diidentifikasi tersebut, daerah sesuai kondisi dan karakteristik masing-masing dapat merumuskan dan mengajukan intervensi kebijakan dan program yang sesuai dengan tuntutan berbasis data serta selaras dengan kebijakan nasional keolahragaan. Berdasar atas data riil hasil pengukuran SDI, berbagai instansi yang terkait dengan pembangunan olahraga, masing-masing dapat menyusun rencana program intervensi disertai kebutuhan anggaran dalam rangka mengatasi masalah yang disepakati secara bersama-sama. Dalam konteks ini, SDI memiliki peran yang penting sebagai penyedia data, katalisator, fasilitator, dan sekaligus instrumen untuk mengevaluasi seberapa jauh keberhasilan pembangunan olahraga secara nasional.

Bab 3 Pembudayaan Olahraga: Proyek Kehidupan yang Tiada Akhir

Di Amerika Serikat pada tahun 1953, di awal pemerintahan Eisenhower dikejutkan dengan adanya laporan penelitian berjudul “Muscular Fitness and Health” yang dipublikasikan di “The Journal of the American Association for Health, Physical Education, and Recreation”. Dalam artikel tersebut dipaparkan bahwa hasil tes kebugaran jasmani pemuda Amerika lebih jelek dibandingkan dengan pemuda dari negara Eropah (Hans Kraus & Hirschland, 1953). Laporan penelitian tersebut mengejutkan pemerintah Amerika Serikat. Atas dasar itu, Presiden Esienhower membentuk “President’s Council on Youth Fitness” yang memiliki satu peran sebagai “catalytic agent” dengan fokus membangun kesadaran warga Amerika untuk meningkatkan kebugaran jasmani. Pada tanggal 9-10 September 1957, melalui “Conference on Physical Fitness of Youth”, pertama kali diluncurkan program sebagai uji coba pelaksanaan tes kebugaran jasmani secara nasional dan membentuk “Presidential Council on Physical Fitness” sebagai kebijakan untuk menggerakkan para pemuda Amerika agar meningkatkan kebugaran jasmani.

Hebatnya, meski itu telah terjadi sejak 70 tahun yang lalu, “Presidential Council” itu selalu menjadi bagian penting dari agenda setiap Presiden Amerika Serikat, walaupun namanya berubah-ubah. Istilah “President’s Council on Youth Fitness” berubah menjadi “President’s Council on Physical Fitness” pada zaman pemerintahan John, F. Kennedy, kemudian menjadi “President’s Council on Physical Fitness and Sports” pada zaman pemerintahan Lyndon B. Johnson, dan terakhir menjadi “President’s Council on Sports, Fitness, and Nutrition” pada zaman pemerintahan Presiden Barack Obama. Hingga kini kebijakan tersebut masih diberlakukan dan dikembangkan terus sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman.

Pada zaman pemerintahannya, Kennedy berpidato untuk menegaskan pentingnya kebugaran jasmani terhadap kekuatan bangsa Amerika Serikat, pusat-pusat kebugaran dirancang sejak 1961 sebagai model bagi sekolah-sekolah. Kemudian Lyndon B. Johnson melanjutkan apa yang dilakukan Kennedy dan mendorong agar kebugaran jasmani terus dijaga melalui aktivitas olahraga dan permainan. Saat itu dilakukan tes kebugaran jasmani kedua pada tahun 1965 bagi anak-anak usia 10-17 tahun. Mereka yang berprestasi baik dalam kebugaran jasmani diberikan “Presidential Physical Fitness Award”. Council pada saat itu juga melakukan supervisi pada program olahraga nasional bagi pemuda difabel. Pada tahun 1972, pada zaman pemerintahan Presiden Richard M. Nixon diadakan Presidential Sports Award dan pada zaman pemerintahan Ronald Reagan, pada tahun 1985 dilakukan tes kebugaran jasmani nasional kepada seluruh siswa dengan pemberian “National Physical Fitness Award”.

Pada tahun 1983 lahir ide-ide baru terkait penerapan program-program kebugaran, melibatkan wanita dalam gerakan kebugaran, dan pada tahun 1987 diperkenalkan “President’s Challenge Award” bagi olahragawan, kerjasama Council dengan Amateur Athletic Union dan memberikan prioritas untuk kebugaran jasmani dalam bidang kesehatan masyarakat. Pada zaman pemerintahan George H. Bush tahun 1989-1993 anggota Council ditambah menjadi 20 orang yang diketuai Arnold Schwarzenegger. Pada masa tersebut peran swasta lebih banyak dilibatkan. Kegiatan memprioritaskan aktivitas fisik dan kebugaran dalam upaya mengatasi penyakit tidak menular dengan program “Healthy People 2000”, melakukan reviu kebugaran bagi militer dan pada tahun 1991 memperkenalkan “Family Fitness Award”. Pada zaman pemerintahan William J. Clinton 1993-2001 dilakukan forum perencanaan strategis untuk mendiskusikan survei kebugaran bagi orang dewasa dan mengembangkan rekomendasi untuk meningkatkan kebugaran warga Amerika Serikat.

Diperkenalkan Silver Eagle Award bagi pada warga senior (usia lanjut). Buku petunjuk kebugaran dikenal dengan Nolan Ryan Fitness Guide disebar-luaskan secara gratis kepada setiap warga Amerika (850.000 lebih buku telah terdistribusi). Setahun kemudian diperkenalkan FitStart ditambahkan kedalam Presidential Sports and Health Fitness Awards. Bekerjasama dengan berbagai instansi terkait termasuk dengan Advertising Council mengembangkan program kampanye 3 tahun dengan fokus Kebugaran pemuda: “Get Off It. “Get UP”. Get Out”. Upaya pencapaian Healthy People 2010 terus dilakukan. Presiden Clinton mengeluarkan *Executive Memorandum* untuk mengidentifikasi strategi meningkatkan kebugaran para pemuda. Selanjutnya dibuat laporan yang ditujukan kepada gedung putih, “Promoting Better Health for Young People through Physical Activity and Sports”.

Pada zaman pemerintahan George W. Bush 2001-2009. Hal menonjol yang dilakukan saat ini antara lain, dibukanya pintu website di www.fitness.gov, diterbitkan Executive Order 13265 yang menekankan peran Council dalam memberikan nasihat dan membantu Presiden dalam mengembangkan kepedulian nasional dalam memperoleh kesehatan melalui aktivitas fisik dan olahraga. Kemudian dimunculkan program untuk membantu warga Amerika ”Be Physically Active Every Day” dengan memperkenalkan “Presidential Active Lifestyle Award” melalui media dan mengumumkan President’s Challenge interactive website yang akan diberlakukan ke depan; meluncurkan program “HealthierFeds Physical Activity Challenge” untuk karyawan pemerintah federal, sekitar 30,000 karyawan dari 30 instansi berpartisipasi. Presiden Bush memproklamasikan bulan Kebugaran dan Olahraga Nasional (*National Physical Fitness and Sport*), memberikan penghargaan kepada mitra dalam memperingati 50 tahun berdirinya Council (50th Anniversary Partners to Get America Moving) dan “A Lifetime Achievement

Award” kepada para tokoh-tokoh berjasa, serta mengumumkan “Community Leadership Awards”. Pada tahun 2008, Council meluncurkan Tes Kebugaran untuk orang dewasa yang baru dan pertama kali meluncurkan Pedoman Aktivitas Fisik untuk warga Amerika.

Pada zaman pemerintah Presiden Barack H. Obama banyak hal yang dilakukan terkait dengan kebugaran ini. Ia menerbitkan surat perintah mengubah nama Council menjadi President’s Council on Fitness, Sports and Nutrition yang menambah misinya termasuk nutrisi, dan menambah jumlah anggota dari 20 menjadi 25. Program Presidential Active Lifestyle Award (PALA) terus dilanjutkan dan first lady Michelle Obama ikut aktif dalam menyemarakkan program the million PALA challenge. Kerjasama dengan Entertainment Association (ESA) untuk mempromosikan pola hidup sehat aktif melalui video games. Program Active Play PALA+ Challenge diluncurkan dan diperkenalkan melalui Active Gaming Showcase di sekolah. Program baru diperkenalkan dan diluncurkan “Physical Activity Outreach Initiative” pada September 2012 melalui pengumuman lewat televisi, media cetak, dan radio.

Pada tahun 2015 President’s Council dan mitra The Aspen Institute meluncurkan Sports for All, Play for Life: A Playbook to Get Every Kid in the Game, suatu laporan yang berisi delapan strategi agar partisipasi dalam olahraga itu bermanfaat. Pada tahun 2017 program yang dikenal dengan Council’s Presidential Champion dikerjasamakan dengan Departemen Pertanian khususnya yang terkait dengan SuperTracker food and nutrition tracking tool. Pada zaman pemerintahan Donald J. Trump mengamandemen surat perintah dan merubah jumlah anggota President's Council on Sport, Fitness, and Nutrition (PCSFN) dari 25 menjadi 30. Pada tahun 2019 President’s Council on Sports, Fitness & Nutrition digabungkan ke dalam Office of Disease Prevention and Health Promotion, kemudian gabungan kedua institusi itu diumumkan pada 21 Juni tahun 2019 menjadi bagian dari struktur organisasi Assistant Secretary for Health. Presiden Joe Biden melanjutkan kebijakan untuk mengaktifkan PCSFN dengan menerbitkan Surat Perintah nomor 14048 yang menugaskan PCSFN sebagai komite penasihat pemerintah federal yang bertujuan untuk mempromosikan pola makan dan aktivitas fisik yang sehat bagi warga Amerika, tanpa memandang latar belakang dan kemampuan. Surat Keputusan tersebut melanjutkan penerapan “The National Youth Sports Strategy” dan melakukan penyadaran akan pentingnya memasukkan “mental health” terkait dengan kebugaran jasmani dan nutrisi. Sekretaris Health and Human Services Amerika Serikat membentuk Dewan Direktur dari National Fitness Foundation. Foundation melakukan kerja sama dengan PCSFN dan mengidentifikasi strategi prioritas untuk melanjutkan tujuan dan fungsi President’s Council. Tampak di sini, kebijakan secara nasional terkait dengan promosi

kebugaran jasmani bagi warga Amerika Serikat dari Presiden satu ke Presiden selanjutnya terus berkesinambungan.

Narasi di atas menggambarkan bagaimana perhatian dan kepedulian pemerintah Amerika, siapa pun presidennya, terhadap kebugaran jasmani warganya. Mereka sungguh menyadari bahwa kebugaran jasmani merupakan faktor krusial dalam pembangunan, baik dari aspek sumber daya manusia, kesehatan, dan produktivitas, maupun ketahanan bangsa dalam jangka panjang. Bagaimana dengan Indonesia? Pada tataran ini kita harus akui, Indonesia tertinggal jauh. Meski sudah banyak penelitian dilakukan yang menyatakan bahwa tingkat kebugaran masyarakat, termasuk anak-anak sangat memprihatinkan. Demikian juga BPJS Kesehatan yang terus mengalami defisit triliunan rupiah sejak didirikan tahun 2014 akibat tingginya angka kesakitan, terutama yang diakibatkan karena gaya hidup yang tidak sehat. Tampaknya fenomena tersebut belum mampu menggetarkan kepedulian pemimpin bangsa ini sehingga lahir terobosan kebijakan sebagaimana yang terjadi di Amerika.

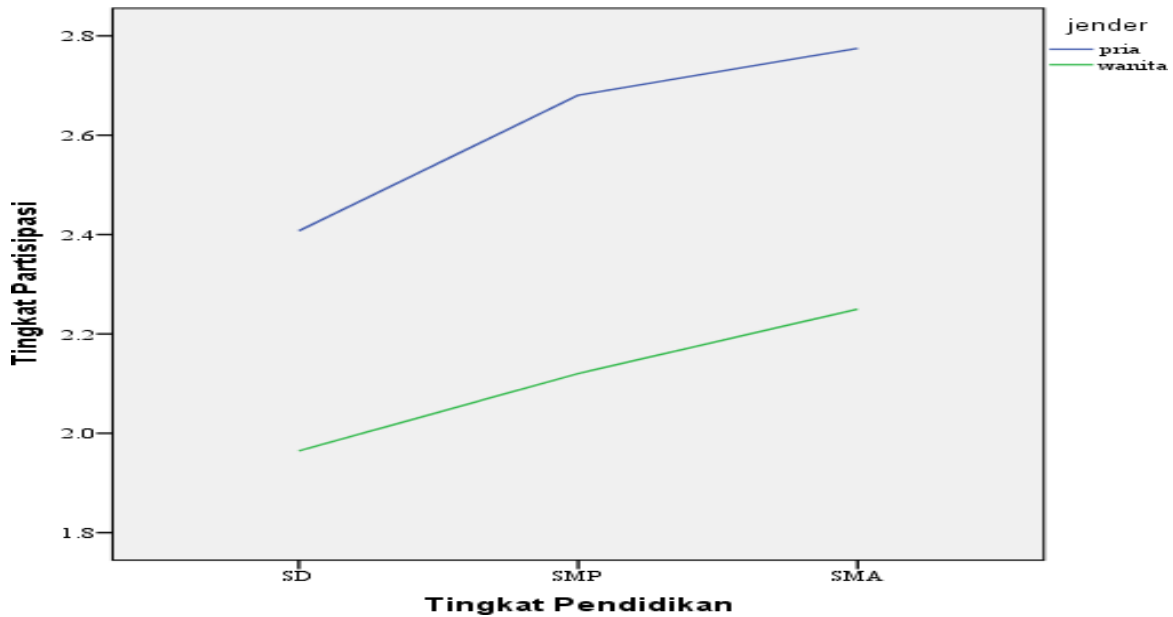
Olahraga Pendidikan di Sekolah: Sudahkan Mencapai Tujuan?

Dalam banyak penelitian, aktivitas fisik yang dilakukan secara terencana, teratur, dan sungguh-sungguh terbukti efektif meningkatkan kebugaran, fungsi-fungsi kognitif, dan karakter (Bailey, 2006; Erickson et al., 2019; Fuchs, 2015; Pharr & Lough, 2016). Sayangnya, hal tersebut tidak terjadi dalam praktik olahraga pendidikan di sekolah. Eksistensi olahraga pendidikan di sekolah sering dipertanyakan karena dianggap telah gagal dalam upaya mencapai tujuan. Meski masalah tersebut tidak hanya terjadi di Indonesia (Hartati, 2018; Indahwati, 2018; Nurhayati, 2018), tetapi juga terjadi di banyak negara (K Hardman, 2003; Ken Hardman, 1999). Rendahnya tingkat kebugaran jasmani dan munculnya berbagai perilaku menyimpang seperti tawuran, pelecehan seksual, perundungan, ketidakjujuran, dan intoleransi merupakan contoh tidak berdayanya olahraga sebagai instrumen pendidikan untuk membangun jiwa dan raga peserta didik sebagai sosok pribadi yang berkarakter. Olahraga juga dikritisi karena tidak mampu untuk membuat peserta didik merasa senang, kompeten dalam melakukan aktivitas fisik dalam berbagai situasi, berpengetahuan memadai tentang bagaimana dan mengapa harus melakukan aktivitas fisik, serta untuk melakukan aktivitas fisik secara teratur sepanjang hayat. Sering didapati bahwa sebagian besar anak *drop out* setelah mengikuti pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah.

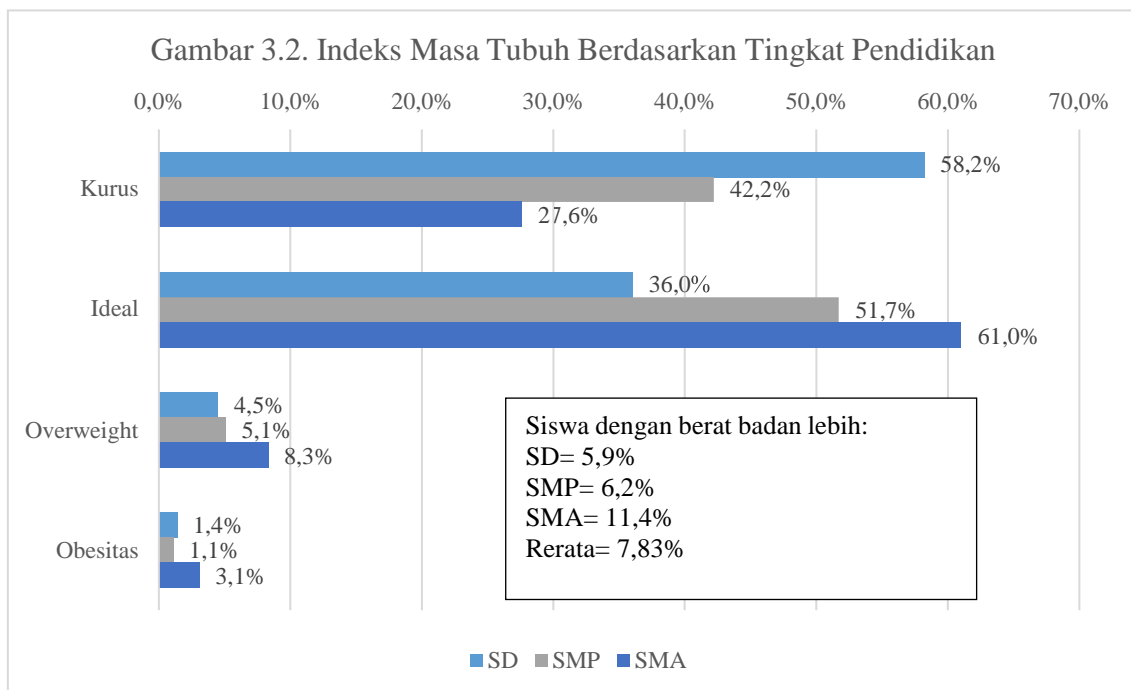
Sejatinya tidak ada yang salah dengan olahraga, ia mengandung sistem gerakan dan sistem nilai yang paripurna. Problemnya ada pada praktik keseharian karena rendahnya mutu guru. Olahraga di sekolah seharusnya dapat menanamkan literasi fisik pada diri anak. Literasi fisik

merupakan aspek yang esensial dan kurang memperoleh perhatian dalam proses belajar-mengajar selama ini. Praktik olahraga di sekolah selama ini masih belum bisa memberikan oase atau pengalaman yang menyenangkan di tengah permasalahan-permasalahan yang semakin menjustifikasi ketidakbermanfaatan pendidikan jasmani dan olahraga di sekolah maupun masyarakat.

Gambar 3.1. Tingkat Partisipasi Olahraga Pelajar Berdasarkan Gender dan Pendidikan

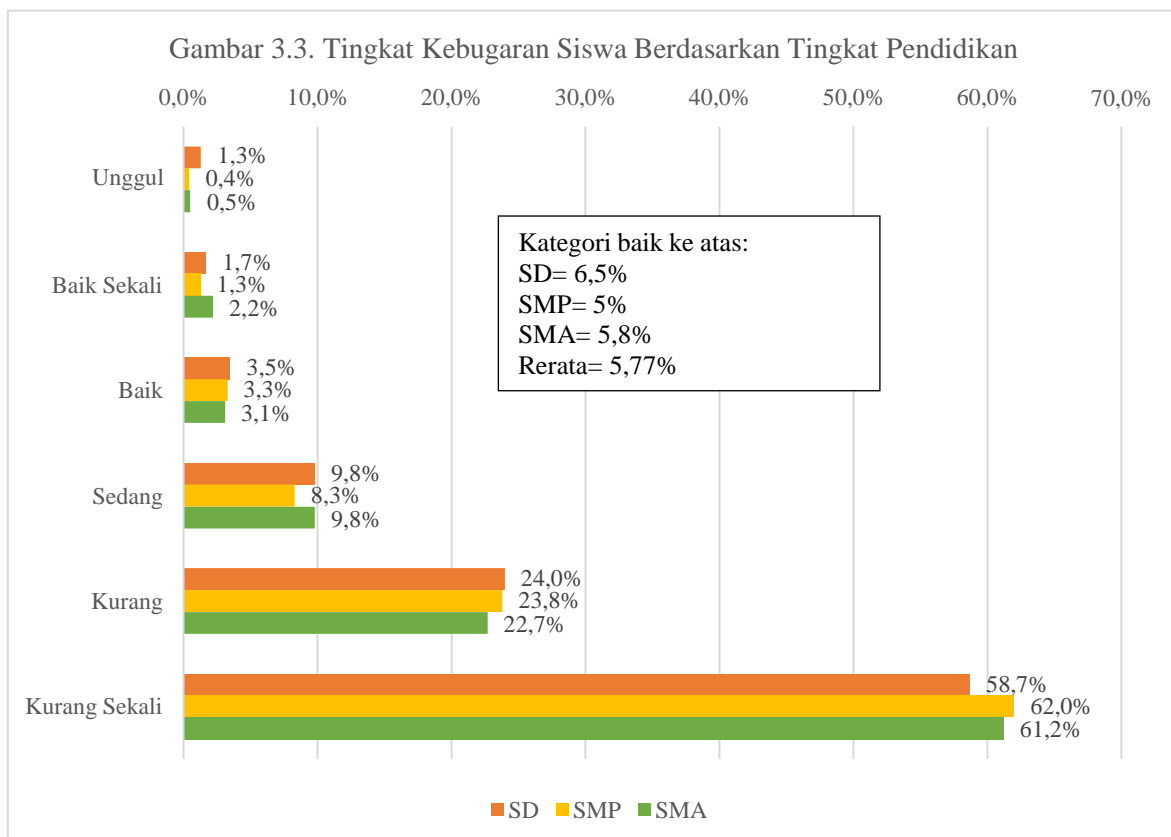


Gambar 3.2. Indeks Masa Tubuh Berdasarkan Tingkat Pendidikan



Laporan ini menyatakan bahwa dari total responden pengumpulan data SDI tahun ini, sebanyak 3.406 (21,3%) berusia 10-19 tahun yang dapat diasumsikan sebagai usia SD, SMP, dan SMA. Usia SD sebanyak 1.256 (36,9%), usia SMP sebanyak 1.256 (33,1%), dan usia SMA sebanyak 1.022 (30%). Dilihat dari tingkat partisipasi olahraga, siswa SD/ sederajat yang aktif berolahraga sebesar 27,9%, siswa SMP/ sederajat sebesar 35,7%, dan siswa SMA/ sederajat sebesar 38,8%. Dari aspek jender, siswa perempuan tingkat partisipasinya jauh lebih rendah dibandingkan dengan siswa laki-laki.

Dari analisis data yang dilakukan ditemukan bahwa pada siswa SD/ sederajat, terdapat 5,9% siswa yang mengalami berat badan lebih, pada siswa SMP/ sederajat sebanyak 6,2% dan pada siswa SMA/ sederajat sebanyak 11,4%. Jika angka tersebut diinterpolasi ke dalam jumlah penduduk yang sesungguhnya, maka akan didapatkan angka yang lebih riil. Menurut data BPS, jumlah siswa SD sebesar 24,8 juta, SMP sebesar 10,1 juta, dan SMA sebesar 10,3 juta (BPS, 2021). Dengan demikian, jumlah siswa SD yang memiliki berat badan lebih sebanyak 1,46 juta anak, siswa SMP sebanyak 0,63 juta anak, dan siswa SMA sebanyak 1,17 juta anak.

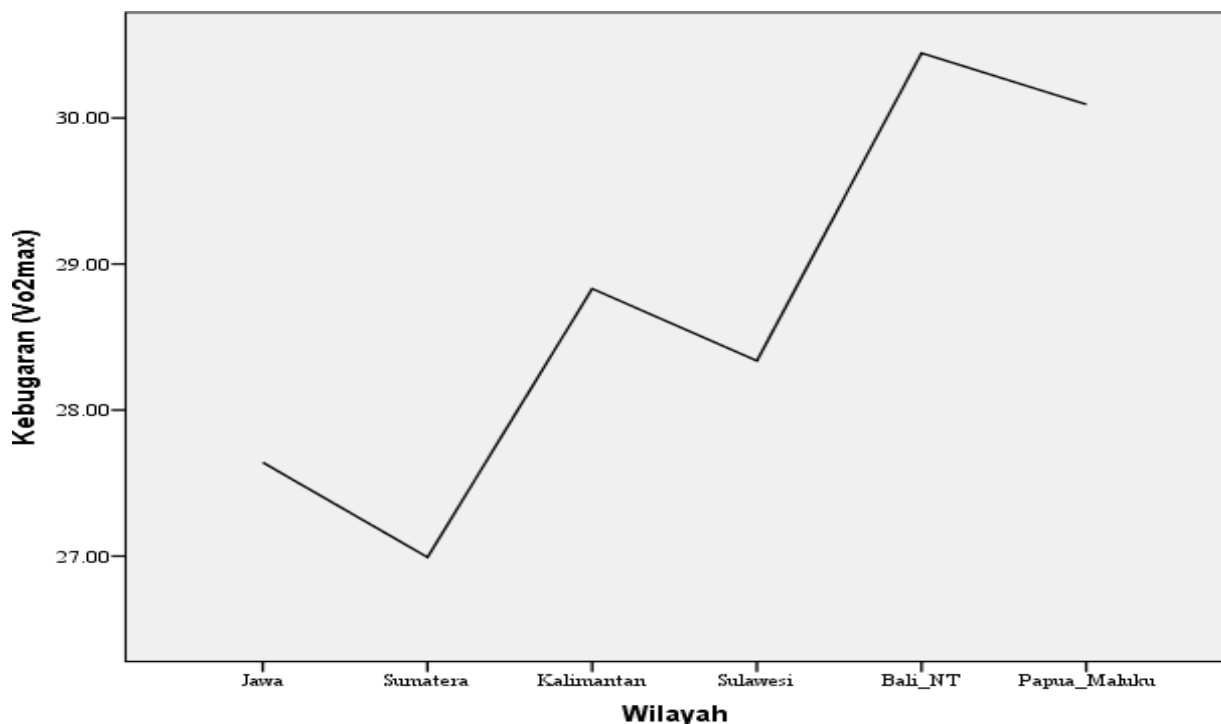


Pada aspek kebugaran jasmani, sebanyak 58,7% siswa SD/ sederajat tingkat kebugarannya masuk pada kategori kurang sekali. Sementara itu, pada siswa SMP/ sederajat sebanyak 62%

dan siswa SMA/ sederajat sebanyak 61,2%. Jika angka tersebut diinterpolasi ke dalam jumlah siswa yang riil, maka didapatkan bahwa jumlah siswa SD yang memiliki kebugaran jasmani “kurang sekali” sebanyak 14,56 juta anak, siswa SMP sebanyak 6,26 juta, dan siswa SMA sebanyak 6,3 juta. Angka tersebut tentu sangat memprihatinkan mengingat mereka yang tingkat kebugarannya rendah sekali memiliki risiko lebih tinggi terkena penyakit (Girardi, Casolo, Nuccio, Gattoni, & Capelli, 2020; Kakanis et al., 2010; Mujika & Padilla, 2000), selain risiko lain seperti rendahnya status kesehatan dan produktivitas dalam belajar.

Lalu, bagaimana dengan tingkat kebugaran pelajar berdasarkan wilayah? Dari analisis data menunjukkan bahwa pelajar di wilayah Sumatera dan Jawa menduduki peringkat terendah, sementara itu pada wilayah Bali-NT dan Papua-Maluku menduduki peringkat tertinggi. Data ini sekaligus mengonfirmasi bahwa wilayah timur, yakni Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua memiliki potensi yang luar biasa pada cabang olahraga yang membutuhkan vo_{2max} tinggi, seperti lari, dayung, dan sepakbola.

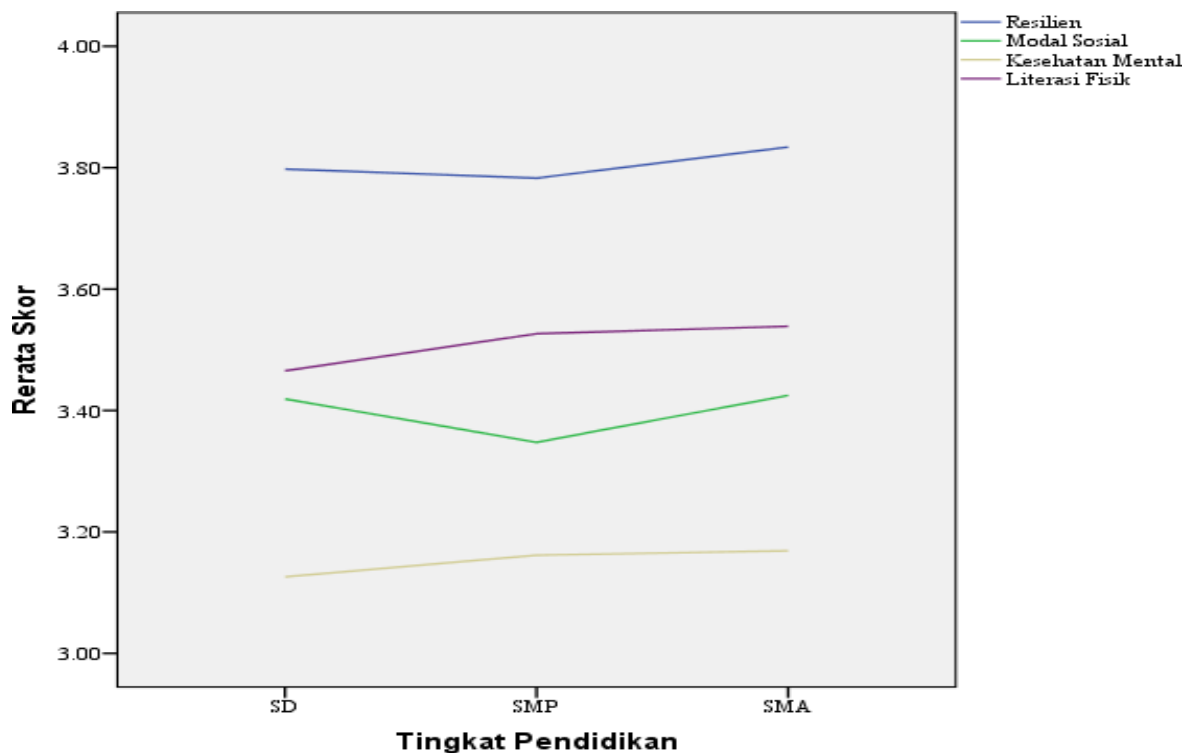
Gambar 3.4. Tingkat Kebugaran Pelajar Berdasarkan Wilayah



Pada responden pelajar juga ditemukan bagaimana kondisi literasi fisik dan tiga aspek mental, yakni kesehatan mental, resilien, dan modal sosial. Pada aspek literasi fisik, capaian siswa SD/ sederajat sebesar 3,46, SMP/ sederajat sebesar 3,53, dan SMA/ sederajat sebesar 3,54 dari skala 1-5. Pada aspek kesehatan mental, capaian siswa SD/ sederajat sebesar 3,13,

SMP/ sederajat sebesar 3,16, dan SMA/ sederajat sebesar 3,17 dari skala 1-5. Pada aspek resilien, capaian siswa SD/ sederajat sebesar 3,80, siswa SMP/ sederajat sebesar 3,79, dan siswa SMA/ sederajat sebesar 3,83 dari skala 1-5. Pada aspek modal sosial, capaian siswa SD/ sederajat sebesar 3,42, siswa SMP/ sederajat sebesar 3,38, dan siswa SMA/ sederajat sebesar 3,42. Dari keempat aspek tersebut, resilien pada siswa merupakan dimensi yang paling kuat. Aspek ini menjelaskan bagaimana para siswa memiliki kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Sementara itu, aspek kesehatan mental menjadi dimensi yang paling lemah. Aspek ini menjelaskan bagaimana para siswa kurang memiliki otonomi dalam mengambil tindakan, kurang bisa mengenali kelebihan dan kekurangan dalam dirinya, dan kurang memiliki tujuan hidup yang jelas.

Gambar 3.5. Rerata Skor Resilien, Modal Sosial, Kesehatan Mental, dan Literasi Fisik Pelajar Berdasarkan Tingkat Pendidikan



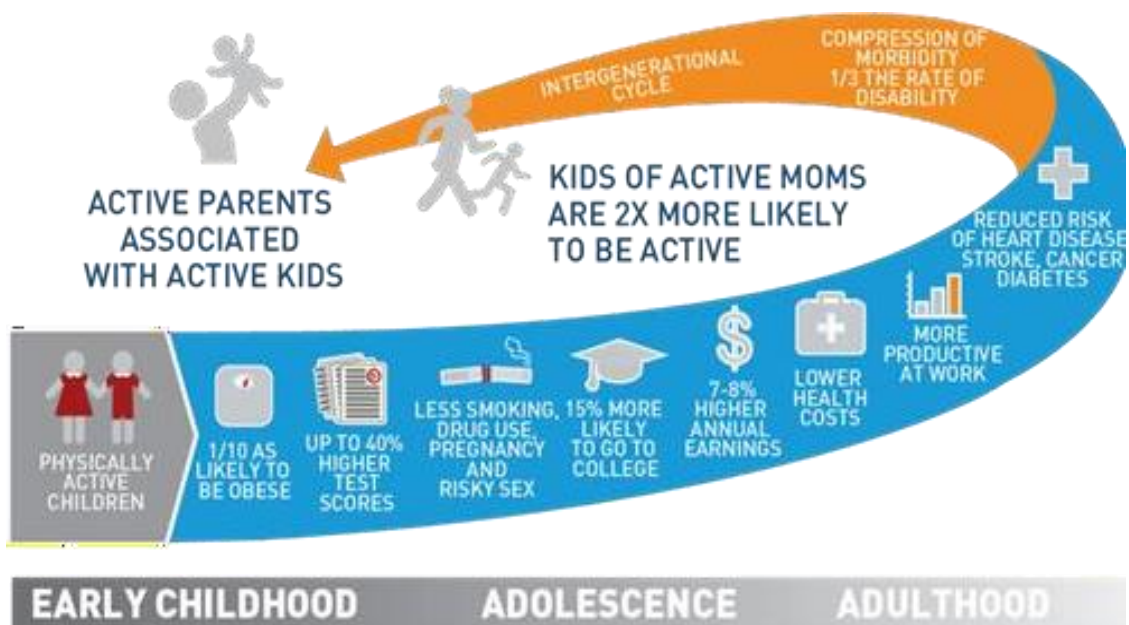
Literasi Fisik, Literasi Kehidupan

Gerak merupakan tanda masih adanya kehidupan. Itu sebabnya, untuk melangsungkan kehidupan, kita perlu terus bergerak yang dalam hal ini melakukan aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang teratur bermanfaat bagi kesehatan, termasuk membantu membangun dan memelihara kesehatan tulang, otot, dan persendian; membantu mengontrol berat badan dan

mengurangi lemak; dan mencegah atau menunda perkembangan tekanan darah tinggi. Olahraga adalah cara paling murah dan mudah untuk sehat. Olahraga dapat mencegah penyakit kronis seefektif pengobatan dan dapat menurunkan risiko 13 jenis kanker yang berbeda, termasuk leukemia payudara, usus besar, hati, dan myeloid (Aspen Institute, 2022).

Mengingat pentingnya aktivitas fisik bagi kelangsungan kehidupan, maka harus terus diupayakan olahraga dilakukan oleh semua orang pada semua level usia. Sayangnya, pola aktivitas fisik cenderung berbeda pada kelompok usia. Pada anak-anak, aktivitas fisik cenderung tinggi dan mengalami puncaknya pada usia remaja (SMA). Setelah itu aktivitas fisik mengalami penurunan yang drastis hingga masa lansia (Maksum, 2020; Maksum & Indahwati, 2020a; Mutohir et al., 2021). Hal yang demikian tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di sejumlah negara. Ada penurunan yang signifikan dalam aktivitas fisik ketika individu berpindah dari masa muda ke masa dewasa. Di Inggris, misalnya, penurunan ini sebanyak 60% selama periode ini (Sport England, 2016). Untuk menggeser jarum pada tingkat sosial aktivitas fisik, kita perlu mengubah cara kita membentuk kebiasaan aktivitas fisik yang langgeng di masa muda.

Gambar 3.6. Manfaat Majemuk dari Aktivitas Fisik Seumur Hidup (Aspen Institute, 2022)



Partisipasi olahraga merupakan prediktor signifikan partisipasi dewasa muda dalam olahraga dan aktivitas kebugaran fisik. Remaja yang berolahraga delapan kali lebih mungkin aktif pada usia 24 tahun dibandingkan remaja yang tidak berolahraga. Tiga dari empat (77%) orang dewasa berusia 30+ yang berolahraga saat ini melakukan olahraga sebagai anak pada

usia sekolah. Hanya 3% orang dewasa yang berolahraga saat ini tidak bermain ketika mereka masih muda (Aspen Institute, 2022). Karena itu, intervensi harus dilakukan pada berbagai tahap perkembangan anak muda untuk mengembangkan kebiasaan aktivitas yang berkelanjutan dan seumur hidup. Mendapatkan hak ini akan menghasilkan manfaat kesehatan, sosial, dan ekonomi yang berlipat ganda selama masa hidup dan lintas generasi dan bahkan dapat mengakibatkan perpanjangan hidup hingga lima tahun. Strategi pencegahan obesitas terbukti juga efektif dilakukan melalui aktivitas fisik. Penelitian menemukan bahwa program aktivitas fisik “after school” terbukti mengurangi obesitas paling signifikan, 1,8% di antara anak-anak usia 6 hingga 12 tahun. Itu dua kali lipat dari dampak yang diproyeksikan cara lain seperti larangan iklan makanan cepat saji yang ditujukan untuk anak-anak (Aspen Institute, 2022).

Secara global, ketidakaktifan fisik mencapai 31% pada orang dewasa berusia 15 ke atas, pada pria sekitar 28% dan wanita 34% (World Health Organization, 2015). Prevalensi aktivitas fisik yang tidak mencukupi tertinggi ada di wilayah Amerika dan Mediterania Timur. Di kedua wilayah ini, hampir 50% wanita kurang aktif, sementara prevalensi untuk pria adalah 40% di Amerika dan 36% di Mediterania Timur. Bagaimana dengan Indonesia? Hasil survei yang dilakukan terhadap anggota masyarakat usia 6 tahun ke atas menunjukkan bahwa 50,6% dari mereka tidak melakukan aktivitas fisik dalam frekuensi yang cukup, prevalensi pria sebesar 42,7% dan wanita sebesar 58,5% (Maksum, 2020). Memasuki usia dewasa hingga lanjut usia, partisipasi individu dalam aktivitas fisik cenderung menurun (Eime et al., 2016; Maksum & Indahwati, 2020a). Padahal pada usia tersebut aktivitas fisik justru sangat dibutuhkan guna menjaga daya tahan tubuh seiring menurunnya fungsi organ dan metabolisme serta meminimalkan gangguan kesehatan. Pandemi Covid-19 memberikan pembelajaran berharga bahwa risiko kematian tertinggi ada pada usia 30 tahun ke atas, apalagi jika memiliki penyakit penyerta (komorbid) seperti jantung, hipertensi, dan diabetes (Driggin et al., 2020; Handayani, Hadi, Isbaniah, Burhan, & Agustin, 2020).

Penghentian terhadap aktivitas fisik atau yang lazim disebut dengan “detraining” membuktikan bahwa individu akan mengalami penurunan dalam beberapa indikator kesehatan tubuh. Periode berhenti olahraga dapat merusak profil hemodinamik dan lipid wanita penderita hipertensi yang lebih tua dengan dislipidemia. Hasil penelitian terhadap sembilan belas wanita tua (± 67 tahun) hipertensi dengan dislipidemia melakukan program latihan multikomponen yang diawasi selama sembilan bulan, diikuti dengan periode penghentian satu tahun. Sementara itu, empat belas wanita tua hipertensi (kelompok kontrol) dengan dislipidemia mempertahankan rutinitas harian mereka tanpa olahraga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa latihan dapat meningkatkan profil hemodinamik dan lipid, sedangkan tiga bulan penghentian

menurunkan semua parameter, dengan pengecualian tekanan darah diastolik. Sembilan bulan program latihan secara signifikan meningkatkan profil hemodinamik dan lipid serta kapasitas fungsional wanita tua hipertensi dengan dislipidemia (Leitão et al., 2022).

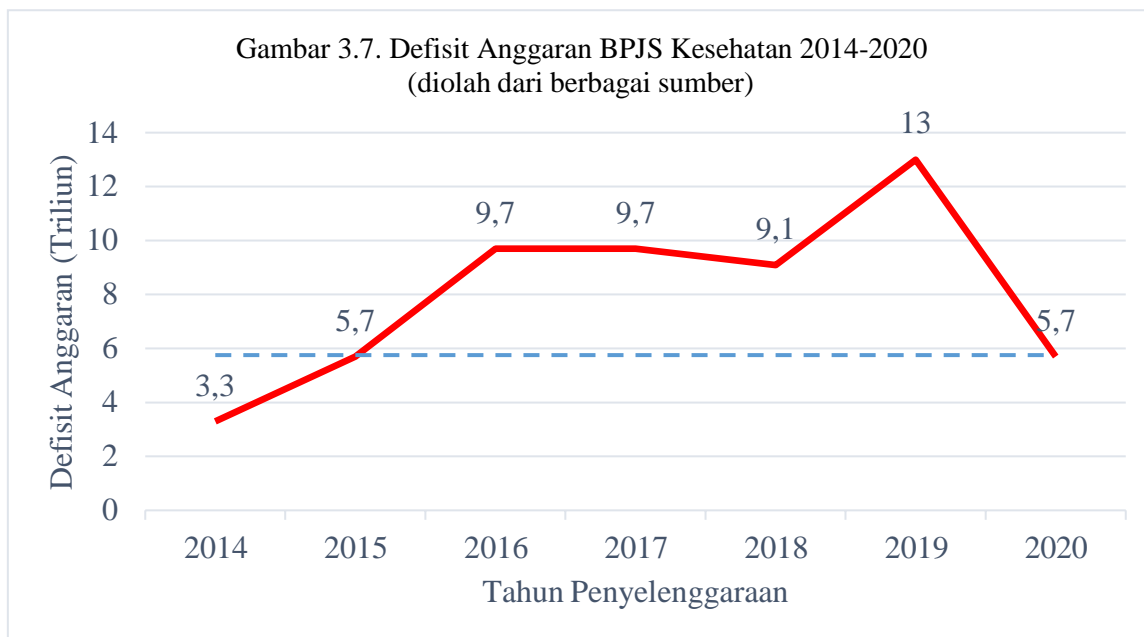
Mempromosikan Olahraga atau Membiayai Orang Sakit?

Dalam logika kesehatan yang berlaku universal, upaya preventif lebih efektif dibandingkan dengan upaya kuratif. Meta-analysis terhadap 231 studi yang mengkaji tentang efektivitas biaya kesehatan menunjukkan bahwa intervensi preventif lebih efektif dan lebih murah daripada intervensi kuratif. Secara umum, biaya preventif lebih hemat 41-59% dibanding biaya kuratif (Simoens, 2011). Sayangnya, meski aktivitas fisik secara ilmiah telah terbukti efektif berpengaruh terhadap kesehatan, baik fisik maupun psikis, tetapi tidak banyak individu yang melakukannya. Komitmen pemerintah dalam mempromosikan aktivitas fisik sebagai upaya preventif juga masih lemah.

Penyakit tidak menular seperti jantung, diabetes, hipertensi, dan stroke adalah pembunuh utama di era modern. Sekitar 70% kematian umat manusia di dunia disebabkan karena penyakit ini, yang oleh WHO disebut sebagai *noncommunicable disease*. Seiring waktu prevalensi penyakit ini di Indonesia terus meningkat (Maksum, 2022; Maksum & Indahwati, 2020b). Kurangnya aktivitas fisik adalah penyebab utama sebagian besar penyakit kronis ini. Aktivitas fisik/olahraga diyakini dapat mencegah 35 penyakit kronis seperti kematian prematur, kebugaran kardiorespirasi rendah, obesitas, disfungsi kognitif, dan kecemasan (Booth, Roberts, & Laye, 2012).

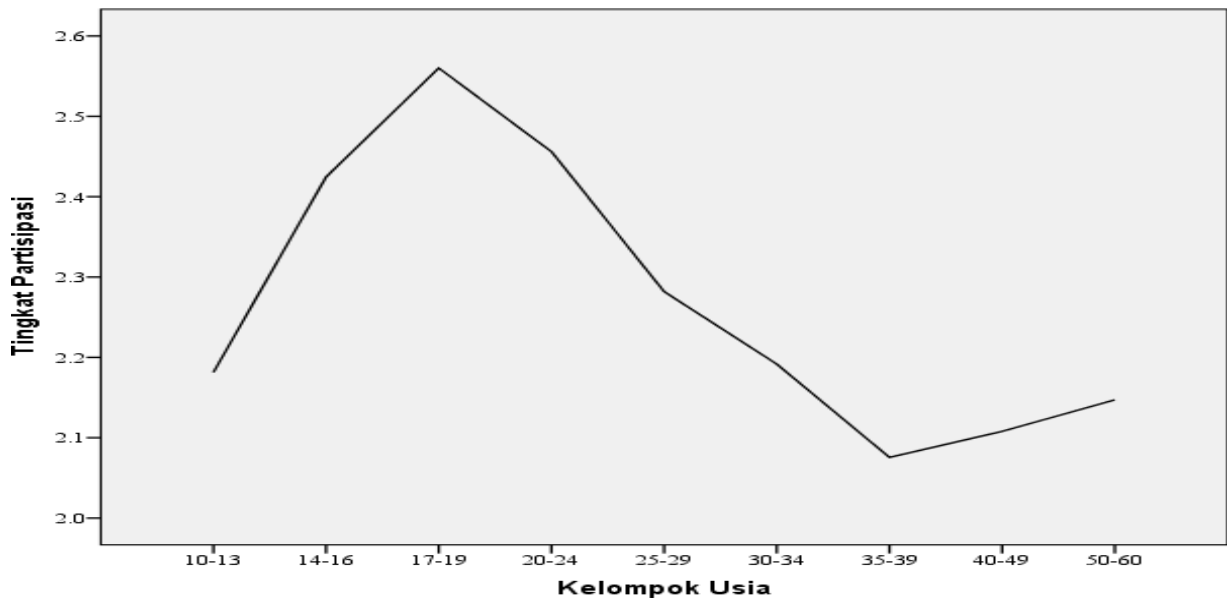
Menurut catatan Kementerian Kesehatan, dalam kurun waktu dua dekade terakhir, penyakit tidak menular menjadi penyebab utama dari beban penyakit. Pembiayaan kesehatan sebanyak 23,9% - 25% untuk pengeluaran penyakit katastrofik. Sekelompok penyakit yang membutuhkan perawatan ekstra dan biaya tinggi. Empat penyakit katastrofik tertinggi meliputi jantung, gagal ginjal, kanker dan stroke. Pembiayaan penyakit ini akan terus meningkat seiring gaya hidup yang tidak sehat. Merujuk data dari BPJS, jumlah kasus dan pembiayaan penyakit katastrofik dari tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami kenaikan. Pada tahun 2014 terdapat 6.116.535 kasus dengan total pembiayaan sebesar 9,1 triliun. Sedangkan pada tahun 2018, angkanya meningkat menjadi 19.243.141 kasus dengan jumlah pembiayaan sebesar 20,4 triliun. Penyakit ini banyak dialami oleh usia di atas 50 tahun. Namun dalam perkembangannya, penderita penyakit ini semakin muda. Berdasarkan hasil Riskesdas 2018 membuktikan bahwa usia 20–49 sudah banyak yang terkena penyakit ini (Kemenkes RI, 2022).

Sayangnya, porsi pengeluaran kesehatan Indonesia masih berfokus pada upaya kuratif sehingga biaya kesehatan yang dikeluarkan oleh pemerintah dan masyarakat terus membengkak. BPJS Kesehatan sejak didirikan tahun 2014 sampai sekarang terus mengalami defisit hingga triliunan rupiah. Pada tahun 2014 BPJS Kesehatan mengalami defisit sebesar 3,3 triliun, naik menjadi 5,7 triliun pada tahun 2015, dan pada tahun 2019 menjadi 13 triliun. Jika di rata-rata, defisit anggaran BPJS Kesehatan 2014-2020 sebesar 8 triliun. Angka tersebut hampir 4 kali lipat anggaran yang diterima oleh Kemenpora dalam setiap tahunnya.

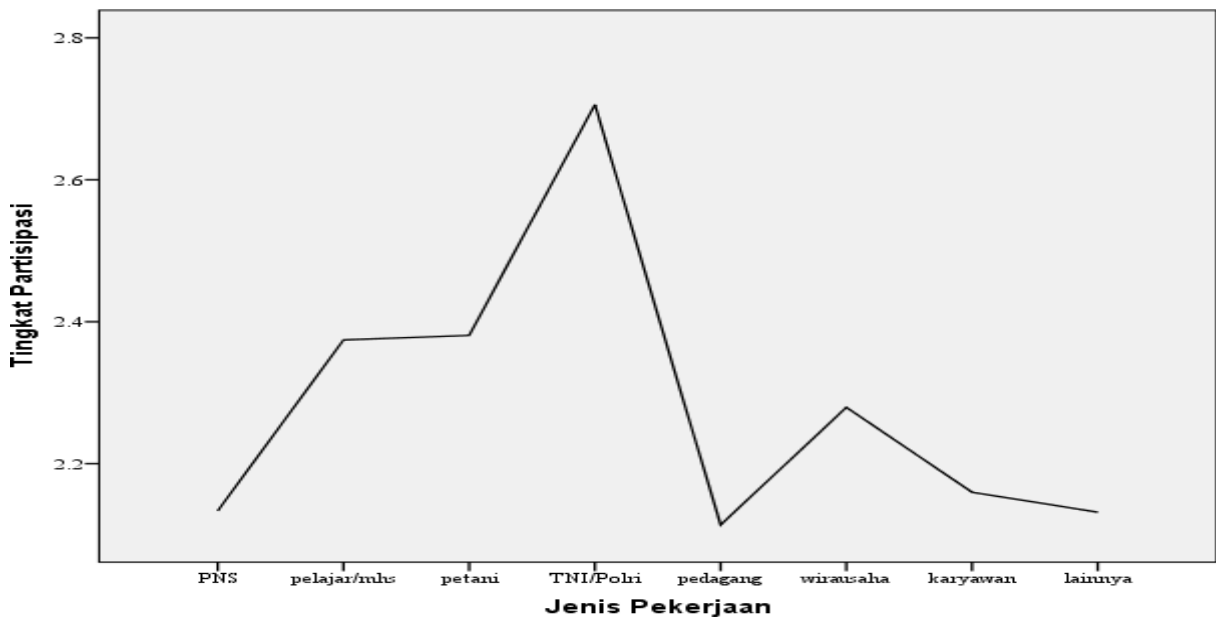


Masalah tersebut sebenarnya bukan hanya khas Indonesia, tetapi juga terjadi di beberapa negara. Di Inggris, misalnya, pemerintah harus mengeluarkan anggaran sebesar £7,4 milyar atau sekitar 125,4 triliun rupiah per tahun (Sport England, 2016). Ternyata ada persoalan serius dibalik keberhasilan Inggris dalam olahraga elit yang konsisten menempati 5 besar Olimpiade. Pembangunan olahraga tidak boleh sekadar terbius oleh hegemoni popularitas sesaat tetapi mengabaikan kebutuhan publik yang justru berdimensi jangka panjang. Kesadaran yang sama juga muncul di Australia ketika melihat data bahwa 68% pria dan 55% wanita dewasa mengalami kelebihan berat badan dan obesitas. Pada usia anak dan remaja, 17% mengalami kelebihan berat badan dan 8% mengalami obesitas (Australian Government, 2010). Para pengambil kebijakan tampaknya perlu memahami pembangunan olahraga dari perspektif yang lebih komprehensif.

Gambar 3.8. Tingkat Partisipasi Olahraga Berdasarkan Kelompok Usia



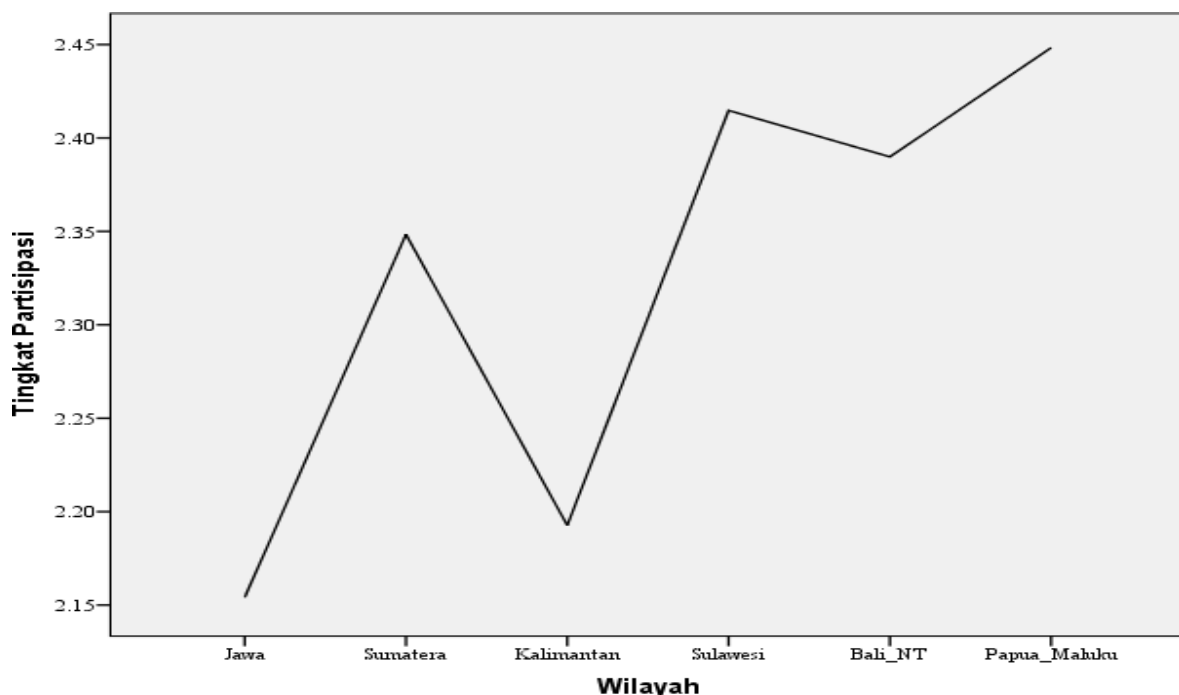
Gambar 3.9. Tingkat Partisipasi Olahraga Berdasarkan Jenis Pekerjaan



Prevalensi penyakit tidak menular yang tinggi yang kemudian berdampak pada biaya kesehatan dapat dikurangi secara signifikan melalui peningkatan aktivitas fisik atau olahraga. Idealnya, intervensi kebijakan dilakukan dengan menyoar semua kelompok umur, mulai dari anak-anak sampai dengan lanjut usia. Namun karena pertimbangan efisiensi dan efektivitas, maka intervensi kebijakan bisa diarahkan kepada kelompok usia yang berdasarkan data memiliki kerentanan. Laporan ini menemukan bahwa tingkat partisipasi pada usia 10-13 tahun

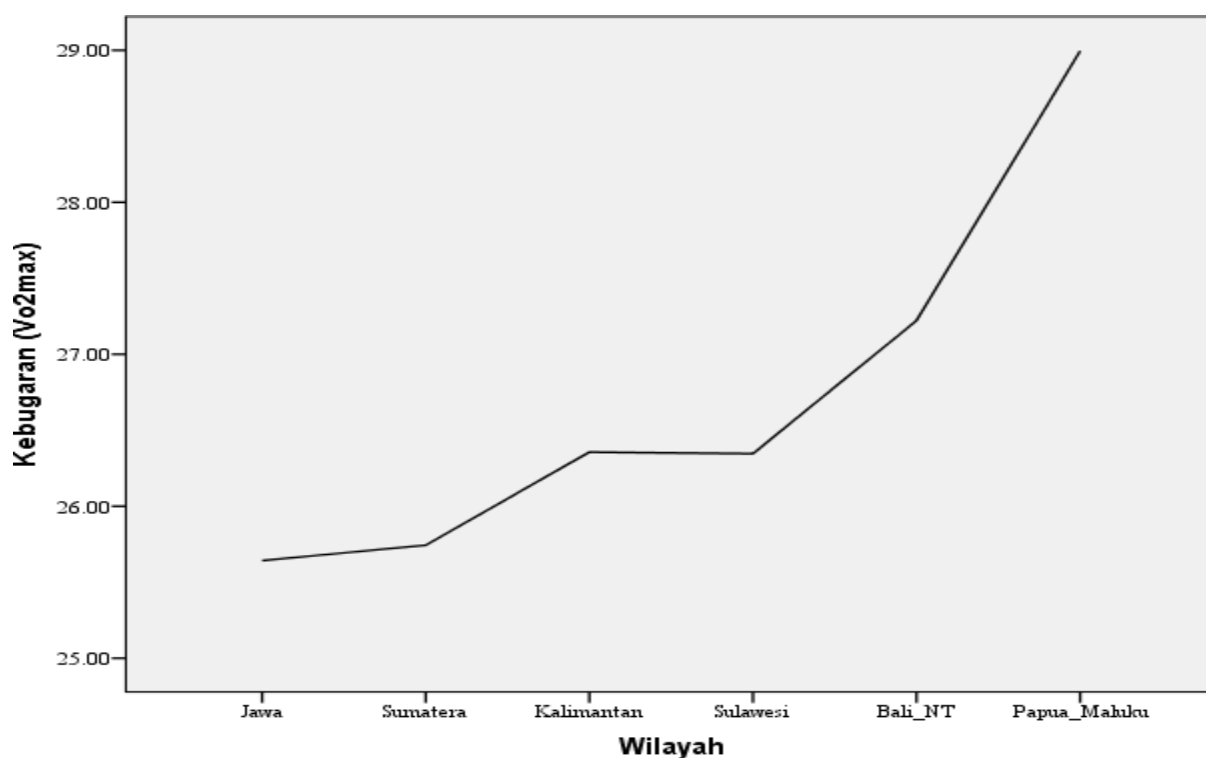
relatif rendah, kemudian meningkat pada kelompok usia 14-16 tahun, dan puncaknya terjadi pada kelompok usia 17-19 tahun. Setelah itu, seiring usia tingkat partisipasi menurun dan titik terendah terjadi pada kelompok usia 35-39 tahun. Dilihat dari jenis pekerjaan, kelompok TNI/Polri memiliki tingkat partisipasi yang paling tinggi, kemudian diikuti kelompok pelajar/mahasiswa, dan petani. Tingkat partisipasi terendah terjadi pada kelompok PNS dan pedagang.

Gambar 3.10. Tingkat Partisipasi Olahraga Berdasarkan Wilayah



Dari aspek wilayah, tingkat partisipasi olahraga di Jawa tercatat paling rendah dibandingkan wilayah yang lain. Sementara itu, tingkat partisipasi tertinggi ada di wilayah Papua-Maluku. Data tersebut membuktikan bahwa meski di wilayah Jawa memiliki SDM dan infrastruktur yang lebih memadai, tidak serta merta tingkat partisipasi olahraganya akan tinggi. Dalam banyak penelitian, tidak ada korelasi yang signifikan antara status sosial ekonomi dan pendidikan terhadap tingkat keterlibatan dalam olahraga (Eime et al., 2016; Maksum, 2022; World Health Organization, 2015). Laporan ini juga menemukan fakta bahwa tingkat partisipasi olahraga berhubungan dengan tingkat kebugaran jasmani. Berdasarkan pada aspek wilayah, tingkat kebugaran terendah terjadi di daerah Jawa dan Sumatera. Sementara itu, tingkat kebugaran tertinggi terjadi di wilayah Bali-Nusa Tenggara dan Papua-Maluku.

Gambar 3.11. Tingkat Kebugaran Jasmani Berdasarkan Wilayah



Tabel 3.1. Anggaran yang Dikelola Kemenpora Tahun 2021

Alokasi Anggaran	Jumlah	Persentase
Sekretariat Kemenpora	280.142.595.000	10,5%
Deputi Pemberdayaan Pemuda	36.689.566.000	1,4%
Deputi Pengembangan Pemuda	73.460.259.000	2,8%
Deputi Pembudayaan Olahraga	206.638.151.000	7,7%
Deputi Prestasi Olahraga	1.897.423.435.000	71,1%
Unit Pelayanan Terpadu	19.690.000.000	0,7%
LPDUK	71.000.000.000	2,7%
Dekonsentrasi	84.260.724.000	3,2%
	2.669.304.730.000	100,0%

Indikasi paling mudah untuk menilai komitmen kebijakan adalah pada besarnya anggaran. Semakin besar anggaran yang dialokasikan, semakin kuat indikasi komitmen yang dicurahkan untuk bidang tersebut. Dari anggaran sebesar 2,6 triliun yang diterima Kemenpora, 84,8% atau sekitar 2,2 triliun untuk bidang olahraga. Selebihnya untuk bidang pemuda dan tata kelola manajemen (Kemenpora, 2021). Dari alokasi anggaran olahraga tersebut, 90,2% untuk

olahraga prestasi dan 9,8% untuk olahraga masyarakat. Jumlah anggaran olahraga sebesar 2,2 triliun tersebut jika dibagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang sebesar 270 juta, maka estimasi alokasi anggaran per orang sebesar Rp8.388. Jika angka tersebut didalami dengan memisahkan antara anggaran olahraga prestasi dan olahraga masyarakat dan diasumsikan sasaran olahraga masyarakat sebesar 95% jumlah penduduk dan olahraga prestasi 5% dari jumlah penduduk, maka diperoleh alokasi anggaran sebesar Rp806 per orang untuk olahraga masyarakat dan sebesar Rp140.550 per orang untuk olahraga prestasi.

Tabel 3.2. Rekapitulasi Anggaran Kemenpora Tahun 2021

Alokasi Anggaran	Jumlah	Persentase
Manajemen	300.349.203.000	11,3%
Olahraga	2.264.705.702.000	84,8%
Pemuda	104.249.825.000	3,9%
	2.669.304.730.000	100%

Tabel 3.3. Anggaran Olahraga Tahun 2021

Deputi	Jumlah	Persentase
Pembudayaan Olahraga	206.638.151.000	9,8%
Prestasi Olahraga	1.897.423.435.000	90,2%
	2.104.061.586.000	100,0%

Konon, anggaran pembudayaan olahraga sebesar 206,6 milyar tersebut sebagian besar untuk bonus dan alokasi lain yang menunjang olahraga prestasi. Jika lebih didalami lagi alokasi anggaran yang benar-benar untuk pembudayaan olahraga sekitar 80 milyar. Apabila angka tersebut dibagi dengan sasaran olahraga masyarakat, maka besarnya menjadi semakin kecil lagi, yakni sebesar Rp312 per orang. Tentu sebuah angka yang sangat kecil untuk mendorong perubahan perilaku masyarakat untuk berolahraga.

Membangun Peradaban Sosial yang Bermartabat

Jika direfleksikan secara mendalam dan dengan pikiran tenang, kita akan sampai pada kesimpulan bahwa aktivitas olahraga memiliki tujuan yang mulia. Tujuan utama olahraga bukan meraih kemenangan yang diukur dengan medali seperti yang banyak persepsikan orang, termasuk para pejabat dan tokoh politik. Olahraga juga tidak bertujuan untuk mengalahkan dan bahkan mencederai pihak lain seperti yang banyak diekspresikan oleh para pecundang. Kita

bisa telusuri esensi olahraga dari pikiran jernih penggagas Olimpiade modern, Barron Pierre de Coubertin, seorang filosof dan pendidik berkebangsaan Perancis. Dalam tulisannya, ia banyak menguraikan bagaimana olahraga, yang di dalamnya terdapat unsur permainan dan kesenangan, diyakini menjadi instrumen yang efektif untuk membentuk nilai-nilai moral dan kepribadian yang dalam jangka panjang berwujud peradaban yang bermartabat (Coubertin, 2000; McFee, 2012). Logika pemikiran Coubertin sangat bisa dipahami, dalam banyak penelitian, proses belajar akan efektif manakala dilakukan dalam suasana yang menggembirakan. Penanaman nilai-nilai kemanusiaan dan peradaban seperti kejujuran, keunggulan, persahabatan, dan respek pada aturan tidak bisa dilakukan melalui indoktrinasi. Itu sebabnya, Olimpiade dibuat dan IOC didirikan.

Pendek kata, olahraga bukanlah tujuan, melainkan alat untuk mencapai tujuan. Karena itu, formulasi visi IOC adalah membangun dunia yang lebih baik melalui olahraga – *to build a better world through sport* (IOC, 2022). Ada tiga nilai yang menjadi acuan perilaku bagi siapa pun yang berkecimpung dan berkhidmat dalam olahraga, yakni keunggulan, respek, dan persahabatan. Ketiga sistem nilai tersebut kemudian ditransformasikan ke dalam prinsip kerja IOC, termasuk komite olimpiade suatu negara dan federasi olahraga, yakni universalitas dan solidaritas, kesatuan dalam perbedaan, otonomi dan tatakelola yang baik, dan keberlanjutan. Logika inilah yang menjelaskan mengapa Presiden IOC, Thomas Bach, berdasarkan keputusan rapat memberikan sanksi kepada Rusia sehubungan dengan invasi yang dilakukan kepada Ukraina.

IOC melarang partisipasi atlet dan pejabat Rusia dalam kompetisi internasional. Rusia juga dilarang menjadi penyelenggara even olahraga internasional. Sanksi tersebut sesungguhnya bukan ditujukan kepada para atlet dan komite olimpiade Rusia, tetapi ditujukan kepada mereka yang bertanggung jawab terhadap invasi tersebut. Dalam pandangan IOC, apa yang dilakukan Rusia dinilai melanggar Olympic Charter yang kebetulan sejalan dengan nilai-nilai yang diperjuangkan oleh PBB (IOC, 2020, 2021). Padahal Olympic Charter merupakan konstitusinya olahraga. Semua aktivitas dan penyelenggaraan olahraga harus mengacu dan berdasarkan pada prinsip dan ketentuan yang diatur dalam Olympic Charter.

Dalam praktik selama ini, IOC sangat konsisten menerapkan nilai-nilai tersebut, bahkan “zero tolerance” terhadap pelanggaran. Pada Olimpiade Tokyo 2021, misalnya, pelari Britania Raya, Zharnel Hughes, didiskualifikasi karena mencuri start dalam final lari 100 meter. Sejatinya ia berpeluang mendapatkan medali, namun ia harus gagal sebelum bertanding karena tindakan yang tidak sportif. Kejadian serupa juga pernah dialami atlet bulutangkis Indonesia, Greysia Polii. Ia dan pasangannya, Meiliana Jauhari, didiskualifikasi pada gelaran Olimpiade

London 2012 karena dianggap sengaja mengalah saat menghadapi Ha Jung Eun/Kim Min Jung dari Korea Selatan. Mereka sengaja melakukan tindakan tersebut agar terhindar dari pasangan Wang Xiaoli/Yu Yang dari China di babak berikutnya. Tindakan tersebut dinilai melanggar *code of conduct*, yakni tidak bersungguh-sungguh memenangkan pertandingan dan merusak reputasi bulutangkis.

Dalam kaitan tersebut, olahraga sesungguhnya dapat menjadi wahana membangun peradaban yang bermartabat. Karena itu, tragedi kerusuhan suporter yang terjadi pada 1 oktober 2022 di Kanjuruhan Malang sangat disesalkan. Berdasarkan pengungkapan fakta disimpulkan bahwa kerusuhan yang terjadi pasca pertandingan sepak bola antara Arema FC vs Persebaya karena penyelenggara pertandingan, termasuk aparat keamanan, yang tidak profesional, tidak memahami tugas dan peran masing-masing (TGIPF, 2022). Peristiwa tersebut menyebabkan 135 orang meninggal dan 574 luka-luka, baik dari pihak aparat keamanan maupun suporter. Tragedi Kanjuruhan merupakan kejadian paling mematikan sepanjang sejarah sepakbola Indonesia. Tentu, kejadian tersebut menimbulkan duka yang mendalam dan menyisakan pertanyaan, bagaimana mungkin menonton sepakbola yang seharusnya menikmati gol-gol indah harus berujung dengan merengang nyawa?

Secara hipotetik, olahraga dapat berkontribusi pada pengurangan perilaku kriminal dan memperkuat resilien. Banyak penjelasan dalam kriminologi di mana banyak faktor risiko dan proteksi mempengaruhi munculnya tindakan kriminal (Jugl, Bender, & Lösel, 2021; Sapkota & Neupane, 2020). Namun, baik faktor risiko maupun protektif, ada hubungan stimulus respon dari akumulasi pengaruh yang tidak bisa begitu saja dijelaskan dalam satu pendekatan teoretis tunggal. Olahraga dapat secara langsung bersifat protektif tetapi juga dapat mempengaruhi variabel dan proses lain yang memiliki efek risiko. Interaksi kompleks telah ditemukan antara agresi dan faktor biologis. Hormon dan neurotransmitter seperti rendahnya kadar serotonin atau peningkatan kadar testosteron dikaitkan dengan tingkat agresi dan perilaku kriminal yang lebih tinggi (Platje et al., 2015).

Aktivitas fisik ditemukan secara positif mempengaruhi produksi hormon, yang pada gilirannya menurunkan dan menghambat perilaku kekerasan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa partisipasi olahraga dapat mengurangi agresivitas dan kekerasan (Jugl et al., 2021; Platje et al., 2015). Meta analisis terhadap 13 hasil penelitian ditemukan efek moderat dari partisipasi dalam olahraga terkait tindak kejahatan. Peserta menunjukkan penurunan yang signifikan dalam hasil seperti agresivitas atau perilaku anti-sosial. Riset juga menemukan hasil psikologis seperti harga diri atau kesejahteraan mental, yang juga meningkat secara signifikan ketika berpartisipasi dalam program olahraga (Jugl et al., 2021).

Laporan ini juga menemukan fakta bahwa mereka yang rutin berolahraga memiliki resilien, modal sosial, dan *well-being* atau kesejahteraan psikis yang lebih baik. Resilien merupakan kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dan ketangguhan dalam menghadapi kesulitan. Modal sosial adalah perasaan bersama sebagai warga bangsa yang memungkinkan mereka percaya satu dengan yang lain. Sementara itu, *well-being* mengacu pada kesejahteraan psikis, yakni suatu kondisi di mana individu dapat bertindak secara otonom, dapat menerima kelebihan dan kekurangan dirinya, dan memiliki tujuan hidup yang jelas. Kondisi tersebut menjadi variabel penting bagi individu, baik sebagai bagian dari masyarakat maupun perkembangan dirinya. Individu dengan tingkat pemahaman dan penghayatan yang tinggi terkait resilien, modal sosial, dan *well-being* akan terhindar dari perilaku menyimpang, apalagi yang mengarah pada tindak kejahatan.

Tabel 3.4. Uji Beda Kondisi Resilien, Modal Sosial, dan Well-being menggunakan Anova Antara Mereka yang Rutin Berolahraga dan Tidak

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Resilien	Between Groups	13.762	1	13.762	51.385	.000
	Within Groups	4283.483	15994	.268		
	Total	4297.245	15995			
Modal Sosial	Between Groups	21.731	1	21.731	59.046	.000
	Within Groups	5886.248	15994	.368		
	Total	5907.979	15995			
Well-being	Between Groups	2.213	1	2.213	7.804	.005
	Within Groups	4535.422	15994	.284		
	Total	4537.635	15995			

Dalam kongres PBB tentang pencegahan kejahatan dan peradilan pidana pada tahun 2015, ada konsensus bahwa pendidikan untuk semua anak dan remaja merupakan dasar untuk pencegahan kejahatan dan untuk mempromosikan budaya hukum yang mendukung supremasi hukum dan hak asasi manusia dengan tetap menghormati identitas budaya. Negara anggota UNESCO telah mengakui pentingnya pemberdayaan pemuda, melalui pendidikan, sebagai hal penting untuk mencegah ekstremisme kekerasan (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018). Terkait hal tersebut, banyak program yang menggunakan olahraga sebagai alat pencegahan kejahatan atau untuk membangun jembatan sosial, terutama di Eropa, Afrika, Amerika Latin dan Utara, dan pada tingkat yang lebih terbatas, di Timur Tengah.

Secara umum, sebagian besar kegiatan berbasis olahraga yang dipertimbangkan adalah pembentukan sikap sosial di alam terbuka, respek terhadap orang lain, dan taat pada aturan.

Ada harapan bahwa dampaknya bukan sekadar mengatasi kriminal dalam jangka pendek, tetapi memiliki dampak berkelanjutan jangka panjang. Tentu bukan hanya program olahraga, tetapi perlu dikombinasikan dengan program lain seperti pendidikan keterampilan dan kejuruan. Dengan demikian dapat disebut sebagai program “olahraga plus”. Ternyata, pendekatan gabungan semacam ini termasuk yang paling efektif dan berdampak, termasuk dalam jangka panjang (United Nations Office on Drugs and Crime, 2018).

Program semacam ini belum banyak diterapkan di Indonesia. Padahal potensinya sangat efektif untuk menurunkan perilaku menyimpang dan tingkat kejahatan, khususnya yang dilakukan oleh para remaja. Mengacu data kriminalitas yang dikeluarkan oleh Mabes Polri tahun 2021, narkoba merupakan jumlah kasus tertinggi yakni sebanyak 32.438 kasus, penipuan/perbuatan curang sebanyak 28.042 kasus, pengeroyokan 6.124 kasus, dan mabuk ditempat umum 708 kasus (Polri, 2022). Selain itu, berdasarkan data riset dasar kesehatan, terdapat 58,8% remaja usia 10-19 tahun yang pernah hamil (Kemenkes, 2018). Tingkat perkawinan anak di Indonesia juga termasuk tinggi. Prevalensi pemuda yang merokok 25,07% dan angka kesakitan pemuda sebesar 0,23%. Program olahraga yang didesain secara khusus diharapkan mampu berkontribusi dalam menurunkan risiko perilaku kurang sehat dan tindakan kriminal di atas.

Bab 4 Daya Saing Olahraga Prestasi

Ada korelasi yang cukup kuat antara prestasi olahraga dengan kemajuan suatu bangsa. Negara dengan sumber daya manusia berkualitas, termasuk di dalamnya ilmu pengetahuan dan teknologi, dan ditunjang oleh kemajuan ekonomi, maka umumnya mereka memiliki prestasi olahraga yang luar biasa. Kita bisa periksa dari sepuluh besar negara peringkat Olimpiade Tokyo 2021. Mereka antara lain Amerika, China, Jepang, Inggris, dan Australia. Logika tersebut juga bisa digunakan untuk menjelaskan kesuksesan Jawa Barat, Jawa Timur, dan DKI Jakarta dalam setiap kali diselenggarakan PON. Mereka selalu mendominasi perolehan medali dibandingkan dengan 31 provinsi yang lain.

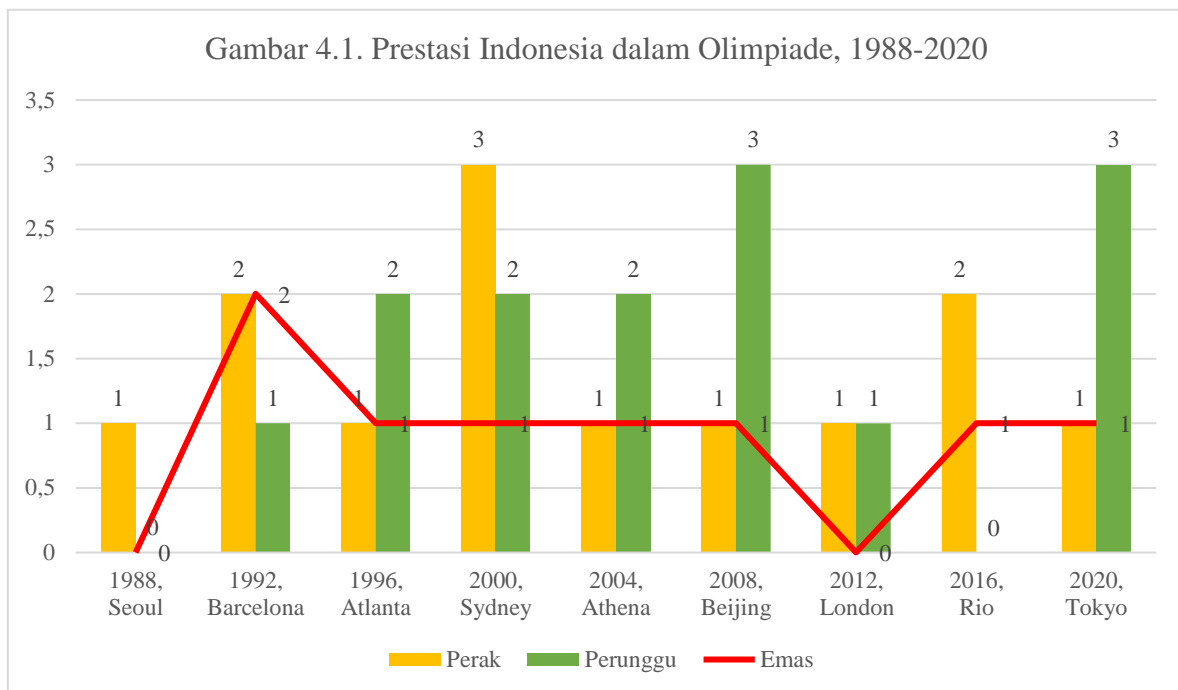
Pada kondisi tertentu bisa saja terjadi, misalnya ketika suatu negara menjadi tuan rumah kejuaraan, maka ia memiliki probabilitas yang tinggi untuk meningkatkan peringkatnya. Suatu negara yang menjadi penyelenggara, ia akan mengkapitalisasi dan menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki. Hal tersebut dapat terjadi pada konteks SEA Games, Asian Games, maupun Olimpiade. Sayangnya, dalam banyak kasus energi tersebut memudar seiring berakhirnya kejuaraan yang diselenggarakan.

Capaian Olahraga Prestasi: Sampai di Mana?

Pada bagian ini dipaparkan bagaimana capaian prestasi olahraga Indonesia di forum internasional. Keikutsertaan Indonesia pada Olimpiade dimulai sejak tahun 1952 di Helsinki. Sepanjang partisipasi tersebut, baru pada tahun 1988 Indonesia mendapatkan medali perak dari cabang olahraga panahan melalui trio srikandi Indonesia, Lilies Handayani, Nurfitriana Saiman, dan Kusuma Wardani. Sayangnya, setelah itu panahan tidak lagi bisa mempersembahkan medali hingga sekarang. Puncak capaian tertinggi Indonesia terjadi pada Olimpiade Barcelona 1992, ketika Alan Budi Kusuma dan Susi Susanti meraih medali emas dari cabang olahraga bulutangkis. Setelah itu, bulutangkis relatif konsisten menyumbangkan medali emas hingga sekarang, kecuali pada Olimpiade London 2012. Pada periode berikutnya, tepatnya Olimpiade Sydney 2000, cabang olahraga angkat besi mulai membuahkan hasil, menyumbangkan medali bagi Indonesia. Hingga sekarang, angkat besi relatif konsisten menyumbangkan medali meski belum sampai pada medali emas.

Dari uraian di atas nampak bahwa baru tiga cabang olahraga yang berhasil memberikan kontribusi berupa medali sepanjang perjalanan Indonesia mengikuti Olimpiade. Pertanyaannya kemudian, bagaimana dengan cabang olahraga yang lain. Mencermati histori perjalanan tersebut, kita juga dapat menyimpulkan bahwa selama 30 tahun prestasi Indonesia di arena

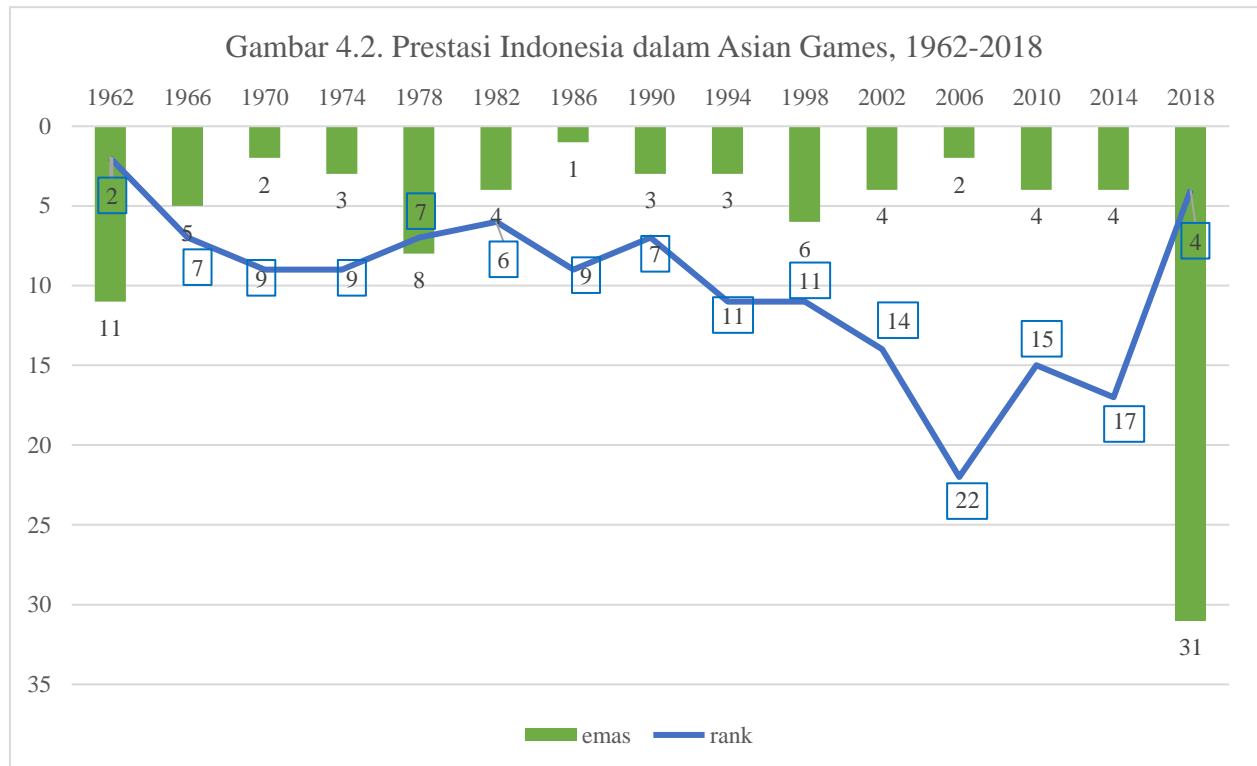
Olimpiade mengalami stagnasi, bahkan cenderung turun. Selain itu, ada kesenjangan yang cukup lebar antara cabang olahraga yang satu dengan yang lain.



Mengacu pada logika indeks daya saing yang dikembangkan oleh *World Economic Forum*, ada empat indikator yang dapat digunakan untuk menilai daya saing suatu negara, yakni (1) lingkungan yang mendukung, termasuk institusi dan infrastruktur, (2) modal manusia, (3) pasar, termasuk ekonomi yang menghidupi, dan (4) ekosistem inovasi, termasuk penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi (Schwab & Zahidi, 2020). Dari empat dimensi utama tersebut, setidaknya faktor institusi, infrastruktur, modal manusia, ukuran ekonomi, dan iptek dapat digunakan untuk menjelaskan daya saing olahraga Indonesia. Faktor-faktor tersebut juga linier dengan sejumlah hasil penelitian yang menjelaskan kesuksesan prestasi olahraga suatu negara di kejuaraan internasional (De Bosscher et al., 2006, 2015).

Sejarah panjang bulutangkis menunjukkan bahwa faktor-faktor tersebut bekerja secara optimal. Nama Indonesia seringkali bergema di forum internasional melalui olahraga ini. Rudy Hartono, misalnya, menjadi satu-satunya pemain dunia yang dapat menjuarai All England 8 kali mulai 1968-1976 dan 7 kali diperolehnya secara berturut-turut. Pada kejuaraan Piala Thomas yang merupakan lambang supremasi bulutangkis beregu putra dunia, pemain Indonesia menjadi juara sebanyak 13 kali mulai 1958-2002 dan 5 kali diperolehnya secara berturut-turut. Sampai sekarang, bulutangkis menjadi satu-satunya olahraga Indonesia yang telah memperoleh medali emas dalam Olimpiade. Sejak bulutangkis dipertandingkan dalam

Olimpiade tahun 1992 di Barcelona, Indonesia memiliki tradisi memperoleh medali emas hingga sekarang, baik pada nomor tunggal maupun ganda. Karena itu, sampai sekarang bulutangkis masih menjadi olahraga utama yang dijadikan andalan untuk meraih medali di even internasional.



Lalu, bagaimana prestasi Indonesia dalam Asian Games? Telaah bisa dilakukan sejak Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games 1962 di Jakarta. Masih di bawah rezim orde lama di era kepemimpinan Presiden Soekarno, kala itu kita bisa mencapai peringkat kedua Asia dengan 11 medali emas. Tampaknya saat itulah puncak prestasi Indonesia dalam kejuaraan multieven se Asia tersebut sejak keikutsertaannya pada tahun 1951 di New Delhi. Pada tahun 2018 Indonesia menjadi penyelenggara untuk kedua kalinya, tetapi capaiannya tidak setinggi pada tahun 1962. Bisa jadi medali emas yang diperoleh jauh lebih banyak, tetapi peringkatnya hanya bertengger di posisi ke empat, dua level di bawah capaian tahun 1962. Selain itu, 45% medali emasnya diperoleh dari cabang olahraga pencaksilat. Olahraga yang memang asli, tumbuh, dan menjadi andalan Indonesia. Sementara itu, negara lain masih begitu lemah.

Dari pentas Asian Games, kita bisa memberikan catatan bahwa selepas Asian Games 1962, tepatnya 1966-1990, Indonesia masih masuk 10 besar Asia. Artinya daya saing olahraga Indonesia di ajang Asia masih cukup bagus. Namun setelah era reformasi, tepatnya pada Asian

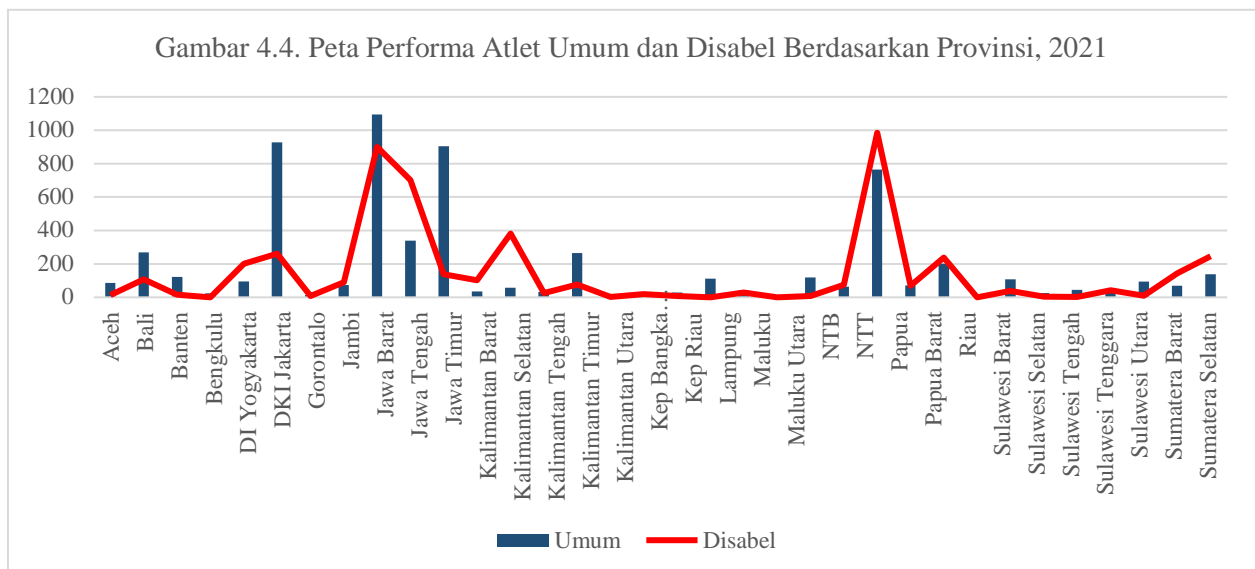
Games 2002, prestasi Indonesia melorot ke urutan ke 14 dan terjun bebas hingga urutan ke 22 pada Asian Games 2006. Apa yang bisa dijelaskan dari fenomena tersebut? Kejatuhan orde baru yang diikuti dengan era reformasi menimbulkan turbulensi yang luar biasa, yang berdampak pada tata nilai, kebijakan, kinerja, dan hasil-hasil pembangunan. Meski awalnya karena krisis ekonomi, tetapi pada gilirannya menjalar pada krisis multidimensi, termasuk politik, sosial, dan bidang olahraga. Olahraga tidak tumbuh dalam ruang yang vakum. Maju dan mundurnya prestasi olahraga pada kenyataannya berjaln berkelindan dengan bidang yang lain, baik secara makroskopik maupun mikroskopik.



Pola yang sama bisa digunakan untuk menjelaskan capaian olahraga Indonesia di level SEA Games. Sejak keikutsertaan Indonesia untuk pertama kalinya pada SEA Games 1977 di Kuala Lumpur, Indonesia konsisten menjadi juara umum hingga 1997, kecuali saat Thailand menjadi tuan rumah. Artinya, dominasi olahraga Indonesia di wilayah Asean sudah terbukti selama 20 tahun. Seiring era reformasi, dominasi tersebut memudar dan titik nadir terjadi pada tahun 2005 ketika peringkat Indonesia jatuh ke posisi ke 5. Kita pernah bangkit menjadi juara umum pada SEA Games 2011 ketika Indonesia menjadi tuan rumah dan kemudian jatuh bebas kembali ke peringkat ke 5 pada SEA Games 2015 dan 2017.

Pada konteks nasional, yang diukur dengan perolehan medali dalam PON dan Kejuaraan Nasional, kesenjangan antar daerah sangat terasa. Sepanjang perjalanan PON digelar sejak tahun 1948 di Surakarta hingga sekarang, dominasi provinsi di Jawa, terutama Jawa Barat, DKI

Jakarta, dan Jawa Timur sulit tertandingi. Kondisi tersebut diprediksi akan terus terjadi hingga beberapa dekade ke depan. Kemunculan beberapa provinsi yang kebetulan menjadi tuan rumah, seperti Sumatera Selatan dan Papua, lebih bersifat sporadis. Seiring berakhirnya penyelenggaraan, meleleh pula prestasinya. Tidak ada kesinambungan pembinaan atlet dalam jangka panjang.



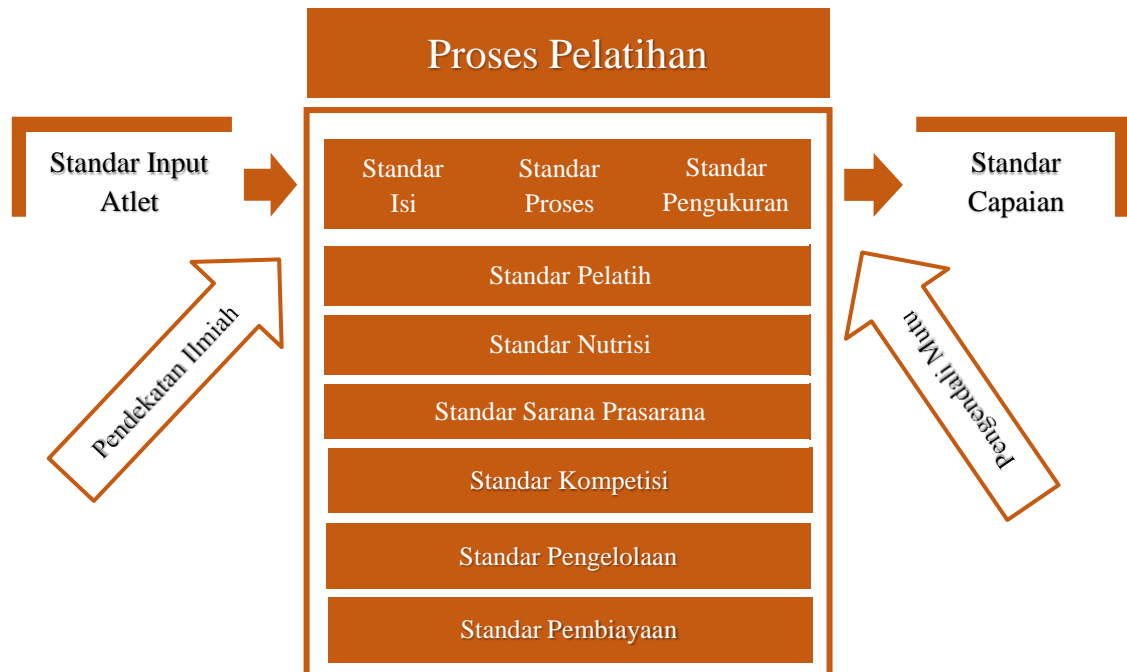
Performa Tinggi Butuh Standar Mutu

Ketika membahas mutu, kita jadi teringat apa pernah diingatkan oleh budayawan Koentjaraningrat 46 tahun yang lalu. Ia menyatakan bahwa ada sejumlah sikap mental orang Indonesia yang dianggap menghambat kemajuan, yaitu: meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri, tidak berdisiplin, dan mengabaikan tanggung jawab (Koentjaraningrat, 1976). Manusia Indonesia juga memiliki sifat munafik, enggan bertanggung jawab, berperilaku feodal, percaya tahayul, dan lemah karakter (Lubis, 1990). Meski kita sudah merdeka 77 tahun yang lalu, tampaknya sikap mental tersebut belum akan hilang dari alam pikiran sebagian besar orang Indonesia (Maksum, 2015). Kebiasaan mengambil jalan pintas dalam mencapai tujuan, termasuk bekerja asal jalan, masih banyak kita temukan, baik pada tataran pemerintah, masyarakat, maupun pada tataran individual. Mutu seolah menjadi barang mewah yang sulit ditemukan dalam budaya masyarakat kita.

Budaya tersebut tampaknya juga terjadi dalam konteks olahraga. Pembinaan atlet dilakukan seadanya, yang penting ada dan jalan. Kualitas pelatih memprihatinkan, isi dan proses latihan kurang diperhatikan, nutrisi atlet di bawah kebutuhan standar, dan masih banyak lagi masalah yang menyelimuti pembinaan olahraga di Indonesia. Padahal, kalau Indonesia

mau bersaing pada level internasional, maka standar mutu menjadi keharusan. Sebuah kondisi yang tidak bisa di tawar-tawar lagi.

Gambar 4.2. Kerangka Standar Mutu dalam Pembinaan Atlet



Kerangka standar mutu dimulai dari *input* calon atlet yang dilakukan melalui identifikasi dan seleksi bakat. Proses tersebut diharapkan menjadi prediktor keberhasilan atlet di masa mendatang. Identifikasi dan seleksi bakat perlu dilakukan secara lebih cermat dan pruden, mengingat banyak program identifikasi bakat yang berujung dengan kegagalan (Boccia, Cardinale, & Brustio, 2020, 2021). Ketika calon atlet sudah ditemukan, maka pelatihan yang menyangkut isi, proses, dan pengukuran harus dilakukan dengan standar mutu yang jelas. Jangan sampai atlet kurang mendapatkan porsi latihan yang membuat mereka tidak mengalami kemajuan yang berarti. Namun pada saat yang sama, jangan sampai para atlet mendapatkan menu latihan melebihi apa yang seharusnya mereka terima, yang berakibat pada cedera berkepanjangan. Untuk sampai pada proporsi yang tepat dibutuhkan ilmu pengetahuan dan hasil-hasil riset mutakhir yang relevan. Untuk mengetahui kemajuan para atlet, maka perlu dilakukan pengukuran secara regular. Dalam serangkaian proses tersebut, peran pelatih menjadi sangat penting (Bompa & Haff, 2009). Kebiasaan kita menggunakan konsep teoretik tanpa berpikir kritis menyebabkan kesalahan terjadi secara berulang. Penerapan konsep LTAD,

misalnya, ia banyak dikritik karena tidak memiliki *evidence-based* yang memadai (Côté & Hancock, 2016; Ford et al., 2011).

Kualitas pelatih akan sangat menentukan capaian performa para atletnya. Jika kita menginginkan prestasi tinggi, seperti dalam Olimpiade, maka diperlukan pelatih kualitas tinggi yang memiliki rekam jejak internasional. Tidak cukup hanya dengan melakukan seleksi layaknya membuka lowongan pekerjaan. Jika itu yang terjadi, maka yang datang adalah para *job seeker*, bukan pelatih yang hebat. Kesuksesan atlet pada kejuaraan, mustahil dilepaskan dari sosok pelatih yang bermutu. Itulah sebabnya, banyak negara berburu pelatih bermutu guna mengangkat prestasi mereka pada kejuaraan internasional.

Pada Olimpiade 2012, misalnya, Inggris berusaha memberikan iming-iming sejumlah pelatih hebat dari Australia dengan memberikan gaji tinggi. Migrasi sejumlah pelatih Australia menuju Inggris pun tidak bisa dihindari, fenomena “brain drain” sedang berlangsung. Apa yang berikutnya terjadi? Capaian Australia merosot tajam, dari 14 medali emas pada Olimpiade 2008 menjadi hanya 8 medali emas pada Olimpiade 2012. Hal yang kurang lebih sama terjadi pada pelatih angkat besi Indonesia, M Lukman. Karena tidak dipakai lagi oleh PABSI - dengan alasan yang tidak rasional, maka ia menerima tawaran Thailand untuk melatih di sana. Wal hasil, 6 medali emas dari angkat besi diperoleh Thailand pada SEA Games Vietnam 2021, sementara Indonesia hanya mendapatkan 3 medali emas.

Fenomena “brain drain” juga terjadi di bulutangkis. Banyak pelatih bulutangkis Indonesia yang diminta melatih di luar negeri. Diperkirakan, jumlah pelatih bulutangkis yang merumput di luar negeri sebanyak 25 orang (Sport.Tempo.co, 2021). Ada sejumlah nama besar seperti Hendrawan di Malaysia, Flandy Limpele di Malaysia, Mulyo Handoyo di Singapura, dan Rexy Mainaky di Thailand dan Malaysia. Kehadiran mereka dalam waktu cepat dapat mengangkat prestasi bulutangkis di ajang internasional seperti kejuaraan dunia, All England, dan Olimpiade. Keberhasilan pemain tunggal Singapura, Loh Kean Yew, menjadi juara dunia 2021 tidak lepas dari tangan dingin Mulyo Handoyo. Demikian juga salah satu tunggal terbaik dunia saat ini, Lee Zii Jia dari Malaysia, dilatih oleh Indra Wijaya. Flandy Limpele juga berhasil membawa ganda putra Malaysia, Aaron Chia/Soh Woi Yik, meraih medali perunggu Olimpiade Tokyo 2020 mengalahkan Hendra/Ahsan. Bahkan ada hal yang mengejutkan ketika Guatemala, negara yang tidak pernah terdengar dalam bulutangkis, berhasil menempatkan atletnya, Kevin Cordon, orang pertama dari benua Amerika yang masuk semifinal tunggal

putra Olimpiade di Tokyo 2020. Setelah ditelusuri, ternyata pelatihnya adalah Moamar Qadafi dari Solo, Indonesia, jebolan PB Djarum.

Para atlet tidak hanya membutuhkan standar menu latihan yang sesuai, tetapi juga asupan nutrisi yang standar. Tidak mungkin kebutuhan nutrisi atlet disamakan dengan nonatlet atau orang biasa karena aktivitasnya yang berbeda. Pada orang biasa, kebutuhan kalori sekitar 1.500-2000 per hari, sedangkan pada atlet sekitar 2.500-3500 kalori per hari dan bisa lebih, tergantung berat-ringannya aktivitas. Nutrisi yang tepat akan sangat mendukung pencapaian performa tinggi, termasuk pemulihan akibat cedera (Barreto, 2022; Smith-Ryan, Hirsch, Saylor, Gould, & Blue, 2020). Masalah ini sering mengemuka pada konteks pembinaan atlet muda jangka panjang seperti di PPLP dan SMANOR. Anggaran nutrisi siswa, yang pada dasarnya merupakan *student-athlete*, sangat minim dan seiring waktu mengalami penurunan. Bagaimana mungkin nutrisi atlet disamakan dengan mereka yang bukan atlet sehingga pengelola harus jungkir balik memodifikasi anggaran yang ada agar sesuai dengan kebutuhan para atlet. Parahnya lagi, karena alasan efisiensi, anggaran yang minim tersebut masih dikurangi.

Sarana dan prasarana olahraga juga menjadi bagian penting dari standarisasi mutu. Di banyak negara, penyedia fasilitas olahraga yang paling signifikan berada di tingkat pemerintah daerah atau otoritas lokal. Pengembangan olahraga elit nasional sering terhambat oleh kenyataan bahwa pemerintah daerah mengidentifikasi prioritas mereka sendiri dan sering ada tuntutan yang saling bertentangan antara olahraga akar rumput dan atlet elit mengenai akses dan spesifikasi fasilitas pelatihan dan kompetisi. Fasilitas olahraga elit mahal dan hanya digunakan oleh sejumlah kecil atlet. Dengan munculnya atlet penuh waktu dan peluang bagi atlet untuk bersaing dan berlatih secara penuh waktu, kebutuhan atlet untuk memiliki fasilitas yang tersedia setiap saat sepanjang hari telah meningkat. Seiring waktu, beberapa negara telah membangun fasilitas pelatihan *indoor* dan *outdoor* multi-fungsi khusus untuk olahraga elit.

Fasilitas tersebut menampung para atlet tingkat elit sehingga dapat memiliki akses penuh waktu, seperti fasilitas hotel sehingga atlet tinggal dan berlatih di satu lokasi, dukungan ilmu olahraga dan kedokteran olahraga, dan gaya hidup dan perencanaan masa depan, termasuk layanan pendidikan. AIS (*Australian Institute of Sport*) yang didirikan pada tahun 1981 di Australia bisa menjadi contoh, meski sebelumnya sudah ada INSEP (*Institut National du Sport, de l'Expertise et de la Performance*) yang didirikan tahun 1975 di Paris, Prancis. Fasilitas terpusat, semacam *national training center*, dibangun untuk memudahkan pengendalian

terutama dari aspek mutu. Selain itu juga untuk mengurangi biaya mobilisasi orang, mendorong pertukaran pengetahuan antar tenaga keolahragaan, dan mengurangi waktu perjalanan atlet antara rumah mereka dan tempat pelatihan. Model INSEP dan AIS ini telah menjadi contoh yang kuat untuk ditiru oleh banyak negara, termasuk Jepang dan China. Dalam perkembangannya, Prancis dan Australia kemudian mengembangkan infrastruktur fasilitas ke jaringan yang berlokasi regional, sebagian untuk mengurangi *drop-out* atlet muda.

Kita tentu berharap dengan penyelenggaraan PON yang berbeda, ada dampak pembangunan infrastruktur olahraga terhadap daerah yang menjadi tuan rumah, dan tentu berimbas pada pencapaian prestasi. Nyatanya hal tersebut tidak terjadi. Penyelenggaraan PON pasca reformasi seperti di Sumatera Selatan (2004), Kalimantan Timur (2008), Riau (2012), dan Papua (2020) justru menimbulkan masalah baru terkait mangkraknya sejumlah fasilitas yang dibangun dengan biaya yang tidak murah. Belum lagi pembangunan fasilitas lain seperti wisma atlet di Hambalang yang harus berhenti karena kasus korupsi.

Keikutsertaan dalam kompetisi, baik di tingkat nasional maupun internasional, merupakan faktor penting dalam perkembangan atlet. Hal ini memungkinkan atlet dan tim untuk mengukur kemampuan mereka dan membuat evaluasi kemajuan dalam rangka mencapai prestasi puncak seperti Olimpiade. Frekuensi kompetisi internasional dapat ditingkatkan untuk atlet ketika kejuaraan besar diselenggarakan di dalam negeri. Inilah salah satu variabel yang dapat menjelaskan mengapa negara tuan rumah memiliki peluang lebih tinggi dalam mendapatkan medali. Fenomena penyelenggaraan Asian Games 1962 dan 2018 di Indonesia bisa menjadi fakta empirik. Sejumlah hasil penelitian juga menunjukkan hal serupa. Peluang bagi pemain tenis untuk berpartisipasi dalam turnamen profesional yang diadakan di negara mereka sendiri telah terbukti menjadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan mereka. Pemain Eropa tampaknya memiliki keuntungan besar karena 53% dari kalender ATP saat ini diselenggarakan di Eropa dan bukti menunjukkan bahwa ada efek kinerja positif bagi negara-negara yang menyelenggarakan turnamen profesional (De Bosscher, Shibli, Westerbeek, & van Bottenburg, 2016; De Bosscher et al., 2015).

Standar berikutnya terkait dengan pengelolaan (*governance*), yaitu bagaimana organisasi keolahragaan dikelola guna mencapai tujuan. Aspek ini paling rumit untuk distandarisasi karena perbedaan konteks yang signifikan antara sistem olahraga elit, bagaimana mereka terstruktur, diorganisir, dan tertanam dalam sistem kebijakan secara keseluruhan. Tidak ada konsensus di antara praktisi olahraga atau akademisi tentang pendekatan praktik terbaik untuk

mengembangkan dan menerapkan kebijakan dan tata kelola olahraga elit. Dalam tataran makro, terdapat dua model tata kelola olahraga prestasi, yakni model swasta dominan yang diterapkan Amerika Serikat dan model pemerintah dominan yang diterapkan China. Keduanya berhasil dalam mencapai tujuan yang dibuktikan dengan dominasi kedua negara tersebut dalam Olimpiade. Dalam tataran mikro, olahraga balap sepeda di Denmark dikelola secara tersentralisasi. Sementara itu, tenis dan golf di Swedia dikelola secara terdesentralisasi. Model sentralisasi dan desentralisasi (Passaportis, Brown, Wagstaff, Arnold, & Hays, 2022), keduanya dapat dilihat sebagai efisien dan cocok untuk situasi organisasi tertentu dalam periode waktu tertentu, yang pada dasarnya merupakan pendekatan kontingensi untuk membangun sistem olahraga elit. Seperti yang dikemukakan oleh banyak penulis, tidak ada formula ajaib untuk kesuksesan olahraga elit, tetapi ada ruang untuk pendekatan yang berbeda di dalam dan antar negara dan di dalam dan di antara olahraga individu (De Bosscher, 2016; De Bosscher et al., 2015; Houlihan & Green, 2008).

Tentu, kebutuhan untuk mengontrol dan berkoordinasi lebih menonjol pada olahraga elit daripada olahraga masyarakat. Sentralisasi dibutuhkan ketika tingkat spesialisasi yang tinggi diperlukan, seperti dalam olahraga elit. Secara operasional, struktur yang koheren dan holistik merupakan prasyarat untuk penggunaan yang efisien dari sumber daya. Sangat penting untuk menggambarkan dengan jelas tanggung jawab setiap bagian yang berbeda guna menghindari tumpang tindih, selain tentu untuk menyederhanakan administrasi. Pelibatan pemangku kepentingan, dalam hal ini atlet dan pelatih, dalam proses pengambilan keputusan dan evaluasi kebijakan sungguh diperlukan.

Bukti secara konsisten menunjukkan bahwa ada hubungan positif yang kuat antara jumlah absolut uang yang dibelanjakan untuk olahraga elit dan capaian dalam kejuaraan (Brouwers, Sotiriadou, & de Bosscher, 2015; Mutohir et al., 2021; Patatas, De Bosscher, Derom, & De Rycke, 2020). Dari semua faktor dan sub-faktor yang termasuk dalam model SPLISS, pengeluaran olahraga elit menjadi prediktor terbaik keberhasilan. Poin penting yang perlu diperhatikan adalah bahwa pengeluaran jenis ini dapat dikontrol, tentu dengan pertimbangan dan strategi yang dihasilkan dari kajian yang mendalam. Artinya, pengeluaran diarahkan pada hal-hal yang bersifat strategis. Lebih jauh lagi, dengan adanya pilihan tentang bagaimana pemerintah membelanjakan uang publik, pengeluaran olahraga elit tidak bergantung pada kekayaan mutlak suatu negara. Perlu juga diberikan catatan di sini bahwa pengeluaran yang dibelanjakan untuk olahraga elit tidak berkorelasi dengan olahraga akar rumput atau olahraga masyarakat. Ini sekali lagi menunjukkan gagasan negara membuat pilihan tentang dimensi

olahraga di mana mereka memilih untuk berinvestasi. Sebaliknya, tidak ada hubungan antara investasi dalam olahraga akar rumput dan keberhasilan olahraga elit. Piramida pengembangan olahraga yang sering dikutip di mana bakat secara alami menyaring ke atas tidak terbukti (De Bosscher et al., 2009; Mutohir et al., 2021; Patatas et al., 2020).

Anggaran dan Mutu SDM: Kunci Keberhasilan Olahraga Prestasi

Ada logika yang berbeda dalam kita memahami *high performance*, yang hal ini jarang disadari oleh banyak pihak, termasuk para pengambil kebijakan. Parahnya lagi, ada sebagian akademisi yang ikut masuk dalam perangkat kesemrawutan logika tersebut. Literasi data dan hasil-hasil riset dibutuhkan agar kita tidak terjebak pada sekadar *common sense*. Logika *high performance* atau sering juga disebut *elite athlete*, yang kemudian diuji dalam kejuaraan internasional semacam Olimpiade, mempersyaratkan mutu yang tinggi untuk bisa bersaing. Semakin tinggi mutu atlet yang dihasilkan melalui proses latihan yang bermutu, semakin tinggi pula probabilitas atlet tersebut untuk memenangkan kejuaraan. Artinya, standar mutu sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, menjadi keharusan jika kita ingin bersaing di tingkat internasional. Banyaknya partisipan yang terlibat dalam olahraga tidak berkorelasi dengan capaian dalam kejuaraan.

Logika inilah yang menjelaskan mengapa Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Jawa Timur, meski tingkat partisipasi olahraga masyarakatnya di bawah rata-rata nasional, mereka konsisten bertengger di posisi atas dalam setiap kali PON. Demikian juga kasus bulutangkis dan angkat besi. Jika disurvei, partisipan bulutangkis lebih kecil dibandingkan sepakbola dan bolavoli. Apalagi angkat besi, jika disurvei masyarakat yang melakukan olahraga tersebut nyaris tidak terekam atau 0,0...%. Pertanyaannya kemudian mengapa angkat besi yang nyaris sulit ditemukan di masyarakat, tetapi prestasinya sampai pada tingkat Olimpiade. Sementara itu, sepakbola dilakukan oleh banyak orang, bahkan sekolah sepakbola (SSB) jumlahnya ribuan, tetapi capaian prestasinya tidak kemana-mana? Jawabannya sederhana: Standar mutu.

Dalam banyak referensi internasional dapat ditemukan, misalnya de Bosscher, dkk, meski mereka menyatakan ada sembilan pilar dalam membangun olahraga prestasi, tetapi mereka belum sampai pada kesimpulan akhir (De Bosscher et al., 2006, 2016, 2015; Patatas et al., 2020). Di dalam banyak negara, tidak ada bukti yang cukup bahwa tingkat partisipasi olahraga dalam suatu negara berkorelasi dengan prestasi yang dicapai dalam kejuaraan internasional. Dari jumlah penduduk, Australia memiliki \pm 25 juta jiwa, sekitar 9% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun dalam Olimpiade Tokyo 2020, Australia meraih 17 medali emas, sementara

Indonesia hanya 1 medali emas. Jamaika yang berpenduduk hanya ±2,7 juta mampu memperoleh 4 medali emas. Laporan ini juga menyajikan hasil pengujian terhadap sejumlah variabel yang mempengaruhi performa dalam kejuaraan nasional cabang olahraga yang diikuti oleh 34 provinsi.

Tabel 4.1. Uji Regresi Beberapa Variabel yang Mempengaruhi Performa

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1.513	4	.378	21.835	.000 ^b
	Residual	.502	29	.017		
	Total	2.015	33			

a. Dependent Variable: Performa

b. Predictors: (Constant), Anggaran Olahraga, Kebugaran, Partisipasi, SDM Olahraga

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	.054	.131		.413	.683
	SDM Olahraga	.000	.000	.415	3.197	.003
	Partisipasi	-.105	.276	-.037	-.382	.706
	Kebugaran	.026	.476	.005	.055	.957
	Anggaran Olahraga	8.394E-13	.000	.521	4.092	.000

a. Dependent Variable: Performa

Dari hasil pengujian regresi membuktikan bahwa dalam tataran kebijakan, performa sangat dipengaruhi oleh besarnya anggaran dan ketersediaan tenaga keolahragaan. Sementara itu, variabel tingkat partisipasi dan kebugaran masyarakat tidak berpengaruh terhadap capaian prestasi dalam PON. Hasil tersebut konsisten dengan pengujian yang dilakukan sebelumnya, saat laporan SDI 2021 disusun (Mutohir et al., 2021). Ini tidak berarti bahwa partisipasi dan kebugaran tidak penting dalam pembinaan olahraga. Partisipasi dan kebugaran masyarakat sangat penting dalam logika olahraga masyarakat atau lazim disebut *mass sports*. Kedua lingkup olahraga tersebut tidak relevan untuk diperdebatkan. Keduanya memiliki tujuan, kebijakan, dan target yang berbeda. Olahraga masyarakat dikemas dalam kebijakan pembudayaan olahraga dan menysasar 95% penduduk. Sementara itu, *high performance* dikemas dalam kebijakan olahraga prestasi yang menysasar 5% penduduk. Keduanya harus ditempatkan dalam kerangka kebijakan sesuai dengan proporsinya, tanpa menegasikan satu dan yang lain.

Meski anggaran menjadi variabel kunci dalam pembinaan olahraga, namun perlu dicermati secara lebih hati-hati dalam implementasinya. Dalam banyak kasus, anggaran yang besar acapkali menimbulkan godaan *abuse of power* yang berujung pada korupsi. Kasus Hambalang tahun 2011, misalnya, pembengkakan anggaran dari 125 milyar ke 2,5 triliun terkait pembangunan Pusat Pendidikan, Pelatihan, dan Sekolah Olahraga Nasional yang kemudian diubah menjadi *National Training Center* untuk elit atlet kelas dunia pada akhirnya berujung pada korupsi. Belum lagi sejumlah kasus lain terkait dana hibah KONI, pembangunan stadion, dan wisma atlet. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), sejak tahun 2010-2019, setidaknya ada 78 kasus korupsi di sektor olahraga. Kerugian negara yang ditimbulkan akibat perbuatan curang tersebut mencapai Rp865 milyar dan nilai suap sebesar Rp37,6 milyar (ICW, 2022). Masalah tersebut ternyata juga menjadi isu krusial dalam pertemuan Presidensi G20 terkait pembahasan korupsi (Infopublik-Indonesia G20, 2022).

Pertanyaannya kemudian mengapa korupsi marak terjadi di sektor olahraga, padahal dalam olahraga, nilai-nilai keutamaan seperti sportivitas, kejujuran, taat pada aturan, dan *fairplay* menjadi nafas utama? Dalam masyarakat yang masih berada pada tahap *materialist*, tata nilai seperti orientasi uang, keamanan ekonomi, dan sindrom “kesejahteraan” masih mendominasi. Hal tersebut berbeda dengan masyarakat yang sudah masuk pada level *post-materialist*, di mana pengaturan diri, rasa memiliki, perhatian pada kepentingan publik, dan kualitas hidup menjadi yang utama (Petersen & Lindström, 2010). Selain itu, longgarnya sistem nilai yang mengarah pada sikap permisif terhadap pelanggaran juga menjadi variabel yang ikut berkontribusi (Maksum, 2017, 2019).

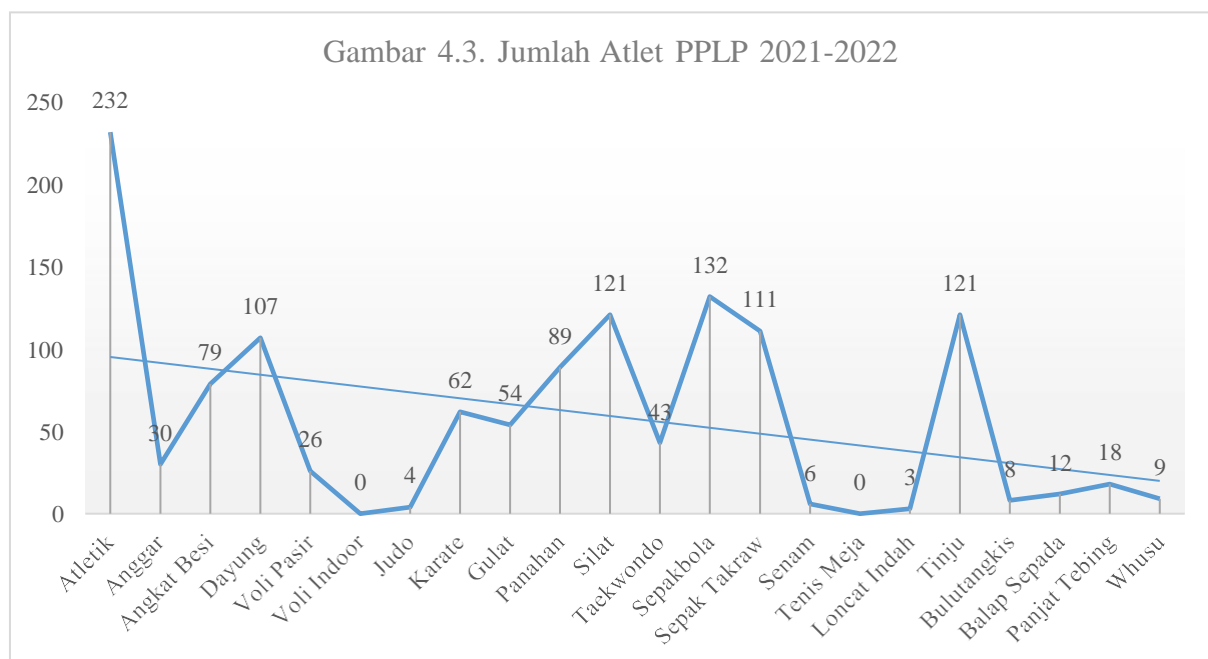
Terkait SDM keolahragaan, kualitas pelatih menjadi faktor kunci. Fenomena pelatih Lukman yang berhasil membawa Thailand menjadi juara umum angkat besi pada SEA Games Vietnam 2021 hanya sekadar contoh. Selepas tidak lagi dipakai oleh PABSI, ia ternyata dipinang oleh Thailand untuk melatih para atlet angkat besi di sana. Dalam waktu singkat ia berhasil mengantarkan sejumlah atlet Thailand meraih 6 medali emas, sementara Indonesia sendiri pada kejuaraan tersebut hanya memperoleh 3 medali emas. Tentu hal tersebut merugikan sebuah kerugian bagi Indonesia. Namun pada saat yang sama hal tersebut membuktikan bahwa pelatih menjadi faktor krusial dalam pencapaian prestasi tinggi.

Fenomena yang sama juga terjadi di bulutangkis. Banyak pelatih Indonesia yang karena alasan tertentu hijrah ke luar negeri dan berhasil membawa atlet-atlet negara yang bersangkutan menjadi juara di beberapa pertandingan internasional. Diperkirakan, jumlah pelatih bulutangkis yang merumpuk di luar negeri sebanyak 25 orang (Sport.Tempo.co, 2021). Ada sejumlah nama besar seperti Hendrawan di Malaysia, Flandy Limpele di Malaysia, Mulyo

Handoyo di Singapura, dan Remy Mainaky di Thailand dan Malaysia. Kehadiran mereka dalam waktu cepat dapat mengangkat prestasi bulutangkis di ajang internasional seperti kejuaraan dunia, All England, dan Olimpiade. Fenomena “brain drain” tersebut perlu dicermati jika kita tidak ingin dominasi bulutangkis berpindah ke negara lain, meski pada tataran tertentu hal tersebut juga ada nilai positifnya.

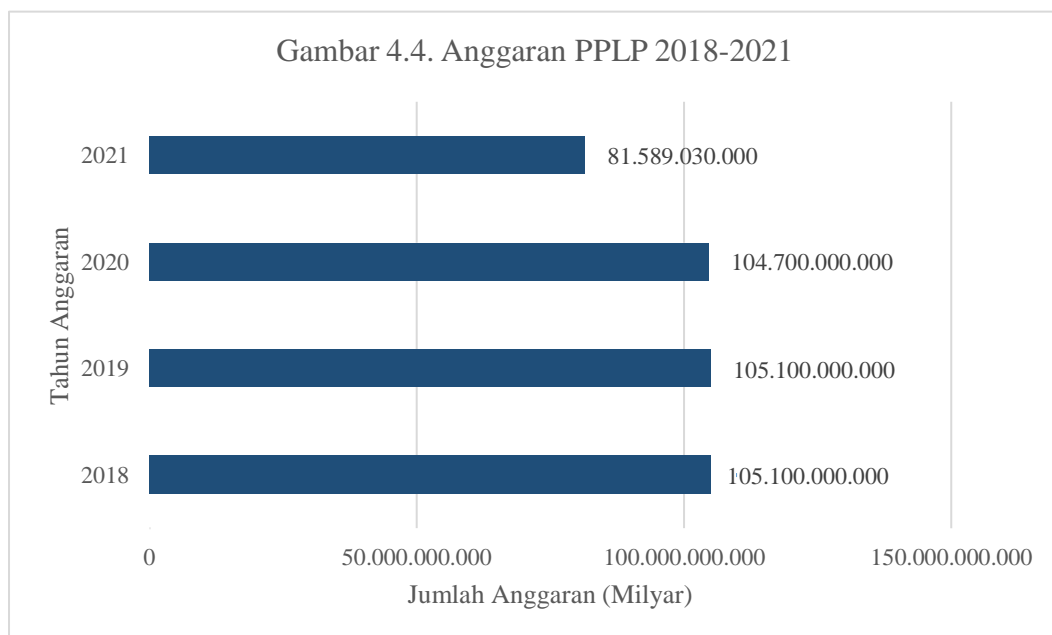
Menatakelola Pusat Pembinaan Atlet Muda: Kasus PPLP

Ada dua jalur pembinaan atlet yang selama ini dianggap efektif menghasilkan atlet-atlet yang bertanding pada sejumlah kejuaraan, baik pada tingkat nasional maupun internasional. Kedua jalur pembinaan tersebut adalah jalur klub olahraga yang dibina oleh swasta/masyarakat dan jalur sekolah yang dibina oleh pemerintah dan pemerintah daerah. Pada jalur klub, misalnya, kita bisa cermati lebih dalam apa yang terjadi di bulutangkis. Dalam bulutangkis, klub berperan besar dalam pembinaan atlet. Sebagian besar pemain yang telah berprestasi di tingkat internasional awalnya dibina di sejumlah klub seperti Djarum, Jaya Raya, Mutiara, Sangkuriang Graha Sarana, Suryanaga, dan Tangkas. Pembinaan dilakukan sejak usia dini hingga menjadi pemain “setengah jadi” yang akan disempurnakan kemampuan dan keterampilannya di Pemusatan Latihan Nasional. Meski jumlah klub bulutangkis cukup banyak, namun hanya sebagian kecil yang bisa bertahan dan secara konsisten menghasilkan atlet potensial. Terkait jalur ini, tidak cukup data yang bisa dikemukakan mengingat klub dikelola secara otonom oleh masyarakat dan peran pemerintah relatif kecil.



Pada bagian ini dikemukakan pembinaan atlet melalui jalur sekolah, khususnya Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP). Secara konseptual, model pembinaan ini mengawinkan antara pendidikan dan latihan olahraga – *student athlete*. Seperti diketahui, usia atlet muda pada dasarnya adalah usia pelajar. Mereka umumnya berada di bangku SMP dan SMA. Meski mereka diproyeksikan menjadi atlet nasional yang harus berlatih sungguh-sungguh, mereka juga harus tetap bisa mendapatkan layanan akademik yang memadai. Tentu kita tidak ingin mereka menjadi atlet tetapi pendidikannya terbengkalai. Apalagi mereka gagal sebagai atlet dan gagal pula dalam pendidikannya. Proporsi keduanya perlu dijaga guna saling melengkapi untuk kepentingan masa depan para atlet muda tersebut.

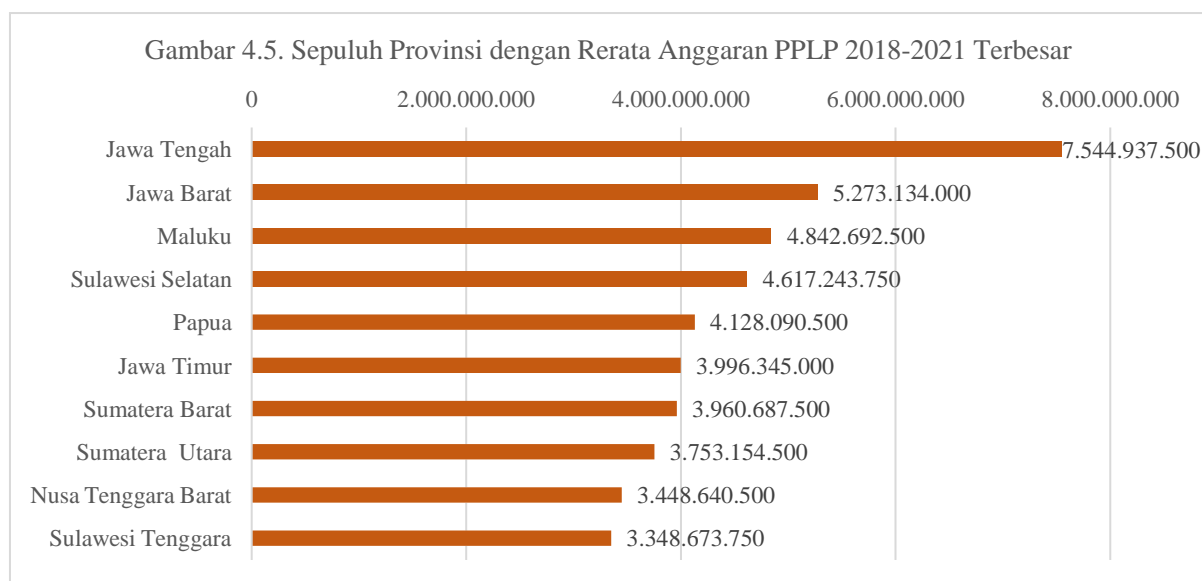
Pusat pembinaan ini ada di 34 provinsi dengan cabang olahraga yang bervariasi. Data per Juni 2022, jumlah atlet yang dibina sebanyak 1.267 orang yang terbagi dalam 22 cabang olahraga. Dari data tersebut, cabang olahraga atletik, sepakbola, silat, dan tinju memiliki jumlah atlet yang terbesar. Sementara itu, ada beberapa cabang olahraga yang sangat kecil jumlah atletnya seperti judo, loncat indah, dan senam. Bahkan, ada beberapa cabang olahraga yang sudah dihentikan seperti bolavoli indoor dan tenis meja.



Meski dalam banyak momen kejuaraan para atlet PPLP berkontribusi besar dalam perolehan medali, namun tidak seiring dengan komitmen dan perhatian yang diberikan. Indikasinya ada pada anggaran yang diberikan kepada PPLP. Total anggaran yang dialokasikan untuk PPLP seiring waktu mengalami penurunan. Sebagai ilustrasi, tahun 2018 anggaran PPLP sebesar 105,1 milyar dan pada tahun 2021 menurun menjadi 81,5 milyar. Jika angka tersebut

dibagi ke dalam jumlah atlet, maka setiap atlet akan mendapatkan biaya pembinaan sebesar 64,3 juta per tahun atau 5,4 juta per bulan. Jumlah tersebut merupakan anggaran pembinaan per atlet dan tidak diberikan kepada atlet dalam bentuk uang tunai.

Jumlah tersebut dinilai sangat minim dan bahkan jauh dari memadai. Sebagai perbandingan, anggaran pembinaan atlet yang dikeluarkan oleh Jawa Barat pada tahun 2021 sebesar 593,6 juta/atlet/tahun atau 49,5 juta/atlet/tahun. Dengan demikian, anggaran atlet PPLP hanya 10,8% dari anggaran atlet Jawa Barat. Bisa jadi, perbandingan tersebut tidak setara, tetapi dari angka tersebut dapat menggambarkan bagaimana penganggaran untuk para atlet PPLP. Selain merupakan indikasi penting terkait dengan komitmen pemerintah, anggaran menjadi faktor krusial dalam pembinaan atlet. Hasil analisis analisis data yang menguji sejumlah variabel di 34 provinsi, termasuk beberapa hasil penelitian (De Bosscher, 2016; De Bosscher et al., 2009) membuktikan bahwa anggaran menjadi faktor yang paling konsisten kontribusinya terhadap performa atlet.



Jika dilihat dari rerata anggaran yang diterima, provinsi Jawa Tengah memiliki alokasi anggaran terbesar, yakni 7,5 milyar per tahun, baru kemudian diikuti Jawa Barat dengan 5,2 milyar dan Maluku sebesar 4,8 milyar. Pertanyaannya kemudian, apakah besarnya anggaran linier dengan capaian prestasi yang diperoleh? Secara universal hipotetik tersebut memang tidak terbantahkan, tetapi apakah hal tersebut juga berlaku pada konteks PPLP? Tampaknya masih perlu ada kajian yang mendalam. Dari segi anggaran, Jawa Tengah memang mendapatkan alokasi tertinggi, tetapi hal tersebut belum linier dengan capaian prestasinya. Dalam PON 2021, Jawa Tengah berada diperingkat ke 5, kalah dengan Jawa Barat, DKI

Jakarta, Jawa Timur, dan Papua. Sementara itu dalam Peparnas, Jawa Tengah ada diperingkat ke 3, kalah dengan Jawa Barat dan Papua.

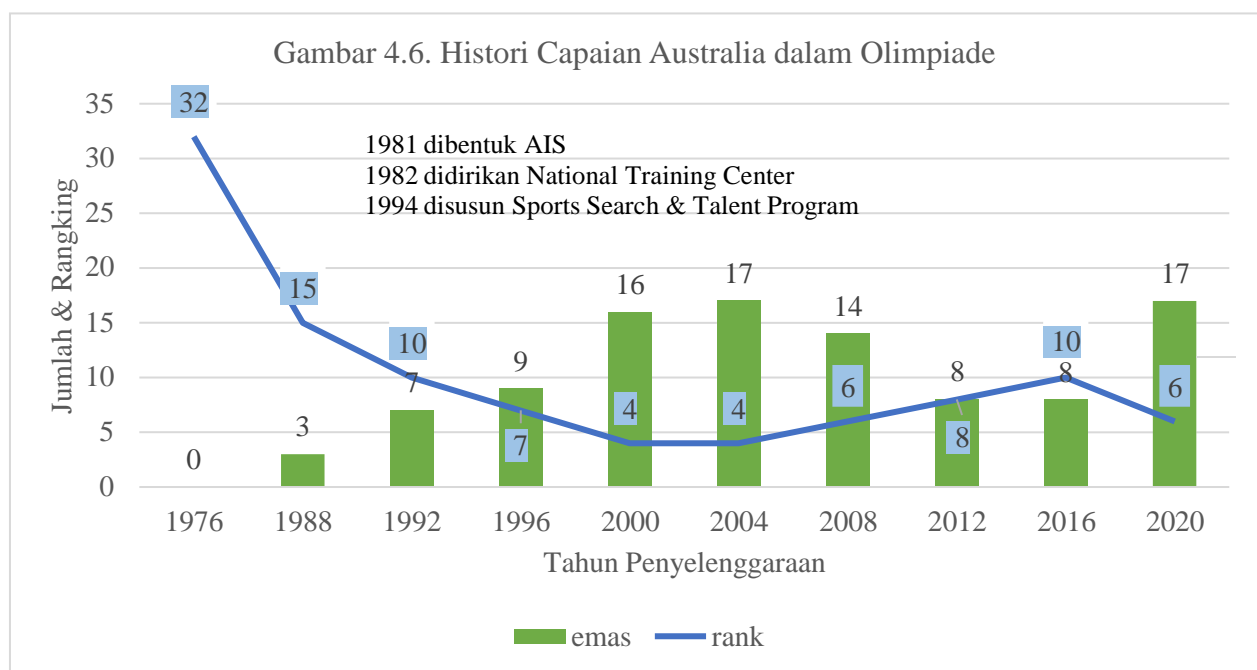
Sejak pertama kali didirikan tahun 1983, PPLP tidak mengalami perubahan yang signifikan, kecuali dalam persebaran dan jumlah atletnya. Pada level daerah, PPLP memang sangat besar pengaruhnya dalam pencapaian kejuaraan seperti Porprov, Kejurnas, dan PON. Sejumlah daerah di mana PPLP berada merasa diuntungkan dengan keberadaan PPLP. Namun untuk kepentingan kompetisi di level internasional, terutama Olimpiade, masih banyak yang perlu ditata ulang, direvitalisasi, dan dioptimalisasi. PPLP memang telah berhasil memunculkan atlet level Olimpiade seperti Lalu Mohamad Zohri, Windi Cantika Aisyah, dan Mohammad Ahsan. Sebanyak 11 atlet (39,29%) dari 28 atlet yang memperkuat kontingen Indonesia pada Olimpiade Tokyo berasal dari PPLP dan SKO. Mereka tampil pada 5 cabang olahraga dari 8 cabang olahraga yang dikirim. Kelima cabang olahraga tersebut adalah panahan, atletik, dayung, angkat besi, dan bulutangkis. Sementara itu, untuk cabang olahraga menembak, renang, dan selancar, semuanya berasal dari non PPLP/SKO. Dominasi PPLP/SKO ada pada cabang olahraga panahan, atletik, dan dayung. Sementara itu, cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi yang konsisten menyumbangkan medali masih didominasi atlet dari non PPLP/SKO. Ada harapan besar ke depan, jika PPLP/SKO direvitalisasi dengan menerapkan standar mutu, maka kontribusinya akan semakin signifikan pada kejuaraan level Olimpiade.

Pusat Pelatihan Nasional: Sebuah Keniscayaan

Salah satu variabel yang bisa menjelaskan mengapa cabang olahraga bulutangkis relatif konsisten memiliki performa tinggi adalah adanya pusat pelatihan nasional – *national training center*. Pelatnas tersebut berlangsung sepanjang tahun, bukan 3-4 bulan menjelang pertandingan. Dengan adanya Pelatnas, kontrol terhadap proses pelaksanaan latihan, termasuk pemantauan standar mutu dapat dilakukan secara optimal. Dari aspek mental, Pelatnas dilakukan karena untuk membentuk kekompakan pemain mengingat mereka berasal dari klub dan daerah yang berbeda.

Untuk pertama kalinya, Pelatnas dilakukan pada tahun 1957 saat Indonesia mempersiapkan diri mengikuti kejuaraan Thomas Cup dan Uber Cup. Karena dianggap sukses, maka proyek tersebut sejak tahun 1970 dibakukan dan menjadi program sepanjang tahun, termasuk untuk persiapan kejuaraan individu seperti All England dan Kejuaraan Dunia (Djarmiko et al., 2004; Siregar & Harsuki, 2003). Para pemain hasil seleksi dikumpulkan,

diasramakan, dan dilatih secara sungguh-sungguh di Kompleks Senayan dan kemudian pada tahun 1992 pindah ke Cipayung hingga sekarang. Mereka dilatih oleh para pelatih profesional dibantu tenaga ahli yang relevan di bawah tanggung jawab PB-PBSI. Seiring kebutuhan dan tuntutan perkembangan, sejak 1984 dibentuk pusat pendidikan dan latihan di daerah (Pusdiklat) sebagai penyangga Pelatnas. Puncaknya pada 1991, terbentuk 36 Pusdiklat/Pelatda yang tersebar di seluruh Indonesia. Sebagian besar atlet yang Berjaya pada tahun 1990-an seperti Susi Susanti, Alan Budikusumah, Ardy B. Wiranata, dan Ricky Subagdja/Rexy Mainaky, merupakan hasil pembinaan dari sistem ini.



Terkait dengan “national training center”, kita juga bisa belajar dari sejumlah negara lain seperti Australia, Jepang, dan Korea Selatan, yang telah nyata-nyata berhasil memajukan olahraganya di level internasional. Di Australia, misalnya, sejak keterpurukan prestasi yang terjadi tahun 1976 di Olimpiade Montreal, pada tahun 1981 didirikanlah “Australian Institute of Sport” di Canberra. Pusat latihan yang didukung pendekatan ilmiah tersebut memiliki luas 66 hektar dan secara khusus didesain untuk *high performance* menuju Olimpiade. Dari proses tersebut, Australia dapat menghasilkan 3 medali emas pada Olimpiade 1988 dan empat tahun berikutnya menjadi 7 medali emas. Peningkatan secara signifikan terjadi saat Australia menjadi penyelenggara Olimpiade tahun 2000. Kala itu, Australia memperoleh 16 medali emas. Masa keemasan tersebut masih berlanjut hingga Olimpiade berikutnya, meski tidak lagi menjadi tuan rumah. Pada Olimpiade Tokyo 2020, Australia mendapat 17 medali emas.

Bab 5 Menumbuh-Kembangkan Ekonomi Berbasis Olahraga

Sebenarnya sudah banyak konsep industri olahraga yang bisa kita adopsi dari sejumlah negara sejak tahun 2000, di mana industri olahraga mulai *booming*. Payung hukum pun sudah ada yaitu UU No. 3/2005 yang kemudian diganti menjadi UU No. 11/2022 tentang keolahragaan. Industri olahraga adalah aneka upaya dalam olahraga dan aspek terkait dalam bisnis untuk meningkatkan nilai tambah (Chong, 2007). Industri olahraga pada dasarnya menerapkan konsep ekonomi, yaitu kaitan antara faktor penawaran dan permintaan. Maka teori pemasaran diterapkan untuk mengendalikan aspek penawaran terkait barang dan jasa guna memenuhi permintaan. Nilai tambah adalah peningkatan nilai dari barang dan jasa. Sebagai contoh 5 bilah papan jati kualitas bagus harganya mungkin hanya Rp1 juta, oleh pengrajin mebel Jepara diolah menjadi kursi antik, dan setelah dibeli konsumen harganya meningkat mencapai Rp 5 juta. Jadi nilai tambah sebanyak Rp 4 juta atau empat kali lipat.

Jika Persib Bandung bertanding dengan Persebaya di lapangan sebuah desa terpencil yang sekelilingnya ditutup dengan kain, bisa jadi harga karcis sekitar Rp500, sehingga pendapatan kotor paling-paling Rp5 juta. Setelah pertandingan itu dilaksanakan di stadion yang representatif dengan tempat duduk yang nyaman dan akses mudah termasuk lapangan parkir, selain aman, maka pendapatan kotor bisa sampai Rp500 juta, sehingga nilai tambah sebanyak 100 kali lipat. Manajemen penjualan karcis ditingkatkan, termasuk dukungan sponsor. Pertanyaan mendasarnya adalah sejauh mana potensi permintaan sebagai pasar untuk barang dan jasa dalam olahraga. Empat cabor liga profesional di Korea, yaitu bisbol, bola basket, sepakbola, dan bolavoli menghasilkan *revenue* hingga \$2 milyar dolar per tahun (Chong, 2007). Maka tujuan olahraga profesional adalah memperoleh *revenue*. Jadi manajemennya menerapkan pendekatan bisnis, termasuk strategi marketing. Dalam kaitan ini, pertanyaan yang harus dijawab manajer adalah seberapa besar pasarnya, terkait permintaan. Faktor ini menegaskan betapa penting angka partisipasi dalam olahraga secara umum atau spesifik. Karena itu dimensi ekonomi olahraga di Indonesia sukar maju bila angka partisipasi masih rendah. Jadi erat sekali kaitan antara penawaran dan permintaan terkait segmen produk.

Untuk berpartisipasi aktif secara langsung, termasuk sebagai penonton, pelaku mengeluarkan sejumlah biaya, seperti biaya transportasi, akomodasi, peralatan, dan pakaian sesuai kebutuhan. Partisipasi pasif sebagai penonton juga membutuhkan pengeluaran, seperti membeli karcis, transportasi, akomodasi, dan sebagainya. Partisipasi pasif biasanya terkait suatu even. Australia, misalnya, mengutamakan even tenis dalam bentuk Australia Open. Indonesia bisa melakukan hal yang sama, misalnya melalui bulutangkis. Meski demikian perlu

dicatat bahwa even termasuk jasa yang mudah basi. Suatu pertandingan tidak bisa diulang dengan hasil yang sama kecuali dalam sistem *home away* dalam liga profesional.

Sesungguhnya apa yang ditawarkan dari olahraga tontonan baik amatir maupun profesional? Faktor *entertainment* yang sangat spesifik dan berbeda dengan tontonan lainnya seperti bioskop dan orchestra. Sebuah even olahraga penuh dengan faktor kejutan yang menggugah emosi, laksana sebuah drama tanpa naskah. Satu kesebelasan yang sudah tertinggal skor, misalnya, bisa membalik keadaan pada menit-menit terakhir tanpa disangka-sangka. Pegolf menghadapi tantangan alam dan berjuang melawan diri sendiri. Keberhasilan memasukkan bola dari tempat yang sulit membangkitkan rasa suka cita. Kegagalan juga punya makna yaitu rasa penasaran sehingga ingin bermain lagi. Faktor inilah yang bisa menyebabkan pegolf ingin main lagi keesokan harinya. Setiap lapangan berbeda-beda, baik dalam desain, keindahan rumput, variasi tantangan, kolam air maupun bunker pasirnya. Hal ini menyebabkan penggemar ingin mencoba lapangan di mana-mana. Maka industri olahraga dalam golf menawarkan *entertainment*, termasuk fasilitas lainnya seperti kamar ganti dan tempat mandi yang nyaman. Selain itu juga dilengkapi dengan *shopping* peralatan, *stick*, pakaian, sepatu, celana, dan baju kaos berkerah. Di sinilah *brand* berperan, yang mengambil nama pegolf tenar sebagai model.

Industri olahraga golf termasuk segmen pasar yang mewah. Di Korea, pengguna lapangan golf lebih dari 6 juta orang dan total penjualan mencapai 21 juta dolar Amerika. Penjualan kartu anggota mencapai 17,9 juta dolar Amerika, sewa lapangan golf mencapai 24,91 juta dolar Amerika (Chong, 2007). Angka fantastik inilah yang menyebabkan pemerintah Korea menyebut golf sebagai olahraga terhormat karena selain pemainnya dari kalangan yang punya uang, pemasukan pemerintah dari pajak juga cukup besar. Untuk setiap kompetisi, golfer membayar pajak 12 dolar dan 3,6 dolar dalam kegiatan belajar dan berlatih sebagai layanan jasa. Lapangan golf beserta fasilitas lainnya juga kena pajak bumi dan bangunan, sebesar 58 dolar atau 40 persen dari keseluruhan pajak (Chong, 2007).

Data tersebut menarik sebagai pelajaran bagi Indonesia, bagaimana olahraga golf membangkitkan potensi ekonomi dan sumber pemasukan dari pajak untuk pemerintah. Sayangnya, data terkait di Indonesia belum tersedia, termasuk berapa besar investasi pada setiap lapangan golf, jumlah tenaga kerja yang terserap, dan pajak yang diperoleh. Pelajaran lainnya adalah pasar terbentuk selain karena kegemaran bermain juga kemampuan membayar sehingga besarnya gaji dan pendapatan ikut menentukan kemampuan belanja. Jadi, *sport marketing* menjadi bagian yang melekat pada industri olahraga. Dalam industri tontonan, penonton adalah darahnya bisnis.

Pada klub-klub sepakbola di Brazil, bidang hubungan masyarakat bertugas membina pendukungnya. Di televisi yang disiarkan bukan even sepakbola liga Inggris, Italia, atau Jerman, tetapi lebih pada membelajarkan masyarakat tentang sepakbola modern, termasuk tentang aturan permainan, penjelasan kasus pelanggaran sehingga wasit memberi kartu merah atau tendangan penalti. Usai pertandingan, kru televisi menanyakan pendapat penonton tentang kesannya mengenai pertandingan. Di Indonesia, kelemahan terjadi pada aspek edukasi kepada para suporter. Mereka umumnya tidak paham dan respek terhadap peraturan. Orang datang membayar karcis untuk menyaksikan atraksi yang menarik dan gol-gol yang indah, bukan lalu berakhir dengan kekerasan dan kerusuhan yang membahayakan keselamatan seperti yang baru-baru ini terjadi usai pertandingan antara Persebaya Surabaya dan Arema Malang di Stadion Kanjuruhan Malang, 1 Oktober 2022. Kerusuhan tersebut menimbulkan korban jiwa sebanyak 135 orang dan 574 luka-luka. Tragedi paling kelam sepanjang sejarah sepakbola Indonesia.

Ekonomi Berbasis Olahraga

Ekonomi berbasis olahraga kini menjadi sebuah orientasi yang semakin menarik untuk dibahas dan dikaji oleh berbagai pihak. Menjadi sebuah tantangan besar, peluang besar, potensi besar, sekaligus pekerjaan rumah yang besar bagi dunia olahraga di Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang DBON sudah sangat gencar disosialisasikan oleh Pemerintah. Sebagaimana telah dipahami oleh khalayak, bahwa salah satu tujuan utama DBON adalah memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga. Mencari benang merah yang menghubungkan ekonomi dan olahraga menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada pameo universal bahwa manusia adalah makhluk multidimensional yang salah satunya dikenal sebagai *homo economicus*, makhluk yang kesehariannya tidak terlepas dengan aneka motif untuk pemenuhan kebutuhan ekonomi. Hal tersebut sangat berkaitan erat dengan pameo lain bahwa “tiada hari tanpa olahraga”. Arsiran di antara predikat manusia sebagai *homo economicus* dan formula interaksi sosial tiada hari tanpa olahraga, telah menghasilkan simbiosis baru yang kuat berupa ekonomi olahraga.

Ekonomi berisi pilihan individu, perusahaan, pemerintah, dan negara dalam mengalokasikan serta menggunakan sumber daya yang langka, baik untuk konsumsi, produksi, maupun distribusi, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan. Benang merahnya terlihat secara sangat jelas, karena olahraga adalah segala kegiatan yang sistematis untuk mendorong, membina, serta mengembangkan potensi jasmani, rohani, dan sosial secara individu maupun kolektif sepanjang hayat dan berperilaku kolektif sepanjang zaman, serta

melibatkan banyak pihak terkait. Olahraga dibangun untuk tujuan *well-being*, yakni mewujudkan kesejahteraan paripurna, yakni kehidupan yang sehat, damai, dan makmur.

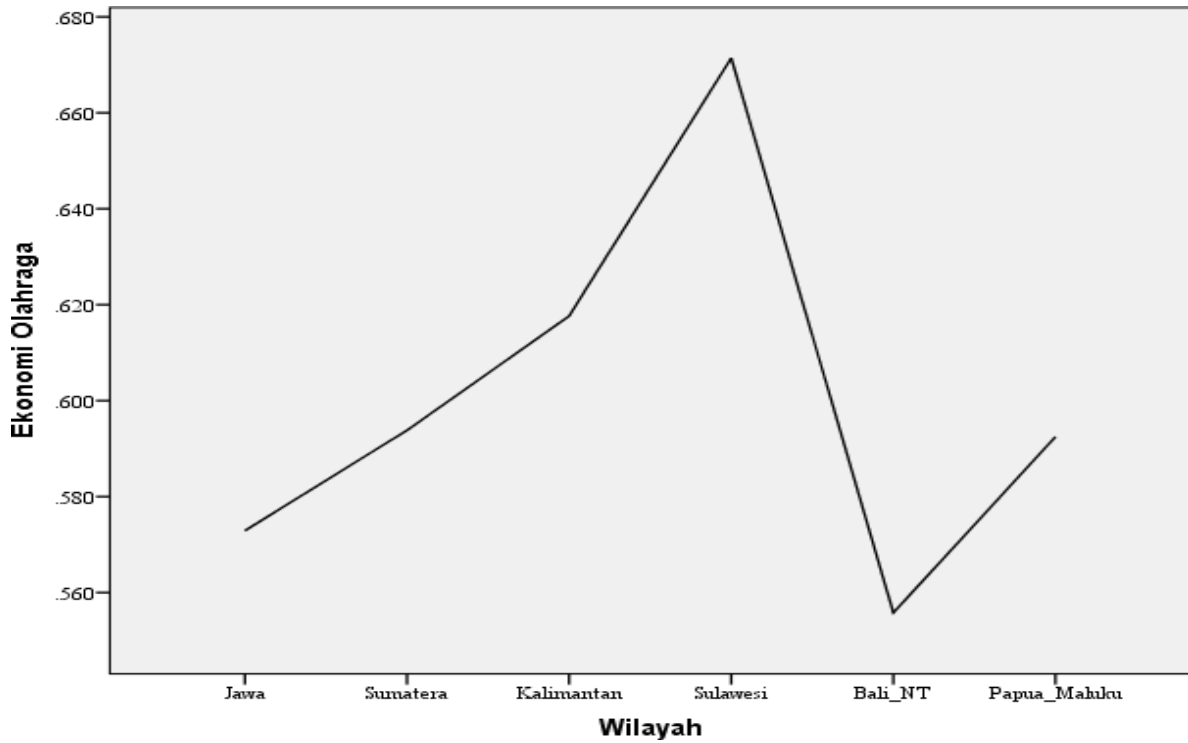
Setidaknya terdapat tiga aspek utama kemajuan ekonomi yang digerakkan oleh olahraga yang menjadi tantangan besar bersama. *Pertama*, mengenali nilai spesifik serta potensi unik dari kegiatan olahraga. Nilai yang terbangkitkan melalui aktivitas besar yang mengakomodasikan aneka kebutuhan pragmatis ekonomi dan pencapaian tujuan olahraga. Eskalasi kebutuhan barang dan jasa olahraga akan meninggi seiring dengan volume kegiatan olahraga yang sukses diselenggarakan. Berbagai *multi event* olahraga, selalu didesain menuju bentuk *three in one* paket kesuksesan, yakni: sukses penyelenggaraan, sukses prestasi, dan sukses ekonomi kerakyatan.

Kedua, kemajuan ekonomi digerakkan olahraga melalui sentuhan kebijakan sinergi pada ekosistem perekonomian serta keolahragaan secara multilingkup dan multiranah. Olahraga sebagai “fungsi reservoir energi penggerak”. Lingkup keolahragaan yang meliputi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi (masyarakat), dan olahraga prestasi memiliki komunitas yang spesifik dan memicu interaksi dari banyak kalangan. Olahraga bukan sekadar panggung untuk para pelaku olahraga, melainkan sebuah pangsa pasar yang dinamis dan berpotensi besar bagi proses memajukan perekonomian nasional, bahkan global. *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi keolahragaan dipersyaratkan oleh pertumbuhan angka partisipasi masyarakat dalam berolahraga. Partisipasi merupakan bentuk prasyarat aksi dari pribadi maupun masyarakat secara kolektif. Partisipasi yang tinggi tentu akan mendongkrak volume kebutuhan barang dan jasa. Artinya, memperbesar komposisi masyarakat Indonesia yang berpartisipasi akan memicu keniscayaan modal demografi, yang merupakan faktor dominan perekonomian Indonesia. Apalagi jika dikaitkan dengan bonus demografi.

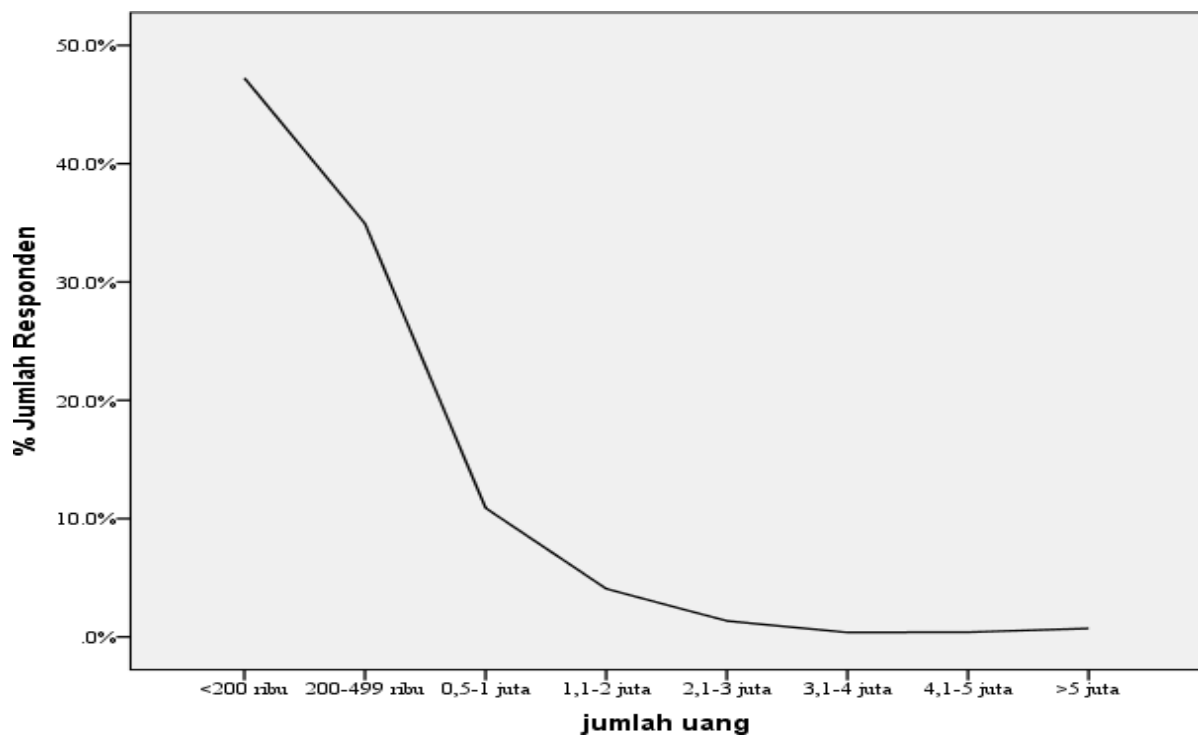
Secara spesifik ekonomi olahraga lebih merujuk pada aktivitas individu atau kolektif yang terkait dengan pengeluaran biaya belanja barang dan jasa dalam olahraga. Belanja barang dapat berupa kaos, sepatu, raket, dan/atau perlengkapan olahraga yang lain. Sementara itu, jasa olahraga bisa berupa pembayaran tiket, konsultan, dan/atau jasa pelatihan, dan sebagainya. Dimensi ekonomi kini menjadi salah satu parameter hasil pembangunan olahraga. Artinya, pembangunan olahraga tidak berhasil jika kurang memberikan sumbangan positif bagi kemajuan perekonomian. Beberapa hal penting terkait dengan deteksi atas dimensi ekonomi olahraga telah dilakukan oleh Tim SDI) Pusat dan daerah pada Tahun 2022 ini. Dimensi ekonomi yang menggunakan parameter belanja barang dan jasa olahraga tersebut dapat menjadi penjelas tentang benang merah antara ekonomi dan olahraga, sekaligus menjadi *entrypoint* berbagai ikhtiar untuk menggerakkan ekonomi melalui olahraga khususnya mengacu

pada perspektif belanja barang dan jasa olahraga pada masyarakat. Komparasi indeks ekonomi berdasarkan belanja barang dan jasa dapat terukur.

Gambar 5.1. Potensi Ekonomi Olahraga Berdasarkan Wilayah



Gambar 5.2. Jumlah Besaran Uang yang Dikeluarkan Masyarakat untuk Belanja Olahraga



Pertama, modus belanja barang olahraga masyarakat Indonesia tertuju pada sepatu (34%), belanja pakaian olahraga (28%) dan peralatan olahraga (13%). Ketiga barang olahraga tersebut menjadi sesuatu yang primer dalam belanja barang olahraga. Tentu terdapat berbagai penjelasan yang sangat menarik jika ditindak lanjuti dengan survei yang lebih mendalam. Di balik pilihan mereka terhadap jenis barang dominan yang dibeli, pasti ada sebuah peta nasional *need assesment* tentang barang olahraga. Peta tersebut menjadi sangat penting bagi kalangan produsen barang olahraga untuk memproduksi jenis barang yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat atau apa yang dianggap bernilai oleh masyarakat. Termasuk juga memahami secara lebih mendasar tentang keterbatasan akses dan daya beli masyarakat.

Kedua, belanja jasa olahraga secara nasional memiliki *trend* yang menyebar dan merata. Biaya perjalanan (23%) termasuk angka yang cukup besar jika dikaitkan dengan masa Pandemi Covid-19 yang mengharuskan orang “*olahraga di rumah saja*” dan membatasi perjalanan yang tidak penting. Terdapat dua kemungkinan, yakni tempat berolahraga yang dilakukan cukup jauh dari tempat tinggal, atau mereka tetap menempuh perjalanan karena melakukan olahraga sangat penting bagi dirinya. Membeli tiket pertandingan, membayar tempat latihan, langganan TV olahraga berbayar, dan membayar pelatih yang dilakukan pada masa Pandemi Covid-19 semakin memperkuat bahwa olahraga memiliki sisi utilitas yang tinggi di masyarakat. Olahraga penting dan tetap menjadi prioritas. *Ketiga*, olahraga harus maju untuk semua lingkungannya, tetapi kemajuan tersebut juga harus memberi berkah pada kemajuan perekonomian nasional. Memberi berkah bagi kemajuan perekonomian tentu bukan sesuatu yang asing dalam keolahragaan. Setidaknya jika dicermati secara luas dan mendalam bahwa koridor olahraga itu memang ada dua, yakni koridor kejayaan dan koridor kesejahteraan. Koridor kesejahteraan merepresentasikan misi kesehatan, kedamaian, dan kemakmuran. Artinya, menumbuhkan ekonomi secara otomatis menjadi bagian yang tak terpisahkan dari misi besar keolahragaan sebagai instrumen pembangunan bangsa.

Di Korea Selatan, misalnya, melalui industri olahraga dapat menghasilkan 2,48 % dari GDP tahun 1999. Jumlah tersebut sekitar 12 triliun atau 1134 milyar won. Potensi ekonomi berbasis olahraga di Indonesia seharusnya jauh lebih prospektif dibanding Korea Selatan karena jumlah penduduk yang lebih besar. Peluang Industri kreatif olahraga dan komodifikasi *sport tourism* Indonesia merupakan potensi yang sangat luar biasa. Hal ini merupakan tantangan besar, potensi besar, pekerjaan rumah yang besar dan membutuhkan kecermatan *by design* melalui perencanaan strategis yang besar.

Perkembangan Global Industri Olahraga

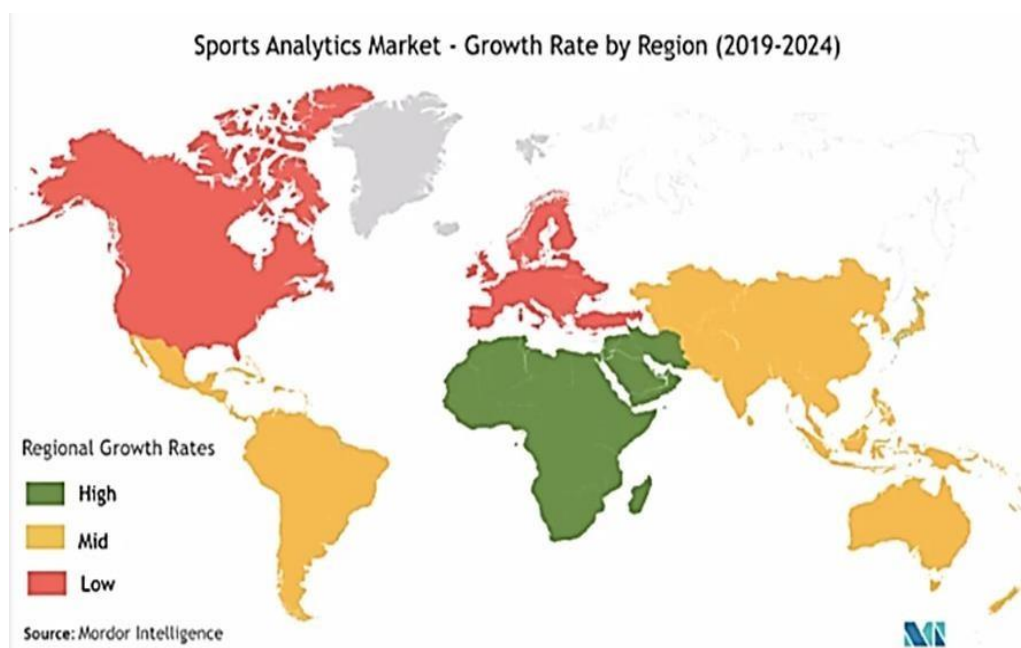
Kajian tren global industri olahraga menjadi telaah yang semakin menarik sejak jejak penyelenggaraan *event* olahraga dunia menunjukkan sinergitas yang makin menguat secara simultan dengan industri olahraga. Amalgamasi olahraga dan dunia industri pada awalnya diwarnai penuh keraguan. Olahraga lazimnya tumbuh di ranah sosial, sedangkan industri olahraga lebih dekat dengan ranah bisnis dan wilayah komersialisasi. Keraguan tersebut kemudian dipatahkan dengan beberapa *best practice event* olahraga. Pada tahun 1984 penyelenggaraan Olimpiade Los Angeles membuktikan bahwa olahraga dan industri sangat memungkinkan untuk bersimbiosis secara mutualistis. Berbagai penyelenggaraan *event* olahraga yang lain semakin membuktikan kekuatan simbiosis tersebut.

Menelaah kecenderungan global industri olahraga telah menjadi pokok bahasan utama pada FGD *background study* penyusunan RPJPN 2025-2045 dan RPJMN 2025-2029 yang diselenggarakan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tahun ini. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghimpun pandangan yang lebih lengkap, luas, dan mendalam untuk menyusun Rencana Aksi Nasional. Sangat menarik bahwa industri olahraga di dunia terdeteksi dalam penguatan debut performa perekonomian dunia. Beberapa deskripsi dan narasi sebagaimana telah dipublikasikan oleh *Sports Industry Insights* (2019) bahwa industri olahraga adalah sektor dengan pertumbuhan tercepat kedua untuk merek, melampaui pertumbuhan PDB sebagian besar negara. Industri olahraga di Amerika akan mencapai \$75 miliar pada tahun 2019. Nike dan ESPN menguasai mayoritas pangsa pasar merek. Pasar olahraga bernilai \$56 juta pada 2018 dan memiliki CAGR 30% hingga 2024. Pada tahun 2018, pendapatan sponsor olahraga di Amerika Utara berjumlah \$17 miliar. Raksasa teknologi akan terus menantang media olahraga tradisional, sehingga meningkatkan persaingan untuk konten premium. Pendapatan untuk *e-sports* telah mencapai \$ 1,1 miliar pada 2019. Amerika Serikat memiliki sektor pasar terbesar sejauh ini, sebesar \$ 31,83 miliar. Dari acara olahraga langsung hingga makanan, sponsor media, dan barang material, industri olahraga. (<https://medium.com/qara/sports-industry-report-3244bd253b8>).

Perkembangan industri olahraga di dunia pada kurun 2019–2024 menunjukkan *trend* yang sangat menarik jika dipetakan dalam klaster perkembangan berdasarkan wilayah. Terdapat tiga klaster perkembangan industri olahraga sebagaimana diilustrasikan dalam gambar tersebut. Warna merah adalah zona pertumbuhan yang rendah, zona kuning adalah klaster perkembangan medium, dan zona hijau merupakan klaster pertumbuhan yang tinggi. *Pertama*, ada sesuatu yang menarik, bahwa Negara-negara di Eropa termasuk dalam klaster pertumbuhan

rendah. Hal yang sama juga dialami oleh negara-negara di Amerika Utara, terutama adalah Kanada. Tidak mudah untuk memberikan penjelasan tentang hal ini, tetapi pertumbuhan yang rendah di wilayah Eropa dan Kanada sangat mungkin terjadi karena dalam kurun waktu-waktu sebelumnya, zona tersebut sudah berada pada posisi tinggi. Kurun 2019–2024 pertumbuhan yang dialami Eropa dan Kanada hanya cenderung melandai atau grafiknya cenderung berpola grafik *plateau*.

Gambar 5.3. Peta Perkembangan Industri Olahraga Berdasarkan Zona Benua



Kedua, Amerika Serikat dan seluruh negara di Amerika Latin, terutama seperti Argentina, Brasilia, Meksiko, Peru, Bolivia termasuk negara dengan pertumbuhan industri olahraga yang sedang. Hal yang sama juga dialami oleh negara-negara di Benua Australia, juga negara-negara di Benua Asia, termasuk Indonesia. Pertumbuhan sedang tersebut tentu saja merupakan sebuah prestasi, mengingat kurun 2019–2024 adalah kurun waktu yang semua bangsa di dunia ini berhadapan dengan ancaman Pandemi Covid-19. Sebuah situasi yang awalnya berada di ranah kesehatan, penyakit infeksi virus, kemudian berdampak secara luas multidimensional di ranah lain, terutama pertumbuhan ekonomi, termasuk industri olahraga di dalamnya. *Ketiga*, negara-negara di Benua Afrika terdeteksi sebagai zona yang berada di kluster perkembangan industri olahraga yang melesat tinggi. Tidak mudah juga mendapatkan argumentasi tentang kecenderungan seperti hal tersebut. Tapi setidaknya hal tersebut karena secara alamiah,

kebanyakan Negara Afrika pada kurun satu dekade ke belakang cenderung berada di level rendah. Terdapat potensi tumbuh yang meningkat secara signifikan karena perubahan kolektif masyarakat Afrika pada umumnya. Perubahan menuju gaya hidup aktif, penguatan iklim partisipasi olahraga yang signifikan akan dibarengi dengan tren pembelanjaan barang dan jasa olahraga yang memicu proses produksi, distribusi, dan pemasaran. Sebuah mekanisme sistemik yang akan menimbulkan *multiplier effect* yang mengakselerasi perkembangan industri olahraga yang melesat.

Kemana Pendulum Ekonomi Olahraga Bergerak?

Industri olahraga bukan sebatas pada bagaimana mendefinisikannya. Industri olahraga adalah sebuah kiprah yang bersifat sistemik meracik keterlibatan berbagai pihak yang tujuannya adalah untuk menggali nilai manfaat ekonomi di dalam olahraga atau melalui olahraga sebagai “tools” yang berpotensi sangat besar. Industri olahraga adalah sebuah industri yg menciptakan nilai tambah dengan memproduksi dan menyediakan peralatan dan jasa yang berkaitan dengan olahraga. Industri Olahraga adalah kegiatan ekonomi bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan atau jasa yang memberi nilai tambah atau manfaat yang lebih tinggi dan berdampak pada perekonomian masyarakat dan olahraga. Segmen utama industri olahraga, sebagaimana telah diuraikan dalam buku *The Global Sports Industry*, mencakup *fan engagement*, *sports participation*, dan *sports products* (Best & Howard, 2022).

Gambar 5.4. Segmen Utama Industri Olahraga



Pertama, industri tentang keterlibatan dan pengikatan diri dari para “penggemar” olahraga (*fan engagement*). Pada *scope* ini dapat diuraikan lebih lanjut meliputi: *sport events*, yakni penyelenggaraan *event* olahraga merupakan jantung atau *core* dari kegiatan industri olahraga. *Sport media*, yakni merupakan peran “*extending fan engagement*” untuk menjadi mesin yang memperluas kualitas dan kuantitas keterlibatan para penggemar olahraga. *Sport entertainment*, yakni berfungsi dan berperan sebagai “*extending sport enjoyment*” yakni mengarah pada perluasan industri hiburan olahraga. Olahraga sebagai aktivitas yang menghibur bagi para penggemar maupun para pelakunya. Sesuatu yang menghibur akan menguatkan keterlibatan dan pengikatan diri.

Kedua, produk olahraga yang meliputi produk pakaian dan peralatan olahraga yang sangat bervariasi, baik produk yang bersifat pakaian umum olahraga maupun pakaian spesifik berdasarkan cabang-cabang olahraga. T-shirt merupakan contoh pakaian olahraga yang secara umum diproduksi secara massal karena merupakan pakaian umum. Sepatu olahraga tipe untuk *walking* dan *running* merupakan produk umum yang lebih dibutuhkan publik. Peralatan olahraga seperti raket, bola, *stick*, *glove*, dan sebagainya merupakan sarana olahraga yang omset penjualannya bergantung pada ukuran populasi yang gemar berolahraga. Produk yang memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang adalah berupa ranah *sports health and wellness*, yang berupa obat-obatan, alat terapi pendukung dan aneka suplemen dan nutrisi.

Ketiga, partisipasi dalam olahraga (*sports participation*) sebenarnya meliputi dimensi yang luas, menyangkut partisipasi secara aktif berolahraga maupun partisipasi pasif. Partisipasi bahkan dapat dibedakan berdasarkan spektrum keterlibatannya, yakni langsung maupun tak langsung. Namun demikian ranah partisipasi cenderung mengerucut pada bagaimana masyarakat membangun animo berolahraga, baik di rumah maupun di luar rumah. Berupa aktivitas *indoor* maupun *outdoor*. Masyarakat perkotaan akan memiliki kebutuhan yang meningkat melakukan olahraga rekreasi keluarga. Mereka membutuhkan wahana rekreatif yang berbasis aktivitas kolektif secara aktif di luar rumah. Definisi angka partisipasi ke depan sangat menarik karena akan menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan masyarakat yang semakin “haus” akan wahana yang menantang beraktivitas fisik-menyenangkan bersama keluarga.

Beberapa *trend* utama telah mempengaruhi industri olahraga dalam beberapa tahun terakhir. Terutama dengan munculnya teknologi dan inovasi baru, atlet serta penggemar olahraga telah mengadopsi pendekatan alternatif untuk berpartisipasi dalam kegiatan olahraga. Beberapa *trend* utama yang harus diwaspadai muncul sebagai dampak lahirnya teknologi terbaru dan juga inovasi-inovasi baru. *Pertama*, *e-sport* menjadi *trend* utama dunia industri

olahraga yang perlu diwaspadai. Perlu kehati-hatian dalam tingkat yang tinggi untuk merespons debut ledakan *trend e-sport* di berbagai belahan dunia. Sektor ini telah berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Dengan kalkulasi peningkatan jumlah pemirsa serta pendapatannya, *Newzoo* memperkirakan bahwa tingkat pertumbuhan tahunan untuk *e-sports* akan mencapai sekitar 14%. Hal ini pada dasarnya berarti bahwa mulai tahun 2019, diperkirakan 1,57 miliar orang kemungkinan akan mulai debut belajar tentang industri olahraga elektronik ini. Beberapa negara dengan pertumbuhan e-sport tinggi adalah Jepang, Jerman, dan Perancis.

Kedua, sponsorships adalah sesuatu yang tumbuh secara eskalatif. Dalam bisnis olahraga, bahkan sponsor adalah segalanya. Ini menghasilkan keuntungan, menyediakan dana, dan memungkinkan acara kompetitif agar terus berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang. Menurut *BBC News*, pengeluaran bisnis untuk sponsorship olahraga diperkirakan akan tumbuh sebesar 4% dan menghabiskan hampir \$44 miliar secara global. Selain itu, PwC melaporkan bahwa pasar *sponsorship* akan mencapai \$49 miliar pada tahun 2023. *Ketiga, media rights* atau hak siar olahraga, tumbuh pesat seiring dengan kemajuan teknologi informasi. Hak siar pada dasarnya adalah biaya yang harus dibayar pelanggan untuk menonton olahraga di TV, internet, atau saluran distribusi media lainnya. Sebagian besar pendapatan yang berasal dari acara olahraga apa pun berasal dari sumber ini. Hak siar dilaporkan mencapai pendapatan \$23,8 miliar pada tahun 2022 dan mewakili hampir 30% dari semua pendapatan olahraga. Pemain terbesar di balik hak siar berasal dari raksasa teknologi seperti *Apple* dan *Amazon*.

Keempat, sports gambling merupakan sebuah *trend* yang paling tua usianya dalam peradaban manusia. Nilai industri dan ekonominya memang sangat tinggi, tetapi selalu menimbulkan persoalan yang pelik sebagaimana umumnya terjadi pada praktik-praktik perjudian yang lainnya. Taruhan telah menjadi salah satu sektor paling populer dalam industri olahraga yang bersentuhan dengan praktik perjudian dalam bentuk apapun. Menghadapi fenomena *sports gambling* ini selalu ada peraturan ketat yang berbeda yang diterapkan di setiap negara, dengan demikian mendapatkan ukuran pasar secara keseluruhan sulit diperkirakan. Namun, pasar dengan pertumbuhan tercepat adalah Amerika Serikat. Pada tahun 2016, pasar taruhan olahraga di AS bernilai \$ 40 miliar. Berbagai penelitian relevan juga menunjukkan bahwa karena teknologi baru dan konektivitas digital, pasar perjudian diperkirakan akan melonjak dalam waktu dekat. Perjudian memiliki potensi industri yang sangat besar, tetapi wajib untuk diwaspadai bersama. Secara faktual, eksese perjudian dapat mengarah pada pelanggaran *fair play* dan sportivitas, di samping juga akan terjerat sebagai perbuatan yang melanggar hukum positif yang berlaku.

Ekonomi Kreatif dan Wisata Olahraga

Industri kreatif adalah industri yang berasal dari pemanfaatan keterampilan, kreativitas, dan bakat yang dimiliki individu dalam menciptakan kesejahteraan dan lapangan pekerjaan. Industri ini berfokus untuk memberdayakan daya cipta dan daya kreasi suatu individu. Manfaat yang ditumbuhkan dari industri kreatif mencakup inovasi baru yang semakin berkembang dengan cepat, membuka dan menambah lapangan kerja, nilai dan kualitas suatu produk semakin meningkat, manusia akan dituntut semakin kreatif, persaingan yang kompetitif, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi.

Sektor industri kreatif diprediksi akan menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia di masa yang akan datang. Sebab, Indonesia tidak akan selamanya bergantung pada eksploitasi sumber daya alam yang jumlahnya semakin terbatas. Kekuatan industri kreatif lebih bergantung kepada keunggulan sumber daya manusia. Berbagai ide kreatif seperti karya seni, arsitektur, buku, inovasi teknologi dan animasi akan mendorong lahirnya jenis usaha industri kreatif. Pemerintah saat ini sedang berusaha untuk mendorong perkembangan industri kreatif di Indonesia dan terus menerus memperbaiki kebijakan mengingat pentingnya industri kreatif dalam kontribusinya untuk pertumbuhan perekonomian. Seiring dengan kemajuan teknologi, sektor industri kreatif Indonesia mempunyai potensi yang sangat terbuka luas untuk digarap dan dikembangkan oleh para pelaku usaha, meskipun mensyaratkan harus mempunyai kreativitas tinggi.

Kendati industri kreatif olahraga belum termasuk industri yang terdaftar secara formal di Badan Ekonomi Kreatif (BEKRAF), namun geliat dan spektrum prospeknya sungguh sangat nampak. Justru hal ini menjadi tantangan tersendiri untuk pengembangannya ke depan. Melibatkan komunitas dan masyarakat luas yang diikat oleh magnet media massa dan *sponsorship*. Belajar dari Korea Selatan yang telah membuktikan bahwa industri olahraga Korea Selatan menghasilkan 2,48 % dari GDP tahun 1999. Jumlah tersebut sekitar 12 triliun atau 1134 milyar won. *Sport industry* adalah kegiatan bisnis bidang olahraga dalam bentuk produk barang dan/atau jasa, sebagai keseluruhan proses produksi barang, jasa, tempat, orang-orang, dan pemikiran yang ditawarkan kepada pelanggan, yang berkaitan dengan olahraga. Olahraga adalah salah satu dari industri yang tercepat bertumbuh-kembangnya di Amerika dan yang jalin menjalin dengan setiap aspek ekonomi – dari media dan pakaian sampai pada makanan dan periklanan olahraga.

Prospek industri kreatif olahraga sangat menjanjikan untuk melipatgandakan industri kreatif pada umumnya. Kebangkitan industri kreatif olahraga haruslah mengarah pada ikhtiar nyata dari bagian yang tak terpisahkan dari upaya peningkatan kemandirian domestik dan daya

saing bangsa. Model kemitraan perlu dijalin dan langkah-langkah koordinatif harus ditempuh untuk menggali potensi, meningkatkan kemampuan serta peluang bagi perkembangan industri olahraga. Industri olahraga merupakan bagian integral dari industri nasional dalam membuka lapangan kerja serta peluang usaha. Prinsip yang perlu dikembangkan adalah: mulai dari hal yang kecil, mulai dari solusi sederhana, dan mulai dari sekarang. Kemitraan antar *stakeholder* menjadi kata kunci untuk memadukan keunggulan proses alih teknologi yang dikembangkan di Perguruan tinggi keolahragaan dengan masyarakat. Wujud nyata pembentukan *softskill* berupa kompetensi lulusan perguruan tinggi berbasis *sportpreneurship*.

Sportpreneurship menjadi wujud kepeloporan inovasi karena memiliki esensi mentalitas kolektif yang mengandung nilai-nilai: kemandirian, daya adaptasi tinggi, jiwa wirausaha, mutu layanan dan produksi, serta komitmen pada tujuan. Era revolusi industri 4.0 merupakan era yang menjelaskan tentang kekhususan kondisi pergaulan global yang wajib beradaptasi dengan cara-cara hidup baru. Menjadi keniscayaan dari lahirnya generasi teknologi terbaru. Terdapat perilaku lama yang terdisrupsi, kemudian datang kesempatan dan peluang baru. Hal itu pasti juga terjadi dan menjadi orientasi perintisan industri kreatif olahraga, termasuk pemberdayaan terhadap para pelakunya.

Selain ekonomi kreatif, wisata olahraga belakangan mulai marak dan menjadi ikon dan unggulan di sejumlah daerah, seperti Borobudur Marathon di Jawa Tengah, Tour de Singkarak di Sumatera Barat, Sail Sabang di Aceh, dan motoGP Mandalika di Nusa Tenggara Barat. Terkait yang terakhir, ada dampak ekonomi yang luarbiasa, termasuk event sebelumnya berupa World Superbike Mandalika. Agenda World Superbike yang digelar pada 19-21 November 2021 tersebut dapat meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Lombok Tengah dan menciptakan lapangan kerja sekitar 1.475 tenaga kerja lokal. Even tersebut juga merupakan peluang mengenalkan produk usaha mikro, kecil, dan menengah ke dunia. Terjadi peningkatan sekitar 50% jumlah penumpang pesawat yang tiba di Bandara Lombok dibandingkan sebelum ajang event ini. Selain itu, tingkat okupansi hotel meningkat dari 15% menjadi 95% dan omzet bisnis hotel juga meningkat dari 15% menjadi 85%. Peningkatan omzet bisnis persewaan kendaraan, dari Rp10 juta-Rp15 juta per bulan menjadi hampir Rp70 juta (Pusat Penelitian BadanKeahlian DPR, 2022; Yudistira, 2022).

Dampak ekonomi yang lebih besar terjadi pada agenda motoGP Mandalika yang digelar pada 18-20 Maret 2022. Event tersebut menyerap sekitar 6.900 tenaga kerja. Penyerapan terjadi di enam sektor yaitu sektor konstruksi pembangunan jalan kawasan khusus sebanyak 300 orang, sektor UMKM Lombok sebanyak 3.000 orang, sektor transportasi logistik sebanyak 1.500 orang, sektor kuliner dan restoran sebanyak 900 orang, sektor akomodasi sebanyak 500 orang, dan sisanya sektor

pariwisata dengan kegiatan eksplorasi keindahan alam, sosial, dan budaya. Selain itu, agenda olahraga tersebut juga meningkatkan wisatawan ke Lombok, yang meliputi tim MotoGP dan penonton balapan. Pada saat tes pramusim MotoGP di Sirkuit Mandalika pada Februari 2022, ada sebanyak 12 tim MotoGP dengan 24 pembalap dan sekitar 600 orang yang terlibat di dalamnya. Tetapi, pada pergelaran MotoGP Mandalika 2022 tanggal 18- 20 Maret 2022, jumlah kru tim MotoGP mencapai empat kali lipat. Ada sekitar 2.500 orang terlibat dalam ajang balap tersebut. Selain itu, data per 16 Maret 2022, tiket nonton langsung MotoGP Mandalika 2022 sudah habis terjual. Sebanyak 91,1% penonton MotoGP Mandalika berasal dari luar Provinsi NTB dan sisanya (8,9%) berasal dari Provinsi NTB. Selain itu, ada peningkatan tingkat okupansi hotel mencapai 100%. Padahal, tingkat okupansi hotel pada hari biasa hanya sekitar 30%. Tingginya tingkat okupansi tersebut tak lepas dari banyaknya jumlah penonton dan kru tim MotoGP. Kondisi tersebut pada gilirannya meningkatkan PAD Lombok Tengah sekitar Rp300 miliar (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR, 2022; Yudistira, 2022).

Hal yang kurang lebih sama terjadi pada Formula E yang diselenggarakan pada 4 Juni 2022. Hasil kajian yang dilakukan oleh Indef menyebutkan bahwa penyelenggaraan Formula E telah menyumbang pertumbuhan ekonomi Jakarta sebesar 0,1%. Secara keseluruhan, wisata olahraga tersebut memberikan dampak ekonomi sebesar Rp2,6 triliun, terdiri dari Rp2,04 triliun terhadap PDRB DKI Jakarta dan dampak langsung sebesar Rp597 miliar (CNNIndonesia.com, 2022; Kompas.com, 2022). Dari dampak langsung tersebut, terungkap pembelian tiket dan pengeluaran pengunjung sebesar Rp52,4 miliar dan transaksi pengunjung UMKM sebesar Rp4,54 miliar. Pagelaran tersebut juga berdampak pada peningkatan sector rekreasi dan jasa sebesar 0,4%, sector komunikasi sebesar 0,31%, jasa bisnis sebesar 0,30%, computer dan elektronik sebesar 0,21%, dan transportasi sebesar 0,21%.

Bab 6 Penutup

Laporan ini telah menyajikan data dan informasi keolahragaan nasional, terutama menyangkut 9 dimensi dalam SDI. Data dan informasi tersebut dihasilkan dari proses pengumpulan data di 34 provinsi di Indonesia, yang kemudian dianalisis secara mendalam dan dikaitkan dengan bukti-bukti empirik lain yang relevan sehingga diperoleh pengetahuan yang akuntabel dan kredibel. Pada bagian ini akan dipaparkan sejumlah poin penting untuk mendapatkan perhatian dan komitmen, termasuk sejumlah rekomendasi untuk dielaborasi lebih jauh dalam bentuk rumusan kebijakan.

Kesimpulan

1. Olahraga merupakan “driving forces” bagi meningkatnya sejumlah komponen pembentuk daya saing bangsa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Kebugaran jasmani dan kesehatan fisik menjadi faktor krusial guna mendukung produktivitas dan ketahanan bangsa. Olahraga juga memperkuat resilien dan modal sosial dalam rangka beradaptasi dengan perubahan dan fragmentasi sosial serta membangun identitas dan *branding* melalui prestasi dunia.
2. Hasil pengukuran SDI nasional tahun 2022 sebesar 0,376 dari skala 0-1. Dimensi SDI yang masuk dalam kategori rendah adalah SDM, partisipasi, kebugaran, dan performa. Sedangkan dimensi yang masuk dalam kategori menengah adalah ruang terbuka, kesehatan, literasi fisik, perkembangan personal, dan ekonomi. Tidak ada perubahan yang signifikan dibandingkan dengan capaian tahun 2021. Hal ini membuktikan bahwa intervensi kebijakan harus lebih gencar dilaksanakan sehingga berdampak signifikan pada perubahan capaian.
3. Sejarah perjalanan olahraga Indonesia, baik dalam bentuk kemajuan maupun kemunduran, merupakan cerminan dari pengambilan keputusan yang dibuat oleh para pemimpinnya. Dengan bantuan ilmu pengetahuan, hasil-hasil riset, dan analisis data yang mendalam, kita memiliki alat bantu untuk mengambil kebijakan berbasis bukti - *evidence based policy* - sehingga kekeliruan dalam mengambil keputusan dapat diminimalkan.
4. Perpres 86/2021 tentang DBON merupakan arah kebijakan pembinaan dan pengembangan olahraga guna meningkatkan budaya olahraga masyarakat, pencapaian prestasi di level internasional, dan ekonomi berbasis olahraga. Sebagai dokumen kebijakan jangka panjang yang mengikat semua pihak .

5. Kebijakan dan program pembudayaan olahraga yang mengarah pada penguatan modal manusia seperti kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan psikis masih jauh dari harapan. Rendahnya tingkat partisipasi dan kondisi kebugaran masyarakat yang sangat memprihatinkan, termasuk pada anak dan remaja, merupakan bukti yang tak terbantahkan. Anggaran pembudayaan olahraga yang kurang dari 10% dari total anggaran olahraga sungguh tidak proporsional, sementara target programnya menysasar 95% rakyat Indonesia.
6. Daya saing Indonesia dalam konteks olahraga prestasi mengalami stagnasi kurun waktu 30 tahun terakhir. Pada level Olimpiade, capaian tertinggi diperoleh tahun 1992 ketika kita meraih 2 medali emas dari bulutangkis. Pasca itu, kita hanya meraih 1 medali emas dan bahkan nihil pada Olimpiade London 2012. Pada level Asian Games, Indonesia pernah berjaya pada 1962 dengan memperoleh 11 medali emas dan ada diperingkat kedua setelah Jepang. Kemerostan prestasi terjadi sejak Asian Games 2002 dan titik nadirnya pada tahun 2006 ketika Indonesia hanya memperoleh 2 medali emas dan ada diperingkat ke 22. Pada level SEA Games, dominasi Indonesia selama 20 tahun, 1977-1997, memudar hingga ke peringkat 5. Pembinaan olahraga yang memenuhi standar mutu, mulai dari *input* calon atlet, kualitas pelatih, anggaran, sampai pada mutu capaian menjadi persoalan yang serius.
7. Ukuran dan potensi ekonomi olahraga Indonesia sangat besar. Uang yang beredar untuk belanja olahraga diperkirakan sebesar 43,2 triliun/tahun. Dari responden yang disurvei, sebanyak 57,7% atau sekitar 113,8 juta orang membelanjakan uangnya untuk kebutuhan olahraga, antara Rp200 ribu hingga lebih dari Rp5 juta/tahun. Event olahraga seperti motoGP Mandalika 2022 terbukti menyerap sekitar 6.900 tenaga kerja, meningkatkan wisatawan ke Lombok karena sebanyak 91,1% penonton berasal dari luar Provinsi NTB, okupansi hotel mencapai 100% padahal pada hari biasa hanya sekitar 30%, dan kondisi tersebut pada gilirannya meningkatkan PAD Lombok Tengah sekitar Rp300 miliar.
8. Laporan ini menyajikan data keolahragaan dalam lingkup nasional yang mencakup 34 provinsi, terutama terkait dengan sembilan dimensi SDI yang merupakan representasi olahraga pendidikan, olahraga rekreasi/masyarakat, dan olahraga prestasi. Analisis statistik juga telah membuktikan bahwa olahraga berdampak positif terhadap kebugaran, kesehatan fisik, kesejahteraan psikis, risilien, modal sosial, dan ekonomi.

Rekomendasi

1. Penyusunan kebijakan dan program pembinaan olahraga dalam konteks daya saing bangsa tidak hanya terbatas pada capaian olahraga prestasi, tetapi juga olahraga pendidikan yang menekankan pada penanaman nilai moral dan etos kerja serta olahraga masyarakat yang menekankan pada kesehatan dan modal sosial. Substansi tersebut perlu dimasukkan dalam dokumen perencanaan, terlebih pada RPJP 2025-2045 menuju Indonesia Emas.
2. Hasil pengukuran SDI Tahun 2022 (dan juga SDI Tahun 2021) menunjukkan capaian hasil pembangunan olahraga yang belum menggembirakan. Hal ini, tentu saja tidak boleh dibiarkan, harus ada intervensi kebijakan dan program aksi yang konkrit yang harus dilakukan oleh Pemerintah secara integratif dan kolaboratif. Diperlukan audit kebijakan dan program di setiap satuan kerja Pemerintah yang terkait dengan urusan Olahraga agar memberikan dampak pada perubahan capaian, bukan sekedar rutinitas.
3. Kebijakan pembangunan olahraga nasional perlu disusun berdasarkan data dan bukti-bukti empirik hasil suatu kajian ilmiah. Kita harus mengakhiri kebijakan olahraga yang bias tujuan dan bertransformasi menuju kebijakan berbasis bukti - *evidence-based policy*.
4. Perlu ada terobosan kebijakan dan program terkait pembudayaan olahraga, termasuk peningkatan anggaran yang lebih proporsional, guna memberikan manfaat olahraga yang sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia. Upaya ini sekaligus akan meningkatkan indeks pembangunan olahraga secara signifikan karena pembudayaan olahraga berkontribusi sebesar 79% terhadap indeks SDI secara keseluruhan.
5. Upaya pencapaian performa tinggi dalam kompetisi internasional, terlebih pada Olimpiade, perlu lebih fokus dengan menerapkan standar mutu dalam pembinaan atlet mulai dari seleksi calon atlet, kualitas pelatih, anggaran, sampai pada mutu capaian. Kata kunci pada persaingan adalah mutu, bukan sekedar jumlah. Dengan strategi yang lebih fokus dan menerapkan standar mutu pembinaan, maka probabilitas mencapai prestasi dunia semakin terbuka.
6. Ekonomi olahraga, termasuk didalamnya industri dan pariwisata olahraga, perlu terus dikembangkan sebagai upaya untuk memperoleh sumber pembiayaan bidang

keolahragaan, devisa negara, dan kesejahteraan masyarakat. Ada harapan besar bahwa pada akhirnya olahraga dapat membiayai dirinya sendiri dan bahkan dapat berkontribusi bagi tumbuhnya ekonomi di masyarakat.

7. Sebagai instrumen kebijakan, SDI perlu diimplementasikan tidak saja di tingkat nasional, tetapi juga tingkat daerah (provinsi/kabupaten/kota) secara sinergis dan berkelanjutan. Dengan demikian provinsi dan kabupaten/kota dapat mengetahui perkembangan pembangunan olahraga dan sekaligus mengidentifikasi berbagai masalah atau kesenjangan yang terjadi untuk kemudian merumuskan intervensi kebijakan dan program yang sesuai kebutuhan.

Referensi

- Achebe, A., & Schools, C. P. (2021). Genetic Modification: A Force of Good in Sports. *Researchgate*, (May).
- Aspen Institute. (2022). Youth sports facts benefits. Retrieved from <https://www.aspenprojectplay.org/youth-sports/facts/benefits>
- Australian Government. (2010). *Australian sport: The pathway to success [Publications Approval Number 6510]*. Commonwealth of Australia. Retrieved from <http://www.ag.gov.au/cca>
- Bailey, R. (2006). Physical education and sport in schools: A review of benefits and outcomes. *Journal of School Health*. <https://doi.org/10.1111/j.1746-1561.2006.00132.x>
- Barreto, G. (2022). Nutrition for the Athlete: A Foundation for Success. *Physician Assistant Clinics*, 7(4), 727–740. <https://doi.org/10.1016/J.CPHA.2022.06.004>
- Best, R., & Howard, D. (2022). *The Global Sports Industry*. Oregon: Global Sports Insights.
- Blair, T. (1999). *Modernising government*. London: Prime Minister and the Minister for the Cabinet Office.
- Boccia, G., Cardinale, M., & Brustio, P. R. (2020). World-Class Sprinters' Careers: Early Success Does Not Guarantee Success at Adult Age. *International Journal of Sports Physiology*, 16, 367–374. <https://doi.org/doi: 10.1123/ijssp.2020-0090>
- Boccia, G., Cardinale, M., & Brustio, P. R. (2021). Performance progression of elite jumpers: Early performances do not predict later success. *Scand. J. Med. Sci. Sports*, 31, 132–139. <https://doi.org/doi: 10.1111/sms.13819>
- Bompa, T. O., & Haff, G. G. (2009). *Periodization: Theory and methodology of training*. Champaign, Ill. : Human Kinetics;
- Booth, F. W., Roberts, C. K., & Laye, M. J. (2012). Lack of exercise is a major cause of chronic diseases. *Comprehensive Physiology*, 2(2). <https://doi.org/10.1002/cphy.c110025>
- BPS. (2021). *Hasil sensus penduduk Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik. Retrieved from <https://www.bps.go.id/pressrelease/2021/01/21/1854/hasil-sensus-penduduk-2020.html>
- Brouwers, J., Sotiriadou, P., & de Bosscher, V. (2015). Sport-specific policies and factors that influence international success: The case of tennis. *Sport Management Review*, 18(3), 343–358. <https://doi.org/10.1016/j.smr.2014.10.003>
- Caldwell, H. A. T., Miller, M. B., Tweedie, C., Zahavich, J. B. L., Cockett, E., & Rehman, L. (2022). The Impact of an After-School Physical Activity Program on Children's Physical Activity and Well-Being during the COVID-19 Pandemic: A Mixed-Methods Evaluation Study. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 19(9). <https://doi.org/10.3390/ijerph19095640>
- Camporesi, S., & McNamee, M. (2018). *Bioethics, genetics and sport*. *Bioethics, Genetics and Sport*. Taylor and Francis. <https://doi.org/10.4324/9781315709253>
- Chong, K. (2007). Sport industry development in Korea: Sport marketing strategy focus on professional and golf. In *International Conference on Sport Industry*. UNS Surakarta.
- CNNIndonesia.com. (2022). Hitung-hitungan Formula E beri dampak ekonomi Rp2,6 triliun ke DKI. Retrieved November 11, 2022, from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220624075953-532-812910/hitung-hitungan-formula-e-beri-dampak-ekonomi-rp26-t-ke-dki>
- Connor, K. M., & Davidson, J. R. T. (2003). Development of a new Resilience scale: The Connor-Davidson Resilience scale (CD-RISC). *Depression and Anxiety*. <https://doi.org/10.1002/da.10113>
- Côté, J., & Hancock, D. J. (2016). Evidence-based policies for youth sport programmes.

- International Journal of Sport Policy*, 8(1), 51–65.
<https://doi.org/10.1080/19406940.2014.919338>
- Coubertin, P. de. (2000). *Olympism: Selected writings*. (N. Muller, Ed.). Lausanne: International Olympic Committee.
- De Bosscher, V. (2016). Theory of sports policy factors leading to international sporting success (SPLISS). In *Handbook of Theory in Sport Management*. Routledge.
<https://doi.org/10.4324/9781315753461>
- De Bosscher, V., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2006). A Conceptual Framework for Analysing Sports Policy Factors Leading to International Sporting Success. *European Sport Management Quarterly*.
<https://doi.org/10.1080/16184740600955087>
- De Bosscher, V., De Knop, P., van Bottenburg, M., Shibli, S., & Bingham, J. (2009). Explaining international sporting success: An international comparison of elite sport systems and policies in six countries. *Sport Management Review*.
<https://doi.org/10.1016/j.smr.2009.01.001>
- De Bosscher, V., Heyndels, B., De Knop, P., Van Bottenburg, M., & Shibli, S. (2008). The paradox of measuring success of nations in elite sport. *BELGEO*.
<https://doi.org/10.4000/belgeo.10303>
- De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & van Bottenburg, M. (2016). Convergence and Divergence of Elite Sport Policies: Is There a One-Size-Fits-All Model to Develop International Sporting Success? *Journal of Global Sport Management*.
<https://doi.org/10.1080/24704067.2016.1237203>
- De Bosscher, V., Shibli, S., Westerbeek, H., & Van Bottenburg, M. (2015). Successful elite sport policies. An International comparison of Elite Sport Policies in 15 Nations (SPLISS 2.0). *SPLISS*.
- Degenne, A. (2004). Social capital: a theory of social structure and action. *Tempo Social*.
<https://doi.org/10.1590/s0103-20702004000200014>
- Djajmiko, E., Irawan, M., Asmadi, T. D., Bangun, H. C., Sanusi, U., Sabaruddin, & Kembaren, R. (2004). *Sejarah bulutangkis Indonesia [History of badminton of Indonesia]*. Jakarta: PBPBSI.
- Driggin, E., Madhavan, M. V., Bikdeli, B., Chuich, T., Laracy, J., Biondi-Zoccai, G., ... Parikh, S. A. (2020). Cardiovascular Considerations for Patients, Health Care Workers, and Health Systems During the COVID-19 Pandemic. *Journal of the American College of Cardiology*, 75(18), 2352–2371. <https://doi.org/10.1016/j.jacc.2020.03.031>
- Durden-Myers, E. J., Green, N. R., & Whitehead, M. E. (2018). Implications for promoting physical literacy. *Journal of Teaching in Physical Education*, 37(3).
<https://doi.org/10.1123/jtpe.2018-0131>
- Edwards, L. C., Bryant, A. S., Keegan, R. J., Morgan, K., & Jones, A. M. (2017). Definitions, Foundations and Associations of Physical Literacy: A Systematic Review. *Sports Medicine*. <https://doi.org/10.1007/s40279-016-0560-7>
- Eime, R. M., Harvey, J. T., Charity, M. J., Casey, M. M., Westerbeek, H., & Payne, W. R. (2016). Age profiles of sport participants. *BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation*, 8(6), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s13102-016-0031-3>
- Erickson, K. I., Hillman, C., Stillman, C. M., Ballard, R. M., Bloodgood, B., Conroy, D. E., ... Powell, K. E. (2019). Physical Activity, Cognition, and Brain Outcomes: A Review of the 2018 Physical Activity Guidelines. *Medicine and Science in Sports and Exercise*.
<https://doi.org/10.1249/MSS.0000000000001936>
- Ford, P., de Ste Croix, M., Lloyd, R., Meyers, R., Moosavi, M., Oliver, J., ... Williams, C. (2011). The Long-Term Athlete Development model: Physiological evidence and application. *Journal of Sports Sciences*, 29(4), 389–402.

- <https://doi.org/10.1080/02640414.2010.536849>
- Forrest, R., & Kearns, A. (2001). Social cohesion, social capital and the neighbourhood. *Urban Studies*. <https://doi.org/10.1080/00420980120087081>
- Fuchs, R. (2015). Physical Activity and Health. In J. Wright (Ed.), *International Encyclopedia of the Social & Behavioral Sciences* (2nd ed.). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-097086-8.14115-7>
- Girardi, M., Casolo, A., Nuccio, S., Gattoni, C., & Capelli, C. (2020). Detraining Effects Prevention: A New Rising Challenge for Athletes. *Frontiers in Physiology*, 11(October). <https://doi.org/10.3389/fphys.2020.588784>
- Hallmann, Kirstin and Petry, K. (2013). *Comparative sport development: Systems, participation and public policy*. London: Springer. <https://doi.org/10.1007/978-1-4614-8905-4>
- Handayani, D., Hadi, D. R., Isbaniah, F., Burhan, E., & Agustin, H. (2020). Corona virus disease 2019. *Jurnal Respiriologi Indonesia*, 40(2), 119–129. Retrieved from <https://jurnalrespirologi.org/index.php/jri/article/view/101>
- Hans Kraus, M. D., & Hirschland, R. P. (1953). Muscular fitness and health. *Journal of the American Association for Health, Physical Education, and Recreation*, 24(10).
- Hardman, K. (2003). The state and status of physical education in schools: foundation for deconstruction and reconstruction of physical education. In *In Hardman, K. (ed.), International Council of Sport Science and Physical Education, Physical education: deconstruction and reconstruction - issues and directions*, Schondorf, Verlag Karl Hofmann, c2003, p.15-34.
- Hardman, Ken. (1999). The State and Status of Physical Education in Schools: Foundation for Deconstruction and Reconstruction of Physical Education. *European Physical Education Review*.
- Hartati, S. C. Y. et. a. (2018). *Profil tingkat kebugaran jasmani siswa SMP di Surabaya*. Surabaya: LPPM Universitas Negeri Surabaya.
- Houlihan, B., & Green, M. (2008). *Comparative elite sport development: Systems, structures and public policy*. Elsevier Ltd. <https://doi.org/10.4324/9780080554426>
- Hüttermann, S., Noël, B., & Memmert, D. (2018). Eye tracking in high-performance sports: Evaluation of its application in expert athletes. *International Journal of Computer Science in Sport*, 17(2), 182–203. <https://doi.org/10.2478/IJCSS-2018-0011>
- Hylton, K., Bramham, P., Jackson, D., & Nesti, M. (2007). *Sport development: Policy, process, and practice* (Revision). New York: Routledge.
- ICW. (2022). Korupsi Dana Hibah Keolahragaan. Retrieved from <https://www.antikorupsi.org/id/korupsi-dana-hibah-keolahragaan>
- Indahwati, N. (2018). *Profil kemampuan motorik anak SMP di Surabaya*. Surabaya: LPPM Universitas Negeri Surabaya.
- Infopublik-Indonesia G20. (2022). Pentingnya Pemberantasan Korupsi di Bidang Olahraga. Retrieved from <https://indonesia.go.id/g20/kategori/kabar-terkini-g20/5997/pentingnya-pemberantasan-korupsi-di-bidang-olahraga?lang=1>
- IOC. (2020). *Olympic Charter*. International Olympic Committee. <https://doi.org/10.1080/01436597.2016.1177455>
- IOC. (2021). *Annual report 2021: Faster, higher, stronger - together*. International Olympic Committee.
- IOC. (2022). International Olympic Committee. Retrieved from <https://olympics.com/ioc/overview>
- John, R., Dhillon, M. S., & Dhillon, S. (2020). Genetics and the Elite Athlete: Our Understanding in 2020. *Indian Journal of Orthopaedics*, 54(3), 256–263. <https://doi.org/10.1007/s43465-020-00056-z>

- Jugl, I., Bender, D., & Lösel, F. (2021). *Do Sports Programs Prevent Crime and Reduce Reoffending? A Systematic Review and Meta-Analysis on the Effectiveness of Sports Programs*. *Journal of Quantitative Criminology*. Springer US.
<https://doi.org/10.1007/s10940-021-09536-3>
- Kakanis, M. W., Peake, J., Brenu, E. W., Simmonds, M., Gray, B., Hooper, S. L., & Marshall-Gradisnik, S. M. (2010). The open window of susceptibility to infection after acute exercise in healthy young male elite athletes. *Exercise Immunology Review*, *16*, 119–137. <https://doi.org/10.1016/j.jsams.2010.10.642>
- Kemendes. (2018). *Riset kesehatan dasar*. Agency of Health Research and Development. Retrieved from <https://www.litbang.kemkes.go.id/laporan-riset-kesehatan-dasar-riskesdas/>
- Kemendes RI. (2022). Masalah dan tantangan kesehatan Indonesia saat ini. Retrieved from <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/masalah-dan-tantangan-kesehatan-indonesia-saat-ini>
- Kemendikham. (2012). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi*. Jakarta: Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- Kemendikpora. (2021). *Laporan kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga 2021*. Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Koentjaraningrat. (1976). *Kebudayaan, mentalitet, dan pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Kompas.com. (2022). Dampak ekonomi Formula E Jakarta capai Rp 2,6 triliun. Retrieved November 11, 2022, from [https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/24/21091621/anies-dampak-ekonomi-formula-e-jakarta-capai-rp-26-triliun-sangat#:~:text=%22Kegiatan Formula E yang kemarin,%2F6%2F2022\) malam.](https://megapolitan.kompas.com/read/2022/06/24/21091621/anies-dampak-ekonomi-formula-e-jakarta-capai-rp-26-triliun-sangat#:~:text=%22Kegiatan Formula E yang kemarin,%2F6%2F2022) malam.)
- Kompas. (2022, May 27). Enggan Mengemis, Lukman Bawa Thailand Berjaya di Vietnam. *Kompas.Id*. Retrieved from <https://www.kompas.id/baca/olahraga/2022/05/24/enggan-mengemis-lukman-bawa-thailand-berjaya-di-vietnam>
- Leitão, L., Marocolo, M., de Souza, H. L. R., Arriel, R. A., Campos, Y., Mazini, M., ... Pereira, A. (2022). Three-Month vs. One-Year Detraining Effects after Multicomponent Exercise Program in Hypertensive Older Women. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, *19*(5).
<https://doi.org/10.3390/ijerph19052871>
- Lubis, M. (1990). *Manusia Indonesia: Sebuah pertanggungjawaban*. Jakarta: Haji Masagung.
- Luthans, F., Luthans, K. W., & Luthans, B. C. (2004). Positive psychological capital: Beyond human and social capital. *Business Horizons*.
<https://doi.org/10.1016/j.bushor.2003.11.007>
- Mahkamah Konstitusi. (2015). *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 19/PUU-XII/2014 tanggal 26 Pebruari 2015 atas Pengujian Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional*.
- Maksum, A. (2015). National mental model and competitiveness: Transformation toward achieving and progressive behavior. *Anima, Indonesian Psychological Journal*, *29*(2).
- Maksum, A. (2017). Riset Karakter dalam Pendidikan Jasmani. In *Implementasi nilai-nilai luhur olahraga dalam pembentukan karakter melalui Pendidikan jasmani*. Jakarta: Universitas Singaperbangsa Karawang.
- Maksum, A. (2018). *Metodologi penelitian dalam olahraga* (2nd ed.). Unesa University Press.
- Maksum, A. (2019). Dilema pendidikan karakter dalam kuasa sosial yang disruptif: Kajian dari perspektif neuro-psikologi [The dilemma of character education in disruptive social power: An analysis from a neuropsychological perspective]. In *Integrasi PPK dan Gerakan Literasi Nasional dalam Pembelajaran Berbasis HOTS*. Surabaya:

- Pascasarjana Universitas Negeri Surabaya.
- Maksum, A. (2020). *Patterns of sports participation by age, gender, and jobs: A case of Indonesia (Research Report)*. Surabaya: Unesa University Press.
- Maksum, A. (2022). Patterns of physical activity and its impact on the quality of life: A structural equation modeling analysis. *Annals of Applied Sport Science*, 10(2). Retrieved from <http://www.aassjournal.com>
- Maksum, A., & Indahwati, N. (2020a). Patterns of physical activity and its implication on health risk and life satisfaction: An evidence from adults in Indonesia [Paper presentation]. The 2020 Yokohama Sport Conference. Yokohama, Japan.
- Maksum, A., & Indahwati, N. (2020b). *Physical Activity and Quality of Life: A Structural Equation Modeling Analysis of Its Relations and Affecting Factors - Research Report*. Surabaya: Universitas Negeri Surabaya.
- Martinen, R., & Stellino, M. B. (2022). Before- and After-School Physical Activity: Programs and Best Practices. *Journal of Physical Education Recreation & Dance*, (July). <https://doi.org/10.1080/07303084.2022.2053474>
- Mayer, D. (2010). *Essential evidence-based medicine* (2nd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
- McFee, G. (2012). Olympism and sport's intrinsic value. *Sport, Ethics and Philosophy*. <https://doi.org/10.1080/17511321.2012.666994>
- Mujika, I., & Padilla, S. (2000). Detraining: Loss of Training-Induced Physiological and Performance Adaptations. *Sports Medicine*, 30(3), 145–154. Retrieved from <http://link.springer.com/10.2165/00007256-200030030-00001>
- Mutohir, T. C., Lutan, R., Maksum, A., & Kristiyanto, A. (2021). *Laporan Nasional Sport Development Index 2021: Olahraga untuk investasi pembangunan manusia*. (Ali Maksum, Ed.). Jakarta: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia.
- Mutohir, T. C., & Maksum, A. (2007). *Sport Development Index: Concept, methodology, and application*. Bessindo Primalaras.
- Natri, H. M., Bobowik, K. S., Kusuma, P., Darusallam, C. C., Jacobs, G. S., Hudjashov, G., ... Romero, I. G. (2020). Genome-wide DNA methylation and gene expression patterns reflect genetic ancestry and environmental differences across the Indonesian archipelago. *PLoS Genetics*, 16(5). <https://doi.org/10.1371/JOURNAL.PGEN.1008749>
- Natri, H. M., Hudjashov, G., Jacobs, G., Kusuma, P., Saag, L., Darusallam, C. C., ... Banovich, N. E. (2022). Genetic architecture of gene regulation in Indonesian populations identifies QTLs associated with global and local ancestries. *American Journal of Human Genetics*, 109(1), 50–65. <https://doi.org/10.1016/j.ajhg.2021.11.017>
- Nurhayati, F. (2018). *Profil status gizi berdasarkan IMT/U siswa SMP di Surabaya*. Surabaya.
- Parkhurst, J. (2017). *The politics of evidence: From evidence-based policy to the good governance of evidence*. London: Routledge Taylor & Francis Group.
- Passaportis, M. J. R., Brown, D. J., Wagstaff, C. R. D., Arnold, R., & Hays, K. (2022). Creating an environment for thriving: An ethnographic exploration of a British decentralised Olympic and Paralympic Sport Organisation. *Psychology of Sport and Exercise*, 62(June), 102247. <https://doi.org/10.1016/j.psychsport.2022.102247>
- Patatas, J. M., De Bosscher, V., Derom, I., & De Rycke, J. (2020). Managing parasport: An investigation of sport policy factors and stakeholders influencing para-athletes' career pathways. *Sport Management Review*, 23(5), 937–951. <https://doi.org/10.1016/J.SMR.2019.12.004>
- Pawson, R. (2006). *Evidence-Based Policy: A Realist Perspective*. London: Sage Publication.
- Petersen, J., & Lindström, M. (2010). Materialist/postmaterialist values and their association with psychological health and health locus of control: A population-based study. *The*

- Social Science Journal*, 47(4), 789–801. <https://doi.org/10.1016/J.SOSCIJ.2010.04.007>
- Pharr, J. R., & Lough, N. L. (2016). Examining the relationship between sport and health among USA women: An analysis of the Behavioral Risk Factor Surveillance System. *Journal of Sport and Health Science*, 5(4), 403–409. <https://doi.org/10.1016/j.jshs.2016.07.005>
- Platje, E., Popma, A., R.J.M., R., Vermeiren, Theo A.H. Doreleijers, Wim H.J. Meeus, Pol A.C. van Lier, H. M. K., Branje, S. J. T., & Jansen, L. M. C. (2015). Testosterone and cortisol in relation to aggression in a non-clinical sample of boys and girls. *Aggressive Behavior*, 41(5).
- Polri. (2022). Data kriminalitas. Retrieved July 9, 2022, from <https://pusiknas.polri.go.id/pelanggaran>
- Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR. (2022). *Dampak Ekonomi Pergelaran MotoGP Mandalika 2022: Jangka Pendek dan Jangka Panjang*. Jakarta: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Retrieved from https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info_Singkat-XIV-6-II-P3DI-Maret-2022-234.pdf
- Sapkota, J. B., & Neupane, P. (2020). Sport for Development and Peace (SDP) Organisations and the Sustainable Development Goals (SDGs) of Nepal. *Global Social Welfare*. <https://doi.org/10.1007/s40609-018-0129-5>
- Schneider, A. J., & Rupert, J. L. (2009). Constructing winners: The science and ethics of genetically manipulating athletes. *Journal of the Philosophy of Sport*, 36(2), 182–206. <https://doi.org/10.1080/00948705.2009.9714756>
- Schulenkorf, N., Sherry, E., & Rowe, K. (2016). Sport for development: An integrated literature review. *Journal of Sport Management*, 30(1), 22–39. <https://doi.org/10.1123/jsm.2014-0263>
- Schwab, K., & Zahidi, S. (2020). *Global competitiveness report 2020: How countries are performing on the road to recovery*. Genewa: World Economic Forum.
- Sekretariat Kabinet. (2016). *Instruksi Presiden No. 12 Tahun 2016 Tentang Gerakan Nasional Revolusi Mental*. Sekretariat Kabinet.
- Sharp, N. C. C. (2010). The Human Genome and Sport, Including Epigenetics, Gene Doping, and Athleticogenomics. *Endocrinology and Metabolism Clinics of North America*, 39(1), 201–215. <https://doi.org/10.1016/J.ECL.2009.10.010>
- Simoens, S. (2011). Public health and prevention in Europe: Is it cost-effective? *Journal of Pharmaceutical Health Services Research*. <https://doi.org/10.1111/j.1759-8893.2011.00052.x>
- Singer, R. N., & Janelle, C. M. (1999). Determining sport expertise: From genes to supremes. *International Journal of Sport Psychology*.
- Siregar, M. F., & Harsuki. (2003). *Sejarah olahraga Indonesia*. Jakarta: Dirjen Olahraga - Depdiknas.
- Smith-Ryan, A. E., Hirsch, K. R., Saylor, H. E., Gould, L. M., & Blue, M. N. M. (2020). Nutritional considerations and strategies to facilitate injury recovery and rehabilitation. *Journal of Athletic Training*, 55(9), 918–930. <https://doi.org/10.4085/1062-6050-550-19>
- Sport.Tempo.co. (2021). Hariyanto Arbi: 25 Pelatih Badminton Indonesia di Luar Negeri, ini Daftarnya. Retrieved September 27, 2022, from <https://sport.tempo.co/read/1495393/hariyanto-arbi-25-pelatih-badminton-indonesia-di-luar-negeri-ini-daftarnya>
- Sport England. (2016). *Towards an active nation: Strategy 2016-2021*. Sport England. Retrieved from <https://www.activehw.co.uk/uploads/sport-england-towards-an-active-nation.pdf>
- Sutcliffe, S., & Court, J. (2005). *Evidence-Based Policymaking: What is it? How does it*

- work? What relevance for developing countries?* Overseas Development Institute.
- TGIPF. (2022). *Laporan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Stadion Kanjuruhan Malang*. Jakarta. Retrieved from <https://polkam.go.id/laporan-tgipf-tragedi-kanjuruhan/>
- United Nations Office on Drugs and Crime. (2018). Desk review on sport as a tool for the prevention of violent extremism, (December).
- Wagner, K. H., Schwingshackl, L., Draxler, A., & Franzke, B. (2021). Impact of dietary and lifestyle interventions in elderly or people diagnosed with diabetes, metabolic disorders, cardiovascular disease, cancer and micronutrient deficiency on micronuclei frequency – A systematic review and meta-analysis. *Mutation Research - Reviews in Mutation Research*, 787, 108367. <https://doi.org/10.1016/j.mrrev.2021.108367>
- Whitehead, M. (2013). Definition of Physical Literacy and Clarification of related Issues. *ICSSPE Bulletin*. <https://doi.org/1728-5909>
- WHO. (2018). *Global action plan on physical activity 2018-2030: More active people for a healthier world*. Who. World Health Organization.
- World Bank. (2021). GDP per capita (current US\$). Retrieved September 20, 2022, from <https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD>
- World Health Organization. (2015). Physical Inactivity: A Global Public Health Problem. Retrieved from <https://www.who.int/ncds/prevention/physical-activity/inactivity-global-health-problem/en/>
- Yudistira, A. W. (2022). Bagaimana Dampak MotoGP Mandalika bagi Ekonomi NTB? Retrieved November 9, 2022, from <https://katadata.co.id/ariayudhistira/analisisdata/622a23c2ce42f/bagaimana-dampak-motogp-mandalika-bagi-ekonomi-ntb>

Lampiran

SDI Menurut Provinsi

No	PROVINSI	DIMENSI									SDI
		SDM	RT	LT	PAR	KEB	KES	PP	EKO	PERF	
1	Aceh	0,078	0,975	0,607	0,377	0,148	0,423	0,558	0,547	0,051	0,418
2	Bali	0,093	0,072	0,585	0,319	0,153	0,424	0,524	0,574	0,188	0,326
3	Banten	0,01	0,054	0,586	0,24	0,154	0,423	0,554	0,585	0,069	0,297
4	Bengkulu	0,102	0,792	0,609	0,333	0,153	0,413	0,553	0,642	0,012	0,401
5	DI Yogyakarta	0,057	0,247	0,576	0,296	0,152	0,417	0,522	0,67	0,148	0,343
6	DKI Jakarta	0,024	0,106	0,584	0,221	0,211	0,415	0,525	0,562	0,596	0,360
7	Gorontalo	0,281	0,731	0,556	0,233	0,305	0,419	0,566	0,567	0,012	0,408
8	Jambi	0,019	0,504	0,599	0,324	0,171	0,412	0,544	0,667	0,082	0,369
9	Jawa Barat	0,04	0,141	0,59	0,304	0,190	0,417	0,546	0,622	1,000	0,428
10	Jawa Tengah	0,038	0,472	0,567	0,237	0,164	0,42	0,531	0,462	0,522	0,379
11	Jawa Timur	0,05	0,203	0,567	0,238	0,173	0,418	0,529	0,537	0,523	0,360
12	Kalimantan Barat	0,102	0,331	0,573	0,312	0,232	0,422	0,534	0,67	0,069	0,361
13	Kalimantan Selatan	0,033	0,036	0,572	0,167	0,184	0,416	0,554	0,438	0,220	0,291
14	Kalimantan Tengah	0,056	0,288	0,602	0,273	0,148	0,444	0,577	0,5	0,029	0,324
15	Kalimantan Timur	0,074	0,314	0,591	0,233	0,202	0,429	0,537	0,714	0,172	0,363
16	Kalimantan Utara	0,141	0,868	0,626	0,4	0,200	0,413	0,512	0,767	0,008	0,437
17	Kep Bangka Belitung	0,102	0,633	0,604	0,244	0,182	0,418	0,505	0,656	0,019	0,374
18	Kep Riau	0,092	0,932	0,57	0,35	0,171	0,413	0,54	0,492	0,019	0,398
19	Lampung	0,029	0,476	0,595	0,278	0,150	0,421	0,549	0,519	0,056	0,341
20	Maluku	0,149	0,89	0,635	0,617	0,305	0,429	0,582	0,842	0,036	0,498
21	Maluku Utara	0,012	0,307	0,64	0,133	0,295	0,463	0,56	0,367	0,002	0,309
22	Nusa Tenggara Barat	0,014	0,136	0,582	0,293	0,279	0,426	0,564	0,45	0,064	0,312
23	Nusa Tenggara Timur	0,029	0,49	0,595	0,373	0,246	0,456	0,579	0,643	0,070	0,387
24	Papua	0,054	0,336	0,575	0,282	0,218	0,43	0,576	0,712	0,877	0,451
25	Papua Barat	0,03	1	0,586	0,3	0,314	0,513	0,606	0,45	0,071	0,430
26	Riau	0,042	0,321	0,595	0,356	0,159	0,411	0,543	0,551	0,220	0,355
27	Sulawesi Barat	0,301	0,704	0,606	0,422	0,187	0,421	0,563	0,744	0,001	0,439
28	Sulawesi Selatan	0,055	0,227	0,605	0,278	0,165	0,416	0,546	0,702	0,073	0,341
29	Sulawesi Tengah	0,046	0,431	0,653	0,389	0,195	0,417	0,563	0,722	0,016	0,381
30	Sulawesi Tenggara	0,075	0,718	0,619	0,373	0,235	0,432	0,565	0,853	0,024	0,433
31	Sulawesi Utara	0,014	0,911	0,598	0,387	0,240	0,416	0,566	0,44	0,046	0,402
32	Sumatera Barat	0,057	0,515	0,643	0,33	0,191	0,416	0,542	0,664	0,053	0,379
33	Sumatera Selatan	0,043	0,379	0,591	0,26	0,224	0,41	0,549	0,608	0,107	0,352
34	Sumatera Utara	0,069	0,206	0,584	0,343	0,186	0,427	0,547	0,594	0,193	0,350

Indeks SDM Olahraga Menurut Provinsi

No	PROVINSI	SDM		NILAI AKTUAL	INDEKS
		PENDUDUK >5 TAHUN	JUMLAH SDM		
1	Aceh	173.943	68	0,000391	0,078
2	Bali	608.172	282	0,000464	0,093
3	Banten	1.277.179	65	0,000051	0,010
4	Bengkulu	35.366	18	0,000509	0,102
5	DI Yogyakarta	372.010	106	0,000285	0,057
6	DKI Jakarta	4.798.870	572	0,000119	0,024
7	Gorontalo	17.765	25	0,001407	0,281
8	Jambi	240.587	23	0,000096	0,019
9	Jawa Barat	5.841.615	1155	0,000198	0,040
10	Jawa Tengah	3.864.140	739	0,000191	0,038
11	Jawa Timur	3.783.267	954	0,000252	0,050
12	Kalimantan Barat	473.230	241	0,000509	0,102
13	Kalimantan Selatan	388.700	65	0,000167	0,033
14	Kalimantan Tengah	53.812	15	0,000279	0,056
15	Kalimantan Timur	282.943	105	0,000371	0,074
16	Kalimantan Utara	35.519	25	0,000704	0,141
17	Kep Bangka Belitung	151.262	77	0,000509	0,102
18	Kep Riau	84.794	39	0,000460	0,092
19	Lampung	1.213.385	176	0,000145	0,029
20	Maluku	44.294	33	0,000745	0,149
21	Maluku Utara	68.010	4	0,000059	0,012
22	Nusa Tenggara Barat	391.586	27	0,000069	0,014
23	Nusa Tenggara Timur	272.926	40	0,000147	0,029
24	Papua	250.249	68	0,000272	0,054
25	Papua Barat	13.230	2	0,000151	0,030
26	Riau	388.321	81	0,000209	0,042
27	Sulawesi Barat	33.174	50	0,001507	0,301
28	Sulawesi Selatan	429.185	117	0,000273	0,055
29	Sulawesi Tengah	166.982	38	0,000228	0,046
30	Sulawesi Tenggara	103.827	39	0,000376	0,075
31	Sulawesi Utara	98.731	7	0,000071	0,014
32	Sumatera Barat	213.476	61	0,000286	0,057
33	Sumatera Selatan	532.348	114	0,000214	0,043
34	Sumatera Utara	634.137	220	0,000347	0,069

Indeks Ruang Terbuka Olahraga Menurut Provinsi

No	PROVINSI	RUANG TERBUKA		NILAI AKTUAL	INDEKS
		PENDUDUK >5 TAHUN	LUASAN		
1	Aceh	13.835	47.232	3,414	0,975
2	Bali	74.889	18.973	0,253	0,072
3	Banten	233.275	44.480	0,191	0,054
4	Bengkulu	3.588	9.945	2,772	0,792
5	DI Yogyakarta	59.497	51.448	0,865	0,247
6	DKI Jakarta	949.769	351.122	0,370	0,106
7	Gorontalo	3.294	8.432	2,560	0,731
8	Jambi	17.825	31.420	1,763	0,504
9	Jawa Barat	964.466	476.118	0,494	0,141
10	Jawa Tengah	403.837	667.845	1,654	0,472
11	Jawa Timur	459.611	327.078	0,712	0,203
12	Kalimantan Barat	46.342	53.651	1,158	0,331
13	Kalimantan Selatan	53.354	6.755	0,127	0,036
14	Kalimantan Tengah	6.413	6.475	1,010	0,288
15	Kalimantan Timur	31.817	35.001	1,100	0,314
16	Kalimantan Utara	8.070	24.503	3,036	0,868
17	Kep Bangka Belitung	11.124	24.648	2,216	0,633
18	Kep Riau	17.400	56.756	3,262	0,932
19	Lampung	73.721	122.870	1,667	0,476
20	Maluku	2.707	8.430	3,114	0,890
21	Maluku Utara	5.485	5.900	1,076	0,307
22	Nusa Tenggara Barat	59.047	28.148	0,477	0,136
23	Nusa Tenggara Timur	28.772	49.330	1,715	0,490
24	Papua	38.472	45.204	1,175	0,336
25	Papua Barat	578	4.800	8,304	1,000
26	Riau	64.435	72.471	1,125	0,321
27	Sulawesi Barat	2.811	6.927	2,464	0,704
28	Sulawesi Selatan	40.017	31.781	0,794	0,227
29	Sulawesi Tengah	35.788	54.011	1,509	0,431
30	Sulawesi Tenggara	7.053	17.714	2,512	0,718
31	Sulawesi Utara	4.701	14.984	3,187	0,911
32	Sumatera Barat	50.519	91.031	1,802	0,515
33	Sumatera Selatan	59.553	79.017	1,327	0,379
34	Sumatera Utara	73.146	52.741	0,721	0,206

Indeks Literasi Fisik Menurut Provinsi

No	PROVINSI	SOAL BENAR			RATA-RATA			NILAI AKTUAL	INDEKS
		Frek	Dur	Intens	Peng	Sikap	Perilaku		
1	Aceh	24,0%	64,0%	45,3%	2,778	3,713	4,118	3,428	0,607
2	Bali	20,0%	46,7%	59,3%	2,679	3,600	4,070	3,340	0,585
3	Banten	20,1%	57,4%	49,7%	2,696	3,622	4,036	3,344	0,586
4	Bengkulu	28,3%	52,5%	56,7%	2,833	3,633	4,146	3,437	0,609
5	DI Yogyakarta	19,3%	57,4%	38,9%	2,541	3,611	4,135	3,302	0,576
6	DKI Jakarta	17,4%	53,8%	52,3%	2,646	3,640	4,062	3,335	0,584
7	Gorontalo	11,7%	58,3%	53,3%	2,644	3,467	3,850	3,224	0,556
8	Jambi	17,1%	60,0%	44,8%	2,625	3,745	4,200	3,395	0,599
9	Jawa Barat	20,8%	61,9%	48,4%	2,748	3,619	4,013	3,358	0,590
10	Jawa Tengah	18,2%	52,1%	48,8%	2,587	3,530	4,027	3,268	0,567
11	Jawa Timur	17,7%	56,8%	45,4%	2,598	3,548	3,990	3,267	0,567
12	Kalimantan Barat	22,1%	51,2%	33,3%	2,422	3,723	4,165	3,292	0,573
13	Kalimantan Selatan	11,7%	53,8%	51,7%	2,561	3,660	4,004	3,288	0,572
14	Kalimantan Tengah	13,3%	61,3%	50,0%	2,662	3,757	4,173	3,407	0,602
15	Kalimantan Timur	17,6%	62,9%	48,1%	2,714	3,633	4,071	3,365	0,591
16	Kalimantan Utara	15,0%	55,0%	48,3%	2,578	3,958	4,442	3,505	0,626
17	Kep Bangka Belitung	20,0%	64,4%	44,4%	2,719	3,761	4,117	3,416	0,604
18	Kep Riau	25,8%	50,0%	35,0%	2,478	3,617	4,146	3,280	0,570
19	Lampung	24,6%	58,3%	48,5%	2,753	3,602	4,095	3,379	0,595
20	Maluku	28,3%	50,0%	43,3%	2,622	4,058	4,404	3,542	0,635
21	Maluku Utara	7,8%	72,2%	40,0%	2,600	4,167	4,394	3,560	0,640
22	Nusa Tenggara Barat	21,3%	52,0%	41,0%	2,524	3,667	4,200	3,330	0,582
23	Nusa Tenggara Timur	20,7%	44,7%	41,0%	2,418	3,857	4,348	3,380	0,595
24	Papua	19,2%	42,3%	50,6%	2,496	3,612	4,196	3,300	0,575
25	Papua Barat	33,3%	33,3%	48,3%	2,533	3,775	4,125	3,343	0,586
26	Riau	23,3%	53,3%	46,2%	2,638	3,740	4,140	3,382	0,595
27	Sulawesi Barat	24,4%	51,1%	50,0%	2,674	3,706	4,267	3,424	0,606
28	Sulawesi Selatan	18,7%	62,2%	48,9%	2,731	3,733	4,145	3,421	0,605
29	Sulawesi Tengah	23,9%	64,4%	52,8%	2,881	3,903	4,414	3,611	0,653
30	Sulawesi Tenggara	20,0%	63,3%	46,0%	2,724	3,757	4,323	3,476	0,619
31	Sulawesi Utara	17,3%	49,3%	46,7%	2,511	3,893	4,207	3,390	0,598
32	Sumatera Barat	26,1%	70,6%	51,8%	2,980	3,811	4,226	3,573	0,643
33	Sumatera Selatan	20,6%	56,0%	43,8%	2,606	3,708	4,157	3,364	0,591
34	Sumatera Utara	19,9%	52,9%	46,2%	2,586	3,715	4,078	3,335	0,584

Indeks Tingkat Partisipasi Olahraga Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	AKTIVITAS >2 KALI PER MINGGU			NILAI AKTUAL	INDEKS
		10-19	20-44	45-60		
1	Aceh	0,213	0,174	0,103	37,667	0,377
2	Bali	0,236	0,264	0,225	31,852	0,319
3	Banten	0,217	0,194	0,189	24,028	0,240
4	Bengkulu	0,185	0,254	0,231	33,333	0,333
5	DI Yogyakarta	0,474	0,321	0,343	29,630	0,296
6	DKI Jakarta	0,361	0,279	0,324	22,121	0,221
7	Gorontalo	0,250	0,242	0,000	23,333	0,233
8	Jambi	0,407	0,339	0,277	32,381	0,324
9	Jawa Barat	0,329	0,317	0,248	30,417	0,304
10	Jawa Tengah	0,280	0,221	0,193	23,704	0,237
11	Jawa Timur	0,311	0,217	0,220	23,833	0,238
12	Kalimantan Barat	0,338	0,381	0,261	31,212	0,312
13	Kalimantan Selatan	0,265	0,203	0,079	16,667	0,167
14	Kalimantan Tengah	0,281	0,167	0,177	27,333	0,273
15	Kalimantan Timur	0,116	0,209	0,193	23,333	0,233
16	Kalimantan Utara	0,615	0,355	0,063	40,000	0,400
17	Kep Bangka Belitung	0,167	0,396	0,208	24,444	0,244
18	Kep Riau	0,333	0,308	0,129	35,000	0,350
19	Lampung	0,183	0,182	0,119	27,778	0,278
20	Maluku	0,167	0,493	0,704	61,667	0,617
21	Maluku Utara	0,357	0,621	0,222	13,333	0,133
22	Nusa Tenggara Barat	0,221	0,267	0,164	29,333	0,293
23	Nusa Tenggara Timur	0,406	0,264	0,299	37,333	0,373
24	Papua	0,320	0,314	0,111	28,205	0,282
25	Papua Barat	0,500	0,265	0,071	30,000	0,300
26	Riau	0,192	0,234	0,143	35,641	0,356
27	Sulawesi Barat	0,167	0,360	0,091	42,222	0,422
28	Sulawesi Selatan	0,234	0,291	0,214	27,778	0,278
29	Sulawesi Tengah	0,310	0,351	0,159	38,889	0,389
30	Sulawesi Tenggara	0,250	0,253	0,308	37,333	0,373
31	Sulawesi Utara	0,267	0,342	0,211	38,667	0,387
32	Sumatera Barat	0,349	0,352	0,293	33,030	0,330
33	Sumatera Selatan	0,271	0,213	0,250	26,042	0,260
34	Sumatera Utara	0,249	0,236	0,173	34,253	0,343

Indeks Tingkat Kebugaran Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	VO2MAX KELOMPOK USIA			NILAI AKTUAL	INDEKS
		10-19	20-44	45-60		
1	Aceh	25,851	25,350	22,809	24,840	0,148
2	Bali	27,296	25,018	22,654	24,996	0,153
3	Banten	27,089	25,104	22,753	25,013	0,154
4	Bengkulu	27,456	24,869	22,846	25,010	0,153
5	DI Yogyakarta	27,370	25,030	22,386	24,954	0,152
6	DKI Jakarta	28,941	27,235	24,056	26,867	0,211
7	Gorontalo	31,542	31,952	23,967	29,853	0,305
8	Jambi	27,706	25,868	22,879	25,580	0,171
9	Jawa Barat	27,980	26,538	23,621	26,169	0,190
10	Jawa Tengah	27,472	25,475	22,996	25,354	0,164
11	Jawa Timur	27,243	25,923	23,440	25,633	0,173
12	Kalimantan Barat	30,188	27,722	24,428	27,515	0,232
13	Kalimantan Selatan	28,692	25,987	23,314	25,995	0,184
14	Kalimantan Tengah	25,422	24,832	24,262	24,837	0,148
15	Kalimantan Timur	28,909	26,593	24,205	26,575	0,202
16	Kalimantan Utara	29,762	27,219	21,806	26,502	0,200
17	Kep Bangka Belitung	28,011	27,035	21,671	25,938	0,182
18	Kep Riau	26,325	26,640	22,668	25,568	0,171
19	Lampung	26,121	25,203	23,089	24,904	0,150
20	Maluku	33,396	30,022	26,054	29,873	0,305
21	Maluku Utara	30,721	31,398	24,700	29,554	0,295
22	Nusa Tenggara Barat	32,595	28,772	26,029	29,042	0,279
23	Nusa Tenggara Timur	31,133	27,957	24,778	27,956	0,246
24	Papua	27,021	28,118	25,016	27,068	0,218
25	Papua Barat	33,758	31,529	23,793	30,153	0,314
26	Riau	26,400	25,944	22,458	25,187	0,159
27	Sulawesi Barat	25,733	27,300	23,986	26,080	0,187
28	Sulawesi Selatan	26,963	25,691	23,180	25,381	0,165
29	Sulawesi Tengah	28,829	26,935	22,673	26,343	0,195
30	Sulawesi Tenggara	31,775	27,914	22,933	27,634	0,235
31	Sulawesi Utara	29,347	28,405	24,926	27,771	0,240
32	Sumatera Barat	27,747	27,072	23,015	26,226	0,191
33	Sumatera Selatan	28,003	27,663	25,711	27,260	0,224
34	Sumatera Utara	27,350	26,622	23,669	26,066	0,186

Indeks Kesehatan Fisik dan Kesejahteraan Psikis Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	KESEHATAN		NILAI AKTUAL	INDEKS
		FISIK	PSIKIS		
1	Aceh	2,682	2,700	2,691	0,423
2	Bali	2,716	2,679	2,698	0,424
3	Banten	2,737	2,645	2,691	0,423
4	Bengkulu	2,700	2,600	2,650	0,413
5	DI Yogyakarta	2,719	2,621	2,670	0,417
6	DKI Jakarta	2,698	2,623	2,660	0,415
7	Gorontalo	2,800	2,556	2,678	0,419
8	Jambi	2,698	2,600	2,649	0,412
9	Jawa Barat	2,689	2,649	2,669	0,417
10	Jawa Tengah	2,689	2,671	2,680	0,420
11	Jawa Timur	2,682	2,663	2,672	0,418
12	Kalimantan Barat	2,734	2,642	2,688	0,422
13	Kalimantan Selatan	2,701	2,629	2,665	0,416
14	Kalimantan Tengah	2,751	2,802	2,777	0,444
15	Kalimantan Timur	2,687	2,744	2,716	0,429
16	Kalimantan Utara	2,678	2,622	2,650	0,413
17	Kep Bangka Belitung	2,630	2,711	2,670	0,418
18	Kep Riau	2,686	2,619	2,653	0,413
19	Lampung	2,702	2,664	2,683	0,421
20	Maluku	2,675	2,756	2,715	0,429
21	Maluku Utara	2,852	2,852	2,852	0,463
22	Nusa Tenggara Barat	2,731	2,679	2,705	0,426
23	Nusa Tenggara Timur	2,894	2,756	2,825	0,456
24	Papua	2,780	2,662	2,721	0,430
25	Papua Barat	3,056	3,044	3,050	0,513
26	Riau	2,674	2,617	2,646	0,411
27	Sulawesi Barat	2,852	2,519	2,685	0,421
28	Sulawesi Selatan	2,730	2,594	2,662	0,416
29	Sulawesi Tengah	2,715	2,620	2,668	0,417
30	Sulawesi Tenggara	2,764	2,693	2,729	0,432
31	Sulawesi Utara	2,727	2,598	2,662	0,416
32	Sumatera Barat	2,714	2,613	2,664	0,416
33	Sumatera Selatan	2,638	2,640	2,639	0,410
34	Sumatera Utara	2,704	2,709	2,707	0,427

Indeks Resilien dan Modal Sosial Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	PERKEMBANGAN PERSONAL		NILAI AKTUAL	INDEKS
		RESILIEN	SOSIAL		
1	Aceh	3,297	3,163	3,230	0,558
2	Bali	3,337	2,854	3,096	0,524
3	Banten	3,370	3,063	3,216	0,554
4	Bengkulu	3,297	3,128	3,213	0,553
5	DI Yogyakarta	3,356	2,821	3,088	0,522
6	DKI Jakarta	3,356	2,847	3,102	0,525
7	Gorontalo	3,328	3,200	3,264	0,566
8	Jambi	3,381	2,970	3,175	0,544
9	Jawa Barat	3,385	2,986	3,185	0,546
10	Jawa Tengah	3,341	2,910	3,125	0,531
11	Jawa Timur	3,312	2,919	3,116	0,529
12	Kalimantan Barat	3,387	2,887	3,137	0,534
13	Kalimantan Selatan	3,292	3,139	3,215	0,554
14	Kalimantan Tengah	3,482	3,131	3,307	0,577
15	Kalimantan Timur	3,330	2,963	3,147	0,537
16	Kalimantan Utara	3,344	2,750	3,047	0,512
17	Kep Bangka Belitung	3,167	2,870	3,019	0,505
18	Kep Riau	3,328	2,989	3,158	0,540
19	Lampung	3,363	3,027	3,195	0,549
20	Maluku	3,550	3,108	3,329	0,582
21	Maluku Utara	3,415	3,067	3,241	0,560
22	Nusa Tenggara Barat	3,426	3,090	3,258	0,564
23	Nusa Tenggara Timur	3,507	3,123	3,315	0,579
24	Papua	3,562	3,049	3,306	0,576
25	Papua Barat	3,083	3,761	3,422	0,606
26	Riau	3,302	3,042	3,172	0,543
27	Sulawesi Barat	3,370	3,130	3,250	0,563
28	Sulawesi Selatan	3,404	2,965	3,185	0,546
29	Sulawesi Tengah	3,381	3,120	3,251	0,563
30	Sulawesi Tenggara	3,376	3,142	3,259	0,565
31	Sulawesi Utara	3,502	3,027	3,264	0,566
32	Sumatera Barat	3,312	3,027	3,170	0,542
33	Sumatera Selatan	3,335	3,055	3,195	0,549
34	Sumatera Utara	3,378	2,998	3,188	0,547

Indeks Performa Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	PEROLEHAN MEDALI			NILAI AKTUAL	INDEKS
		EMAS	PERAK	PERUNGGU		
1	Aceh	12	10	12	102	0,051
2	Bali	39	39	63	375	0,188
3	Banten	11	16	34	137	0,069
4	Bengkulu	1	4	7	24	0,012
5	DI Yogyakarta	30	32	50	296	0,148
6	DKI Jakarta	136	123	140	1189	0,596
7	Gorontalo	3	2	2	23	0,012
8	Jambi	15	21	25	163	0,082
9	Jawa Barat	243	197	190	1996	1,000
10	Jawa Tengah	116	107	140	1041	0,522
11	Jawa Timur	122	111	101	1044	0,523
12	Kalimantan Barat	11	23	14	138	0,069
13	Kalimantan Selatan	45	52	59	440	0,220
14	Kalimantan Tengah	3	11	10	58	0,029
15	Kalimantan Timur	30	47	53	344	0,172
16	Kalimantan Utara	1	3	1	15	0,008
17	Kep Bangka Belitung	2	6	10	38	0,019
18	Kep Riau	3	6	4	37	0,019
19	Lampung	14	10	12	112	0,056
20	Maluku	8	6	14	72	0,036
21	Maluku Utara	0	0	3	3	0,002
22	Nusa Tenggara Barat	16	11	15	128	0,064
23	Nusa Tenggara Timur	10	23	21	140	0,070
24	Papua	220	152	194	1750	0,877
25	Papua Barat	10	23	23	142	0,071
26	Riau	43	56	57	440	0,220
27	Sulawesi Barat	0	0	2	2	0,001
28	Sulawesi Selatan	14	19	19	146	0,073
29	Sulawesi Tengah	2	5	6	31	0,016
30	Sulawesi Tenggara	5	5	8	48	0,024
31	Sulawesi Utara	7	14	14	91	0,046
32	Sumatera Barat	8	15	20	105	0,053
33	Sumatera Selatan	23	20	38	213	0,107
34	Sumatera Utara	37	54	38	385	0,193

Indeks Ekonomi Olahraga Menurut Provinsi

NO	PROVINSI	KELOMPOK USIA			NILAI AKTUAL	INDEKS
		10-19	20-44	45-60		
1	Aceh	54,1%	58,4%	47,4%	54,670	0,547
2	Bali	58,2%	59,0%	53,5%	57,410	0,574
3	Banten	60,9%	62,7%	48,5%	58,470	0,585
4	Bengkulu	63,0%	64,2%	65,4%	64,170	0,642
5	DI Yogyakarta	71,9%	66,4%	64,4%	67,040	0,670
6	DKI Jakarta	57,1%	57,8%	52,5%	56,210	0,562
7	Gorontalo	50,0%	54,6%	66,7%	56,670	0,567
8	Jambi	70,4%	67,9%	59,6%	66,670	0,667
9	Jawa Barat	65,7%	63,3%	57,0%	62,150	0,622
10	Jawa Tengah	51,5%	46,7%	40,7%	46,160	0,462
11	Jawa Timur	54,8%	55,7%	49,0%	53,710	0,537
12	Kalimantan Barat	66,2%	68,5%	64,8%	66,970	0,670
13	Kalimantan Selatan	49,0%	46,9%	33,3%	43,750	0,438
14	Kalimantan Tengah	46,9%	54,8%	41,2%	50,000	0,500
15	Kalimantan Timur	72,1%	71,8%	70,2%	71,430	0,714
16	Kalimantan Utara	92,3%	71,0%	75,0%	76,670	0,767
17	Kep Bangka Belitung	44,4%	72,9%	66,7%	65,560	0,656
18	Kep Riau	33,3%	55,4%	48,4%	49,170	0,492
19	Lampung	50,9%	54,2%	48,3%	51,850	0,519
20	Maluku	70,8%	92,8%	74,1%	84,170	0,842
21	Maluku Utara	64,3%	27,6%	44,4%	36,670	0,367
22	Nusa Tenggara Barat	59,7%	45,3%	28,8%	45,000	0,450
23	Nusa Tenggara Timur	68,8%	66,7%	55,8%	64,330	0,643
24	Papua	74,0%	72,9%	63,9%	71,150	0,712
25	Papua Barat	50,0%	50,0%	28,6%	45,000	0,450
26	Riau	51,3%	58,4%	51,0%	55,130	0,551
27	Sulawesi Barat	55,6%	76,0%	86,4%	74,440	0,744
28	Sulawesi Selatan	67,6%	74,1%	64,3%	70,190	0,702
29	Sulawesi Tengah	81,0%	75,5%	56,8%	72,220	0,722
30	Sulawesi Tenggara	78,1%	86,1%	89,7%	85,330	0,853
31	Sulawesi Utara	40,0%	52,4%	29,0%	44,000	0,440
32	Sumatera Barat	53,0%	71,4%	65,9%	66,360	0,664
33	Sumatera Selatan	64,6%	66,3%	49,3%	60,830	0,608
34	Sumatera Utara	55,3%	61,8%	58,0%	59,430	0,594